

Penilaian

AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI

PT Jambi Batanghari Plantation
2022



PT JAMBI BATANGHARI PLANTATION



Lembar Pengesahan Penilaian High Conservation Value

Laporan:

Penilaian High Conservation Value (HCV)
PT Jambi Batanghari Plantation*[in Bahasa Indonesia]

Laporan Draft : 10 Oktober 2022

Laporan Final : 31 Oktober 2022

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia

Direktur : Iwan Setiawan

Alamat Email : iwansetiawan@pili.or.id

Lead Assessor : Ryan Karida Pratama

Organisasi Penilai:

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia

Jl. Tumenggung Wiradireja No. 216, Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat

Tim Penyusun Laporan HCV: Ryan Karida Pratama, Sigit Budhi Setyanto, Iwan Setiawan, Anwar Muzakkir, Andrea Aditya Widhyanto, Siti Suprihatin, Muhamad Rizal

Organisasi Meminta Penilaian HCV:

PT Jambi Batanghari Plantation

Jl. Raya Suak Kandis, Desa Jebus, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Tanggal Penilaian Dimulai: 27 Juli 2022

Skema Sertifikasi: RSPO & ISPO

Objek Penilaian HCV: Perkebunan Kelapa Sawit

Total Areal Penilaian HCV (Ha): 1,953.02

Total Area HCV di Areal HGU PT Jambi Batanghari Plantation (Ha): 35.9

Bogor, 31 Oktober 2022

Direktur

The image shows a blue and green oval logo for 'PILI Group Network'. Overlaid on the logo is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Iwan Setiawan'.

Iwan Setiawan

Laporan Penilaian HCV

Tanggal Penandatanganan Kontrak Penilaian HCV	25 Juli 2022
Tanggal Penilaian Dimulai	27 Juli 2022
Nama Pimpinan Penilai ALS	Ryan Karida Pratama
Informasi Kontak Pimpinan Penilai	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia Jl. Tumenggung Wiradireja No. 216, Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat - Indonesia Kontak person: Ryan Karida Pratama Email: ryankaridap@gmail.com
Informasi Kontak Organisasi yang Meminta Pelaksanaan Penilaian HCV	PT Jambi Batanghari Plantation Jl. Raya Suak Kandis, Desa Jebus, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi - Indonesia Kontak person: Enar Prihantara e-mail: enar@jbplantation.co.id

Daftar Isi

Laporan Penilaian HCV	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Akronim dan Singkatan	viii
1 Pendahuluan dan Latar Belakang	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Tujuan Penilaian	1
1.3 Lokasi Penilaian	1
1.4. Ikhtisar Organisasi yang Meminta Penilaian	3
1.5. Konteks Singkat Nasional dan Regional	3
2 Tim Penilaian	6
3 Tata Waktu Penilaian	8
4 Fase Pra-penilaian	10
4.1 Uji Tuntas	10
4.2 Gerbang PADIATAPA	15
5 Studi Pemeriksaan Awal	16
5.1 Rangkuman Kegiatan Studi Pemeriksaan Awal	16
5.2 Daftar Konsultasi	23
5.3 Gerbang PADIATAPA	30
6 Deskripsi Area of Interest (AOI)	31
6.1 Batas AOI	31
6.2 Karakteristik Fisik dan Lingkungan	34
6.3 Karakteristik Biologi dan Ekologi	40
6.4 Karakteristik Sosial, Ekonomi, dan Budaya	47
6.5 Tata Guna Lahan dan Tren Pembangunan	57
6.6 Analisis Citra dan Klasifikasi Tutupan Lahan	58
7 Bagian Sosial: Metode dan Hasil	71
7.1 Metode Sosial	71
7.1.1 Tinjauan Pustaka dan Penggunaan Data Sekunder	72
7.1.2 Kerja Lapangan Sosial	73
7.2 Hasil HCV Sosial	75
7.2.1 Status Padiatapa	75
7.2.2 Hasil Kerja Lapangan Sosial	76
7.2.3 HCV 4: Jasa Ekosistem yang Kritis	78
7.2.4 HCV 5: Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	86
7.2.5 HCV 6: Nilai Kultural	91
8 Bagian Lingkungan Metode dan Hasil	93
8.1 Metode Lingkungan	93
8.1.1 Tinjauan Pustaka dan Penggunaan Data Sekunder	93
8.1.2 Kerja Lapangan Lingkungan	94

8.2	Hasil HCV Lingkungan	96
8.2.1	Hasil Kerja Lapangan Lingkungan	96
8.2.2	HCV 1: Konsentrasi Keanekaragaman Hayati	97
8.2.3	HCV 2: Lanskap Besar	103
8.2.4	HCV 3: Ekosistem Langka	104
9	Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan	109
9.1	Penilaian Ancaman	109
9.2	Rekomendasi Setiap Nilai	112
9.3	Rekomendasi Lintas Sektoral	113
9.4	Peta Rangkuman	114
10	Konsultasi Akhir	117
11	Langkah Selanjutnya	121
	Daftar Pustaka	122
	Lampiran 1. Profil Lengkap Personil Penilaian HCV	126
	Lampiran 2. Kebijakan Berkelanjutan	128
	Lampiran 3. MOU Koperasi dengan PT JBP	130
	Lampiran 4. Tahapan Studi Pemeriksaan Awal	133
	Lampiran 5. Tahapan Penilaian Lengkap	139
	Lampiran 6. List Spesies Flora dan Fauna	144
	Lampiran 7. Absensi Konsultasi Publik	147
	Lampiran 8. Materi Konsultasi Publik	148

Daftar Tabel

Tabel 1.	Wilayah administrasi Desa, dan Kecamatan pada area penilaian	2
Tabel 2.	Tim penilai pada penilaian HCV	6
Tabel 3.	Pendamping lapangan pada penilaian HCV	6
Tabel 4.	Tahapan dan tata waktu pelaksanaan penilaian HCV	8
Tabel 5.	Ringkasan deskripsi kegiatan pada studi pemeriksaan awal	16
Tabel 6.	Ringkasan kronologis pemanfaatan lahan dan pembangunan Kebun PT JBP	21
Tabel 7.	Ringkasan hasil konsultasi awal pada tahapan studi pemeriksaan awal	23
Tabel 8.	Deskripsi luas kelas topografi di AOI	35
Tabel 9.	Deskripsi luas kelas kelerengan di AOI	35
Tabel 10.	Deskripsi dan luas fisiografi lahan, sistem lahan, dan ekosistem	37
Tabel 11.	Luas Asosiasi jenis tanah	37
Tabel 12.	Demografi desa di area penilaian	48
Tabel 13.	Jumlah rumah ibadah menurut desa	49
Tabel 14.	Profil pendidikan TK hingga SMA di Kabupaten dan Kecamatan	52
Tabel 15.	Kondisi sarana dan paramedis di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	53
Tabel 16.	Deskripsi citra satelit dan foto udara yang digunakan dalam penilaian HCV	58
Tabel 17.	Luas klasifikasi tutupan lahan awal di area penilaian	61
Tabel 18.	Jumlah titik <i>ground truthing</i> tutupan lahan di area penilaian	62
Tabel 19.	<i>Accuracy assessment</i> tutupan lahan akhir di area penilaian	63
Tabel 20.	Luas dan klasifikasi tutupan lahan akhir di area penilaian	64
Tabel 21.	Deskripsi, keberadaan dan foto tutupan lahan di area penilaian	64
Tabel 22.	Data dan informasi yang dihimpun dan dianalisis untuk bidang identifikasi sosial	72
Tabel 23.	Ringkasan keberadaan HCV 4 di area penilaian	78
Tabel 24.	Ringkasan keberadaan sungai-sungai di area penilaian	80
Tabel 25.	Lokasi dan luas area HCV 4 di area penilaian	84
Tabel 26.	Ringkasan keberadaan HCV 5 di area penilaian	86
Tabel 27.	Lokasi dan luas area HCV 5 di area penilaian	89
Tabel 28.	Indikasi yang akan memenuhi keberadaan HCV 6	91
Tabel 29.	Data dan informasi yang dihimpun dan dianalisis pada bidang kajian lingkungan	93
Tabel 30.	Rekapitulasi kegiatan survei lapangan bagian lingkungan	96
Tabel 31.	Jumlah spesies keanekaragaman hayati di area penilaian	97
Tabel 32.	Indikasi keberadaan HCV 1 di area penilaian	97
Tabel 33.	Daftar spesies penting di area penilaian	99
Tabel 34.	Lokasi dan luas area HCV 1 di area penilaian	101
Tabel 35.	Indikasi keberadaan HCV 2 di area penilaian	103
Tabel 36.	Identifikasi HCV 3 pada ekosistem rawa gambut di area penilaian	105
Tabel 37.	Identifikasi HCV 3 pada ekosistem rawa mangrove dan pasang surut di area penilaian	106
Tabel 38.	Lokasi dan luas area HCV 3 di area penilaian	107
Tabel 39.	Ringkasan hasil penilaian ancaman nilai konservasi di area penilaian (AOI)	109
Tabel 40.	Ringkasan hasil penilaian sumber ancaman, status, risiko, dan intensitas dampak nilai konservasi di area penilaian (AOI)	110
Tabel 41.	Rencana Pengelolaan dan Pemantauan area HCV di area penilaian (AOI)	112
Tabel 42.	Pengelolaan yang berlaku umum bagi setiap area HCV	114
Tabel 43.	Rangkuman area HCV di unit manajemen	114
Tabel 44.	Rekapitulasi luas area HCV dan area pengelolaan di unit manajemen	115
Tabel 45.	Rekapitulasi luas area HCV di area penilaian.	115
Tabel 46.	Notulensi konsultasi publik penilaian HCV PT JBP	117

Daftar Gambar

Gambar 1.	Lokasi penilaian HCV di unit manajemen dan area lanskap	3
Gambar 2.	Area penilaian pada PIPPB Tahun 2022 Periode 2	4
Gambar 3.	Area penilaian pada RTRW Kabupaten Muaro Jambi	5
Gambar 4.	Interpretasi tutupan lahan tahun 2022 di unit manajemen dan sekitarnya	11
Gambar 5.	Surat persetujuan masyarakat atas pelaksanaan penilaian HCV	12
Gambar 6.	Surat permohonan izin PT JBP kepada masyarakat atas penilaian HCV	14
Gambar 7.	Kegiatan <i>opening meeting</i> dan diskusi dengan manajemen PT JBP	17
Gambar 8.	Lokasi kunjungan lapangan dan desa pada tahap studi pemeriksaan awal	18
Gambar 9.	Tipe tutupan lahan yang terdapat di unit manajemen dan areal lanskap	18
Gambar 10.	Temuan spesies RTE Lutung (kiri) dan Elang Ular Bido (kanan)	19
Gambar 11.	Area-area yang memiliki fitur jasa lingkungan berupa sungai dan sempadannya	20
Gambar 12.	Area-area yang memiliki fitur jasa lingkungan berupa lahan gambut	20
Gambar 13.	Kegiatan <i>closing meeting</i> dan foto bersama dengan manajemen PT JBP	22
Gambar 14.	Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 9 Akuisisi 31 Agustus 2022	31
Gambar 15.	Batas AOI penilaian HCV PT JBP	32
Gambar 16.	Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 5 TM Akuisisi 1 Oktober 2007	33
Gambar 17.	Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 5 TM Akuisisi 31 Mei 2009	33
Gambar 18.	Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 9 OLI TIRS Akuisisi 28 Juni 2022	34
Gambar 19.	AOI terhadap batas Sub-DAS	35
Gambar 20.	AOI terhadap kelas ketinggian	36
Gambar 21.	AOI terhadap kelas kelerengan	36
Gambar 22.	AOI terhadap formasi geologi	38
Gambar 23.	AOI terhadap sistem lahan	38
Gambar 24.	AOI terhadap tipe ekosistem	39
Gambar 25.	AOI terhadap jenis tanah	39
Gambar 26.	AOI terhadap zona biofisio geografis	41
Gambar 27.	AOI terhadap tipe ekoregion	41
Gambar 28.	AOI terhadap kawasan fungsi lindung	43
Gambar 29.	AOI terhadap kawasan konservasi	43
Gambar 30.	AOI terhadap area kunci keanekaragaman hayati	44
Gambar 31.	AOI terhadap sebaran spesies RTE	45
Gambar 32.	Jalur migrasi raptor (sumber: raptor Indonesia)	45
Gambar 33.	AOI terhadap Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)	46
Gambar 34.	AOI terhadap Area IFL	47
Gambar 35.	Sebaran wilayah desa di AOI	48
Gambar 36.	Foto tempat ibadah yang terdapat di sekitar unit manajemen	49
Gambar 37.	Foto kegiatan Seloko pada acara pernikahan	50
Gambar 38.	Foto keadaan fasilitas transportasi menuju ibukota Kecamatan dan Provinsi	50
Gambar 39.	Foto kebun kelapa sawit dan kebun karet milik masyarakat	51
Gambar 40.	Foto kebun pertanian pisang dan cabe milik masyarakat	51
Gambar 41.	Foto agen-agen pengumpul buah sawit di masing-masing desa	51
Gambar 42.	Foto kondisi sarana pendidikan di Kecamatan Kumpeh	52
Gambar 43.	Foto keberadaan Posyandu dan Puskesmas di sekitar unit manajemen	53
Gambar 44.	Kondisi sumber air bersih masyarakat	53
Gambar 45.	Foto kondisi perumahan masyarakat di sekitar unit manajemen	54
Gambar 46.	Foto kondisi toko sembako, alat rumah tangga, dan bangunan	54
Gambar 47.	Kondisi infrastruktur listrik dan penggunaan energi rumah tangga	55
Gambar 48.	Foto budidaya walet yang marak berkembang di setiap desa	55
Gambar 49.	Foto pertanian skala kecil di sekitar unit manajemen	56

Gambar 50. AOI terhadap peta RTRW Kabupaten Muaro Jambi	56
Gambar 51. Citra satelit Landsat 9 OLI TIRS tanggal akuisisi 28 Juni 2022 di area penilaian	59
Gambar 52. Citra satelit Landsat 9 OLI TIRS tanggal akuisisi 31 Agustus 2022 di area penilaian	59
Gambar 53. Citra resolusi tinggi Google Earth tahun 2015 di area penilaian	60
Gambar 54. Lokasi titik imajiner pada resolusi tinggi Google Earth tahun 2021	61
Gambar 55. Tutupan lahan awal di area penilaian	62
Gambar 56. Titik <i>ground truthing</i> tutupan lahan di area penilaian	63
Gambar 57. Tutupan lahan akhir di area penilaian	64
Gambar 58. Foto kegiatan opening meeting dan pemetaan partisipatif	74
Gambar 59. Foto kegiatan pemetaan partisipatif	76
Gambar 60. Peta hasil kerja lapangan pengamatan identifikasi HCV Sosial	77
Gambar 61. Sungai-sungai yang dijumpai di unit manajemen dan sekitarnya	79
Gambar 62. Sebaran titik panas tahun 2008-2022 di area penilaian	82
Gambar 63. Peta area HCV 4 di area penilaian	85
Gambar 64. Peta area HCV 5 di area penilaian	90
Gambar 65. Lokasi transek dan titik pengamatan keanekaragaman hayati	95
Gambar 66. Peta area HCV 1 di area penilaian	102
Gambar 67. Posisi area penilaian pada <i>Intact Forest Landscape</i> tahun 2000, 2013 dan 2016	104
Gambar 68. Peta sebaran tutupan vegetasi alami tersisa pada setiap tipe ekosistem	107
Gambar 69. Peta area HCV 3 di area penilaian	108
Gambar 70. Peta ringkasan area HCV di area penilaian	116

Akronim dan Singkatan

ALS	<i>Assessor Licensing Scheme</i>
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
AOI	<i>Area of Interest</i>
APL	Areal penggunaan Lain
BPMPT	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
CITES	<i>Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (Konvensi perdagangan internasional flora dan fauna liar).
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CR	<i>Critical Endangered</i> (Terancam Kritis)
DELH	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
EBA	<i>Endemic Bird Area</i>
EN	<i>Endangered</i> (Kritis)
FPIC	<i>Free Prior and Informed Consent</i> (lihat PADIATAPA)
GIS	<i>Geographic Information System</i>
GRTT	Ganti Rugi Tanam Tumbuh
Ha	Hektar
HCV	High Conservation Value (lihat NKT)
HCVRN	<i>High Conservation Value Resources Network</i>
HL	Hutan Lindung
IBA	<i>Important Bird Areas</i>
ISCC	<i>International Sustainability and Carbon Certification</i>
ISPO	<i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature and Natural Resources</i> , kini disebut World Conservation Union (Badan Konservasi Dunia).
IUP	Izin Usaha Perkebunan
KBKT	Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
KHG	Kesatuan Hidrologis Gambut
KK	Kepala Keluarga
LC	<i>Least Concern</i> (resiko rendah)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NKT	Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value</i>)
NPP	<i>New Planting Procedure</i>
NT	<i>Near Threatened</i> (hampir terancam)
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
PADIATAPA	Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)
PMA	Penanaman Modal Asing
PNS	Pegawai Negeri Sipil
RPP	Rencana Pengelolaan dan Pemantauan
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
RT	Rukun Tetangga
RTE	<i>Rare, Threaten or Endangered</i>
RTRW	Rancangan Tata Ruang Wilayah
SD	Sekolah dasar
SHC	<i>Stakeholder consultation</i>
SIG	Sistem Informasi Geografis
SK	Surat Keputusan
SKT	Stok Karbon Tinggi

SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SOP	<i>Standard Operation Procedure</i>
TBE	Tingkat Bahaya Erosi
TBS	Tandan Buah Segar
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
UKL	Upaya Kelola Lingkungan
UM	Unit Manajemen
UMK	Upah Minimum Kerja
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
VU	<i>Vulnerable</i> (Rentan)
DAS	Daerah Aliran Sungai, adalah satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.
DEM	<i>Digital Elevation Model</i> , adalah penyajian digital suatu permukaan sebagai suatu grid beraturan dari nilai-nilai elevasi.
Hutan	Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No. 41 tahun 1999).
Hutan Primer	Hutan yang sama sekali belum pernah dijamah manusia atau belum ada pemanfaatan sebelumnya. Dalam konteks lokal, yang disebut hutan primer adalah kawasan hutan yang belum pernah dibuka untuk perladangan/kebun, dan hutan yang belum terkena penebangan kayu.
Hutan Sekunder	Hutan primer yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan kayu oleh manusia atau dibuka untuk ladang, atau terbuka karena banjir atau bencana alam lain, kemudian secara alami terbentuk hutan baru, yang belum mencapai klimaks seperti hutan semula.
Kawasan Hutan	Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No. 41 tahun 1999). Beberapa Kawasan Hutan: Kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi (HP), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).
Refugium	(Jamak: Refugia) tempat pengungsian/perlindungan satwa.
Sempadan Sungai	Areal yang terletak di kanan-kiri sungai yang terdiri atas bantaran banjir, bantaran longsor, bantaran ekologi dan bantaran keamanan.
Spesies	Suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil (subur).
Sungai	Sistem pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

1 Pendahuluan dan Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

PT Jambi Batanghari Plantation (selanjutnya disebut “PT JBP”) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan komoditi kelapa sawit. Dalam melaksanakan aktivitasnya PT JBP memiliki Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability Policy*) yang menyatakan komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip produksi minyak sawit berkelanjutan dengan memasukan pertimbangan aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan sosial serta ekonomi sesuai dengan prinsip dan kriteria standar minyak sawit berkelanjutan (*Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) maupun *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)). Bentuk pengejawantahan Kebijakan keberlanjutan tersebut, PT JBP berkomitmen untuk tidak melakukan penebangan hutan dan pembakaran, melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi serta menolak pembukaan kebun di lahan gambut setelah 31 Desember 2015.

Salah satu langkah awal yang dilakukan PT JBP dalam memantapkan komitmen tersebut adalah dengan melakukan Penilaian *High Conservation Value* (HCV), *Land Use Changes Analysis* (LUCA), dan *Social Impact Assessment* (SIA), dimana pelaksanaannya dilakukan dengan menunjuk dan menugaskan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (*PILI Green Network*) sebagai konsultan independent untuk melakukan kegiatan penilaian di wilayah kerja PT JBP yang terletak di Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Secara legalitas, PT JBP telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan terakhir pada tahun 2011, PT JBP telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai Surat Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dengan nomor sertifikat HGU No. 32/HGU/BPN RI seluas 1,953.02 ha¹. Saat kegiatan penilaian ini dilakukan pada areal Kelola PT JBP (selanjutnya disebut “Unit Manajemen”) telah terbangun kebun kelapa sawit beserta infrastruktur pendukung lainnya. Kegiatan yang saat ini dilakukan oleh unit manajemen adalah kegiatan perawatan tanaman, pemanenan serta rehabilitasi terhadap beberapa area yang telah tertanam kelapa sawit. Unit manajemen untuk saat ini belum memiliki rencana pengembangan baru maupun perluasan lahan.

Proses kegiatan dan pelaporan penilaian HCV ini menggunakan panduan-panduan yang terdiri atas : (i) *HCV Assessment Manual* (Maret 2019) dan (ii) *HCV Report Template with Guidance* (Maret 2019). Tim penilai juga menggunakan referensi yang terdiri dari (i) *Common Guidance for the Identification of HCVs* (September 2017) sebagai referensi utama beserta referensi lain seperti (ii) *Common Guidance for the Management and Monitoring of HCVs* (2017), (iii) HCV Toolkit Indonesia 2008.

1.2 Tujuan Penilaian

Latar belakang dan tujuan penilaian HCV diareal kelola unit manajemen yaitu :

1. Memenuhi persyaratan skema sertifikasi RSPO, khususnya dalam pemenuhan prinsip dan kriteria 7.12 RSPO tahun 2018 (Revisi 01 Februari 2020)
2. Mengidentifikasi dan memetakan keberadaan area HCV berdasarkan elemen kunci dan status terkini.

¹ Sertipikat HGU PT JBP memiliki luasan yang sama dengan *shapefile* Batas HGU yaitu 1,953.02 ha.

3. Mengidentifikasi ancaman terhadap keberlanjutan area HCV serta membuat rekomendasi perlindungan, pengelolaan, dan pemantauan, sebagai masukan utama untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Area HCV.
4. Memenuhi persyaratan skema RaCP RSPO sebagai *cut-off* akhir dalam Penilaian *Land Use Changes Analysis* (LUCA).

1.3 Lokasi Penilaian

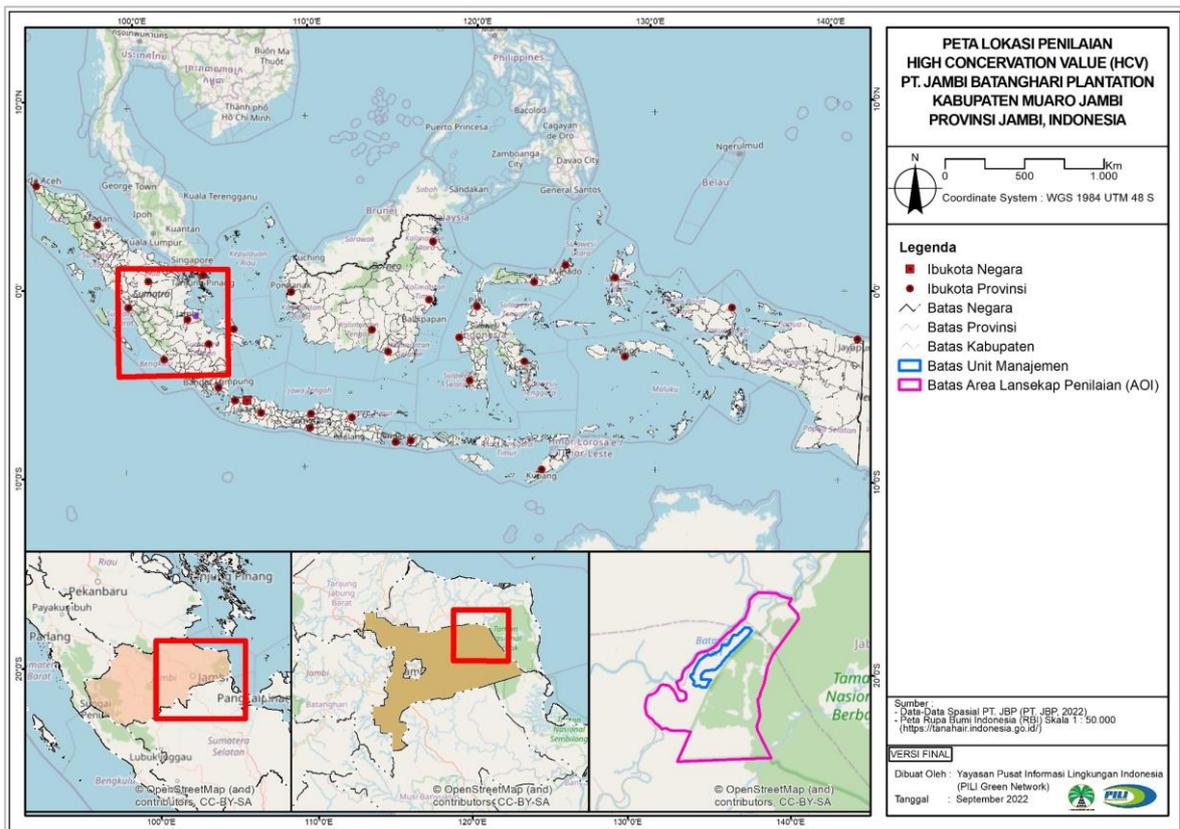
Secara geografis unit manajemen terletak pada rentang koordinat 1°18' 58.464" - 1° 23' 44.299" LS dan 104° 0' 14.020" - 104° 5' 4.992" BT. Lokasi ini secara administratif masuk dalam wilayah Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (**Gambar 1**)

Aspek legalitas yang dimiliki oleh PT JBP adalah (i) Izin Lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 589 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Jambi Batanghari Plantation di Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi seluas ± 2.700 ha, tanggal 10 November 2008 (ii) Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 07 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT Jambi Batanghari Plantation seluas ± 2.700 ha, tanggal 09 Februari 2009 dan (iii) Hak Guna Lahan (HGU) sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 32/HGU/BPN-RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Jambi Batanghari Plantation seluas 1,953.02, tanggal 4 Juli 2011. Untuk aspek perizinan lingkungan, pada tahun 2010 PT JBP telah melakukan Kajian terhadap dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan izin lokasi yang dimiliki seluas ± 2,700 Ha dan telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Surat Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Jambi Batanghari Plantation No. 660.4/01/LH/2010 tanggal 14 Juli 2010. Kemudian sesuai dengan Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi No. 660/276/II.I/DLH, tanggal 4 Agustus 2020 tentang Arahan Dokumen Lingkungan, PT JBP melakukan perubahan terhadap dokumen lingkungan yang telah dimiliki menjadi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang kemudian disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 13/Kep.Dis/LH/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Jebus, Desa Sungai Aur dan Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi oleh PT JBP, tanggal 19 Oktober 2021.

Area penilaian HCV terdiri dari (i) wilayah kelola sesuai perizinan yang dimiliki selanjutnya disebut **Unit Manajemen**, (ii) wilayah sekitar unit manajemen yang diikutsertakan sebagai bagian lanskap yang akan dikaji disebut **Area Lanskap**, dan (iii) gabungan unit manajemen dan area lanskap disebut **Area Penilaian atau AOI**. Berdasarkan konteks sosial, unit manajemen secara administratif berada di tiga desa yaitu Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya. Ketiga desa tersebut memiliki keterikatan sosial dengan unit manajemen dalam hal konteks lingkungan dan sosial (**Tabel 1**).

Tabel 1. Wilayah administrasi Desa, dan Kecamatan pada area penilaian

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Area Penilaian
Jebus	Kumpeh	Muaro Jambi	Unit Manajemen dan Area Lanskap
Sungai Aur			
Gedong Karya			



Gambar 1. Lokasi penilaian HCV di unit manajemen dan area lanskap

1.4. Ikhtisar Organisasi yang Meminta Penilaian

Pemrakarsa (organisasi yang meminta) penilaian HCV adalah PT JBP, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. PT JBP memulai kegiatan pada tahun 2008 sejak mendapatkan izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dimana penanaman pertama dilakukan pada tahun 2009 dan penanaman berakhir tahun 2012. Seiring perkembangannya pada Juni 2018, terjadi peralihan kepemilikan (*take over*) oleh manajemen baru dari manajemen lama dan dibawah kendali manajemen yang baru hingga kegiatan penilaian HCV ini dilakukan, aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh unit manajemen difokuskan pada perbaikan dan pembenahan pada areal perkebunan serta infrastruktur pendukung.

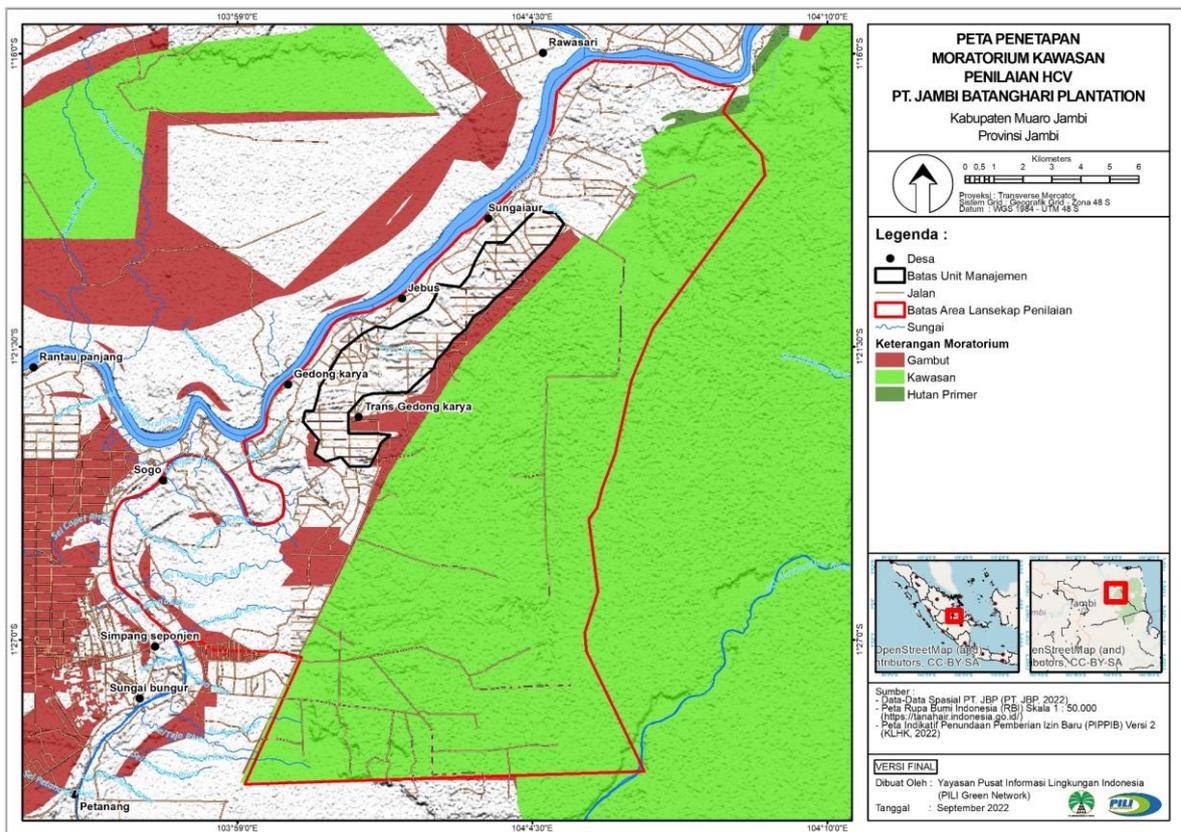
Sejak tahun 2008 saat Izin Lokasi PT JBP diterbitkan hingga penilaian HCV ini dilakukan, unit manajemen belum pernah mendapatkan keluhan atau menjadi objek kampanye dari pihak lain. Kondisi lain yang ditemukan saat penilaian ini dilakukan adalah PT JBP belum memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dan sedang melakukan mempersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi baik ISPO maupun RSPO.

1.5. Konteks Singkat Nasional dan Regional

Unit manajemen terletak di Pulau Sumatera yang secara *zoogeografi* termasuk tipe Oriental (Kawasan Barat Indonesia). Secara global, tipe ini memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tinggi, dimana tercatat ± 13.776 spesies tumbuh-tumbuhan ditemukan dengan ± 1.891 spesies diantaranya merupakan jenis endemik (Retnowati et al, 2019). Selain itu, juga terdapat spesies satwa unik yang menghuni pulau ini seperti: Orangutan (*Pongo abelii*, *P. tapanuliensis*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), dan Tapir (*Tapirus indicus*). Aspek biologi dan ekologi di unit manajemen dan areal lanskap secara rinci dibahas pada **Sub Bab 6.3**.

Dalam konteks kebijakan nasional sejak tahun 2011 pemerintah memberlakukan moratorium pemberian izin baru dalam rangka penyempurnaan tata kelola terhadap pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut. Hal ini dilakukan dalam rangka menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Berdasarkan overlay batas unit manajemen dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB 2022 Periode 2)², unit manajemen berada di luar moratorium hutan primer dan moratorium gambut (**Gambar 2**). Secara lengkap, aspek fisik dan lingkungan terkait moratorium gambut akan dibahas pada **Sub Bab 6.2**.

Dalam konteks regional, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)³ Muaro Jambi, unit manajemen berada pada Kawasan budidaya dan pemukiman (**Gambar 3**). Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, 4 (empat) komoditi utama perkebunan kabupaten Muaro Jambi adalah: Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, dan Kakao⁴. Dari 4 (empat) komoditi utama tersebut, luas perkebunan kelapa sawit merupakan yang terbesar dengan luas 135.279 ha (25,78% dari luas kabupaten Muaro Jambi) dengan produksi pada tahun 2021 mencapai 232.725⁵ ton dimana produksi kelapa sawit dari kecamatan Kumpeh terbesar keempat dibawah kecamatan Sakernan, Kumpeh Ulu, Sungai Bahar. Kondisi diatas dapat mengindikasikan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor penggerak utama aspek ekonomi di Kabupaten Muaro Jambi. Konteks sosial ekonomi di area penilaian dijelaskan lebih lanjut pada **Sub Bab 6.4**.



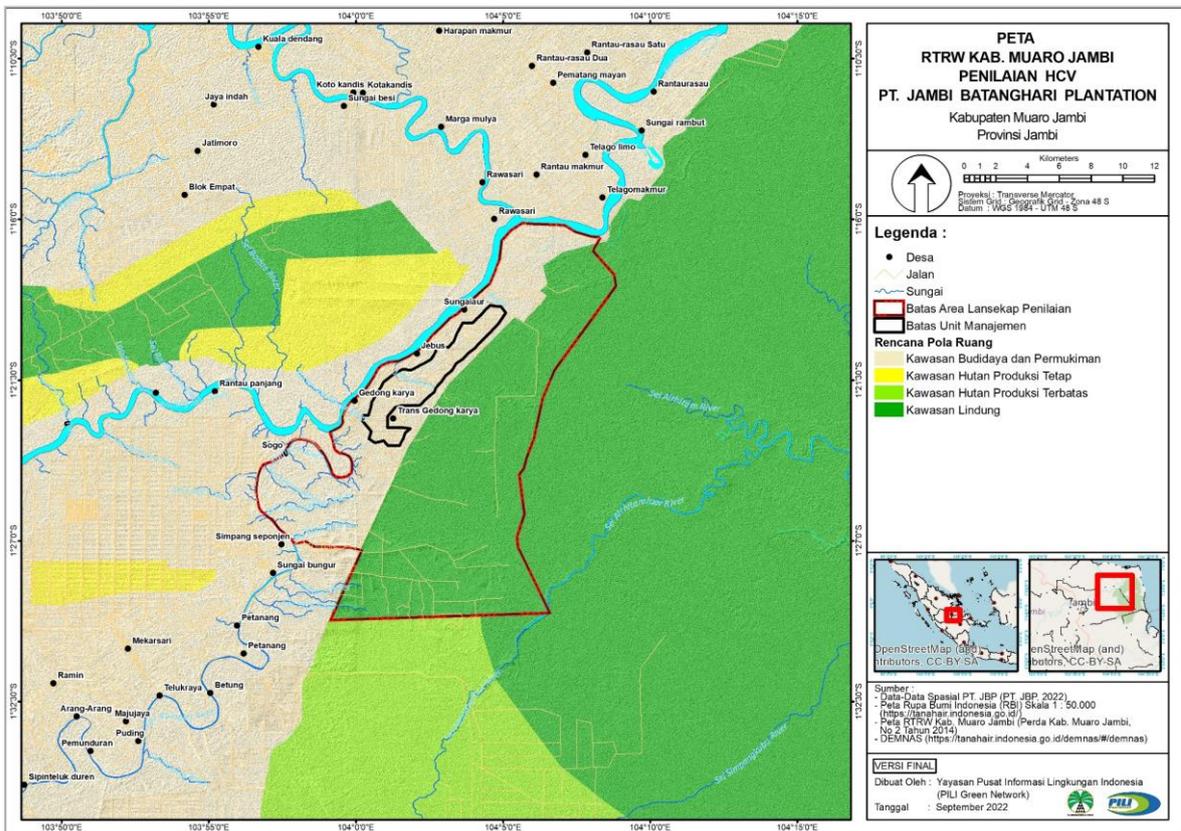
Gambar 2. Area penilaian pada PIPPB Tahun 2022 Periode 2

² Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022

³ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034

⁴ <https://jambi.bps.go.id/indicator/54/516/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-jenis-tanaman-dan-kabupaten-kota.html>

⁵ <https://jambi.bps.go.id/indicator/54/515/1/produksi-tanaman-perkebunan-menurut-jenis-tanaman-dan-kabupaten-kota.html>



Gambar 3. Area penilaian pada RTRW Kabupaten Muaro Jambi

2 Tim Penilaian

Penilaian HCV ini dilaksanakan oleh Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) dengan melibatkan tim penilaian yang terdiri dari 7 (tujuh) personal dengan komposisi tim dan keahlian setiap personal disajikan pada **Tabel 2**. Kegiatan penilaian HCV dibantu oleh masyarakat, staf, dan karyawan perusahaan yang bertugas sebagai pemandu pada kegiatan lapangan dan kunjungan ke desa-desa (**Tabel 3**).

Tabel 2. Tim penilai pada penilaian HCV

Nama	Peran	Institusi	Keahlian	Pengalaman
Ryan Karida Pratama	Pimpinan Penilai; Penilai Jasa Lingkungan dan Ekosistem	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Hidup	Hidrologi, pengelolaan DAS, konservasi tanah dan air, analisis spasial	Negara: Indonesia dan Malaysia Bahasa: Indonesia dan Inggris
Sigit Budhi Setyanto	Anggota tim; Penilai sosial, ekonomi, budaya (ALS15024BS)	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Hidup	Sosial ekonomi, dampak sosial, verifikasi FPIC, sosial budaya, pemetaan partisipatif	Negara: Indonesia, Malaysia, dan PNG Bahasa: Indonesia dan Inggris
Iwan Setiawan	Anggota tim; Penilai keanekaragaman hayati dan ekologi	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Hidup	Identifikasi fauna, identifikasi ekosistem, dan pengelolaan ekosistem	Negara: Indonesia, Malaysia, dan PNG Bahasa: Indonesia dan Inggris
Anwar Muzakkir	Anggota tim; Penilai keanekaragaman hayati dan ekologi	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Hidup	Identifikasi flora, identifikasi ekosistem, dan <i>carbon stock</i>	Negara: Indonesia Bahasa: Indonesia dan Inggris
Andrea Aditya Widhyanto	Anggota tim; Penilai sosial dan ekonomi	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Hidup	Sosial ekonomi, kajian tenurial, FPIC, pemetaan partisipatif	Negara: Indonesia Bahasa: Indonesia dan Inggris
Siti Suprihatin	Anggota tim; Penilai sosial dan ekonomi	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Hidup	Sosial budaya, kajian tenurial, FPIC, pemetaan partisipatif	Negara: Indonesia Bahasa: Indonesia dan Inggris
Muhamad Rizal	Anggota tim; GIS, dan <i>Remote Sensing</i>	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Hidup	Analisis spasial, <i>remote sensing</i> , <i>carbon stock</i> , perubahan tutupan lahan	Negara: Indonesia dan Malaysia Bahasa: Indonesia dan Inggris

Tabel 3. Pendamping lapangan pada penilaian HCV

Nama	Peran
<ul style="list-style-type: none"> • Sahono (Tokoh Masyarakat Desa Sungai Aur) • Azwan (Tokoh Masyarakat Desa Jebus) • Muhamad Zen (Tokoh Masyarakat Desa Gedong Karya) • M. Haris (Staf EHS PT JBP) • Rusman Lumabik (Staf EHS PT JBP) • Afriandi (Staf EHS PT JBP) • Erwin (Staf Humas PT JBP) 	Penunjuk Jalan, Arah, dan Lokasi Lapangan dan Desa

Nama	Peran
<ul style="list-style-type: none"> • Hadi (Masyarakat Desa Jebus) • Loli (Masyarakat Desa Jebus) • Randi (Masyarakat Desa Jebus) • Ali Mukti (Masyarakat Desa Sungai Aur) • Zakaria (Masyarakat Desa Sungai Aur) • Febri (Masyarakat Desa Sungai Aur) • Kausar (Masyarakat Desa Gedong Karya) • Sadam (Masyarakat Desa Gedong Karya) 	Perintis jalur

3 Tata Waktu Penilaian

Penilaian HCV dilakukan pada rentang bulan Juli - Oktober 2022. Kegiatan penilaian ini terbagi menjadi 3 tahapan yang mengacu pada *HCV Assessment Manual* (HCVRN, 2019). Berikut tahapan dan tata waktu penilaian:

Tabel 4. Tahapan dan tata waktu pelaksanaan penilaian HCV

Tahap	Waktu	Kegiatan	Lokasi
PRA-PENILAIAN			
Pertukaran informasi dan <i>desktop study</i>	25-27 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan perusahaan mengenai Informasi awal dari rencana penilaian Penandatanganan kontrak kerja Pengumpulan data dasar rencana penilaian dan melakukan uji tuntas cepat 	Kantor PILI (Bogor)
	8-12 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data awal dari sumber sekunder, seperti laporan, jurnal, buku, data statistik, peta tematik Analisis data dan analisis spasial. Identifikasi stakeholder kunci yang relevan dengan rencana penilaian 	Kantor PILI (Bogor)
STUDI PEMERIKSAAN AWAL (SCOPING STUDY)			
<i>Scoping study</i>	18-25 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi awal dengan stakeholder kunci (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, LSM, dan akademisi) Konsultasi awal dengan perwakilan masyarakat dari Desa Jebus, Desa Sungai Aur, Desa Gedong Karya, dan Kecamatan Kumpeh Kunjungan lapangan dan pengecekan awal tutupan lahan 	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, 3 Kantor Desa, 1 Kantor Kecamatan, dan Unit Manajemen PT JBP
	25 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun jadwal, komposisi tim, dan fasilitas pendukung survey lapangan pada penilaian lengkap 	Kantor PT JBP
PENILAIAN LENGKAP			
Survei lapangan	8 - 16 September - 2022	<ul style="list-style-type: none"> Pengecekan akhir tutupan lahan Penilaian dan pengumpulan data biodiversity dan lingkungan Wawancara dengan <i>stakeholder</i> kunci <i>Focus group discussion</i> dan pemetaan partisipatif dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan di manajemen unit dan area lanskap Pengecekan lapangan sosial dan budaya Kompilasi data lapangan dan koordinasi tim 	Unit Manajemen dan sekitarnya, serta 3 Wilayah Desa
<i>Closing meeting</i>	16 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi dan diskusi dengan Manajemen PT JBP Menyusun jadwal Konsultasi Publik 	Kantor PT JBP
Analisis dan Pelaporan	19 September - 10 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> Analisis data lapangan dan data spasial Penulisan Laporan (Draft 1) Penyampaian Laporan Draft 1 ke Manajemen PT JBP 	Kantor PILI (Bogor)
Konsultasi Publik	19 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan tatap muka dengan <i>stakeholder</i> kunci baik dari masyarakat, pemerintah desa, instansi-instansi pemerintah, LSM, dan perusahaan sekitar 	Kantor Kecamatan Kumpeh

Tahap	Waktu	Kegiatan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi dan diskusi hasil penilaian HCV di Areal HGU PT JBP dan sekitarnya 	
Perbaikan dan Penyempurnaan Laporan	24-26 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis tambahan data lapangan dan data spasial • Penyempurnaan Laporan (Draft 2) sesuai hasil Konsultasi Publik • Penyampaian Laporan Draft 2 ke Manajemen PT JBP 	Kantor PILI (Bogor)
Final Laporan	31 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan Final ke Manajemen PT JBP 	Kantor PILI (Bogor)

Selain melakukan penilaian HCV, unit manajemen juga telah melakukan penilaian dan penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada tahun 2010, Survei Tanah Semi Detail dan Kesesuaian Lahan (Maret 2021), *Land Use Changes Analysis* (Agustus - September 2022), serta *Social Impact Assessment* (Agustus - Oktober 2022).

Hasil dari penilaian-penilaian tersebut digunakan sebagai data dan informasi pendukung pada penilaian ini, seperti data UKL dan UPL digunakan untuk melihat rona awal terkait tutupan lahan, sejarah PT JBP, Spesies Flora dan Fauna, serta proses pembangunan perkebunan PT JBP. Data *Land use changes analysis* digunakan sebagai tutupan lahan awal saat pra-penilaian dilakukan. Data *Sosial impact assessment* digunakan sebagai data awal dalam konteks sosial dan ekonomi, Data Survei Tanah Semi Detil dan Kesesuaian Lahan digunakan untuk memetakan lahan gambut dan kedalaman gambut di areal HGU PT JBP.

4 Fase Pra-penilaian

Kegiatan pertama pada tahap pra-penilaian HCV yaitu (i) melakukan koordinasi dengan unit manajemen mengenai rencana kegiatan, termasuk menghimpun informasi awal mengenai kondisi unit manajemen dan sekitarnya. Informasi awal yang diperlukan salah satunya mengenai status sertifikasi RSPO serta mengenai ada tidaknya pembukaan lahan dan penanaman baru. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya akan disesuaikan dengan skenario penilaian HCV yang terdapat pada *Interpretation of indicator 7.12.2 and annex 5* (RSPO, 2018).

Kegiatan selanjutnya pada tahap pra-penilaian yaitu (ii) pengumpulan data dasar namun tidak terbatas pada informasi mengenai legalitas, status penguasaan lahan, letak lokasi unit manajemen, kondisi tutupan lahan, serta daftar desa-desa terdampak dari operational;(iii) tinjauan atas kebijakan unit manajemen terkait pelaksanaan penilaian HCV; (iv) tinjauan atas proses FPIC yang telah dilakukan unit manajemen; (v) desktop study dan analisis awal atas data dasar (yang diberikan unit manajemen) serta data sekunder yang berasal dari studi literatur, data statistik serta analisis spasial berupa interpretasi tutupan lahan awal.

4.1 Uji Tuntas

Uji tuntas cepat menggunakan 4 (empat) prasyarat yang telah ditetapkan oleh HCVRN, yaitu (1) komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan sosial, (2) komitmen untuk menunda atau menghentikan pembukaan atau persiapan lahan apapun sampai penilaian HCV selesai dilaksanakan, (3) hak hukum yang jelas atau izin untuk eksplorasi unit manajemen, dan (4) Proses FPIC telah dilaksanakan dengan memberikan seluruh informasi tentang proyek yang diajukan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak, serta proses negosiasi dan persetujuan yang telah disepakati, dengan perwakilan yang ditunjuk melalui proses yang adil.

1. Komitmen terhadap pengamanan lingkungan dan sosial

PT JBP berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis secara berkelanjutan dan memahami tanggung jawabnya terhadap lingkungan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Komitmen ini tertuang pada Kebijakan Berkelanjutan (*Sustainability Policy*) yang disusun dengan berpedoman kepada prinsip dan kriteria ISPO maupun RSPO, Kebijakan ini telah diimplementasikan sejak tahun 2019 (*lihat Lampiran 2*). Secara spesifik perlindungan terhadap HCV serta aspek sosial tertuang dalam pernyataan komitmen perusahaan yang menyebutkan bahwa: *“Tidak melakukan penebangan hutan dan pembakaran, melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi dan Kawasan stok karbon tinggi, serta menolak pembukaan kebun dilahan gambut”* serta *“menghormati hak PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) untuk pemanfaatan lahan”*.

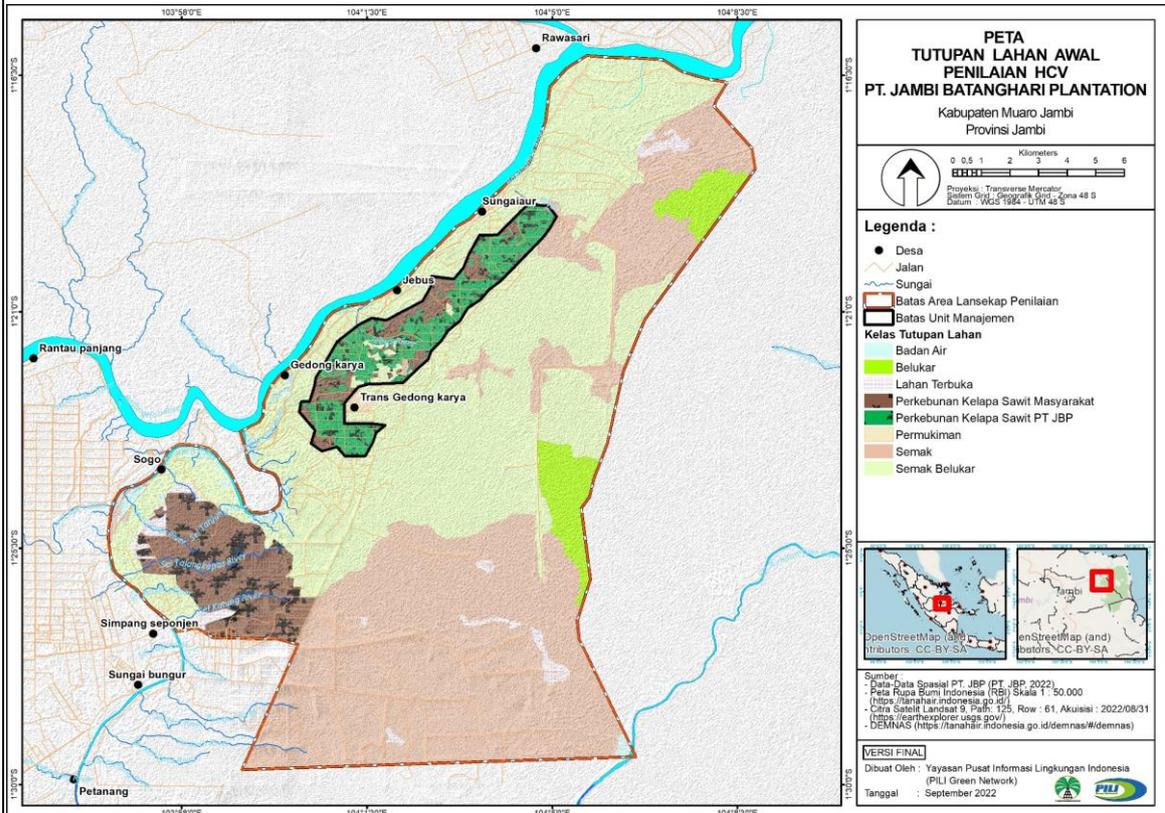
2. Komitmen untuk menunda atau menghentikan pembukaan atau persiapan lahan apapun sampai Penilaian HCV selesai dilaksanakan

Saat penilaian HCV dilakukan, seluruh areal HGU PT JBP telah tertanam kelapa sawit sesuai interpretasi tutupan lahan dari citra satelit Landsat 9 OLI/TIRS tanggal akuisisi 31 Agustus 2022 (**Gambar 4**), sehingga tidak ada rencana pembukaan lahan baru di unit manajemen PT JBP dan tidak ada penerapan NPP RSPO.

Dalam hal pembukaan lahan dan penanaman baru, untuk saat ini unit manajemen belum memiliki rencana dan berkomitmen untuk menunda dan menghentikan pembukaan atau persiapan lahan apapun sampai penilaian HCV selesai dilaksanakan. Komitmen ini dituangkan dalam *“Notification for No Land Clearing & Planting Activities (lihat Lampiran 2)”* yaitu *“PT Jambi Batanghari Plantation*

2. Komitmen untuk menunda atau menghentikan pembukaan atau persiapan lahan apapun sampai Penilaian HCV selesai dilaksanakan

affirms our commitment to half all-land clearing and planting activities until the completion of the HCV Report”.



Gambar 4. Interpretasi tutupan lahan tahun 2022 di unit manajemen dan sekitarnya

3. Hak hukum yang jelas atau izin untuk eksplorasi unit manajemen

PT JBP memiliki Legalitas Lahan (i) Izin Lokasi dan (ii) Hak Guna Lahan (HGU). Izin Lokasi diberikan kepada PT JBP seluas 2.700 ha sesuai dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 589 Tahun 2008, dan Sertifikat HGU diberikan kepada PT JBP seluas 1,953.02 ha sesuai dengan Sertifikat HGU No. 32/HGU/BPN RI yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2011. Pada tahun 2009, unit manajemen PT JBP mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 07 Tahun 2009 dengan luas areal 2,700 ha. Areal HGU PT JBP terletak di wilayah administrasi Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Berdasarkan perizinan lingkungan, PT JBP telah melakukan Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada Tahun 2010 dengan cakupan legal Izin Lokasi seluas 2.700 ha. Dokumen UKL dan UPL tersebut telah di evaluasi secara teknis dan telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Surat Keputusan No. 660.4/01/LH/2010. Seluruh dokumen-dokumen terkait legalitas dan perizinan telah diberikan manajemen PT JBP kepada pihak penilai.

Selain dokumen legalitas dan perizinan PT JBP, manajemen PT JBP juga memberikan peta dengan koordinat dalam bentuk *shapefile* areal HGU PT JBP saat tahapan pra-penilaian. Perizinan untuk eksplorasi unit manajemen dan sekitarnya berkenaan dengan penilaian HCV telah disetujui oleh perwakilan masyarakat melalui pemerintah desa, seperti yang tertuang dalam surat persetujuan (**Gambar 5**).

3. Hak hukum yang jelas atau izin untuk eksplorasi unit manajemen

<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KECAMATAN KUMPEH PEMERINTAH DESA JEBUS Alamat : RT 03 Desa Jebus Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi</p> <hr/> <p>Nomor : 140/57/JBS/VI/2022 Perihal : Konsultasi Awal Penilaian NKT PT. Jambi Batanghari Plantation Lampiran : -</p> <p>Kepada Yth. General Manager PT Jambi Batanghari Plantation Di Tempat</p> <p>Dengan Hormat,</p> <p>Sehubungan dengan surat yang kami terima dari PT Jambi Batanghari Plantation dengan Nomor : 040/JBP/VI/2022 perihal kunjungan Tim kajian NKT yang akan melaksanakan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO (<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>) di PT Jambi Batanghari Plantation.</p> <p>Bersama ini kami selaku Pemerintah Desa Jebus, Kec. Kumpeh, Kah. Muaro Jambi tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya untuk program ataupun kegiatan yang dimaksud diatas.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan dukungan bapak kami sampaikan terimakasih.</p> <p>Jebus, 24 Juni 2022</p> <p style="text-align: right;"> Kepala Desa Jebus</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KECAMATAN KUMPEH PEMERINTAH DESA SUNGAI AUR Alamat : Jl. Lintas Suka Kandang – Simpang Km 90 Kode Pos 36371 Teip Email : desasungaiaurkumpeh@gmail.com</p> <hr/> <p>Nomor : 140/172/SA/VI/2022 Perihal : Konsultasi Awal Penilaian NKT PT. Jambi Batanghari Plantation Lampiran : -</p> <p>Kepada Yth. General Manager PT Jambi Batanghari Plantation Di Tempat</p> <p>Dengan Hormat,</p> <p>Sehubungan dengan surat yang kami terima dari PT Jambi Batanghari Plantation dengan Nomor : 041/JBP/VI/2022 perihal kunjungan Tim kajian NKT yang akan melaksanakan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO (<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>) di PT Jambi Batanghari Plantation.</p> <p>Bersama ini kami selaku Pemerintah Desa Sungai Aur, Kec. Kumpeh, Kah. Muaro Jambi tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya untuk program ataupun kegiatan yang dimaksud diatas.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan dukungan bapak kami sampaikan terimakasih.</p> <p style="text-align: right;"> Kepala Desa Sungai Aur</p>
<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KECAMATAN KUMPEH PEMERINTAH DESA GEDONG KARYA Alamat : RT 07 Desa Gedong Karya Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi Email : pemerintahdesa.gedongkarya@gmail.com</p> <hr/> <p>Nomor : 140/GK/VI/2022 Perihal : Konsultasi Awal Penilaian NKT PT. Jambi Batanghari Plantation Lampiran : -</p> <p>Kepada Yth. General Manager PT Jambi Batanghari Plantation Di Tempat</p> <p>Dengan Hormat,</p> <p>Sehubungan dengan surat yang kami terima dari PT Jambi Batanghari Plantation dengan Nomor : 041/JBP/VI/2022 perihal kunjungan Tim kajian NKT yang akan melaksanakan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO (<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>) di PT Jambi Batanghari Plantation.</p> <p>Bersama ini kami selaku Pemerintah Desa Gedong Karya, Kec. Kumpeh, Kah. Muaro Jambi tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya untuk program ataupun kegiatan yang dimaksud diatas.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan dukungan bapak kami sampaikan terimakasih.</p> <p>Gedong Karya, 24 Juni 2022</p> <p style="text-align: right;"> Kepala Desa Gedong Karya</p>	

Gambar 5. Surat persetujuan masyarakat atas pelaksanaan penilaian HCV

4. Proses FPIC yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Terkait dengan Rencana Pengembangan Perusahaan dan Pelaksanaan Penilaian HCV

PT JBP pada awal pembangunan telah melakukan beberapa sosialisasi awal. Kegiatan sosialisasi ditujukan kepada masyarakat yang terdampak dari semua pemangku kepentingan berkenaan dengan rencana pengembangan perkebunan. Penentuan masyarakat yang terdampak menggunakan pendekatan wilayah desa yang masuk atau berdampingan dengan areal izin Perkebunan PT JBP, yaitu: Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat serta beberapa pihak dari manajemen yang lama, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan oleh unit manajemen pada tahun 2008 yang bertempat di kantor PT JBP. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi tersebut unit manajemen bersama-sama dengan masyarakat pemilik lahan melakukan pengukuran serta kompensasi ganti rugi dan baru setelah itu PT JBP melakukan pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Selain itu tindak lanjut lainnya pasca sosialisasi, pada tahun 2011 masyarakat beserta PT JBP melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan pada masing-masing desa. (Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya) dihadapan Notaris Abrar Surwansyah, SH., M.Kn yang berkedudukan di Jambi. Penandatanganan ini setiap Desa diwakili oleh Koperasi yang dibentuk sebagai wadah untuk kerjasama antara masyarakat dan unit manajemen.

Hasil verifikasi atas informasi dan wawancara yang dilakukan oleh manajemen baru disimpulkan bahwa beberapa dokumen-dokumen tersebut sudah tidak ditemukan. Hal ini disebabkan perubahan dan pergantian struktur manajemen yang membuat beberapa dokumen tidak tersedia. Namun demikian, masih terdapat dokumen pengesahan akta pendirian koperasi (*lihat Lampiran 3*) untuk ketiga desa tersebut.

Pasca diambil alih oleh manajemen yang baru, manajemen PT JBP telah melakukan kegiatan sosialisasi tambahan yang bertujuan untuk memperkenalkan manajemen baru dan menangkap isu-isu sosial yang timbul, serta kerja sama kedepannya antara PT JBP dan masyarakat di Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya. Beberapa dokumentasi sosialisasi yang telah dilakukan PT JBP pasca diambil alih tersaji pada **Lampiran 3**.

Proses FPIC untuk Penilaian HCV telah dilakukan oleh PT JBP dimulai dengan sosialisasi tentang penilaian HCV kepada perwakilan masyarakat melalui pemerintah desa pada tanggal 22 Juni 2022 (**Gambar 6**). Selanjutnya perwakilan desa (dalam hal ini pemerintah desa) berkenan memberikan izin pelaksanaan penilaian HCV di wilayah Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya (*lihat Gambar 5*). Persetujuan atas pelaksanaan penilaian HCV tersebut akan dikonfirmasi pada saat tahap Studi Pemeriksaan Awal (*Scoping Study*) (*lihat Bab 5*).

Persetujuan dari masyarakat diberikan oleh kepala desa atau aparat desa (BPD/PKK/Kepala Adat). Khusus di Kabupaten Muaro Jambi secara tradisi Kepala Desa dan Kepala Adat (penamaan setempat yaitu "Datuk") selalu menjadi bagian (penasehat) dalam segala urusan yang melibatkan komunitasarganya. Dalam konteks internal desa sudah terbentuk hierarki delegasi dan komunikasi dari perangkat kecamatan selanjutnya ke perangkat desa, ke perangkat dusun, ke RT dan warga masyarakat, bahkan perangkat desa sudah memiliki informasi stakeholder penting yang relevan di tingkat desa yang dapat dihubungi. Selain itu, perusahaan melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

4. Proses FPIC yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Terkait dengan Rencana Pengembangan Perusahaan dan Pelaksanaan Penilaian HCV



Gambar 6. Surat permohonan izin PT JBP kepada masyarakat atas penilaian HCV

4.2 Gerbang PADIATAPA

Pada tahap pra-penilaian ini, tim pelaksana penilaian memberikan informasi kepada perusahaan mengenai tahapan penilaian selanjutnya, yaitu tahapan *scoping study* (studi pemerikasan awal) dan penilaian lengkap termasuk konsultasi publik. Perusahaan menyatakan persetujuan atas pelaksanaan tahapan penilaian HCV, dan perusahaan juga memahami konsekuensi hasil penilaian yaitu rekomendasi untuk mengelola dan memantau area HCV, khusus area HCV yang berada di areal unit manajemen PT JBP.

Penilaian uji tuntas terhadap prasyarat yang harus dipenuhi oleh PT JBP telah dilakukan, berdasarkan tinjauan dokumen, data, dan wawancara, tim penilai menyimpulkan bahwa:

1. PT JBP memiliki komitmen terhadap pengamanan lingkungan dan sosial seperti yang dinyatakan dalam Kebijakan Berkelanjutan (*Sustainable Policy*).
2. PT JBP memiliki komitmen untuk menunda atau menghentikan pembukaan atau persiapan lahan sampai penilaian HCV selesai dilakukan. Hal ini dinyatakan pada komitmen *Notification for No Land Clearing & Planting Activities*.
3. PT JBP memiliki legalitas lahan yaitu Izin Lokasi, IUP, dan HGU untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal kelolanya. Seluruh dokumen telah diberikan kepada tim penilai. Terkait penilaian HCV, PT JBP telah mendapatkan izin dari perwakilan masyarakat untuk melakukan kegiatan penilaian HCV.
4. PT JBP telah melakukan kegiatan sosialisasi dan permohonan izin ke perwakilan masyarakat sebelum penilaian HCV dilakukan, hal ini merupakan bukti prinsip FPIC dalam penilaian HCV sudah dapat terpenuhi. Namun demikian, tim penilai akan memverifikasi seluruh kegiatan dan permohonan izin tersebut pada saat tahapan studi pemerikasan awal (*scoping study*) dan tahapan penilaian lengkap (*full assessment*).

Berdasarkan tinjauan dokumen, data, dan informasi yang tersedia pada **Sub Bab 4.1**, PT JBP telah memberikan informasi secara lengkap untuk memverifikasi 4 prasyarat Uji Tuntas dan dinilai telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya (tahap studi pemerikasan awal) dalam pelaksanaan penilaian HCV. Hal-hal yang perlu diverifikasi pada tahapan studi pemerikasan awal adalah verifikasi lapangan atas komitmen perlindungan lingkungan dan sosial, komitmen untuk tidak melakukan pembukaan lahan, dan verifikasi kepada masyarakat atas persetujuan penilaian HCV di unit manajemen PT JBP.

5 Studi Pemeriksaan Awal

5.1 Rangkuman Kegiatan Studi Pemeriksaan Awal

Rangkaian kegiatan studi pemeriksaan awal terdiri dari (i) pengumpulan informasi, (ii) kunjungan lapangan dan pengecekan awal tutupan lahan hasil *desktop study*, (iii) konsultasi awal dengan perwakilan masyarakat dan stakeholder kunci (pemerintah/LSM/akademisi), dan (iv) menyusun jadwal, komposisi tim, dan fasilitas pendukung untuk penilaian lengkap (**Tabel 5**). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memahami konteks area lanskap, menetapkan batas *Area of Interest*, dan identifikasi awal atas potensi keberadaan HCV.

Tabel 5. Ringkasan deskripsi kegiatan pada studi pemeriksaan awal

Kegiatan	Deskripsi	Waktu
Pengumpulan informasi	<i>Opening Meeting</i> dilakukan di Kantor PT JBP	18 Agustus 2022
Kunjungan lapangan dan pengecekan awal tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi tutupan lahan di areal unit manajemen • Identifikasi fitur kunci biodiversity: survei tutupan vegetasi alami di unit manajemen dan area lanskap • Identifikasi fitur kunci jasa lingkungan: survei sungai di unit manajemen dan area lanskap • Identifikasi fitur kunci social: survei awal sebaran area pemukiman 	18 - 25 Agustus 2022
Konsultasi awal perwakilan masyarakat dan stakeholder kunci	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dan diskusi dengan pihak Kecamatan Kumpeh • Wawancara dan diskusi dengan pihak Desa Jebus • Wawancara dan diskusi dengan pihak Desa Sungai Aur • Wawancara dan diskusi dengan pihak Desa Gedong Karya • Konfirmasi atas persetujuan pelaksanaan penilaian HCV kepada perwakilan Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya • Wawancara dan orientasi lapang di Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya • Mengatur jadwal pertemuan kegiatan pemetaan partisipatif dan <i>Focus Group Discussion</i> untuk penilaian lengkap 	18 - 25 Agustus 2022
<i>Closing Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun jadwal, komposisi tim, dan fasilitas pendukung survey lapangan pada penilaian lengkap 	25 Agustus 2022

Tahap Pertama | *Opening meeting* dihadiri tim penilai dan staf internal PT JBP (**Gambar 7**). *Opening meeting* dimulai dengan mempersentasikan tujuan kegiatan, memberikan gambaran dari hasil analisis data pada tahap pra-penilaian, dan menjelaskan mekanisme proses tahapan kegiatan penilaian HCV mulai tahap pra-penilaian hingga tahap pelaporan. Selanjutnya dilakukan *sharing* informasi, diskusi, pemetaan partisipatif, serta review dokumen yang tersedia di *site area*. *Opening meeting* diakhiri dengan menyepakati jadwal kegiatan, pendamping lapangan, transportasi, dan akomodasi. Hal ini perlu dilakukan agar tim penilai dan staf PT JBP memiliki persamaan persepsi dan frekuensi dalam melakukan kegiatan penilaian HCV hingga selesai.

Sharing informasi, diskusi, dan pemetaan partisipatif dilakukan untuk menggali informasi dasar dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan PT JBP. Beberapa informasi dasar yang

didiskusikan seperti (i) kondisi terkini mengenai pemanfaatan lahan baik oleh perusahaan maupun masyarakat, (ii) sungai yang berada di unit manajemen dan sekitarnya, (iii) tutupan lahan alami (seperti hutan dan belukar) yang tersisa saat ini di unit manajemen, (iv) desa-desa yang berdampingan, (v) rencana alokasi area HCV, dan (iv) perusahaan-perusahaan sekitar PT JBP.



Gambar 7. Kegiatan *opening meeting* dan diskusi dengan manajemen PT JBP

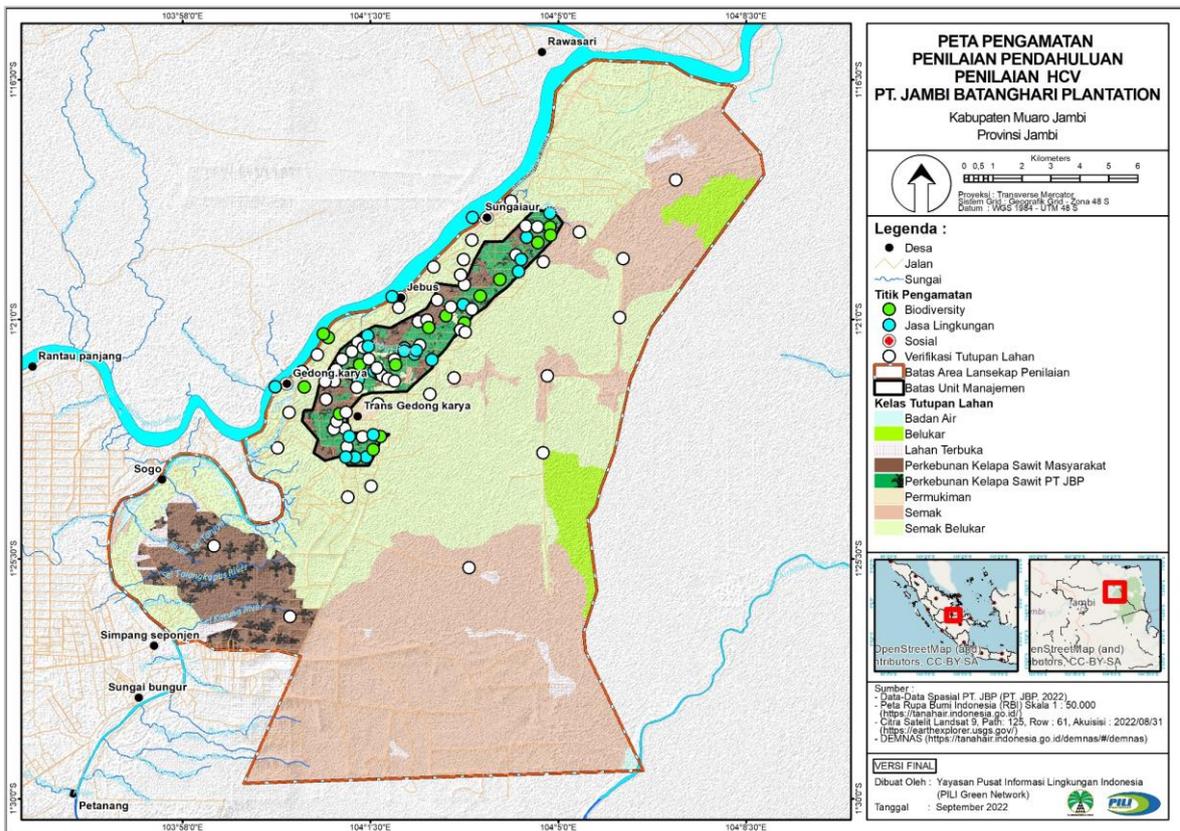
Tahap Kedua | Kegiatan kunjungan lapangan terdiri dari (i) konsultasi awal kepada perwakilan masyarakat, (ii) pengecekan tutupan lahan awal, dan (iii) pengecekan area-area yang memiliki fitur penting biodiversity, lingkungan, dan sosial.

Tahap studi pemeriksaan awal menghasilkan titik kunjungan lapangan sebanyak 81 titik yang terdiri dari 19 titik survey biodiversity, 22 titik survey lingkungan, 3 titik survey sosial, dan 37 titik verifikasi tutupan lahan (**Gambar 8**). Saat survey biodiversity dan survey lingkungan dilakukan juga verifikasi tutupan lahan sehingga total titik verifikasi tutupan lahan adalah 77 titik. Seluruh titik kunjungan lapangan tersebut akan digunakan untuk memvalidasi tutupan lahan awal sehingga menghasilkan tutupan lahan akhir (*lihat Bab 6.6*).

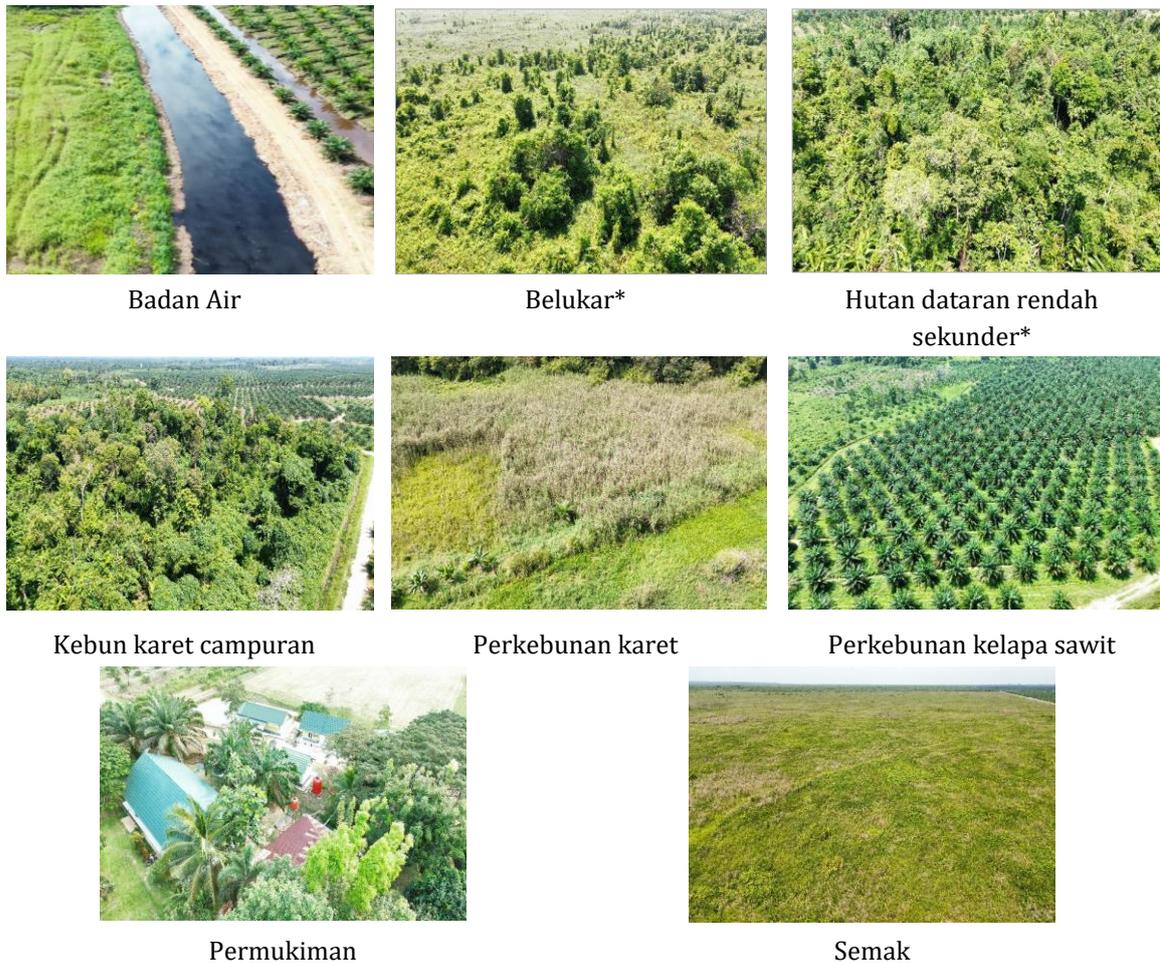
Ringkasan Pengecekan Tutupan Lahan Awal

Berdasarkan hasil verifikasi tutupan lahan, teridentifikasi enam tutupan lahan di unit manajemen dan area lanskap yaitu (i) badan air, (ii) kebun karet campuran, (iii) perkebunan karet, (iv) perkebunan kelapa sawit, dan (v) semak (*lihat Gambar 9*). Studi pemeriksaan awal menunjukkan sudah tidak terdapat vegetasi alami di unit manajemen. Seluruh area di unit manajemen telah dimanfaatkan dan digunakan oleh PT JBP dan masyarakat untuk keperluan perkebunan dan berladang. Namun demikian, masih dijumpai tutupan lahan alami di AOI berupa tutupan lahan hutan dataran rendah sekunder. Luas dan lokasi tutupan lahan hutan dataran rendah sekunder kerapatan rendah akan dibahas pada **Sub Bab 6.6**.

Tutupan lahan dominan di area penilaian adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh PT JBP maupun secara individu oleh masyarakat. Aksesibilitas terhadap area tersebut sudah terbuka dengan jaringan jalan cukup baik menuju ke area kebun dan pemukiman membuat pemanfaatan sumber daya lahan dapat dilakukan dengan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa area penilaian bukan merupakan daerah yang terisolir.



Gambar 8. Lokasi kunjungan lapangan dan desa pada tahap studi pemeriksaan awal



Note:* Tutupan lahan di luar unit manajemen
Gambar 9. Tipe tutupan lahan yang terdapat di unit manajemen dan areal lanskap

Ringkasan Pengecekan Area yang memiliki fitur biodiversity dan lingkungan

Area yang memiliki fitur penting biodiversity tidak ditemukan di unit manajemen, hal ini disebabkan seluruh area di unit manajemen telah dimanfaatkan oleh PT JBP dan masyarakat sebagai perkebunan atau ladang. Namun demikian, pada area lanskap masih ditemukan tutupan lahan alami berupa tutupan hutan dataran rendah sekunder dan belukar dengan kondisi yang sudah sangat terganggu (*lihat Gambar 9*). Kedua tutupan lahan alami ini pernah mengalami gangguan berupa kebakaran lahan pada tahun 2015 yang membuat di sekitar tutupan lahan alami tersebut bertutupan semak. Kedua tutupan lahan alami tersebut berada pada ekosistem penting dengan dengan status terancam (HCV Toolkit Indonesia, 2008) berupa ekosistem gambut.

Terkait spesies RTE, hasil pengecekan pada tahap studi pemeriksaan awal dijumpai beberapa spesies RTE Fauna (**Gambar 10**) seperti lutung kelabu (*Trachypithecus cristatus*) dan elang ular (*Spilornis cheela*). Sedangkan spesies RTE Flora pada tahap studi pemeriksaan awal belum teridentifikasi. Seluruh spesies RTE ini akan diperdalam pada tahap penilaian lengkap.

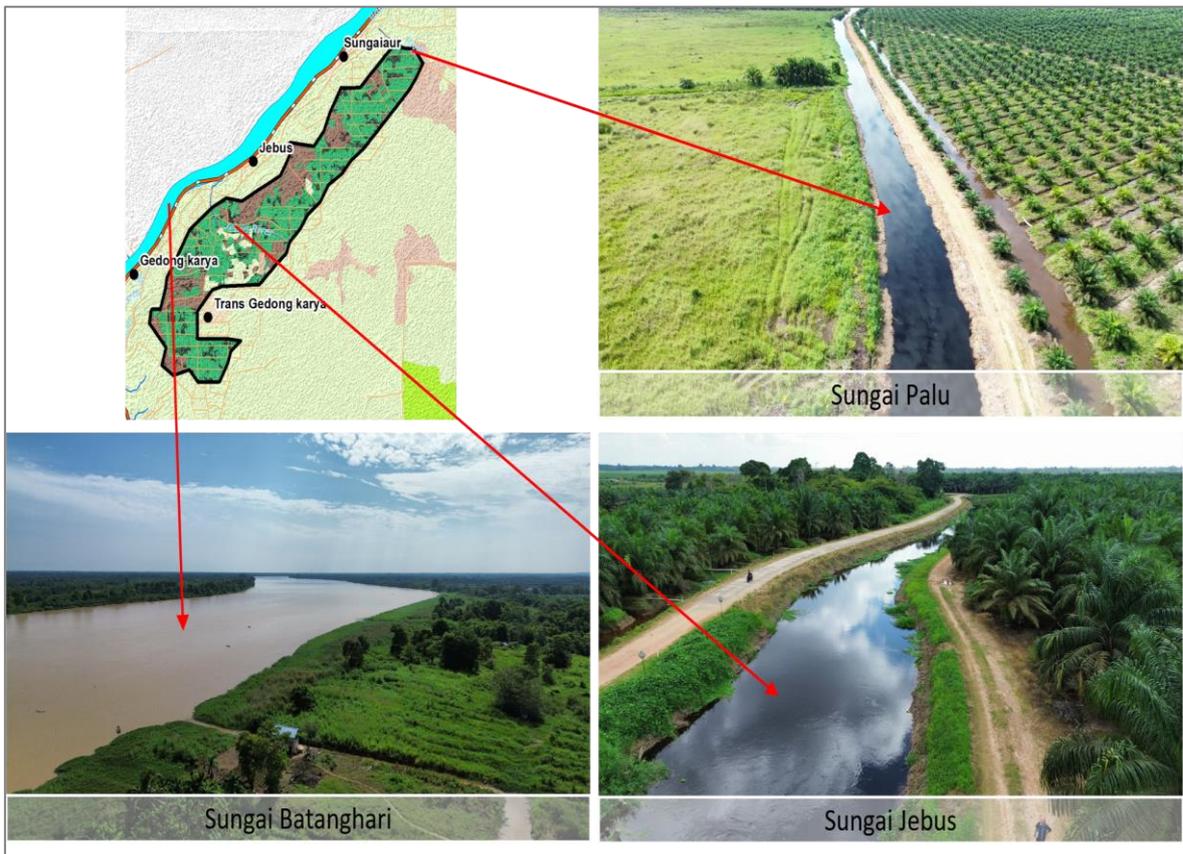


Gambar 10. Temuan spesies RTE Lutung (kiri) dan Elang Ular Bido (kanan)

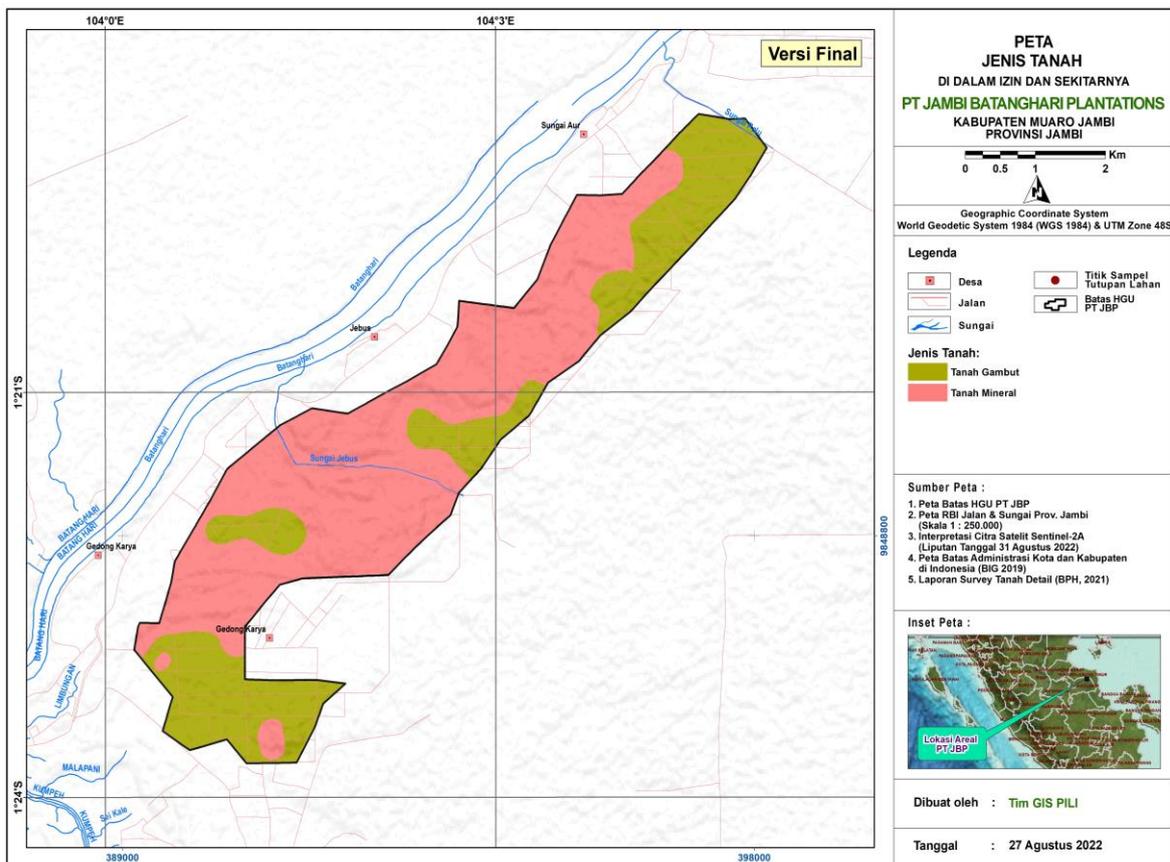
Area yang memiliki fitur penting jasa lingkungan di area penilaian berupa area Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan gambut. Unit manajemen dan area lanskap berada pada topografi dominan datar (0-50 mdpl) dan kelereng dominan <8%, serta tidak dijumpai kelereng >40% (*lihat Sub Bab 6.2*).

Area penilaian terletak di DAS Batanghari dengan 3 Sub-DAS utama yaitu Sub-DAS Sungai Palu/Sungai Simpang, Sub-DAS Sungai Jebus, dan Sub-DAS Sungai Buaya Besar (**Gambar 11**). Sub-DAS Sungai Palu dan Sub-DAS Sungai Jebus berada di unit manajemen sedangkan Sub-DAS Sungai Talangkapas dan Sub-DAS Sungai Bungur berada pada areal lanskap.

Lahan gambut teridentifikasi di unit manajemen dan area lanskap. Berdasarkan laporan survey tanah detail dan inventarisasi gambut (BPH, 2021), terdapat dua jenis tanah di areal kajian yaitu tanah mineral dan tanah gambut (**Gambar 12**). Tanah gambut yang berada di unit manajemen telah tertanam kelapa sawit dan dikelola secara *best management practice* (BMP). Berdasarkan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), unit manajemen berada pada KHG Sungai Batanghari – Sungai Air Hitam Laut (*lihat Sub Bab 6.2*).



Gambar 11. Area-area yang memiliki fitur jasa lingkungan berupa sungai dan sempadannya



Gambar 12. Area-area yang memiliki fitur jasa lingkungan berupa lahan gambut

Ringkasan Pengecekan Area yang memiliki fitur sosial dan budaya

Kunjungan lapangan sosial pada tahap studi pemeriksaan awal dilakukan dengan pertemuan kepada Instansi Kecamatan dan Desa. Tujuan pertemuan dengan instansi Kecamatan dan pihak desa untuk (i) memberikan penjelasan mengenai tahapan penilaian HCV seperti rencana kegiatan studi pemeriksaan awal dan penilaian lengkap; (ii) memverifikasi sosialisasi awal yang telah dilakukan PT JBP terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit; (iii) memverifikasi perizinan yang telah dilakukan oleh PT JBP terkait penilaian HCV, dan (iv) mengidentifikasi area-area yang penting bagi masyarakat, seperti sumber air masyarakat, pemanfaatan lahan oleh masyarakat (kebun/ladang), dan keberadaan makam/kuburan tua yang memiliki sejarah. Selain itu, pada tahap studi pemeriksaan awal dilakukan juga konsultasi dan kunjungan sosial kepada *stakeholder* (yang relevan) pada tingkat Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi. Seluruh daftar konsultasi dan hasil wawancara pada tahap studi pemeriksaan awal tersaji pada **Tabel 7**.

Hasil wawancara dan konsultasi dengan instansi pihak desa diperoleh “Ringkasan kronologis pemanfaatan lahan dan pembangunan perkebunan PT JBP yang disajikan pada **Tabel 6**. Selain itu, diperoleh beberapa informasi area yang memiliki fitur penting sosial berupa sungai yang dimanfaatkan untuk mencari ikan (*lihat Gambar 11*).

Tabel 6. Ringkasan kronologis pemanfaatan lahan dan pembangunan Kebun PT JBP

Tahun	Ringkasan Kronologi
<1980	Masyarakat setempat telah lama tinggal di sekitar PT JBP dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Desa tertua merupakan Desa Sungai Aur yang berdiri sebelum tahun 1980. Sedangkan Desa Jebus dan Desa Gedong Karya merupakan pemekaran dari Desa Sungai Aur. Masyarakat telah memanfaatkan lahan PT JBP dan sekitarnya secara tradisional dan telah turun menurun. Saat itu perekonomian masyarakat ditopang dari sector jual beli kayu yang di ambil dari hutan yang ada di sekitar konsesi PT JBP.
1980	Hadir perusahaan HPH di sekitar Desa Sungai Aur yaitu PT Putra Duta Indah Wood (PT PDI sesuai SK Kehutanan No. 269/Menhut-II/1980). Masyarakat mulai bekerja di perusahaan HPH tersebut, PT PDI beroperasi tidak terlalu lama, hanya periode 1980-1984. Hal ini disebabkan, area-area hutan telah diikuasai dan dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan berladang dan aktifitas pengambilan kayu. Sehingga potensi kayu yang akan diambil oleh Perusahaan PT PDI sangat sedikit yang mempengaruhi masa operasi perusahaan tersebut.
1980-1995	Masyarakat secara aktif melakukan perladangan dan pemanfaatan pengambilan kayu pada hutan-hutan yang tersisa disekitar desa.
1996	Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rencana program transmigrasi. Langkah awal yang dilakukan adalah pembangunan kanal-kanal utama yang bertujuan untuk pengeringan lahan. Pembangunan kanal-kanal ini berlangsung dan sukses pada tahun 1996.
1998	Terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan ini menghilangkan area-area bertutupan lahan alami dan menjadi lahan terbuka. Pada tahun ini perekonomian masyarakat mengalami penurunan, disebabkan sumber kayu yang sudah hilang atau langka. Perekonomian masyarakat bergeser menjadi sektor pertanian dengan komoditi karet,
1999	Pemerintah Provinsi Jambi mulai program transmigrasi. Pada tahun ini masyarakat dari Jawa mulai berdatangan dan menempati area-area yang saat ini menjadi Desa Jebus. Aktifitas berladang semakin aktif dengan datangnya masyarakat transmigrasi, dimana persawahan mulai aktif di sekitar-sekitar desa.
2004	Pemerintah Provinsi Jambi melanjutkan program transmigrasi. Hal yang sama pada tahun 1999, masyarakat dari Jawa mulai berdatangan dan menempati area-area yang saat ini menjadi Desa Gedong Karya. Aktifitas berladang semakin meluas dengan datangnya

Tahun	Ringkasan Kronologi
	masyarakat transmigrasi, dimana persawahan semakin luas yang berada di sekitar-sekitar desa.
2008	PT JBP memperoleh Izin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 589 Tahun 2008 dengan luas 2.700 ha. Selanjutnya, pada tahun 2009, PT JBP melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sosialisasi kepada masyarakat lokal di desa Jebus, Gedong Karya dan Sungai Aur mengenai pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun yang sama, PT JBP melaksanakan Kompensasi Lahan (<i>Ganti Rugi Tanam Tumbuh - GRTT</i>) dan pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.
2010	PT JBP melakukan pembukaan lahan perdana pada area-area yang telah diberikan kompensasi lahan. Pada saat yang sama masyarakat juga melakukan pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada lahan-lahan yang tidak diberikan atau dilepaskan ke PT JBP. Pembukaan lahan oleh masyarakat tersebut semakin meluas hingga tahun 2014 dan sistem pembukaan lahan masyarakat mengikuti pola pembukaan lahan atau di sekitar pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT JBP. Masyarakat memanfaatkan akses berupa jalan yang telah dibuka atau dibuat PT JBP untuk membuka lahan guna membangun perkebunan kelapa sawit masyarakat. Pembukaan lahan yang dilakukan PT JBP berlangsung pada Januari 2010 hingga Maret 2012.
2018	PT JBP di <i>takeover</i> oleh PT Nilam Surya Jaya. Perubahan manajemen pun terjadi, dimana seluruh manajemen baru dikelola oleh PT Nilam Surya Jaya selaku <i>holding</i> dari PT JBP.
2021	PT JBP melakukan survei tanah detail dan inventarisasi gambut.
2022	PT JBP melakukan Penilaian HCV, SIA dan LUCA.

Tahap Ketiga | *Closing meeting* dilakukan bersama staf internal PT JBP dengan mempresentasikan hasil-hasil studi pemeriksaan awal dan kunjungan lapangan di unit manajemen dan area lanskap (*Berita Acara Studi Pemeriksaan Awal tersaji pada Lampiran 4*). Selain itu, memberikan rencana kegiatan tahapan penilaian lengkap. Hasil studi pemeriksaan awal menyimpulkan beberapa temuan yang akan diperdalam pada tahap penilaian lengkap, yaitu: HCV1 - keberadaan spesies RTE; HCV2 - bentang alam di sekitar unit manajemen; HCV3 - keberadaan ekosistem penting dengan status terancam; HCV4 - keberadaan sungai dan area sempadannya dan lahan gambut; HCV5 - keberadaan sungai sebagai sumber air masyarakat dan kebutuhan mencari ikan. Untuk HCV6 – area/makam keramat belum teridentifikasi pada kunjungan awal. Selain itu, hasil kunjungan awal menyimpulkan empat syarat pada tahap pra-penilaian telah terpenuhi, sehingga penilaian HCV dapat dilanjutkan pada tahap penilaian lengkap.



Gambar 13. Kegiatan *closing meeting* dan foto bersama dengan manajemen PT JBP

5.2 Daftar Konsultasi

Pada tahapan studi pemeriksaan awal telah dilakukan konsultasi kepada beberapa stakeholder kunci untuk mengumpulkan isu penting terkait substansi penilaian. Pemilihan para pihak yang menjadi nara sumber dilatarbelakangi oleh keterkaitan aktivitas dan perhatian utama para pihak tersebut terhadap area penilaian dan potensi elemen HCV. Gambaran kegiatan konsultasi pada tahapan studi pemeriksaan awal tersaji pada **Lampiran 4**.

Tabel 7. Ringkasan hasil konsultasi awal pada tahapan studi pemeriksaan awal

Nama	Peran	Organisasi/ Kelompok Sosial	Informasi/Perhatian Utama/ Rekomendasi
Krisna	Camat	Pemerintah Kecamatan Kumpeh	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kumpeh adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Muaro Jambi. • Terdapat 16 Desa di Kecamatan Kumpeh. • Mayoritas masyarakat beragama islam. Terdapat 30 masjid dan 47 mushola. • Terdapat beberapa perusahaan di Kecamatan Kumpeh, diantaranya PT Jambi Batanghari Plantation (JBP), PT Kayu Intan Permata Abadi (KIPA), dan ada beberapa lainnya. • Dahulu ada perusahaan HPH di sekitar Kecamatan Kumpeh yaitu PT Putra Duta Indah Wood yang beroperasi pada tahun 1980-1984. • Kebakaran lahan dalam skala besar pernah terjadi di Kecamatan Kumpeh yaitu pada tahun 1997-1998, tahun 2004, dan tahun 2015. Kebakaran ini menghilangkan area-area berhutan dan saat ini tersisa area-area semak atau ilalang. Sebagian besar area terbakar berada di dalam Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Nasional. Sedangkan kebakaran disekitar desa cenderung skala kecil. • Desa Sungai Aur merupakan desa tertua. Sedangkan Desa Jebus dan Desa Gedong Karya merupakan desa pemekaran dari Desa Sungai Aur. • Masyarakat sangat terbantu dengan adanya PT JBP, karena mampu menyerap 99% tenaga kerja dari semua usia. • Sektor perekonomian masyarakat saat ini tergantung pada perkebunan kelapa sawit dan karet. Namun secara persentase perekonomian dari kelapa sawit jauh lebih besar dari karet. Masyarakat pun sudah banyak yang mengkonversi lahan dari karet menjadi kelapa sawit. • Masyarakat juga belajar untuk mengelola perkebunan kelapa sawit saat bekerja di Perusahaan. • Perbaikan infrastruktur juga tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah, bantuan perusahaan sangat terlihat. • Harapannya kedepan hubungan masyarakat dan perusahaan dapat terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat terus meningkat. • Saat ini sedang digalakkan program ketahanan pangan dengan di dorong Bumdes melalui pendirian Bumdes Mart. Bumdes Mart ini bekerja sama dengan PT JBP terkait pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan PT JBP.
Tamrin	Kepala Desa	Pemerintah Desa Gedong Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen PT Jambi Batanghari Plantation telah memberikan sosialisasi dan memberikan surat permohonan izin Penilaian NKT pada tanggal 15 Juni 2022. • Pihak Desa Gedong Karya telah memberikan surat tanggapan atas permohonan perizinan Penilaian

Nama	Peran	Organisasi/ Kelompok Sosial	Informasi/Perhatian Utama/ Rekomendasi
			<p>NKT PT Jambi Batanghari Plantation pada tanggal 24 Juni 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desa Gedong Karya terdiri dari 5 dusun dan 10 Rukun Tetangga (RT). • Desa Gedong Karya merupakan yang terbentuk dari Program Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan sekitar tahun 2004. • Jumlah penduduk: Laki-laki 611 jiwa, Perempuan 617 jiwa, Total 1228 jiwa. • Suku: Melayu (80%), Jawa (15%) dan suku lainnya (5%). • Mayoritas beragama Islam. Tempat ibadah yang tersedia yaitu 2 masjid dan 4 mushola. • Mata pencaharian: mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun, karyawan perusahaan, dan lainnya sebagai, wiraswasta, PNS, buruh tani, bidan, dan lain-lain. • Perusahaan yang ada di wilayah desa yaitu PT Jambi Batanghari Plantation (JBP). • Sungai yang masih dimanfaatkan yaitu Sungai Batanghari, Sungai Rantai Kecil dan Sungai Rantai Besar. • Sumber air yang digunakan untuk mandi, cuci, kakus bersumber dari Sungai Batanghari dan adapula yang sudah memiliki sumur pribadi. Air yang dikonsumsi juga bersumber dari Sungai Batanghari dan sumur yang mereka miliki. • Mayoritas masyarakat memiliki lahan kelapa sawit/kebun campuran yang berisi durian, jengkol, kopi, pinang, dll yang dikelola secara mandiri. • Pada areal kebun PT JBP berbatasan dengan lahan masyarakat dan Taman Hutan Raya (TAHURA) Tanjung. • Meskipun Desa Gedong Karya berbatasan dengan TAHURA Tanjung dan dekat dengan Taman Nasional Berbak Sembilang, tapi aktivitas perburuan dan penebangan kayu ilegal sudah tidak ditemukan. • Terdapat sawah tadah hujan, namun bukan menjadi penghasilan utama. • Tidak terdapat area makam keramat atau tempat yang disakralkan di Desa Gedong Karya. • Tidak ada TPU (tempat pemakaman umum) di areal PT JBP. TPU saat ini berada di sekitar Desa Gedong Karya. • Terdapat puskesmas bukan rawat inap di Desa Gedong Karya. • Desa Gedong Karya masih rawan banjir. • Pemerintah Desa Gedong Karya mengizinkan tim PILI untuk melakukan Penilaian HCV di areal HGU PT JBP dan sekitarnya.
Jamaludin	Kepala Desa	Pemerintah Desa Jebus	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen PT Jambi Batanghari Plantation telah memberikan sosialisasi dan memberikan surat permohonan izin Penilaian NKT pada tanggal 15 Juni 2022. • Pihak Desa Jebus telah memberikan surat tanggapan atas permohonan perizinan Penilaian NKT PT Jambi Batanghari Plantation pada tanggal 24 Juni 2022. • Desa Jebus terdiri dari 3 dusun dan 6 Rukun Tetangga (RT).

Nama	Peran	Organisasi/ Kelompok Sosial	Informasi/Perhatian Utama/ Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Desa Jebus merupakan yang terbentuk dari Program Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan sekitar tahun 1999. • Jumlah penduduk: Laki-laki 333 jiwa, Perempuan 338 jiwa, Total 671 jiwa. • Suku: Melayu (80%), Jawa (15%) dan suku lainnya (5%). • Mayoritas beragama Islam. Tempat ibadah yang tersedia yaitu 1 masjid dan 2 mushola. • Mata pencaharian: mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun, karyawan perusahaan, dan lainnya sebagai, wiraswasta, PNS, buruh tani, dan lain-lain. • Perusahaan yang ada di wilayah desa yaitu PT Jambi Batanghari Plantation (JBP). • Sungai yang masih dimanfaatkan yaitu Sungai Jebus dan Sungai Palu. Sungai ini dimanfaatkan untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. • Sumber air yang digunakan untuk mandi, cuci, kakus bersumber dari sumur pribadi. Air yang dikonsumsi juga bersumber dari sumur yang mereka miliki. • Mayoritas masyarakat memiliki lahan kelapa sawit/kebun campuran yang berisi durian, jengkol, kopi, pinang, dll yang dikelola secara mandiri. • Dahulu terdapat sawah tadah hujan, namun saat ini lahan tersebut sudah berubah menjadi kebun sawit, dan hanya sekitar 5% masyarakat yang masih menanam padi saat musim penghujan. • Pada areal kebun PT JBP berbatasan dengan lahan masyarakat dan TAHURA Tanjung. • Meskipun Desa Jebus berbatasan dengan TAHURA Tanjung dan dekat dengan Taman Nasional Berbak Sembilang, tapi aktivitas perburuan dan penebangan kayu ilegal sudah tidak ditemukan. • Terdapat aktivitas perburuan namun bukan dilakukan masyarakat Desa Jebus. • Tidak terdapat lahan komunal • Tidak terdapat area makam keramat atau tempat yang disakralkan di Desa Jebus. • Tidak ada TPU (tempat pemakaman umum) di areal PT JBP. TPU saat ini berada di sekitar Desa Jebus. • Tidak ada Puskesmas, masyarakat akan berobat ke Puskesmas di Desa Gedong Karya. • Salah satu desa rawan banjir. • Pemerintah Desa Jebus mengizinkan tim PILI untuk melakukan Penilaian HCV di areal HGU PT JBP dan sekitarnya.
Suwandi	Kepala Desa	Pemerintah Desa Sungai Aur	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen PT Jambi Batanghari Plantation telah memberikan sosialisasi dan memberikan surat permohonan izin Penilaian NKT pada tanggal 15 Juni 2022. • Pihak Desa Sungai Aur telah memberikan surat tanggapan atas permohonan perizinan Penilaian NKT PT Jambi Batanghari Plantation pada tanggal 22 Juni 2022. • Desa Sungai Aur terdiri dari 3 dusun dan 9 Rukun Tetangga (RT). • Desa Sungai Aur merupakan desa tua yang berdiri sebelum tahun 1980.

Nama	Peran	Organisasi/ Kelompok Sosial	Informasi/Perhatian Utama/ Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk: Laki-laki 926 jiwa, Perempuan 784 jiwa, Total 1710 jiwa. • Suku: Melayu (75%), Jawa (15%) dan suku lainnya (10%). • Mayoritas beragama Islam. Tempat ibadah yang tersedia yaitu 2 masjid dan 5 mushola. • Mata pencaharian: mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun, karyawan perusahaan, dan lainnya sebagai wiraswasta, PNS, buruh tani, bidan dan lain-lain. • Dahulu mata pencaharian masyarakat bersumber dari jual beli kayu, saat itu sumber kayu dari hutan masih berlimpah. Jual beli kayu berhenti sejak ada kebakaran besar pada tahun 1997-1998 yang membuat hutan-hutan yang ada terbakar dalam skala besar. • Perusahaan yang ada di wilayah desa yaitu PT Jambi Batanghari Plantation (JBP). • Sungai yang masih dimanfaatkan yaitu Sungai Batanghari, Sungai Rantai Kecil, dan Sungai Palu. Sungai Batanghari dimanfaatkan untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga (konsumsi keluarga). Sedangkan sungai-sungai lain dimanfaatkan untuk mencari ikan namun tidak sebagai pemenuhan kebutuhan protein, karena sumber ikan cenderung sedikit jika dibandingkan dengan Sungai Batanghari. • Sumber air yang digunakan untuk mandi, cuci, kakus bersumber dari sumur pribadi dan Sungai Batanghari. Air yang dikonsumsi juga bersumber dari Sungai Batanghari dan sumur yang mereka miliki. • Mayoritas masyarakat memiliki lahan kelapa sawit/kebun campuran yang berisi durian, jengkol, kopi, pinang, dll yang dikelola secara mandiri. • Dahulu terdapat luasan sawah tadah hujan cukup besar namun akibat sering nya banjir hingga saat ini hanya sekitar 5% masyarakat yang masih menanam padi saat musim penghujan. • Pada areal kebun PT JBP berbatasan dengan lahan masyarakat dan TAHURA (Taman Hutan Raya) Tanjung. • Meskipun Desa Sungai Aur berbatasan dengan TAHURA Orang Kayo Hitam dan dekat dengan Taman Nasional Berbak Sembilang, tapi aktivitas perburuan dan penebangan kayu ilegal sudah tidak ditemukan. • Tidak terdapat lahan komunal • Tidak terdapat area makam keramat atau tempat yang disakralkan di Desa Jebus. • Tidak ada TPU (tempat pemakaman umum) di areal PT JBP. TPU saat ini berada di sekitar Desa Sungai Aur. • Terdapat 1 Puskesmas Pembantu (Pustu) bukan rawat inap. • Pemerintah Desa Sungai Aur mengizinkan tim PILI untuk melakukan Penilaian HCV di areal HGU PT JBP dan sekitarnya.
<ul style="list-style-type: none"> • Ratna Wati • Hariap 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan 	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi sudah sering melaksanakan pemantauan ke area kebun PT JBP.

Nama	Peran	Organisasi/ Kelompok Sosial	Informasi/Perhatian Utama/ Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Staf DLH 		<ul style="list-style-type: none"> • Area HGU PT JBP berbatasan dengan Tahura Orang Kayo Hitam sekitar Tanjung • Dengan demikian diharapkan agar pihak PT JBP menjaga aliran air sungainya dari berbagai pencemaran. • Sempadan PT JBP dengan sungai besar di sekitar batas, memiliki sempadan selebar 50 meter. • Pada area-area sempadan tidak melakukan penyemprotan dengan berbagai pupuk kimia (<i>agrochemical spraying</i>) • Agar menjaga aliran Sungai Jebus, terutama volume ketinggian muka air, karena berpengaruh pada area Tahura yang membutuhkan banyak air agar tidak kering. • Mematuhi seluruh arahan DLH dalam menerapkan segala pengelolaan area mineralnya, juga yang utama area gambutnya, seperti dengan memasang "Data logger" sebagai pengontrol ketinggian muka air. Sekalian bila sudah ada bias dilaporkan ke DLH. • Laporan Data Logger sekalian diserahkan juga dengan Data Kebakaran Lahan. • Sampai saat ini PT JBP sudah tertib melaporkan setiap kegiatannya. • Revegetasi dan <i>Rewetting</i> di area gambut belum dievaluasi oleh DLH. • Khususnya Desa Gedong Karya restorasi gambut perlu dilakukan, juga menyusul Desa Jebus dan Sungai Aur. • Masyarakat di Desa Jebus pernah mengusulkan agar DLH membuatkan 'embung' di desa, sebaiknya bisa dibantu PT JBP. • Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT JBP sudah disosialisasikan juga ke DLH. • Saat ini Program 2R (Revegetasi dan Restorasi diusung DLH Muaro Jambi.)
<ul style="list-style-type: none"> • H. Amri T • Amirudin 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas • Seksi Perkebunan 	Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Muaro Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Target Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kab. Muaro Jambi adalah menjalin hubungan dengan para pengusaha perkebunan, seperti PT JBP salah satunya, di Kab. Muaro Jambi bias terjalin dengan baik. • Pendekatan dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, seperti pembelian buah dari petani yang belum terstandar, menyebabkan perusahaan enggan membelinya. • Dinas berusaha mengumpulkan data yang komprehensif mengenai perkebunan di Muaro Jambi. • Pengawasan terhadap kebun-kebun terjalin dengan baik. • PT JBP sudah kooperatif dengan Disbunak. • Penyediaan Grup WA untuk memfasilitasi koordinasi antar kebun dengan dinas. • Komunikasi yang baik antara Dinas dan Kebun menjadikannya banyak perusahaan dengan patuh memberikan laporannya.

Nama	Peran	Organisasi/ Kelompok Sosial	Informasi/Perhatian Utama/ Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan pra-sarana Tim Karhutla harus dilengkapi dengan peralatan memadai. • Empat hal utama bila mengadakan kunjungan ke lapangan adalah: Bertanya, Melihat, Mencatat dan Melapor. • Semua urusan teknis dilakukan oleh Kabid Disbunak. • Disbunak selalu mengawasi semua hal tentang kebun, misalnya menghadapi musim panas agar mempersiapkan sarprasnya. • Tenaga kerja di kebun sebaiknya menggunakan orang local, dalam hal ini PT. JBP mematuhi aturan tersebut dengan persentase mencapai 99,99% berasal dari tenaga local. • Kemitraan dengan masyarakat agar selalu diperhatikan dan dijaga.
Syafwa Turrahman	Kasi Budaya dan Pencagararan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupapten Muaro Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Cagar Budaya di Kabupaten Muaro Jambi dijabat oleh Kasi Budaya dan Pencagararan. • Belum lama ini (awal tahun 2023), telah terjadi pencurian benda-benda Cagar Budaya, yaitu pada area sungai dengan dalih menambang pasir/ sumber daya alam lainnya. • Bupati Muaro Jambi telah meminta pihak Budaya & Pencagararan untuk memberikan batas-batas area Cagar di sekitar sungai, untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar dan juga menghindari pencurian-pencurian selanjutnya. • Kegiatan-kegiatan penambangan, baik emas ataupun tambang lainnya, sedikit banyak tetap melirik barang-barang Cagar Budaya yang tersimpan di dasar-dasar sungai. • Sungai Batanghari menjadi salah satu area prioritas untuk penetapan Cagar Budaya. Dan saat ini, belum ada penetapan. Menurut informasi, di dasar sungai Batanghari masih terdapat benda-benda peninggalan sejarah yang belum teridentifikasi. • Sedangkan cagar budaya atau situs atau makam di Kecamatan Kumpeh belum teridentifikasi dan belum ada penetapan. Baru yang diusulkan adalah Sungai Batang Hari sebagai prioritas penetapan cagar budaya. • Sekarang di Muaro Jambi, penanganan Cagar Budaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) yang dulunya dikenal BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya). • Proses penetapan Kawasan/ area Cagar Budaya cukup Panjang dan berulang, yaitu diawali usulan dari Disdikbud Kab. Muaro Jambi → Dinas Provinsi → Pusat → Dinas Provinsi → Disdikbud Kab. Muaro Jambi. Baru dilakukan pengukuran area Bersama aparat dari Provinsi/ Pusat. • Pengelolaan selanjutnya langsung dikelola Provinsi dan segala kegiatan di dalamnya harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Provinsi.

Nama	Peran	Organisasi/ Kelompok Sosial	Informasi/Perhatian Utama/ Rekomendasi
Jefrianto	<ul style="list-style-type: none"> Polhut 	BKSDA Prov. Jambi	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2019, terjadi kebakaran lahan di Tahura hingga mencapai sungainya. Di area Pematang Raman masih terdapat satwa-satwa liar alami yang beragam. Sebaiknya konsultan membuat semacam proposal/laporan ke BKSDA tentang apa saja yang diinginkan dan diharapkan. Ada kemungkinan monyet ekor panjang di beberapa desa akan menjadi hama/ gangguan, seperti di Tanjung Jabung (bagian barat dan timur), Batanghari, WKS, Monyet ekorpanjang sudah menjadi hama bagi masyarakat. Bagaimana menanganinya, sementara BKSDA melarang untuk membunuhnya. Di Bahar, pernah tercatat ada serangan Monyet ekorpanjang, namun beberapa saat hilang, tetapi ternyata, masyarakat menyediakan makanannya, dan ketika makanan tidak ada lagi, maka monyet-monyet tersebut menyerbu ke kampung. Ada catatan di tahun 2018, bahwa Harimau sumatera pernah melintas ke beberapa area di sekitar Jambi hingga ke Banyu Asin, informasi ini didapatkan dari masyarakat. Namun setelah dikonfirmasi sepertinya bukan harimau dan tidak ada serangan atau konflik baik dengan masyarakat atau hewan peliharaan. Individu tersebut seperti "individu soliter" yang kebingungan harus bergerak kemana. Disekitar Kecamatan Kumpeh satwa yang masih ada hanya monyet ekor panjang, lutung, buaya, burung elang, planduk, dan babi hutan. Sedangkan keberadaan gajah dan harimau sudah tidak terdeteksi keberadaannya sejak kebakaran lahan tahun 1997-1998. Selain keberadaan, konflik satwa pun juga tidak ada.
Bambang Rosyids	<ul style="list-style-type: none"> Kabid UPTD Tahura Sekitar Tanjung 	UPTD Tahura Sekitar Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> Sebisa mungkin, laporan kajian ini harus bisa mengakomodir terhadap dua kepentingan (Tahura dan PT), yang secara fungsi memiliki pemanfaatan yang saling bertentangan. Satu sisi, Tahura sangat membutuhkan banyak air dan tetap menjaga agar area rawanya tetap basah, sementara pihak PT (Perkebunan) akan memanfaatkan air sebanyak-banyak untuk kepentingan di area kebunnya, dengan tetap menjaga tinggi muka air, agar area tidak terendam. HCV di Indonesia menurutnya tidak legal/ belum diterima di Indonesia (Pemerintah Indonesia), seperti halnya ISPO, agar memperhatikan bagaimana agar kajian bisa diterima pihak pemerintah. Kebakaran lahan di Tahura sering berulang terjadi, karena lahan gambut. Sedangkan dari Tahura sendiri memang memiliki keterbatasan baik personil maupun sarana untuk menanggulangi kebakaran lahan.

5.3 Gerbang PADIATAPA

Pada tahap studi pemeriksaan awal, tim penilai menyampaikan penjelasan tentang HCV dan informasi mengenai rangkaian tahapan penilaian HCV kepada perusahaan dan masyarakat. Penjelasan tentang HCV kepada perusahaan dan masyarakat melingkupi pengertian HCV, elemen kunci HCV, pengelolaan dan pemantauan area HCV, dan jadwal pelaksanaan penilaian lengkap. Selain itu, dalam konteks FPIC, tim penilai melakukan konfirmasi kepada masyarakat atas perizinan pelaksanaan penilaian HCV (*lihat BAB 4.1*).

Kesimpulan dari studi pemeriksaan awal dalam konteks FPIC yaitu perwakilan masyarakat melalui kepala desa memberikan izin untuk melakukan penilaian HCV (pemetaan partisipatif dan kunjungan lapangan), untuk pemetaan partisipatif harus dilakukan di tempat umum (dalam hal ini kantor desa), sehingga dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat bersedia ikut serta dalam penilaian lengkap bersama dengan tim penilai.

Bukti-bukti pertemuan sosialisasi dan kunjungan yang dilakukan tim penilai tersaji pada **Lampiran 4**. Terkait verifikasi empat pra-kondisi uji tuntas yang telah dinilai pada tahap pra-penilaian (**Bab 4**), tim penilai telah melakukan verifikasi pra-kondisi uji tuntas dengan cara penelusuran dokumen tambahan dan tinjauan dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa empat pra-kondisi uji tuntas telah terpenuhi. Berdasarkan hasil pra-penilaian (*lihat Bab 4*) dan studi pemeriksaan awal, dapat disimpulkan bahwa penilaian HCV dapat dilanjutkan ke tahap penilaian lengkap.

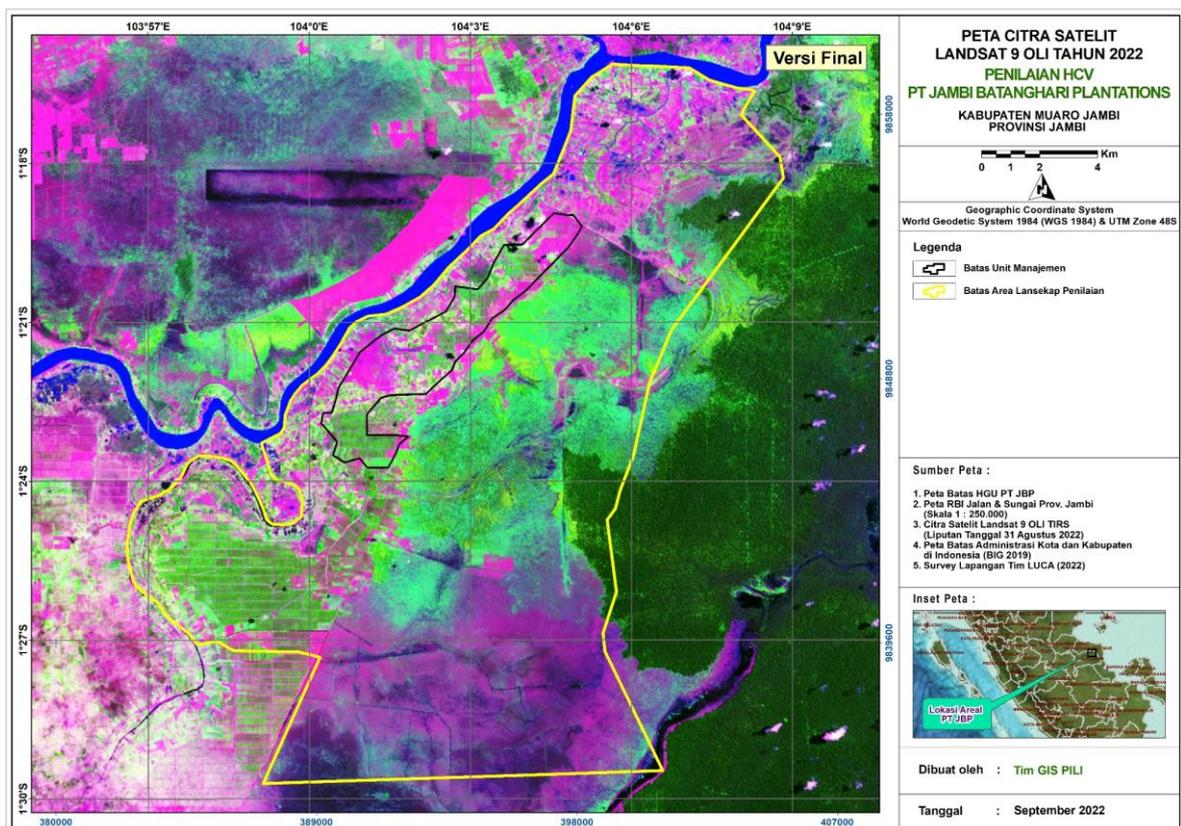
6 Deskripsi Area of Interest (AOI)

6.1 Batas AOI

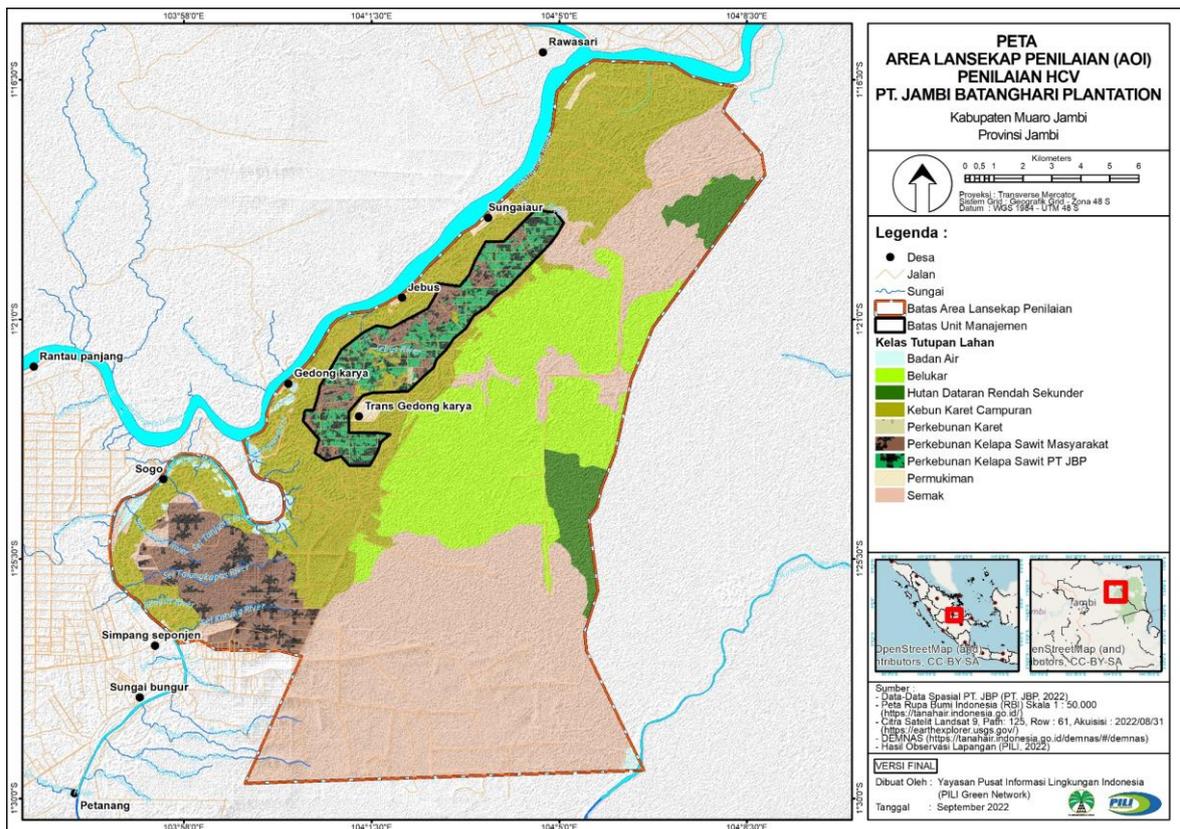
Batas Area of Interest (AOI)/area penilaian diperoleh dari agregasi batas-batas lanskap keanekaragaman hayati, hidrologi, dan sosial. Pada penilaian ini, batas AOI ditetapkan dengan mempertimbangkan batas DAS/Sub DAS; keberadaan ekosistem alami; penggunaan lahan di sekitar unit manajemen; serta tutupan lahan dan/atau lokasi yang berpotensi sebagai habitat kehidupan liar, terutama area yang memiliki konektivitas dengan unit manajemen. Berdasarkan kriteria tersebut, batas Sub DAS Sungai Simpang, Sub DAS Sungai Jebus, Sub DAS Sungai Buaya Besar, dan Sub DAS Sungai Kumpeh merupakan basis data yang digunakan untuk menentukan batas AOI (*lihat Gambar 19*). Selanjutnya, batas AOI disesuaikan dengan melihat keterhubungan dengan unit manajemen, dimana AOI di sebelah Utara, Timur, dan Selatan disesuaikan dengan menggunakan batas Taman Hutan Raya (TAHURA). Penyesuaian AOI ini agar mempermudah dalam penilaian dan penyusunan rekomendasi area HCV serta melihat konektivitas langsung dengan unit manajemen (**Gambar 14**).

Dalam konteks biodiversity, keberadaan tutupan lahan dengan vegetasi alami terdekat sudah termasuk di dalam AOI, yaitu fragmen hutan di bagian Timur dari unit manajemen (**Gambar 14**). Dalam konteks sosial, desa yang terdampak dari kegiatan operasional unit manajemen adalah yaitu Desa Sungai Aur, Desa Jebus, dan Desa Gedong Karya. Keterhubungan desa-desa tersebut sangat kuat dimana mayoritas pekerja PT JBP berasal dari ketiga desa tersebut.

Total luas AOI atau area penilaian mencakup 28,135.1 ha dengan berbagai kondisi penggunaan lahan dan tutupan lahan. Penggunaan lahan di AOI didominasi oleh lahan budidaya dengan tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dan kebun karet campuran (**Gambar 15**).



Gambar 14. Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 9 Akuisisi 31 Agustus 2022



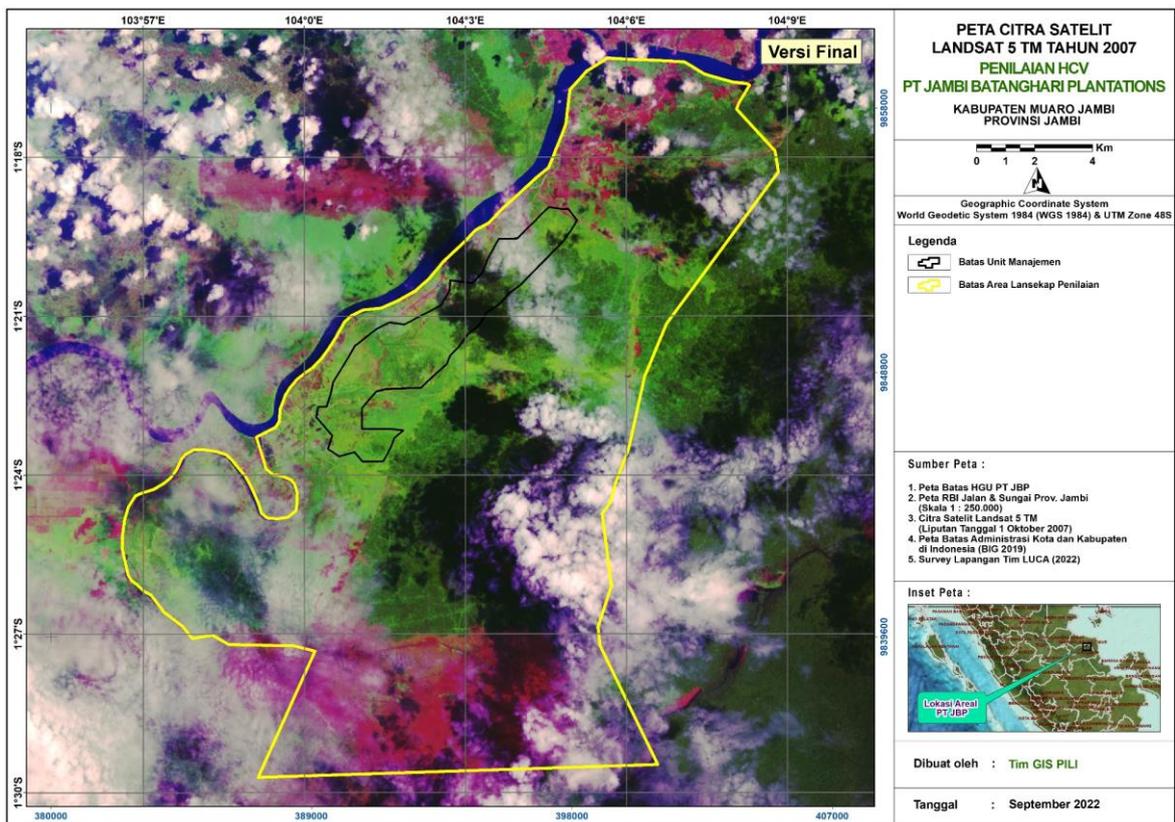
Gambar 15. Batas AOI penilaian HCV PT JBP

Batas AOI/area penilaian selanjutnya di overlay dengan citra satelit dan tutupan lahan berdasarkan beberapa cut-off, yaitu (i) tanggal perusahaan pertama kali memperoleh Izin Lokasi, (ii) tanggal pembukaan lahan pertama, dan (iii) tanggal ketika penilaian dilaksanakan. Sedangkan overlay citra satelit dan tutupan lahan berdasarkan cut-off tanggal skema sertifikasi tidak dilakukan, disebabkan perusahaan belum melalui sertifikasi. Saat penilaian ini dilakukan, PT JBP sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk serifikasi RSPO.

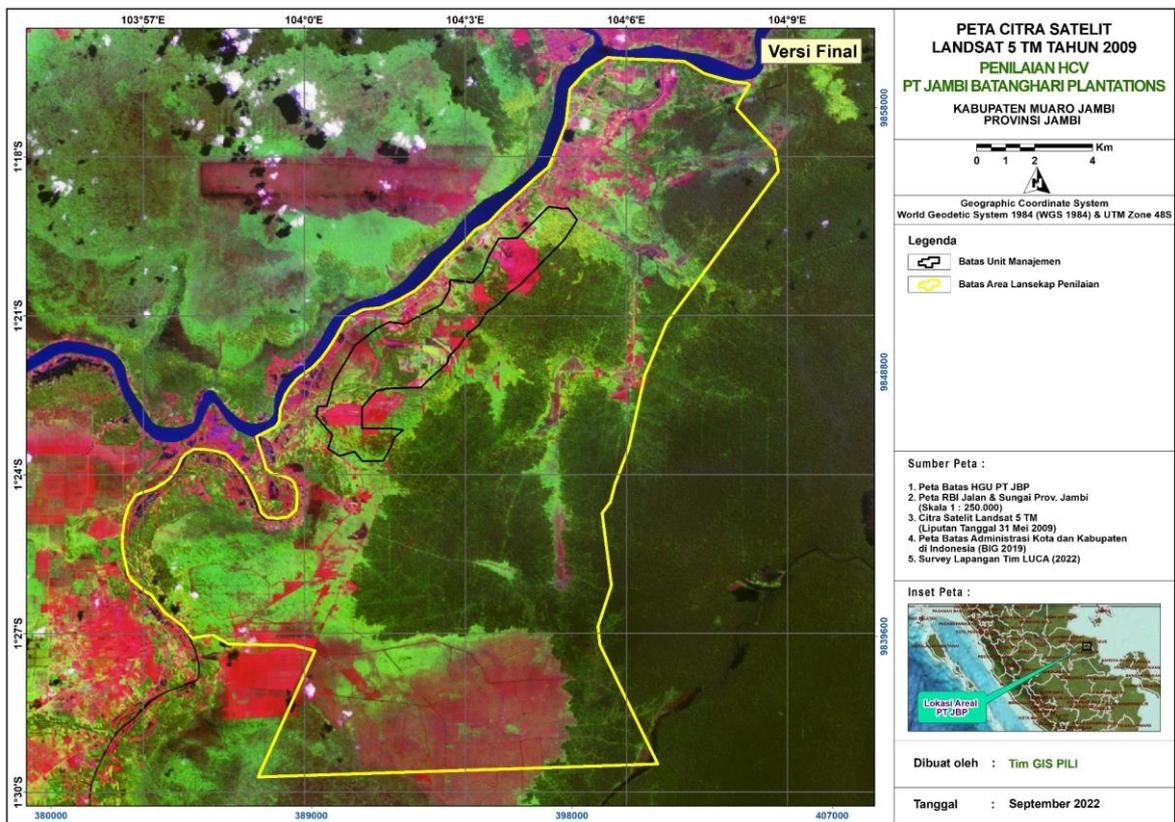
PT JBP memperoleh Izin Lokasi pertama tahun 2008 dan telah memperoleh HGU pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2009, PT JBP melakukan pembukaan lahan dan penanaman pertama kebun kelapa sawit. Citra satelit yang digunakan sebagai cut-off tanggal perusahaan pertama kali memperoleh izin adalah Landsat 5 TM tanggal akuisisi 1 Oktober 2007 (**Gambar 16**). Sedangkan citra satelit yang digunakan sebagai cut-off tanggal pembukaan lahan pertama adalah Landsat 5 TM tanggal akuisisi 31 Mei 2009 (**Gambar 17**).

Citra satelit yang digunakan sebagai cutoff penilaian HCV adalah Landsat 9 OLI TIRS dengan tanggal akuisisi 28 Juni 2022 dan 31 Agustus 2022. Citra satelit Landsat 9 OLI TIRS dengan tanggal akuisisi 28 Juni 2022 (*lihat Gambar 18*) digunakan sebagai citra satelit saat tahapan studi pemeriksaan awal, dan tanggal akuisisi 31 Agustus 2022 (*lihat Gambar 14*) digunakan sebagai citra satelit saat tahapan penilaian lengkap. Berdasarkan analisis tutupan lahan cut-off penilaian HCV (*lihat Gambar 15*), tutupan lahan dominan di unit manajemen berupa perkebunan kelapa sawit. Sedangkan tutupan lahan di area lanskap terdiri dari hutan dataran rendah sekunder, belukar, semak, dan kebun karet campuran.

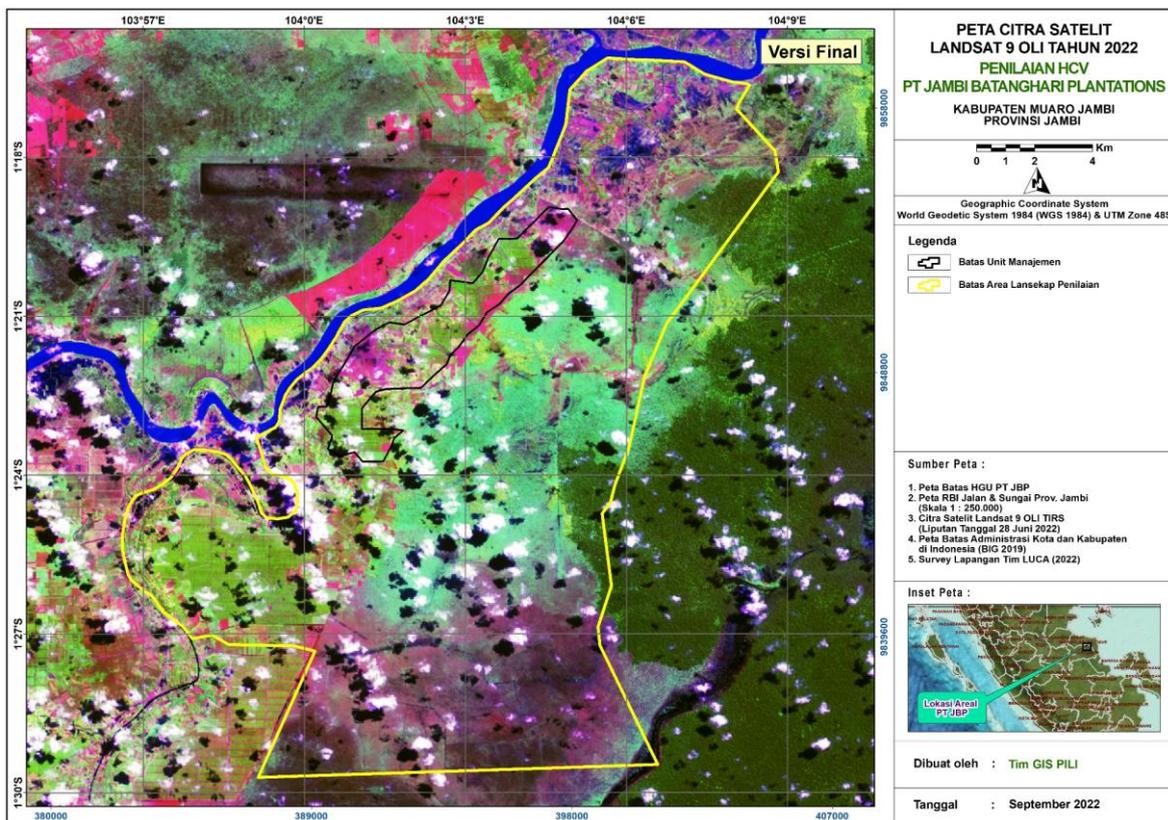
Terdapat dua fragmen hutan dengan area terpisah di sebelah Timur dari unit manajemen. Penjelasan selengkapnya mengenai penggunaan lahan dan tutupan lahan di AOI/area penilaian tersaji pada **Sub Bab 6.5** dan **Bab 6.6**.



Gambar 16. Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 5 TM Akuisisi 1 Oktober 2007



Gambar 17. Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 5 TM Akuisisi 31 Mei 2009



Gambar 18. Batas AOI terhadap citra satelit Landsat 9 OLI TIRS Akuisisi 28 Juni 2022

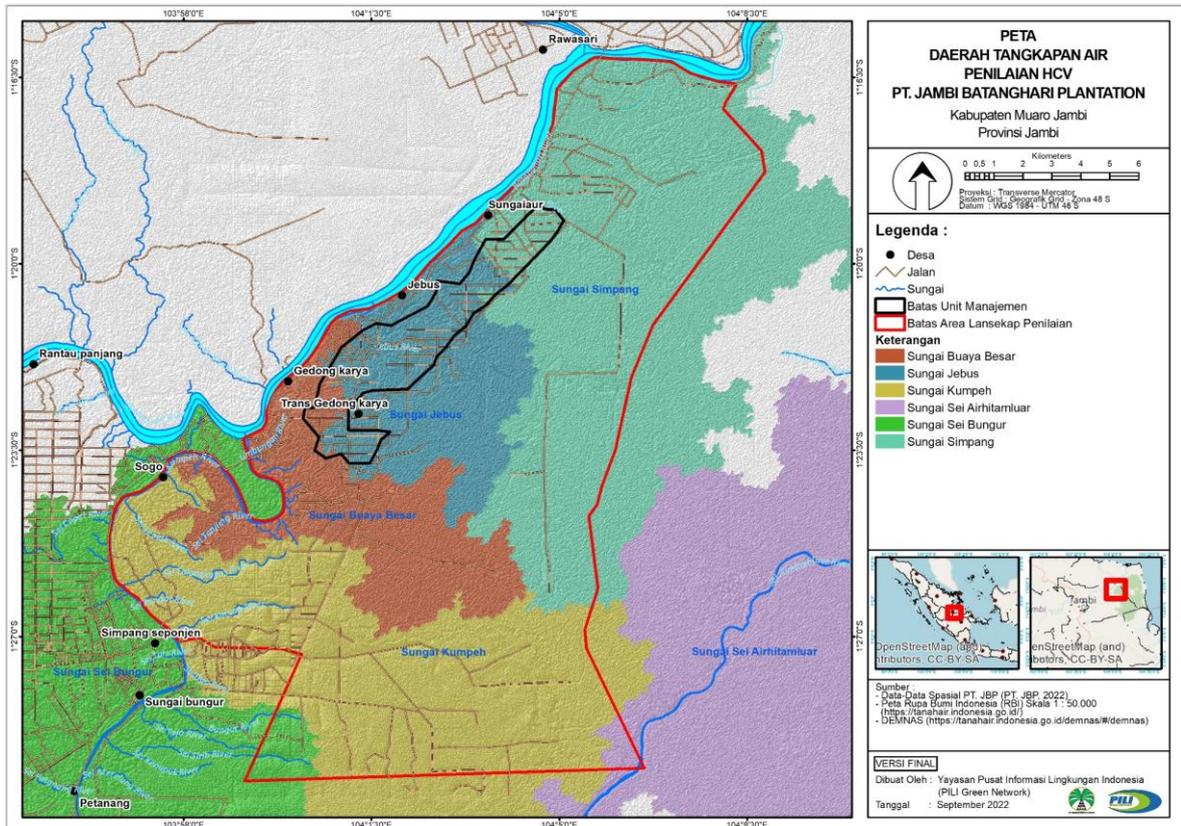
6.2 Karakteristik Fisik dan Lingkungan

Daerah Aliran Sungai (DAS) | DAS merupakan suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh topografi alami yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan menuju outlet sungai utama. Area penilaian berada pada DAS Batanghari yang terdiri dari 3 Sub DAS yaitu Sub DAS Sungai Palu/Sungai Simpang, Sub DAS Sungai Jebus, dan Sub DAS Sungai Buaya Besar (**Gambar 19**). Karakteristik sungai-sungai di area penilaian tergolong cukup baik, dimana aliran sungai masih berbentuk alami (tidak ada perubahan aliran) dan arus air cukup deras. Namun demikian, khusus Sungai Palu sudah mengalami perubahan bentuk aliran sungai, hal ini disebabkan oleh program pemerintah Provinsi Jambi terkait pembuatan kanalisasi di area penilaian. Secara tutupan lahan, hampir semua sempadannya sudah bertutupan lahan kelapa sawit. kecuali pada bagian hulu Sungai Jebus dan Sungai Palu dimana masih memiliki tutupan lahan semak, belukar, dan hutan dataran rendah sekunder. Fungsi dan nilai penting yang terdapat di aliran sungai dan sempadan sungai di area penilaian akan dijelaskan lebih lanjut pada **Sub Bab 7.2.4**.

Topografi dan Lereng | Berdasarkan data Digital Elevation Model (DEM) SRTM dengan resolusi spasial 30 meter, topografi di area penilaian berada di dataran rendah dengan ketinggian dominan 5-10 mdpl (**Gambar 20**). Topografi di unit manajemen di dominasi dengan ketinggian 0-5 mdpl (**Tabel 8**). Kelerengan lahan di area penilaian didominasi dengan lereng 0% - 8% (**Gambar 21**) dan tidak terdapat area-area dengan lereng sangat curam (>40%) di unit manajemen (**Tabel 9**).

Iklim | Berdasarkan data pengukuran curah hujan PT JBP Tahun 2018- 2022, rata-rata curah hujan tahunan tertinggi mencapai 240 mm terjadi pada tahun 2020 dengan total hari hujan 176 hari. Jika dilihat dalam periode bulan, bulan Januari memiliki rata-rata curah hujan tertinggi mencapai 268 mm dengan total hari hujan berkisar 11-15 hari hujan/bulan. Berdasarkan data curah hujan tersebut, maka iklim di area penilaian termasuk kategori Tipe A

(sangat basah) berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Feguson dengan curah hujan terjadi sepanjang tahun; sementara berdasarkan klasifikasi Koppen, termasuk tipe Af atau iklim hutan hujan tropis (Koppen, 1900 dalam Kottek et al., 2006).



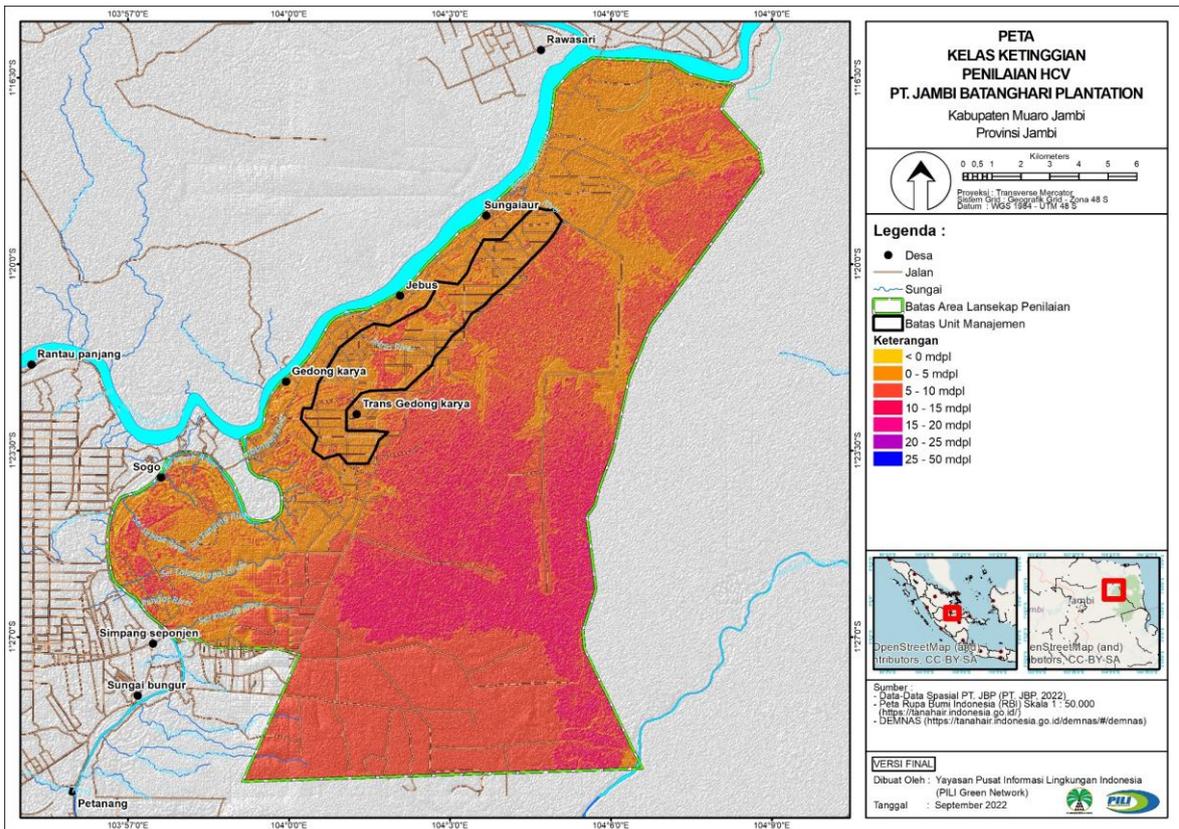
Gambar 19. AOI terhadap batas Sub-DAS

Tabel 8. Deskripsi luas kelas topografi di AOI

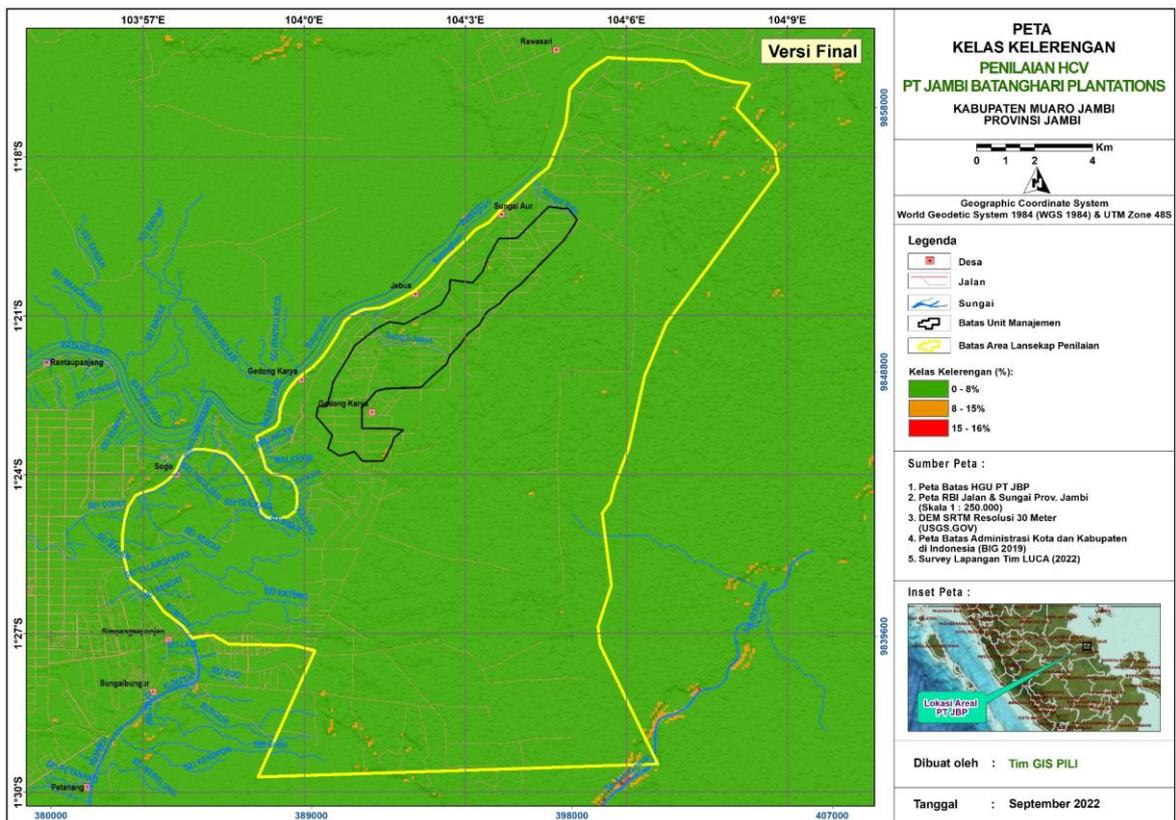
Kelas Topografi	Luas (Ha)	
	Unit Manajemen	AOI
0-5 Mdpl	1,698.1	10,592.7
5-10 Mdpl	234.7	12,898.3
10-15 Mdpl	20.0	4,427.5
15-20 Mdpl	0.2	215.3
20-25 Mdpl	-	1.3
Total	1,953.0	28,135.1

Tabel 9. Deskripsi luas kelas kelerengan di AOI

Kelas Kelerengan	Luas (Ha)	
	Unit Manajemen	AOI
0 - 8%	1,751.3	28,068.8
8 - 15%	7.1	66.2
15 - 25%	-	-
25 - 40%	-	-
>40%	-	-
Total	1,953.0	28,135.1



Gambar 20. AOI terhadap kelas ketinggian



Gambar 21. AOI terhadap kelas kelerengan

Geologi | Perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisiknya, khususnya kondisi geologi. Faktor tersebut akan memberi pengaruh terhadap daya dukung wilayah, khususnya untuk penggunaan lahan yang dapat dimanfaatkan dan berkembang di atasnya. Berdasarkan Peta Geologi Jambi nomor 1014, area penilaian tersusun oleh formasi aluvium (Qa) dan formasi kasai (QTk) (**Gambar 22**). Formasi Endapan aluvium sungai atau formasi alluvial (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal, dan bongkahan lepas (merupakan endapan sungai dan rawa). Formasi Kasai (QTk) terbentuk dari hasil erosi dengan formasi batuan yang lebih tua. Sebagian besar terdiri dari formasi endapan sinorogenik dengan ketebalan 300-500 meter.

Fisiografi Lahan dan Sistem Lahan | Peta sistem lahan (RePPPProT, 1990) menunjukkan area penilaian terbagi menjadi satu fisiografi lahan (**Tabel 10**) dan tiga sistem lahan (**Gambar 23**). Fisiografi lahan di AOI berupa Dataran. Sistem lahan Klaru (KLR) berada pada ekosistem rawa air tawar, sistem lahan Mendawai (MDW) berada pada ekosistem rawa gambut, dan sistem lahan Kajapah (KJP) berada pada ekosistem rawa mangrove dan pasang surut. Ekosistem rawa gambut merupakan ekosistem dominan di unit manajemen dan area penilaian (**Gambar 24**).

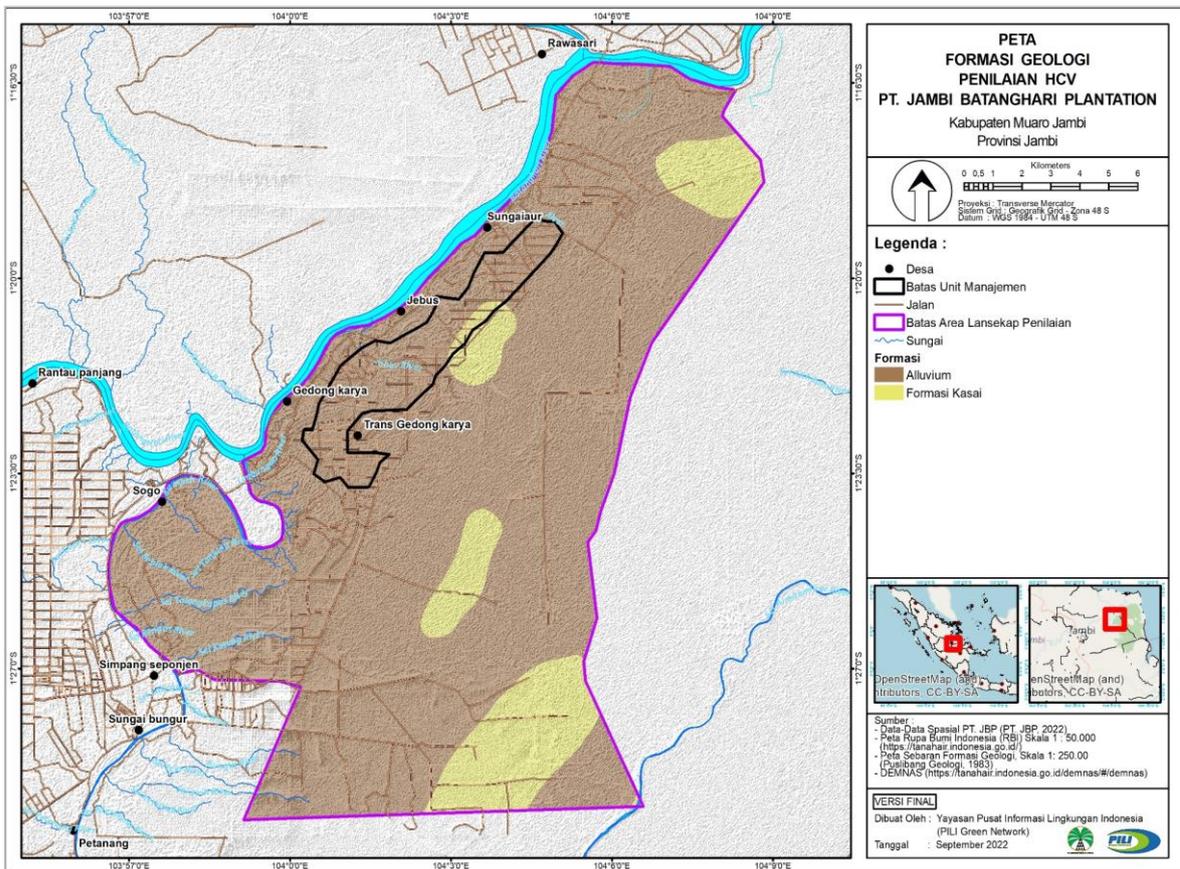
Jenis Tanah | Jenis tanah di area penilaian terdiri dari tanah mineral dan tanah gambut. Berdasarkan peta sistem lahan skala 1:250.000 (RePPPProT, 1990), terdapat 2 asosiasi tanah yang tergolong tanah mineral yaitu *Hydraquents*; *Sulfaquents* dan *Fluvaquents*; *Tropaquepts* (**Tabel 11**). Sedangkan tanah gambut memiliki asosiasi tanah *Troposaprists*; *Tropohemists*. Asosiasi tanah *Troposaprists*; *Tropohemists* merupakan asosiasi tanah yang paling besar di area penilaian (**Gambar 25**). Berdasarkan survei tanah detail dan verifikasi gambut skala 1:50.000 (BPH, 2021) teridentifikasi tanah gambut seluas 684.2 ha atau 35% dari luas unit manajemen dan tanah mineral seluas 1,268.8 ha atau 65% dari luas unit manajemen (*lihat Gambar 12*). Tanah gambut di unit manajemen memiliki jenis Histosols dengan tingkat kematangan Fibristis dan Hemists.

Tabel 10. Deskripsi dan luas fisiografi lahan, sistem lahan, dan ekosistem

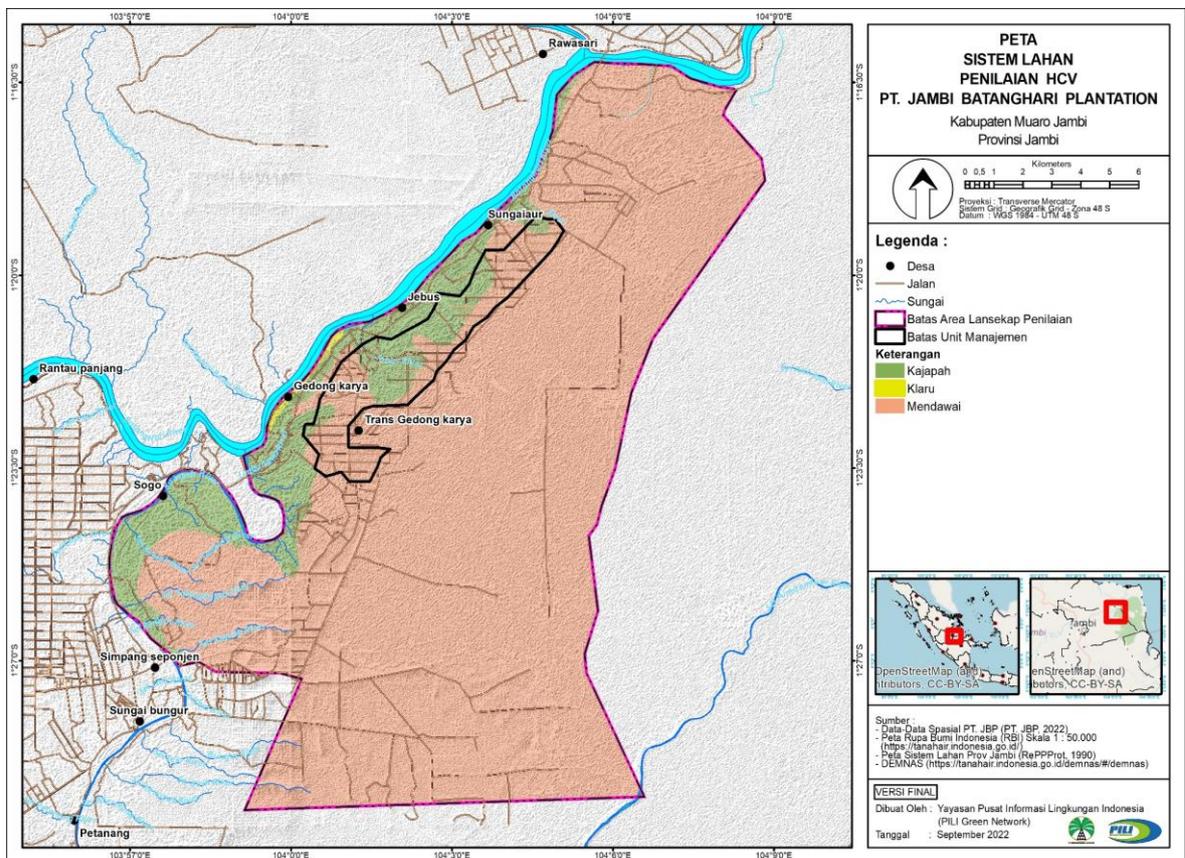
Fisiografi Lahan	Sistem Lahan		Ekosistem	Deskripsi	Luas (ha)	
	Simbol	Nama			Unit Manajemen	AOI
Dataran	KLR	Klaru	Rawa Air Tawar	Bergelombang hingga bergilir dataran sedimen	-	58.4
	MDW	Mendawai	Rawa Gambut	Perbukitan non-orientasi, non-sedimen	1,174.3	24,599.5
	KJP	Kajapah	Rawa Mangrove dan Pasang Surut	Bergelombang hingga bergilir dataran sedimen	778.7	3,477.2
Total					1,953.0	28,135.1

Tabel 11. Luas Asosiasi jenis tanah

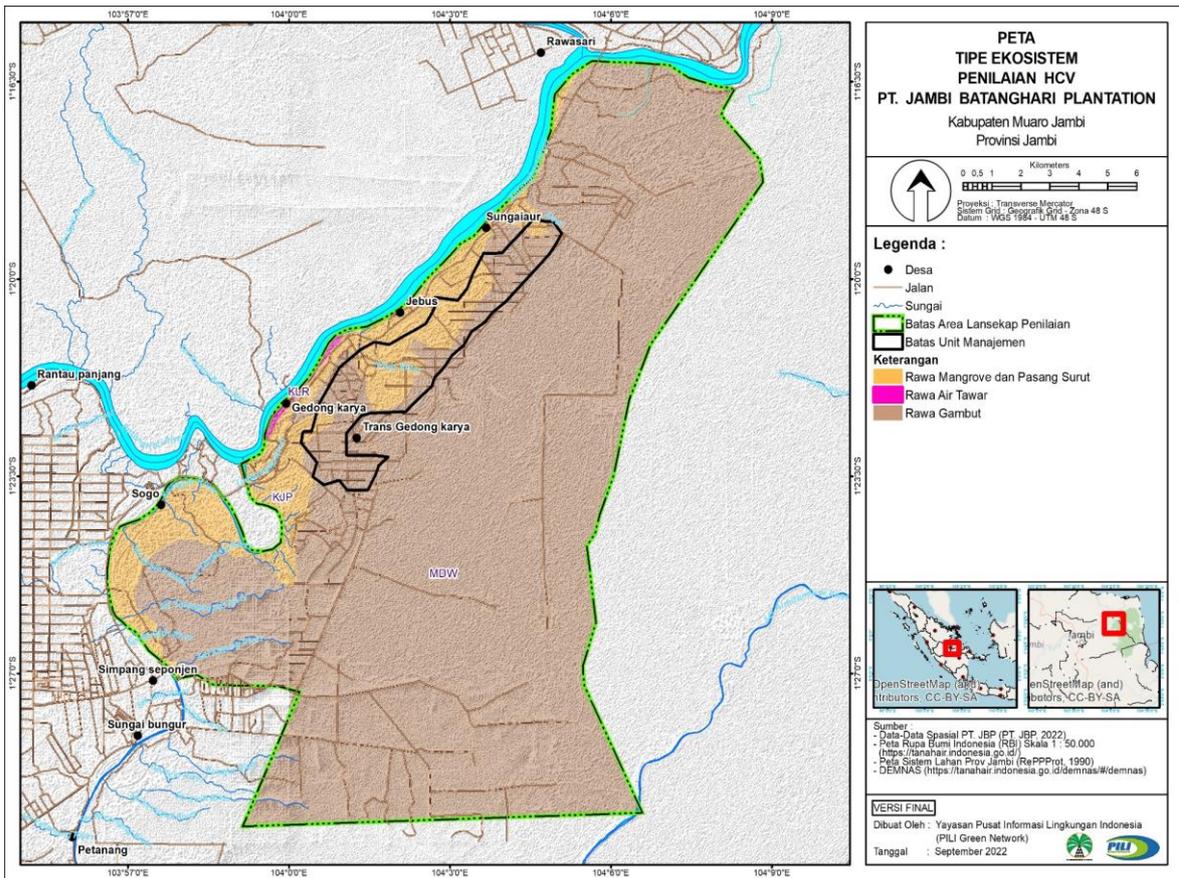
Assosiasi Tanah	Kategori Jenis Tanah	Luas (ha)	
		Unit Manajemen	AOI
<i>Troposaprists</i> ; <i>Tropohemists</i>	Tanah Gambut	1,174.3	24,599.5
<i>Hydraquents</i> ; <i>Sulfaquents</i>	Tanah mineral	778.7	3,477.2
<i>Fluvaquents</i> ; <i>Tropaquepts</i>	Tanah mineral	-	58.4
Total		1,953.0	28,135.1



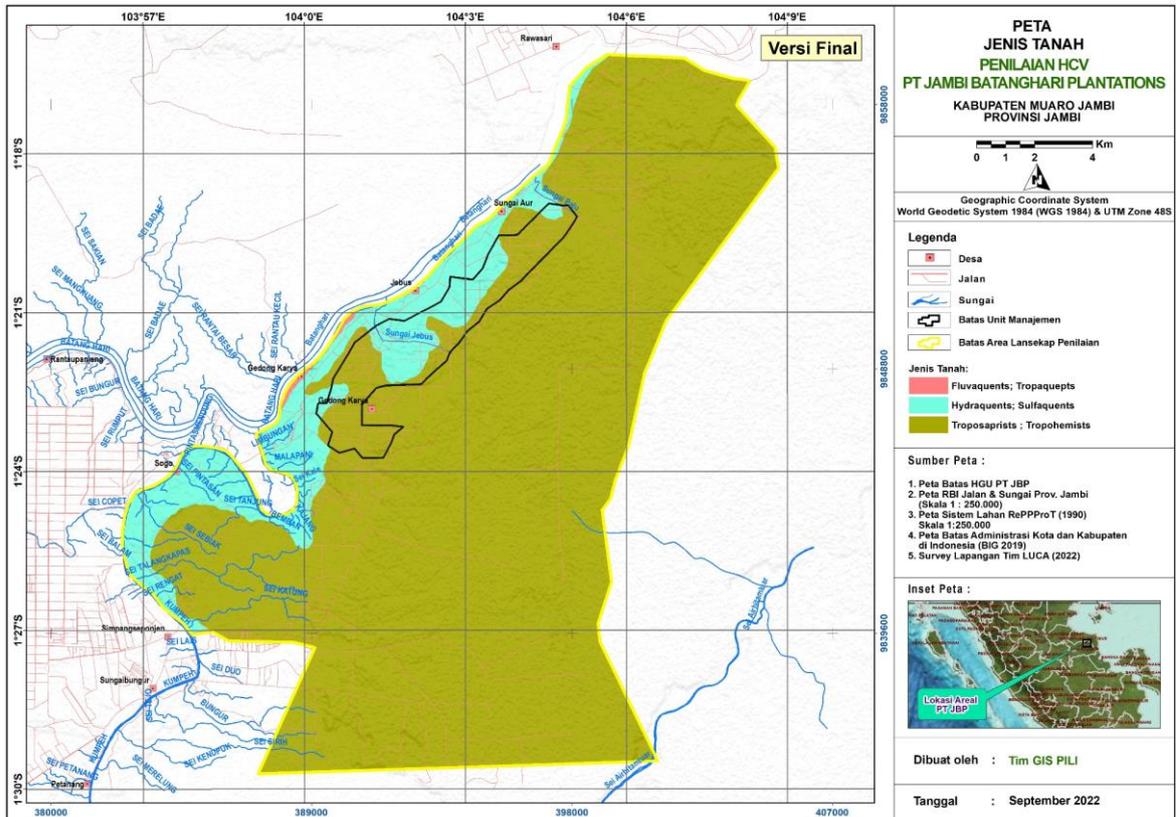
Gambar 22. AOI terhadap formasi geologi



Gambar 23. AOI terhadap sistem lahan



Gambar 24. AOI terhadap tipe ekosistem



Gambar 25. AOI terhadap jenis tanah

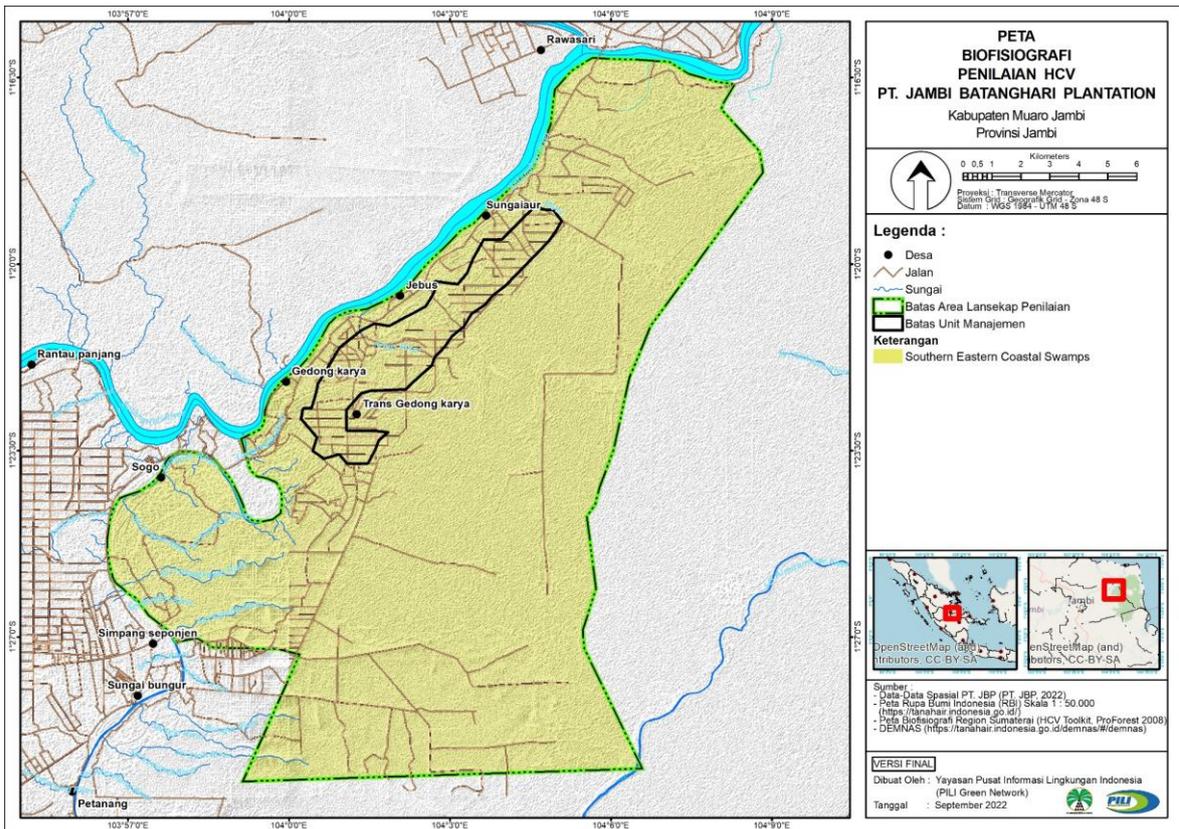
6.3 Karakteristik Biologi dan Ekologi

Zona Biogeografis | Unit manajemen berada di Pulau Sumatera. Berdasarkan Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia (2008), Pulau Sumatera memiliki 12 Zona Biogeografis. Wilayah penilaian termasuk ke dalam zona biogeografi *Southern Eastern Coastal Swamps* (**Gambar 26**).

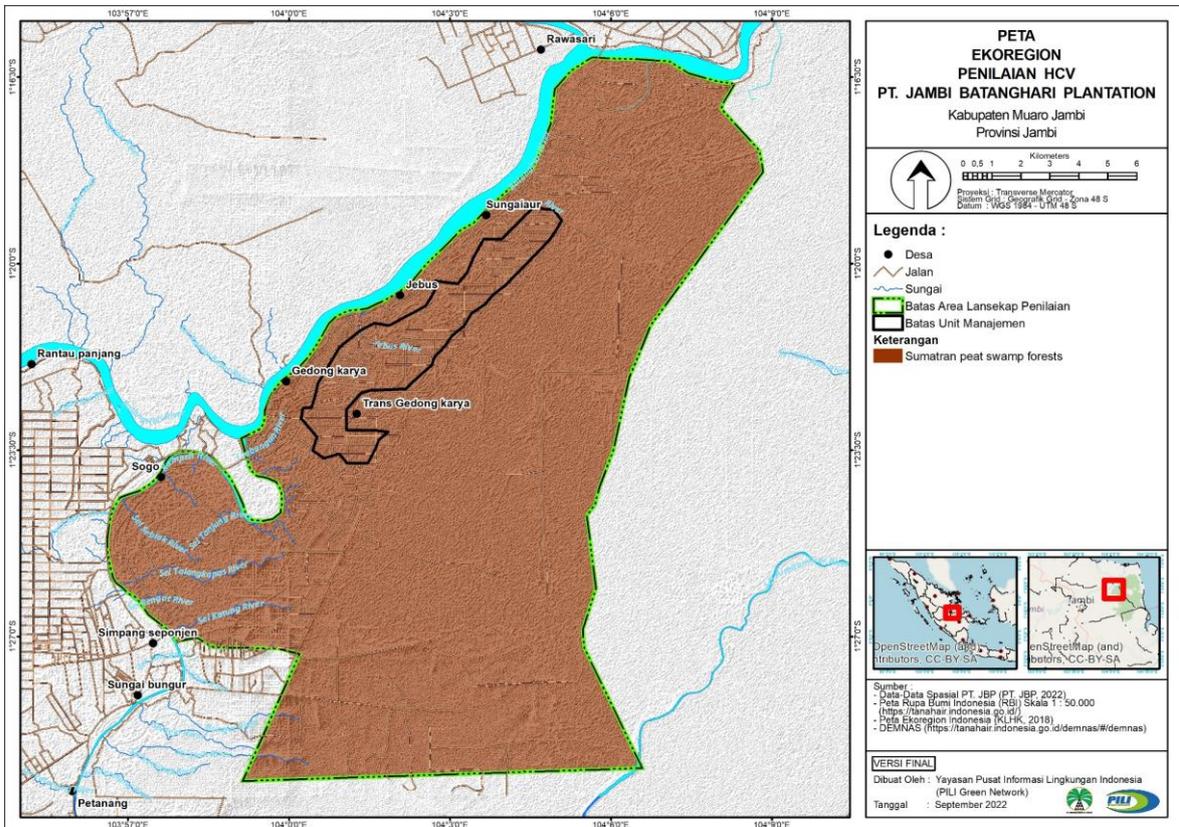
Pulau Sumatera berada di Dataran Sunda yang menyatu dengan benua Asia tentu memiliki kekayaan dan kemiripan flora dan fauna. Sebagai gambaran, di Pulau Sumatera terdapat 257 spesies mamalia, 40 spesies dalam status terancam dan 50 spesies dilindungi (Payne *et al.*, 2000; Sunarto *et al.*, 2022), 600 spesies burung, 465 penetak dan 21 endemik, 30 terancam punah dan 130 dilindungi (PHKA, 2003; MacKinnon *et al.*, 2000), 150 (\pm 8) spesies ular (Stuebing, 1999), 70 spesies amfibia, 272 (\pm 30) spesies ikan air tawar, 49 (\pm 4) Kupu-kupu ekor layang-layang (MacKinnon *et al.*, 1996; Rhee *et al.* 2004) dan banyak spesies fauna lain. Beberapa spesies satwa unik menghuni Pulau Sumatera, yaitu Orangutan (*Pongo abelii*, *P. tapanuliensis*), Tapir (*Tapirus indicus*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris ssp. sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*), Bangau Storm (*Ciconia stormi*), Sikatan aceh (*Cyornis ruckii*), dan Tokhtor Sumatera (*Carpococcyx viridis*).

Berdasarkan sebaran spesies tumbuhan, Pulau Sumatera merupakan pulau dengan hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Tercatat 13.776 spesies tumbuh-tumbuhan hidup di Pulau Sumatera, sedikitnya 17 marga, dan 1891 spesies endemik Sumatra (Whitten *et al.*, 2000; Retnowati *et al.*, 2019). Beberapa spesies kharismatik Pulau Sumatera yakni Rafflesia, 36 jenis di dunia, terbanyak Indonesia (Hidayat & Walck, 2016) dan 10 jenis terdapat di Sumatera (Susatya, 2011). Pada kelompok Kantong Semar dari 138 jenis di dunia, terbanyak di Indonesia (McPherson & Robinson, 2012), 37 jenis terdapat di Pulau Sumatera dan 31 jenis merupakan endemik dan 2 jenis baru berasal dari Pulau Sumatera Utara yakni: *Nepenthes taminii* & *N. xiphioides* (Wistuba, 2019). Dari 267 spesies *Dipterocarpaceae*, 111 spesies (31,9%) di antaranya merupakan spesies Pulau Sumatera (Purwaningsih, 2004). Jumlah ini membuat Pulau Sumatera menjadi pusat kedua dari keragaman *Dipterocarpa* dunia. Beberapa spesies flora Pulau Sumatera berdasarkan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 masuk dalam perlindungan Pemerintah Indonesia diantaranya Gaharu (*Aetoxylon sympetalum*), Pasak Bumi Runcing (*Eurycoma apiculata*), dan Daun Sang Gajah (*Johannesteijsmannia altifrons*). Di sisi lain, jenis-jenis pohon tersebut banyak dimanfaatkan kayunya secara komersial, terutama karena merupakan jenis-jenis pohon yang menjadi tumpuan kepentingan masyarakat lokal.

Ekoregion dan Tipe Ekosistem | adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Peta Ekoregion diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada tahun 2018 sesuai Surat Keputusan No 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018. Pulau Sumatera tersusun atas delapan ekoregion, yaitu: i) Perbukitan Struktural, ii) Dataran Fluvial, iii) Dataran Gambut, iv) Dataran Pantai, v) Pegunungan Struktural, vi) Pegunungan Vulkanik, vii) Perbukitan Vulkanik, viii) Dataran Vulkanik, ix) Dataran Denudasional, dan x) Perbukitan Denudasional. AOI berada di tipe ekoregion Dataran Gambut (**Gambar 27**).



Gambar 26. AOI terhadap zona biofisioografi



Gambar 27. AOI terhadap tipe ekoregion

Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi | Kawasan lindung menurut peraturan Pemerintah Indonesia adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan⁶. Kawasan yang berfungsi sebagai perlindungan bagi keanekaragaman hayati dicakup dalam kategori Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Secara lengkap tipe kawasan yang memiliki fungsi lindung terdiri dari:

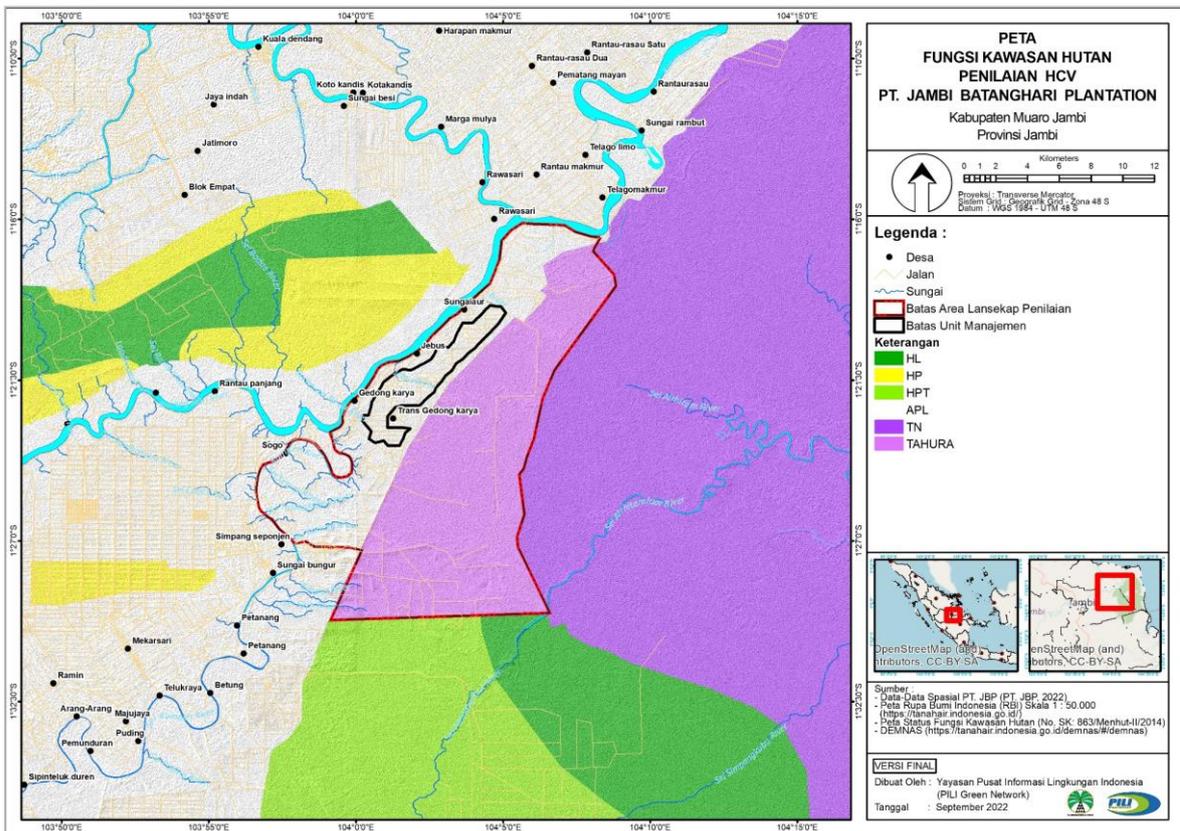
1. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya, misalnya kawasan hutan lindung di kelereng tertentu, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
2. Kawasan perlindungan setempat, misalnya sempadan sungai, pantai, danau, mata air.
3. Kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) dikenal juga dengan Kawasan Konservasi, serta cagar budaya.
4. Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang memiliki fungsi lindung di AOI adalah area Taman Hutan Raya/Tahura yang berada di sebelah Timur dari unit manajemen (**Gambar 28**). Tahura tersebut merupakan kawasan lahan gambut yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur keseimbangan air. Kawasan yang memiliki fungsi lindung di sekitar AOI adalah Hutan Lindung yang berada di sebelah Barat dan berjarak 14 km dari AOI. Selain itu, Kawasan fungsi lindung lainnya adalah Taman Nasional Berbak yang berada di sebelah Timur dan berjarak 6 km dari AOI (**Gambar 29**). Hutan Lindung di sekitar AOI memiliki fungsi yang sama seperti Tahura yaitu sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur keseimbangan air. Taman Nasional Berbak memiliki luas 141 ribu ha yang merupakan kesatuan ekosistem lahan basah rawa gambut dan mangrove. Lahan basah tersebut secara ekologis memiliki peran penting sebagai jalur migrasi burung dan area dengan nilai penting bagi kelangsungan populasi Harimau Sumatra.

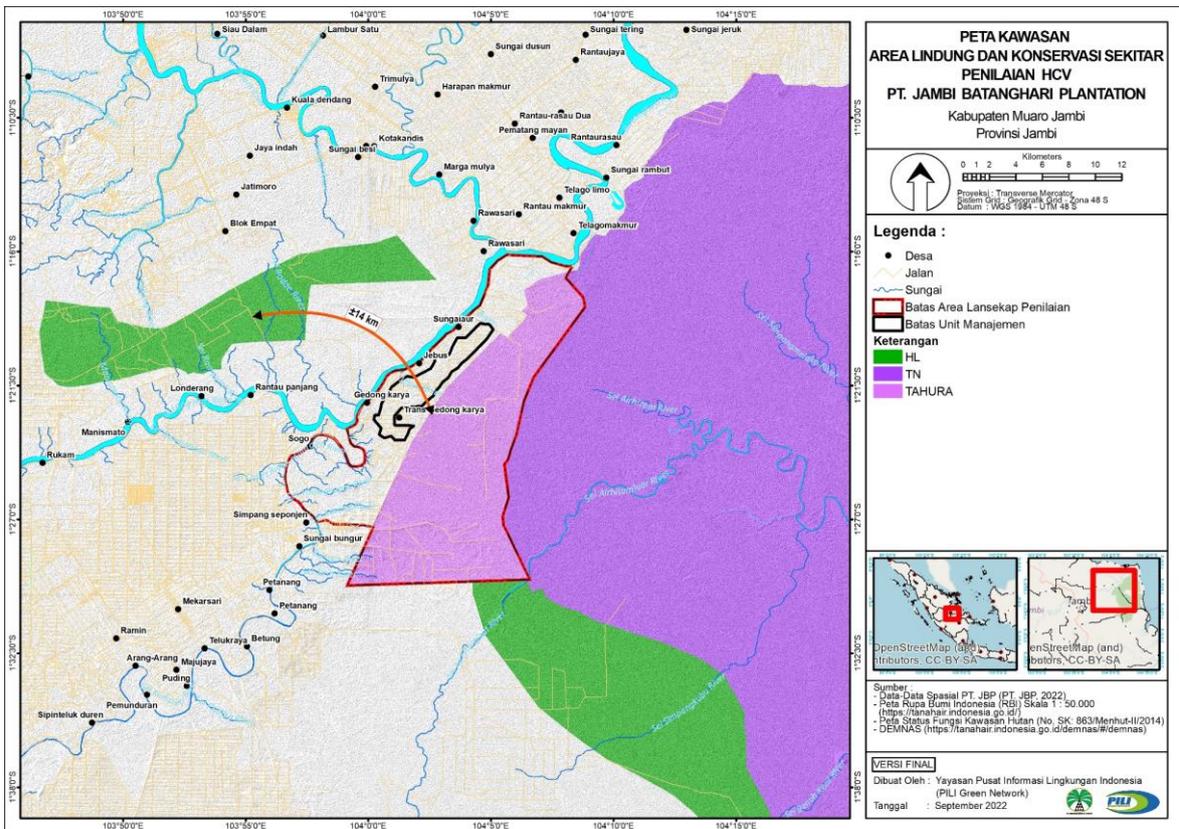
Area Kunci Keanekaragaman Hayati | Area kunci keanekaragaman hayati pada umumnya terdapat dalam dua bentuk, yaitu Kawasan Konservasi (ditetapkan oleh pemerintah) dan kawasan yang memenuhi kriteria yang dikeluarkan oleh konvensi internasional atau LSM yang kompeten pada bidang keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi mencakup antara lain Tahura, Taman Nasional, dan Hutan Lindung (*lihat Gambar 29*). Sementara area kunci keanekaragaman hayati lainnya antara lain *Key Biodiversity Area*, *Important Bird Areas* dan *Endemic Bird Areas* (BirdLife International), atau *Ramsar Site*. Posisi area kunci keanekaragaman hayati terhadap AOI disajikan pada **Gambar 30** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Key Biodiversity Area* (KBA) dan *Important Bird Areas* (IBA): AOI berjarak 30 km dari Kawasan KBA di sebelah Selatan, 12 km dari Kawasan IBA di Sebelah Timur dan overlap dengan Taman Nasional Berbak, dan 155 km dari Kawasan EBA di Sebelah Barat Daya dan overlap dengan Taman Nasional Bukit Barisan
2. Ramsar Site: AOI berjarak 12 km dari Ramsar site Taman Nasional Berbak yang berada di sebelah Timur, dan 60 km dari Ramsar site Taman Nasional Sembilang yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan.

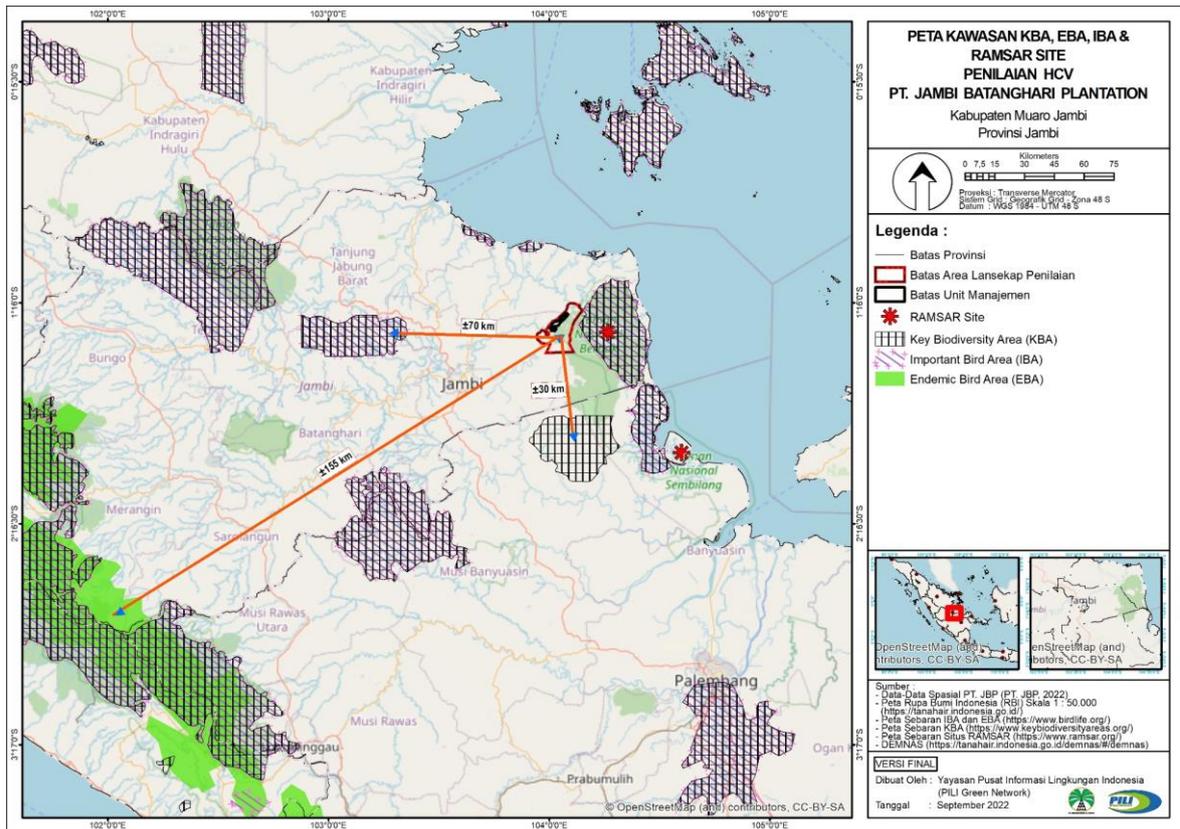
⁶ Keppres No 32 tahun 1990 pasal 1 ayat 1



Gambar 28. AOI terhadap kawasan fungsi lindung



Gambar 29. AOI terhadap kawasan konservasi

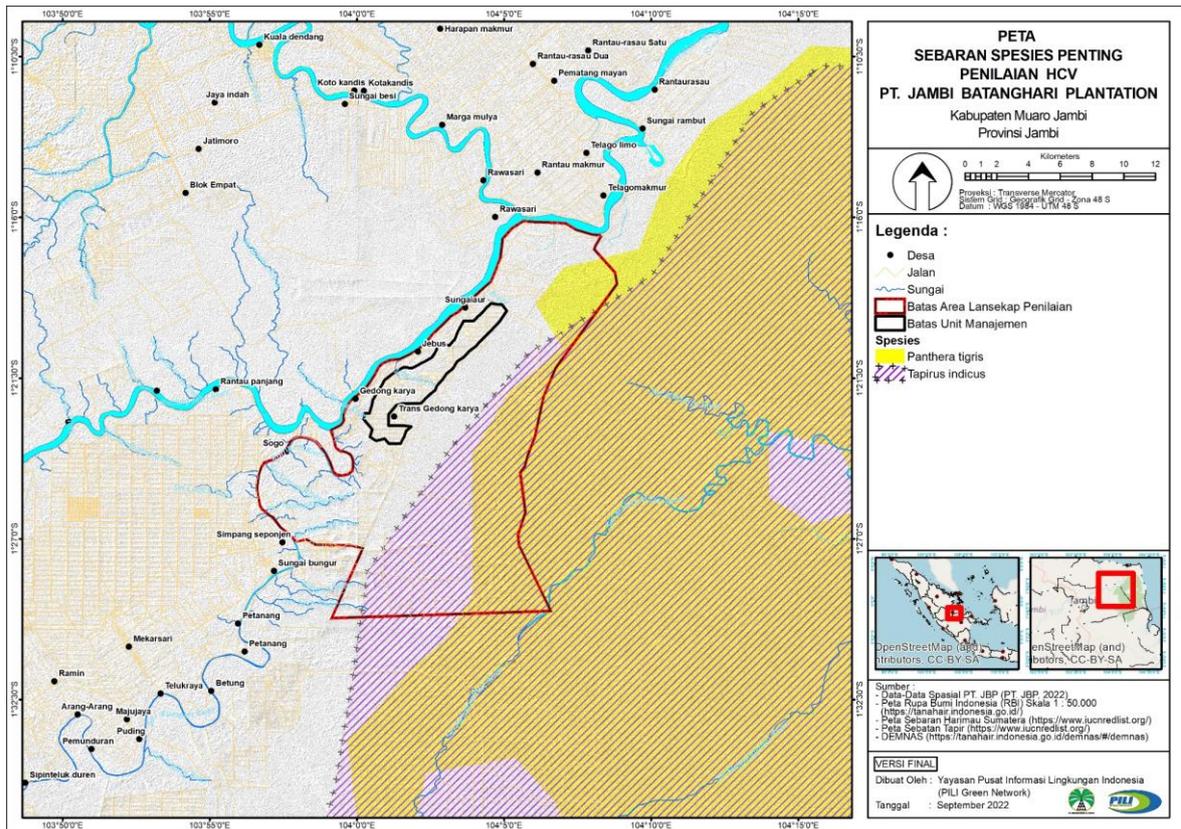


Gambar 30. AOI terhadap area kunci keanekaragaman hayati

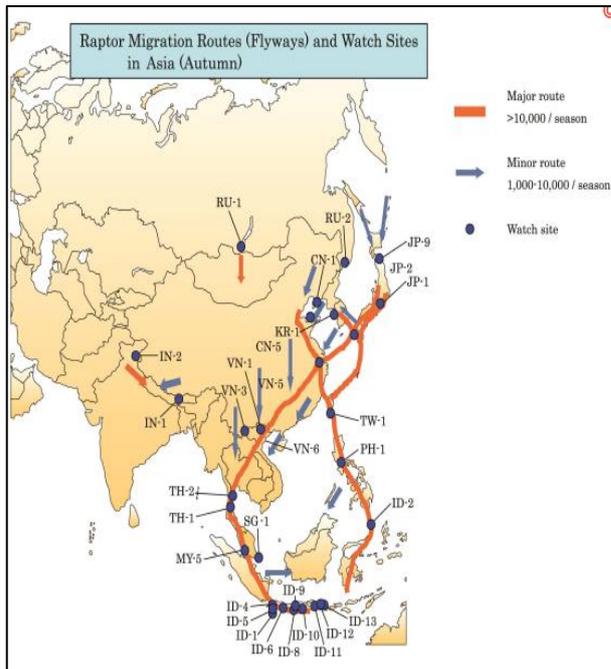
Populasi Spesies yang Menjadi Perhatian Global | Berdasarkan peta sebaran keanekaragaman hayati bernilai penting yang disajikan pada Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN, beberapa spesies RTE diindikasikan tersebar di sekitar AOI. Pada kelompok satwa spesies tersebut adalah harimau (*Panthera tigris*) yang berada di sebelah Timur dari AOI (**Gambar 31**). Kelompok tumbuhan RTE yang sebarannya mencakup wilayah penilaian adalah Meranti (*Shorea teysmaniana*).

Harimau sumatera tercatat masih hidup di seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, meskipun keberadaannya terbatas pada hutan alam berukuran relatif luas. Harimau sumatera tercatat hidup pada habitat hutan mulai dari daerah hutan dataran rendah pesisir (0 m dpl) di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Provinsi Lampung hingga hutan pegunungan (3.200 m dpl) di Gunung Leuser, Provinsi NAD. Jumlah lokasi yang dipastikan masih menjadi habitat harimau yaitu sebanyak 27 lokasi serta dua lokasi yang diyakini masih memungkinkan untuk ditinggali oleh spesies kucing besar ini (Wibisono & Pusparini, 2010). Secara total, perkiraan populasi harimau sumatera saat ini yaitu berkisar antara 371-1,273 individu (Goodrich *et al.*, 2015 berdasarkan Sunarto *et al.*, 2013, Collins *et al.*, 2012, dan Wibisono *et al.*, 2009). Di wilayah Provinsi Riau, harimau sumatera masih tercatat di hutan yang terdapat di Giam Siak Kecil, Rimbang Baling, Tesso Nilo, Kuala Kampar, Kerumutan, Bukit Betabuh, dan Bukit Sosa (Wibisono & Pusparini, 2010).

AOI juga diindikasikan sebagai daerah sebaran beberapa spesies penting lainnya. Jenis-jenis tersebut antara lain trenggiling (*Manis javanica*), lutung (*Trachypithecus cristatus*), kukang (*Nycticebus coucang*), tenek (*Tapirus indicus*), rusa (*Rusa unicolor*), buaya sinyulong (*Tomistoma schlegellii*), dan buaya muara (*Crocodylus porosus*). Pada kelompok tumbuhan, jenis-jenis penting yang diindikasikan memiliki daerah sebaran di sekitar AOI adalah meranti batu (*Parashorea apetera*), meranti buaya (*Shorea teysmanniana*) dan meranti bunga (*Shorea parvifolia*). Sedangkan yang terdapat di dalam unit manajemen adalah jenis pohon kempas/pohon madu (*Koompassia malaccensis*).



Gambar 31. AOI terhadap sebaran spesies RTE



Gambar 32. Jalur migrasi raptor (sumber: raptor Indonesia)

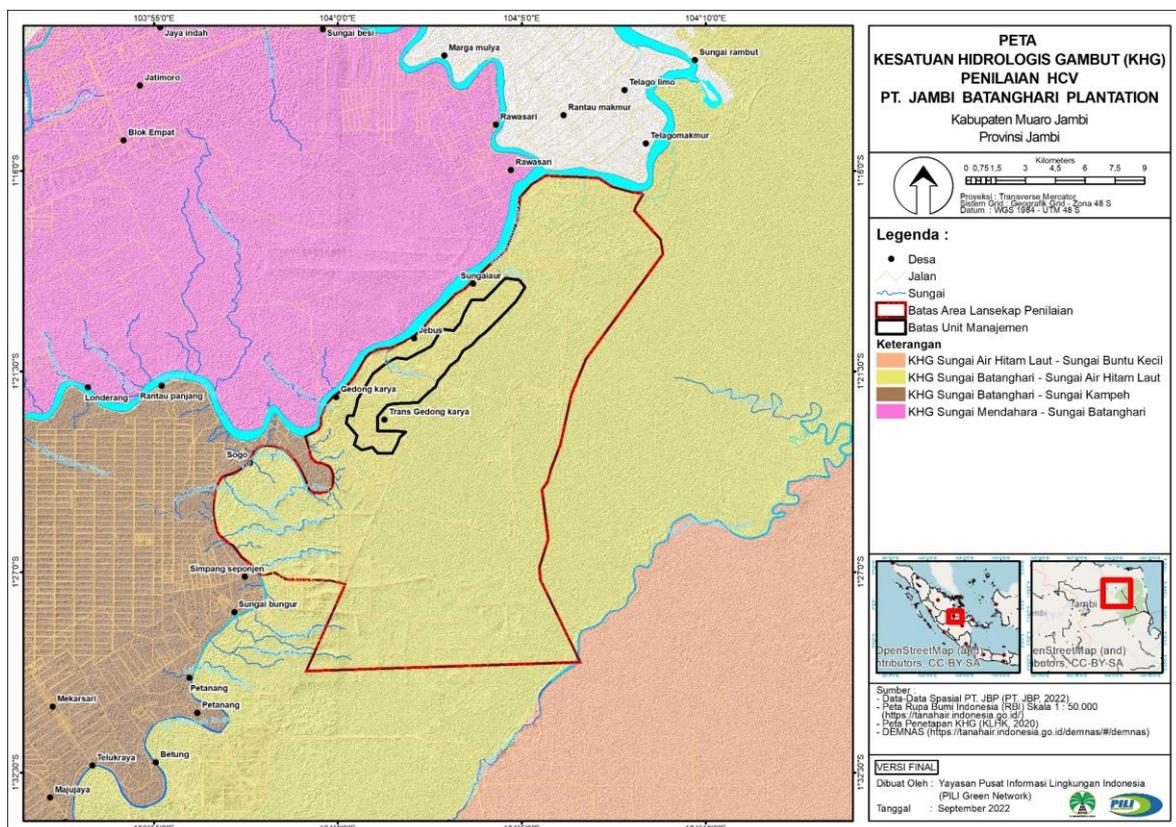
Koridor Migrasi AOI merupakan wilayah yang penting bagi fenomena pergerakan satwa liar musiman (migrasi) terutama untuk kelompok burung bermigrasi. Secara umum, wilayah Indonesia memerankan dua fungsi yaitu sebagai daerah tujuan migrasi (*wintering site*) dan lintasan migrasi (*fly way*). Selain itu terdapat jalur utama yang menjadi jalur lintasan migrasi. Terdapat beberapa kelompok burung bermigrasi, yaitu burung pemangsa/*raptor* (**Gambar 32**), burung air atau burung pantai (*wader* atau *shore birds*), dan burung dari kelompok burung berkicau. Lokasi umum yang dimanfaatkan sebagai tujuan burung pantai/air migran yang bermigrasi dalam kelompok besar adalah daerah lahan basah, seperti pantai, delta dan muara sungai, dan area-area hutan mangrove.

Kategori migrasi mengacu pada konsep migrasi jarak jauh (*long distance migration*) yaitu spesies yang bermigrasi berasal dari belahan bumi Utara dan belahan bumi Selatan, dimana pada saat periode musim dingin, spesies tersebut melakukan migrasi ke wilayah Indonesia. Tercatat 149 jenis burung dari kelompok burung pemangsa, burung air atau pantia, dan burung berkicau masuk dalam kategori migrasi jarak jauh (Sukmantoro *et al*, 2007).

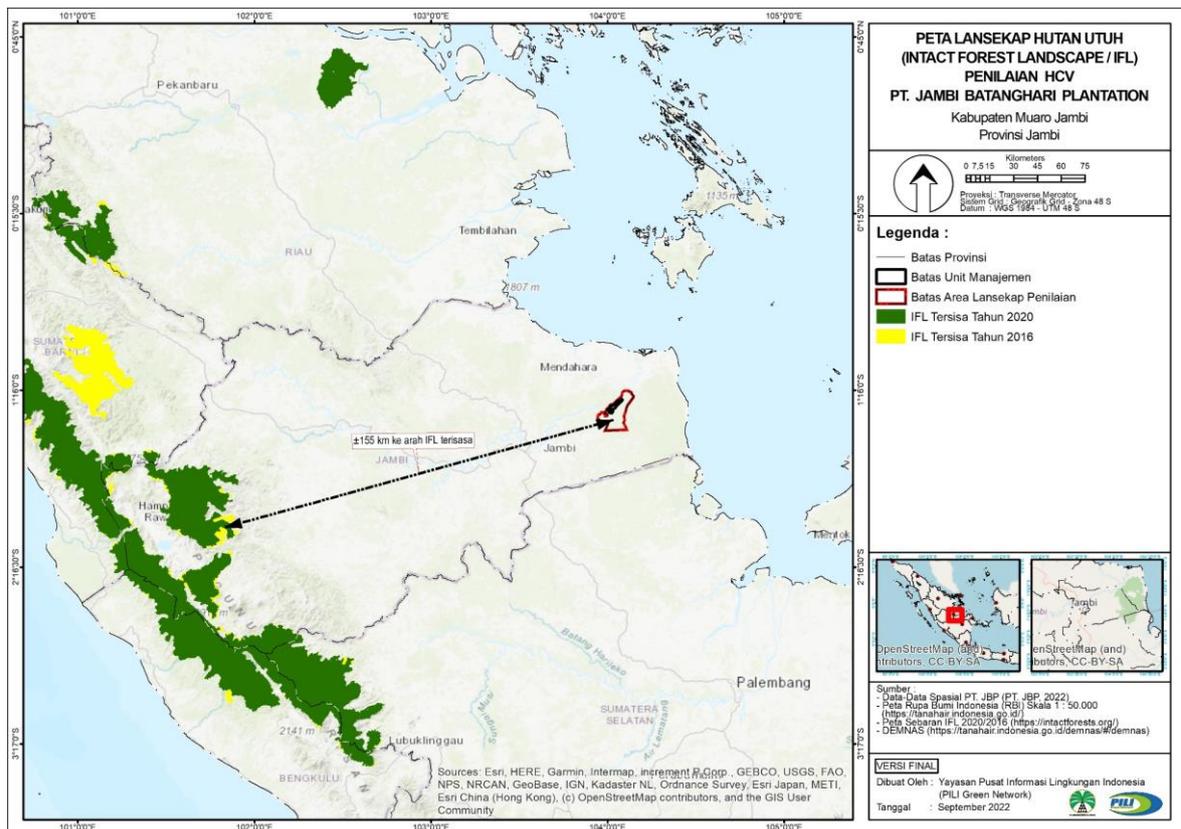
Beberapa kelompok burung pemangsa yang umum dijumpai di Indonesia seperti Elang Alap (*Accipiter soloensis*), Sikep Madu Asia (*Pernis ptilorhynchus*), dan Elang Kelabu (*Bustatur indicus*). Selain itu kelompok burung air atau burung pantai seperti Kedidi Paruh (*Calidris pygmaea*) dan Camar (*Larus schistisagus*). Kelompok burung kicau seperti Layang-layang Asia (*Hirundo rustica*) dan Jalak tiongkok (*Sturnus sturninus*).

Lahan Gambut | Indonesia telah memiliki regulasi dan penetapan tentang sebaran lahan gambut nasional yang tertuang pada Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Skala 1:250.000 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah ekosistem gambut yang letaknya di antara dua sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Berdasarkan peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), AOI terletak di Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Batanghari – Sungai Air Hitam Laut (**Gambar 33**). Hal ini menunjukkan unit manajemen berada di lahan gambut. Namun demikian, berdasarkan survei tanah detail dan verifikasi gambut skala 1:50.000 (BPH, 2021), teridentifikasi lahan gambut di unit manajemen seluas 684.2 ha atau 35% dari luas unit manajemen dan tanah mineral seluas 1,268.8 ha atau 65% dari luas unit manajemen (*lihat Gambar 12*). Tanah gambut di unit manajemen memiliki jenis Histosols dengan tingkat kematangan Fibrists dan Hemists.

Lanskap Hutan Utuh (IFL) | adalah bentangan ekosistem alami yang tak terputus di dalam suatu zona hutan, tidak terdapat tanda-tanda aktifitas manusia yang signifikan dan memiliki keanekaragaman hayati asli dan masih terjaga, termasuk populasi spesies yang tersebar luas dan dapat bertahan hidup. Konsep IFL dikembangkan untuk membantu membuat, menerapkan, dan memantau kebijakan tentang dampak manusia terhadap lanskap hutan di tingkat regional atau nasional (negara). Berdasarkan sebaran IFL, AOI terletak di luar IFL. Area IFL terdekat dari AOI berjarak 155 km (IFL, 2016) di sebelah Barat Daya (**Gambar 34**). Area IFL tersebut berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).



Gambar 33. AOI terhadap Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)



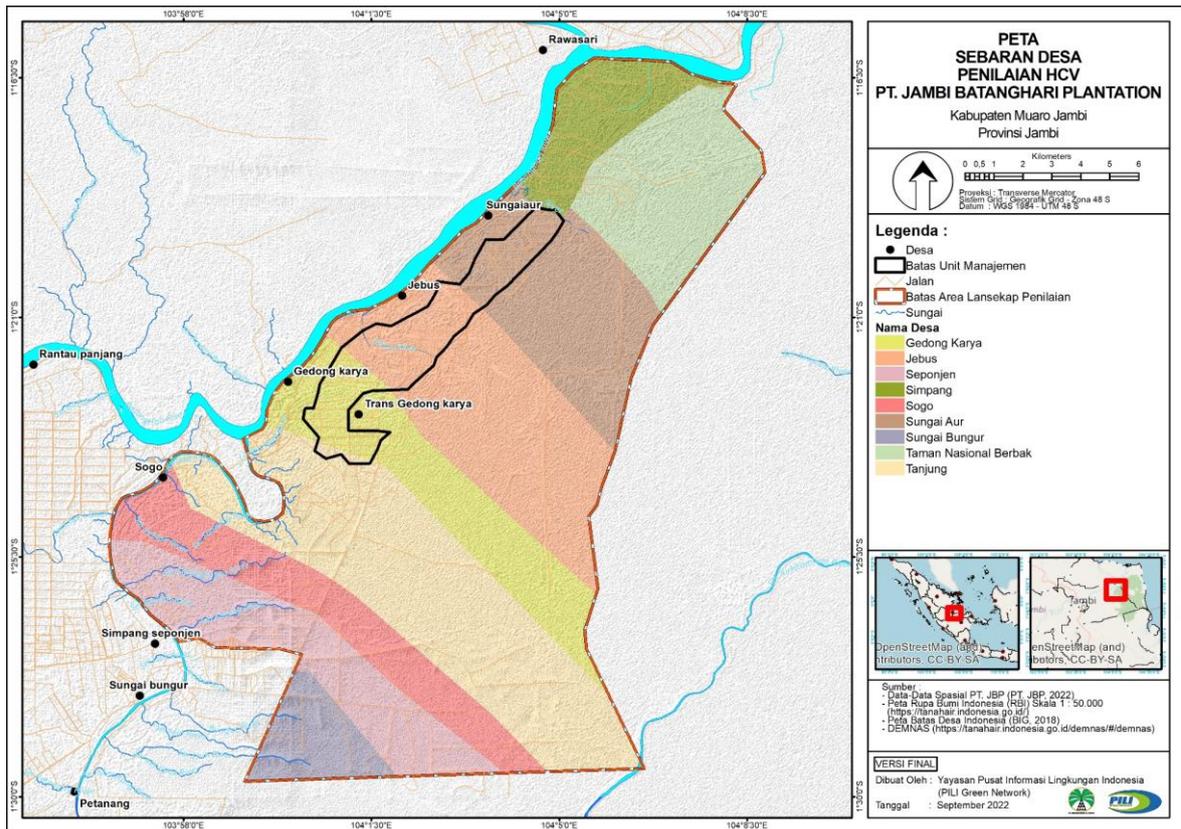
Gambar 34. AOI terhadap Area IFL

6.4 Karakteristik Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Demografi | Unit manajemen secara administrasi terletak di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Muaro Jambi salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah sebesar 9,82 persen dari luas Provinsi Jambi. Sebelah Barat Kabupaten Muaro Jambi berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari, sebelah Timur dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 sebanyak 155.

Unit manajemen berada di wilayah tiga desa yaitu Desa Sungai Aur, Desa Jebus, dan Desa Gedong Karya (**Gambar 35**). Desa Gedong Karya merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di jika dibandingkan dengan desa lainnya. Jumlah penduduk Desa Gedong Karya sebanyak 1.798 jiwa. Sedangkan Desa Jebus merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 671 jiwa.

Data jumlah penduduk tersebut memberikan informasi penting tentang ketersediaan tenaga kerja dan potensi sumber daya manusia di desa tersebut. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, perusahaan dapat mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang dapat direkrut dari desa tersebut berdasarkan jumlah penduduknya sehingga pembagian rekrutmen tersebut lebih proporsional, tentu saja dengan tidak mengabaikan kesesuaian kemampuan tenaga kerja tersebut dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, informasi ini juga berguna dalam menggambarkan implementasi program pemberdayaan masyarakat ataupun CSR (*Corporate Social Responsibility*) karena akan terkait dengan potensi sumber daya manusia yang ada di desa, baik kualitas maupun kuantitas penerima atau pelaksana program-program tersebut. Secara detail, gambaran jumlah penduduk di desa-desa sekitar unit manajemen tersaji dalam **Tabel 12**.



Gambar 35. Sebaran wilayah desa di AOI

Tabel 12. Demografi desa di area penilaian

Kecamatan / Desa	Luas (km ²)		Penduduk				Jiwa/ km ²
	(km ²)	(%)	(Jiwa)	(%)	KK	(%)	
Kecamatan Kumpeh	1.185,32	100	24.809	100	8.053	100	58,46
Desa Jebus	14,06	1,49	671	2,70	261	3,2	47,72
Desa Gedong Karya	21,19	1,79	1.798	4,04	548	20,9	84,85
Desa Sungai Aur	124,03	10,46	1.710	6,89	530	9,6	13,79
Total:	159,28	13,74	4.179	13,63	1.339	33,7	146,36

Sumber: Kecamatan Kumpeh dalam Angka 2021, BPS Muaro Jambi diolah

Data jenis kelamin menunjukkan bahwa Desa Jebus memiliki komposisi jenis kelamin yang berimbang, sedangkan Desa Sungai Aur dan Gedong Karya jenis kelamin laki-laki lebih dominan. Data mengenai rasio jenis kelamin dapat digunakan oleh manajemen perusahaan PT JBP dalam menjalankan program-program CSR di masa depan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan program yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara baik dan benar.

Agama | Masyarakat sekitar unit manajemen merupakan bagian dari etnis melayu dengan dialeg Melayu Jambi yang telah berkembang secara turun temurun. Perkembangan budaya, adat istiadat, seni, dan perilaku masyarakat sangat kental dengan nuansa agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat yaitu Islam. Bahkan penduduk di Desa Sungai Aur, Jebus, dan Gedong Karya 100 persen penduduknya adalah penganut agama Islam. Keberadaan rumah ibadah di tingkat Desa disajikan pada **Tabel 13** dan **Gambar 36** menyajikan foto tempat ibadah yang terdapat di sekitar unit manajemen.

Tabel 13. Jumlah rumah ibadah menurut desa

Kabupaten / Kecamatan / Desa	Masjid	Mushola	Total Tempat Ibadah
Kecamatan Kumpeh	30	47	77
Desa Jebus	1	2	3
Desa Sungai Aur	2	5	7
Desa Gedong Karya	2	4	6

Sumber: Kecamatan Kumpeh dalam Angka 2021, BPS Muaro Jambi diolah



Gambar 36. Foto tempat ibadah yang terdapat di sekitar unit manajemen

Etnis dan Budaya | Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber perwakilan masyarakat dari masing-masing desa, mayoritas etnis di sekitar unit manajemen adalah etnis melayu. Salah satu bentuk perkembangan kebudayaan masyarakat di Kecamatan Kumpeh adalah adanya kesenian masyarakat yang hingga kini masih dipertahankan yaitu kesenian Seloko. Berseloko dilaksanakan pada pertemuan-pertemuan adat, pelaksanaan upacara daur hidup (seperti upacara perkawinan) dan sebagainya. Kata seloko (dalam dialek Jambi) identik dengan kata seloka dalam bahasa Indonesia.

Menurut Djamil Bakar (1981), dalam teori sastra seloko dikenal sebagai salah satu bentuk sastra lisan, yaitu suatu bentuk kebudayaan daerah yang diwariskan secara turun temurun. Bentuk sastra lisan tersebut berkaitan erat dengan tradisi suatu masyarakat. Salah satu hubungannya adalah ditampilkannya sastra lisan itu dalam upacara atau acara-acara tradisional masyarakat yang bersangkutan. Hubungan lain ialah bahwa sastra lisan itu juga bersumber dan sekaligus mengandung adat dan kebiasaan, tingkah laku dan kepercayaan masyarakat pemakainya. Lebih lanjut Tabran Kahar (1986) mengemukakan, melalui ungkapan tradisional atau seloko dapat diketahui latar belakang kehidupan sosial budaya masyarakatnya, karena ungkapan tradisional itu juga menggambarkan segala aspek kehidupan masyarakat.

Dalam pembacaan seloko, penyeloko biasanya menggunakan pantun atau sejenisnya yang diiringi dengan rima dan metrum yang mantap sehingga tidak jarang menarik perhatian bagi sebagian orang yang mendengarkan. Namun demikian, tidak semua orang bisa memahami maksud seloko tersebut karena dalam pemilihan diksi cenderung menggunakan majas perbandingan atau perumpamaan (Mislán, 2012). Hal senada juga dikemukakan oleh H. Junaidi T. Noor (2013), seloko bagi masyarakat Ras Melayu sudah tidak asing lagi. Seloko merupakan tradisi lisan yang terwariskan dari kakek ke bapak, dari bapak ke bisa ke aku atau yang lain atau bisa terhenti atau tersamar karena jarang didengar, jarang diungkapkan diruang publik atau antar lingkungan keluarga. Masyarakat awam hanya dapat mendengar seloko dalam upacara adat terutama dalam prosesi adat perkawinan. Dalam acara itu mulai dari runutan prosesi perkawinan sampai pengantaran ke pelaminan ada dilantunkan seloko itu. Itu pun berlaku dan didengar pada upacara adat penuh. **Gambar 37** menyajikan foto Kegiatan Seloko di Kecamatan Kumpeh.



Gambar 37. Foto kegiatan Seloko pada acara pernikahan

Aksesibilitas dan Sarana Transportasi | Unit manajemen berada cukup dekat dengan pusat Ibukota Kecamatan dan Ibukota Provinsi. Ibukota Kecamatan Kumpeh berjarak 7.6 km dari unit manajemen dan desa. Sedangkan Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi berjarak 83 km dari unit manajemen.

Akses menuju ke Ibukota Kecamatan Kumpeh dan Ibukota Provinsi cukup baik dengan menggunakan jalan Trans Jambi yang telah diaspal. Namun demikian, masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum diaspal oleh pemerintah daerah (**Gambar 38**). Sarana transportasi di sekitar unit manajemen untuk menuju Ibukota Kecamatan dan Ibukota Provinsi sudah tersedia. Masyarakat sebagian besar sudah menggunakan mobil dan motor pribadi untuk sarana transportasi. Namun terdapat transportasi umum travel yang digunakan masyarakat untuk ke Kota Jambi. Desa-desa yang berada di AOI dikelilingi perkebunan kelapa sawit, sehingga aksesibilitas sangat terbuka. Aksesibilitas jalan ini memudahkan masyarakat untuk menuju lokasi-lokasi penting terutama fasilitas kesehatan dan sarana Pendidikan.



Gambar 38. Foto keadaan fasilitas transportasi menuju ibukota Kecamatan dan Provinsi

Matapencaharian | Perekonomian masyarakat di sekitar unit manajemen didukung dari sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan berasal dari komoditi kelapa sawit yang utama dan komoditi karet (**Gambar 39**). Sedangkan sektor pertanian berasal dari komoditi kacang panjang, pisang, cabai besar, terung, ketimun (**Gambar 40**). Hasil dari perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Hasil panen kelapa sawit sangat mudah dijual kepada agen-agen pengumpul yang ada di masing-masing desa (**Gambar 41**).

Selain dari hasil perkebunan dan pertanian dari lahan milik masyarakat, matapencaharian lain masyarakat didapatkan dari bekerja sebagai karyawan perkebunan PT JBP. Menurut hasil wawancara dengan manajemen PT JBP, hampir 99% masyarakat dari masing-masing desa bekerja di PT JBP. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari warga setempat kebanyakan membeli, khususnya untuk beras dan sayuran. Beberapa warga membeli di warung dan toko, karena kondisi akses desa ke pusat kecamatan yang cukup dekat, sehingga masyarakat langsung membeli kebutuhan dasarnya di pasar kecamatan. Warung/kios yang ada di desa

cukup menyediakan kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako hingga bahan bakar minyak. Adapun sarana prasarana ekonomi desa seperti koperasi ataupun fasilitas keuangan lainnya belum ada. Sehingga, untuk transaksi keuangan warga yang menggunakan fasilitas perbankan harus menuju ke pusat kecamatan.



Gambar 39. Foto kebun kelapa sawit dan kebun karet milik masyarakat



Gambar 40. Foto kebun pertanian pisang dan cabe milik masyarakat



Gambar 41. Foto agen-agen pengumpul buah sawit di masing-masing desa

Lahan persawahan dan kebun campuran pernah menjadi komoditas utama di desa – desa sekitar PT JBP. Namun saat ini 80% dari lahan persawahan sudah dikonversi menjadi perkebunan sawit. Konversi ini terjadi karena hasil dari kelapa sawit lebih terlihat dan membuat perekonomian masyarakat meningkat. Hal ini sejalan dengan luas tanaman perkebunan sawit yang meningkat dari 17.599 pada tahun 2019, menjadi 17.610 pada tahun 2020. Matapencaharian masyarakat dari kebun kelapa sawit pribadi semakin meningkat, karena masyarakat yang telah bekerja di kebun sawit mengkonversi kebun campuran atau lahan persawahan menjadi kebun sawit. Hal tersebut tentunya semakin memicu cepatnya perkembangan komoditas kelapa sawit.

Pendidikan | Di tingkat Kecamatan Kumpeh, secara umum sektor pendidikan sudah memadai. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021 dan Data BPS Kecamatan Kumpeh 2021, jumlah SD sederajat sebanyak 23 unit, SMP sederajat sebanyak 5 unit, SMA sederajat sebanyak 1 unit, dan SMK sebanyak 1 unit.

Rasio Guru dan Murid di sekolah-sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA di Kecamatan-Kecamatan sekitar unit manajemen jauh lebih kecil dari pada standar Rasio Guru : Murid. Namun demikian, idealnya berdasarkan referensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rasio Guru : Murid yang ideal bagi Indonesia adalah 1 : 29 untuk jenjang pendidikan SD, 1 : 24 untuk SMP, dan 1 : 20 untuk SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pada sekolah-sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kecamatan Kumpeh masih tercukupi untuk jumlah guru. **Tabel 14** menyajikan Ringkasan profil pendidikan dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga tingkatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tingkat Kecamatan Kumpeh di sekitar unit manajemen.

Tabel 14. Profil pendidikan TK hingga SMA di Kabupaten dan Kecamatan

Kecamatan/ Desa	Sekolah (Unit)	Guru (orang)	Murid (orang)	Rasio Murid:Sekolah	Rasio Murid:Guru
Sekolah Dasar (SD)					
Kecamatan Kumpeh	23	154	3,052	133	20
Desa Sungai Aur	2	6	104	52	17
Desa Jebus	1	7	75	75	11
Desa Gedong Karya	2	3	19	9	6
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Kecamatan Kumpeh	5	47	609	122	13
Desa Sungai Aur	1	6	23	1	4
Desa Jebus	-	-	-	-	-
Desa Gedong Karya	-	-	-	-	-
Madrasah Tsanawiyah					
Kecamatan Kumpeh	5	-	-	-	-
Desa Sungai Aur	-	-	-	-	-
Desa Jebus	1	-	-	-	-
Desa Gedong Karya	-	-	-	-	-
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Kecamatan Kumpeh	1	57	789	789	14
Desa Sungai Aur	-	-	-	-	-
Desa Jebus	-	-	-	-	-
Desa Gedong Karya	-	-	-	-	-
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Kecamatan Kumpeh	1	16	98	1	6
Desa Sungai Aur	-	-	-	-	-
Desa Jebus	-	-	-	-	-
Desa Gedong Karya	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka Tahun 2021 (BPS Kabupaten Muaro Jambi dan BPS Kecamatan Kumpeh), diolah



SD Negeri Desa Jebus



SD Negeri Desa Sungai Aur

Gambar 42. Foto kondisi sarana pendidikan di Kecamatan Kumpeh

Kesehatan Masyarakat | Mayoritas warga telah menggunakan pengobatan modern jika terserang penyakit, baik mendatangi tenaga medis secara langsung, maupun membeli obat kimia yang banyak dijual di warung. Hal ini didukung oleh adanya sarana prasarana kesehatan yang cukup tersedia didesa dan mudah dijangkau. Warga sudah tidak menggunakan pengobatan tradisional. Fasilitas kesehatan dapat di jumpai di Pusat Kecamatan Kumpeh berupa Puskesmas dan Klinik. Sedangkan ditingkan desa hanya tersedia Pustu dan Posyandu (**Gambar 43**).

Tabel 15. Kondisi sarana dan paramedis di tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Kecamatan	Sarana Kesehatan					
	Rumah Sakit	Puskesmas dan Klinik	Pustu	Posyandu	Dokter	Bidan
Kumpeh	-	18	14	32	3	19

Sumber: Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka Tahun 2021 (BPS Kabupaten Muaro Jambi dan BPS Kecamatan Kumpeh), diolah



Gambar 43. Foto keberadaan Posyandu dan Puskesmas di sekitar unit manajemen

Air Bersih dan Sanitasi | Air merupakan sumber kehidupan masyarakat, di tingkat kabupaten telah terdistribusi jaringan air minum PDAM ke ibukota kecamatan dengan beberapa desa yang berdekatan. Namun demikian, fasilitas PDAM ini belum sampai di Kecamatan Kumpeh.

Berdasarkan hasil wawancara, Masyarakat setempat mengambil air bersih untuk keperluan MCK dan sanitasi dari sumur gali dan sumur bor. Selain itu, Sungai Batanghari juga masih digunakan untuk keperluan MCK atau sanitasi.

Sumber air minum didapatkan sebagian besar dari sumur bor, sumur gali. Selain itu, Sebagian kecil didapatkan dari menggunakan air minum galon isi ulang. Terdapat depot isi ulang air minum di setiap desa dengan harga Rp.5.000 per galon. **Gambar 44** menyajikan sumber air bersih masyarakat di sekitar unit manajemen.



Sumur gali

Masyarakat yang memanfaatkan Sungai Batanghari

Gambar 44. Kondisi sumber air bersih masyarakat

Perumahan dan peralatan rumah tangga | Infrastruktur untuk perumahan di desa-desa sekitar unit manajemen sudah didominasi perumahan dengan bahan utama tembok, namun demikian, masih ditemukan masyarakat menggunakan kayu sebagai bahan utama pembuatan rumah (**Gambar 45**). Untuk bangunan baru menggunakan bahan bangunan batu bata, semen, dan atap genteng yang tersedia di toko bangunan di Kecamatan Kumpeh atau Ibukota Jambi. Masyarakat sudah mengganti bahan utama perumahan dari kayu menjadi betok disebabkan sulitnya mencari kayu saat ini karena disekitar desa sudah menjadi perkebunan kelapa sawit.



Gambar 45. Foto kondisi perumahan masyarakat di sekitar unit manajemen

Peralatan rumah tangga tradisional lokal alami sehari-hari dari bahan kayu, bambu, pandan dan rotan seperti bakul, keranjang, tikar dan alat penangkap ikan sebagian besar sudah tergantikan dengan produk plastik pabrikan yang dapat didapatkan/beli di toko kelontong dan pedagang keliling (**Gambar 46**).



Toko Sembako dan Alat Rumah Tangga

Toko Bangunan dan Tani

Gambar 46. Foto kondisi toko sembako, alat rumah tangga, dan bangunan

Infrastruktur Listrik, Energi Rumah Tangga, Telekomunikasi, Lembaga Keuangan | Untuk fasilitas Layanan listrik dari PLN sudah mengcover di semua desa-desa di sekitar unit manajemen. Energi rumah tangga untuk kebutuhan transportasi didapatkan dari BBM. BBM konsumsi kendaraan bermotor masyarakat berkisar antara Rp. 10-12 ribu/liter tergantung lokasinya. Energi rumah tangga untuk memasak besar kompor gas LPG 3 Kg mendapat bantuan dari program konversi energi dari pemerintah, dan sebagian besar masih dikombinasikan pemakaian tungku kayu untuk jumlah masakan yang banyak, ketersediaan kayu bakar masih cukup banyak tersedia di sekitar rumah-rumah masyarakat, harga isi ulang tabung gas 3 kg berkisar Rp 23-30 ribu/tabung.

Sarana telekomunikasi telah tersedia di masing-masing desa. Telekomunikasi dengan provider Telkomsel sudah sangat mudah dijangkau. Lembaga keuangan pun telah tersedia di Kecamatan Kumpeh. Terdapat lembaga keuangan berupa BRI Link di Kecamatan Kumpeh. Dengan adanya sarana telekomunikasi dan sarana lembaga keuangan, menjadikan masyarakat memiliki kegiatan usaha lain seperti jual-beli, jasa, dan usaha toko kelontong. Foto kondisi fasilitas infrastruktur listrik, energi, dan telekomunikasi tersaji pada **Gambar 47**.



Infrastruktur listrik



GAS LPG di toko kelontong



Bensin

Gambar 47. Kondisi infrastruktur listrik dan penggunaan energi rumah tangga

Organisasi Komunitas Desa | Organisasi / kelompok komunitas masyarakat di 3 desa dengan dominasi etnis dan agama yang sama mempunyai ciri yang sama dalam mengorganisasikan komunitas Masyarakat desanya. Pada organisasi keagamaan adalah kelompok pengajian / takmir masjid. Perkumpulan kegiatan kelompok ini sangat aktif dan berlangsung setiap 1 minggu sekali kegiatan. Sedangkan pada organisasi pada kelompok PKK, kelompok kader Posyandu, kelompok Karang Taruna yang terbentuk umumnya karena sosial budaya dan hobby, seperti olahraga populer sepak bola dan volley yang dilakukan hampir setiap sore di lapangan desa-desa. Untuk kelompok PKK dan Kader Posyandu umumnya dikendalikan berdasarkan kepentingan dari desa dan Puskesmas. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Sungai Aur, PT JBP membuat pertandingan bola secara rutin tiap tahun di lapangan bola PT JBP dengan mengundang desa-desa sekitar. Kegiatan ini dianggap sangat positif untuk komunitas anak muda atau karang taruna.

Kapasitas memadai untuk mengakumulasi kekayaan | Masyarakat di 3 desa di sekitar unit manajemen sebagian besar sudah memiliki berkapasitas yang memadai dalam mengakumulasi kekayaannya dari hasil budidaya dan hasil dari kebun kelapa sawit atau karet yang dikelola secara mandiri. Lahan masyarakat sebagian besar sudah banyak dikonversi menjadi kebun kelapa sawit, berkembangnya kebun kelapa sawit mandiri juga memicu terbukanya lapangan kerja lepas untuk masyarakat sebagai pekerja lepas perawatan kebun, pemanen lepas dan transporter TBS. Terbuka dan banyaknya potensi pekerjaan meningkatkan pendapatan keluarga yang terakumulasi untuk membuka usaha baru terkait potensi usaha yang terus berkembang, usaha baru masyarakat di sekitar desa yang populer dan pesat berkembangnya selain kebun kelapa sawit dan karet adalah pembangunan budidaya burung wallet (**Gambar 48**).



Gambar 48. Foto budidaya walet yang marak berkembang di setiap desa

Pertanian dan Peternakan Skala Kecil | Pertanian masyarakat umumnya menanam dengan tanaman sayuran seperti cabe, kacang panjang, dan timur. Penanaman sayur-sayuran ini dilakukan pada sekitar kebun kelapa sawit masyarakat. Sedangkan peternakan masyarakat sebagai alternatif simpanan belum populer dan belum berkembang. Tradisi pengembalaan seperti sapi dan kambing utamanya dikelola dalam skala kecil oleh masyarakat di kandang-kandang di sekitar rumah dan sekitar kebun kelapa sawit (**Gambar 49**). Berdasarkan hasil wawancara, pakan-pakan ternak ini didapatkan dari sekitar kebun kelapa sawit dan karet masyarakat.



Kandang kambing sekitar rumah

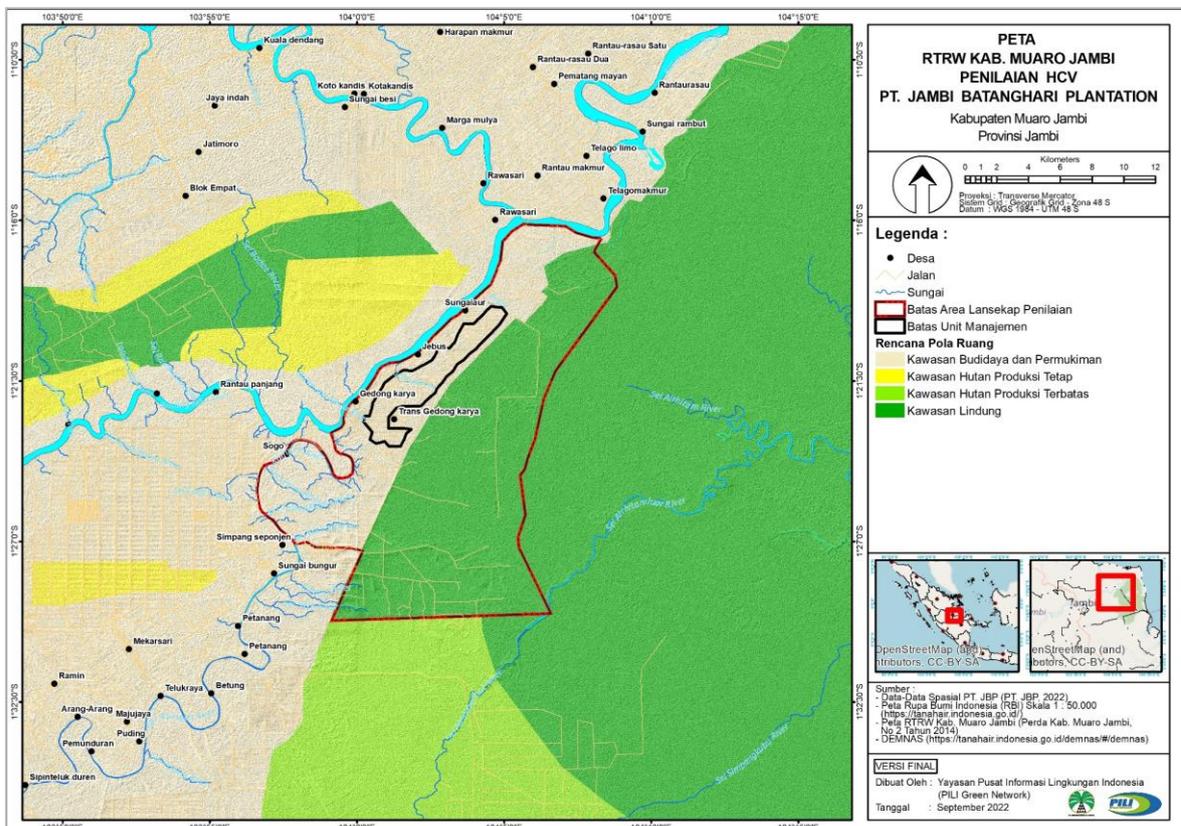


Kandang kambing di kebun kelapa sawit masyarakat

Gambar 49. Foto pertanian skala kecil di sekitar unit manajemen

Menangkap ikan dan berburu | Tradisi untuk menangkap ikan dan berburu dilakukan hanya sekedar hobby, karena sebagian besar warga adalah bekerja di perkebunan dan mengelola kebun sendiri. Kebutuhan protein hewani tambahan sehari-hari utamanya diperoleh dari hasil membeli di pasar atau dari pedagang keliling dari desa lainnya serta menangkap ikan di sungai dengan cara memancing untuk mengisi waktu luang. Aktifitas berburu juga sudah tidak dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jebus, berburu sudah lama ditinggalkan karena area-area untuk berburu sudah tidak ada. Selain itu, hewan yang diburu sudah tidak tersedia dan mayoritas lahan-lahan sekitar unit manajemen adalah rawa gambut, sehingga aksesibilitas masyarakat untuk berburu pun sulit.

Penggunaan Lahan dan Konteks Pembangunan | Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 02/2014, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014-2034, unit manajemen berada di kawasan dengan peruntukan sebagai Kawasan budidaya dan permukiman. Berdasarkan informasi tersebut, unit manajemen sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Peta Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Muaro Jambi yang sudah di overlay dengan AOI dapat di lihat pada **Gambar 50**.



Gambar 50. AOI terhadap peta RTRW Kabupaten Muaro Jambi

6.5 Tata Guna Lahan dan Tren Pembangunan

Riwayat Penggunaan Lahan dan Tren Pembangunan | Program pembangunan di tiga desa sudah dilakukan sejak tahun 1980-an, masyarakat sudah melakukan aktifitas pertanian dan perkebunan di sekitar desa. Pada tahun yang sama, dengan hadirnya Perusahaan HPH di sekitar desa yaitu PT Putra Duta Indah Wood) membuat masyarakat memiliki aktifitas lain yaitu bekerja di perusahaan tersebut dan melakukan aktifitas pengambilan kayu di area-area hutan tersisa. Aktifitas pengambilan kayu oleh perusahaan dan masyarakat berlangsung hingga tahun 1995.

Penggunaan lahan lain yang ada di AOI adalah program transmigrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi. Program transmigrasi ini dilakukan sejak tahun 1996 dengan kegiatan awal pembuatan kanalisasi untuk pengeringan lahan. Program pembangunan lahan transmigrasi berlangsung hingga tahun 2004, dimana pada tahun 1999 dilakukan program transmigrasi pertama dengan mendatangkan masyarakat Jawa ke sekitar AOI dan pada tahun 2004 dilakukan program transmigrasi kedua.

Penggunaan lahan lain yang ada di AOI adalah masuknya perkebunan kelapa sawit. PT JBP mendapatkan Izin Lokasi pertama untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2008. Tentunya dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit membuat perekonomian masyarakat semakin meningkat dengan bekerja di perusahaan. Selain itu, pada tahun 2009 masyarakat mulai melakukan aktifitas membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara mandiri.

Tran pembangunan perkebunan kelapa sawit ini semakin meningkat pada periode tahun 2008 hingga saat ini. Terbukti pada tahun 2022 terdapat beberapa perusahaan lain selain PT JBP di sekitar AOI. Selain itu, masyarakat juga sudah beraktifitas mengelola perkebunan kelapa sawit secara mandiri dengan aktif. Hal ini disebabkan, matapencaharian utama atau perekonomian masyarakat didapatkan dari hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat.

RTRW | Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014-2034, AOI berada pada peruntukkan (i) kawasan budidaya dan permukiman dan (ii) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (*lihat Gambar 50*).

Tata guna lahan kedepannya masih diperuntukkan untuk lahan perkebunan dengan masa berlaku panjang (12 tahun). Komoditi perkebunan paling utama di Kecamatan Kumpeh saat penilaian ini dilakukan adalah kelapa sawit baik yang dikelola oleh perusahaan maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat, tampaknya komoditi kelapa sawit masih menjadi andalan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi pun memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan perkebunan yaitu “Peremajaan Sawit Rakyat – PSR”. Program ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan survei lapangan, kecenderungan *tren* pembangunan saat ini dan ke depan dari pemerintah berfokus kepada pembangunan akses jalan dan pembangunan kelapa sawit masyarakat sejalan dengan program PSR. Pembangunan ini dilakukan seiring dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat dari hasil perkebunan kelapa sawit dan komoditi lainnya. Sedangkan *tren* pengembangan pemanfaatan lahan untuk perusahaan secara komersial di masa depan sudah tidak tersedia. Hal ini disebabkan tidak adanya lahan kosong atau seluruh wilayah telah dikuasai oleh perusahaan dan masyarakat.

6.6 Analisis Citra dan Klasifikasi Tutupan Lahan

Citra Satelit | Citra satelit yang digunakan untuk analisis tutupan lahan dalam penilaian HCV adalah Landsat 9 OLI TIRS, Landsat 5 TM, dan citra resolusi tinggi dari *Google Earth*. Citra satelit Sentinel-2A tidak digunakan dalam penilaian ini, hal ini disebabkan tidak tersedia citra satelit Sentinel-2A yang bersih dari tutupan awan pada periode tahun 2022.

Citra satelit Landsat 9 OLI TIRS yang digunakan dengan tanggal akuisisi 28 Juni 2022 dan 31 Agustus 2022. Citra satelit Landsat 9 OLIT TIRS dengan tanggal akuisisi 31 Agustus 2022 digunakan untuk menganalisis tutupan lahan awal dan tutupan lahan akhir. Sedangkan citra satelit Landsat 9 dengan tanggal akuisisi 28 Juni 2022 digunakan untuk membantu analisa tutupan lahan pada area tertutup awan di citra satelit Landsat 9 OLI TIRS tanggal akuisisi 31 Agustus 2022. Seluruh citra satelit tersebut bersumber dari *United States Geological Survey* (USGS)⁷⁾ dengan resolusi dan tanggal akuisisi yang tersaji pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Deskripsi citra satelit dan foto udara yang digunakan dalam penilaian HCV

Data	Scene/ Path-row	Tanggal/Tahun Akuisisi	Resolusi Spasial	Penutupan Awan
Landsat 9 OLI TIRS	125/061	28 Juni 2022 31 Agustus 2022	30 m	<10% 0%
Landsat 5 TM	125/061	1 Oktober 2007 31 Mei 2009	30 m	<10% 0%
Digital globe (Sumber Google Earth)	-	Tahun 2015	1 m	<5%

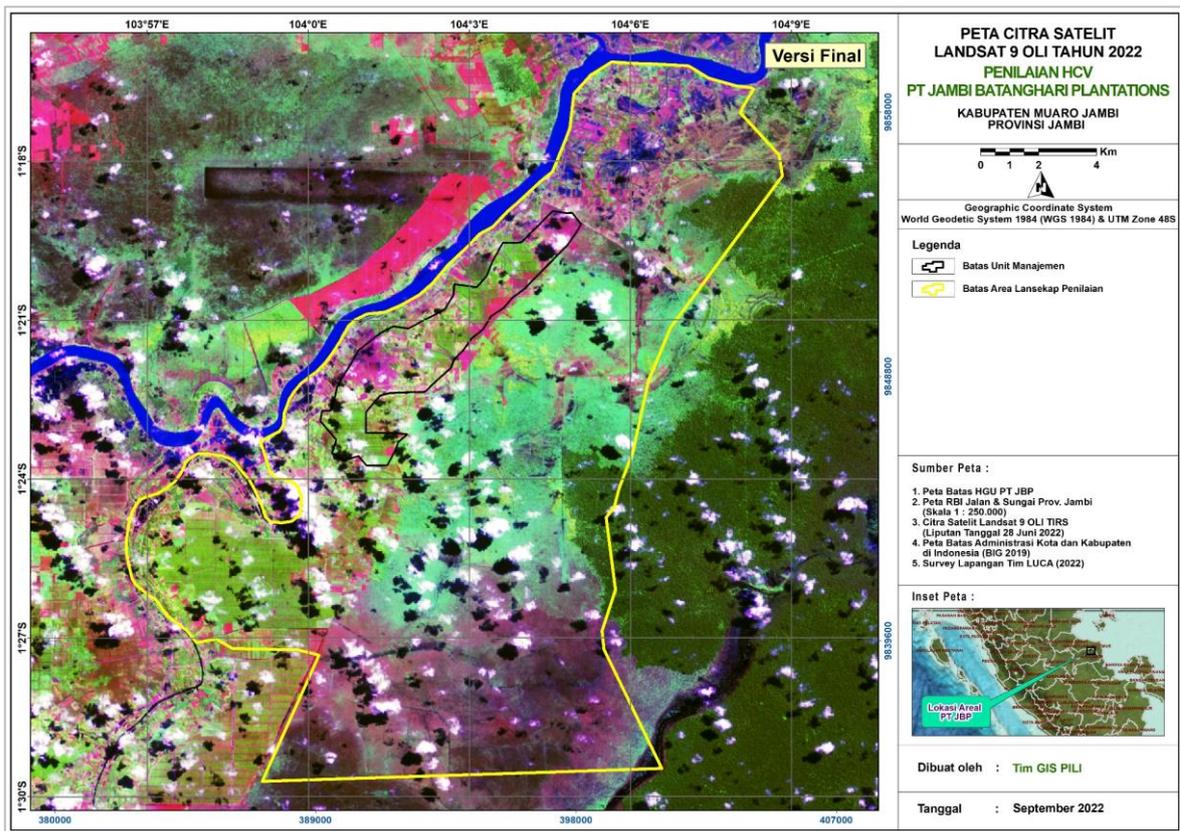
Pemilihan citra satelit tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan, yaitu (i) seluruh citra satelit tersebut memiliki *time series* atau tanggal yang paling dekat dengan waktu penilaian HCV; (ii) seluruh citra satelit tersebut memiliki *band spectral* yang berguna untuk mendapatkan *pseudo-natural colour* dan kerapatan vegetasi; (iii) menyediakan piksel *reflektansi Bottom of Atmosphere* (BOA) yang dapat mengklasifikasikan awan, bayangan awan, vegetasi, tanah/gurun, air, dll (Sentinel-2 User Handbook, 2015); dan (iv) memiliki proyeksi (cartographic geometry) UTM/WGS 84 (Sentinel-2 User Handbook, 2015). Peta citra satelit Landsat 9 OLI TIRS akuisisi 28 Juni 2022 tersaji pada **Gambar 51**, citra satelit Landsat 9 OLI TIRS akuisisi 31 Agustus 2022 tersaji pada **Gambar 52**, dan citra resolusi tinggi *Google Earth* tersaji pada **Gambar 53**.

Metode Analisis Citra dan Klasifikasi Tutupan Lahan | Sebelum analisis tutupan lahan dilakukan, seluruh citra satelit harus melalui proses awal (*pre-processing image*) yaitu *image composite*. *Image composite* dilakukan dengan mengabungkan band 6, band 5, dan band 3 dalam citra satelit Landsat 9 OLI TIRS; band 5, band 4, dan band 2 dalam citra satelit Landsat 5 TM. Penggabungan band citra satelit tersebut untuk mendapatkan *pseudo-natural colour*⁸⁾ atau kombinasi warna untuk segmentasi tutupan lahan. Proses *image composite* dilakukan dengan menggunakan *image analysis tools* pada software ArcGIS 10.5. Hasil proses awal atas citra satelit tersebut digunakan untuk analisis segmentasi tutupan lahan.

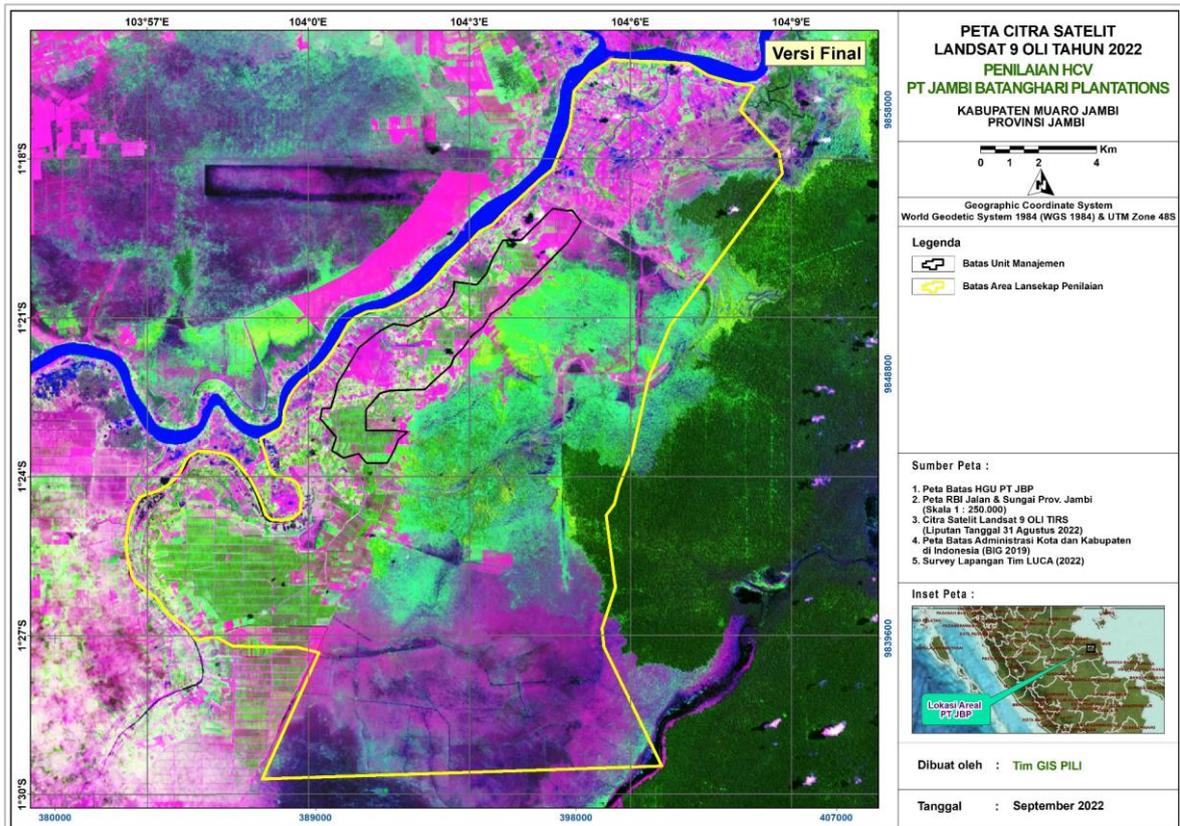
Analisis segmentasi tutupan lahan dilakukan menggunakan visual interpretation dengan on-screen manual digitizing terhadap citra satelit. Untuk membedakan antar tipe tutupan lahan, metode ini mempertimbangkan warna, tekstur, bentuk, lokasi, ukuran objek yang terlihat pada citra satelit. Analisis segmentasi tutupan lahan dengan menggunakan object-based visual interpretation dilakukan di area lanskap (di luar unit manajemen), sedangkan segmentasi tutupan lahan dengan menggunakan visual interpretation dengan on-screen manual digitizing dilakukan di dalam unit manajemen.

⁷⁾ Citra satelit Sentinel-2A diunduh pada alamat <https://earthexplorer.usgs.gov/>

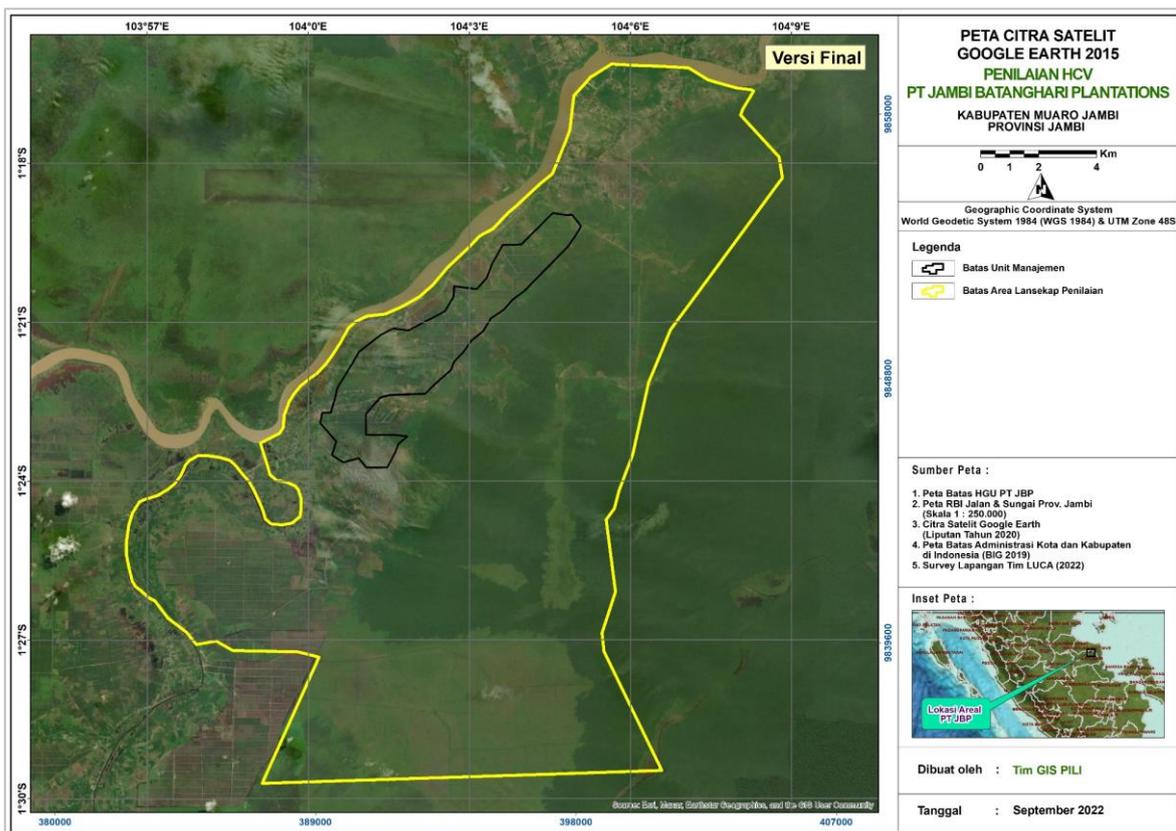
⁸⁾ Zhang, Z., F. Werner, H.-M. Cho, G. Wind, S.E. Platnick, A.S. Ackerman, L. Di Girolamo, A. Marshak, and K. Meyer, 2017: A framework for quantifying the impacts of sub-pixel reflectance variance and covariance on cloud optical thickness and effective radius retrievals based on the bi-spectral method. In Radiation Processes in the Atmosphere and Ocean (IRS2016): Proceedings of the International Radiation Symposium (IRC/IAMAS), 16-22 April 2016, Auckland, New Zealand, AIP Conference Proceedings, vol. 1810, pp. 030002, doi:10.1063/1.4975502.



Gambar 51. Citra satelit Landsat 9 OLI TIRS tanggal akuisisi 28 Juni 2022 di area penilaian



Gambar 52. Citra satelit Landsat 9 OLI TIRS tanggal akuisisi 31 Agustus 2022 di area penilaian



Gambar 53. Citra resolusi tinggi Google Earth tahun 2015 di area penilaian

Analisis segmentasi tutupan lahan dilakukan dengan melihat setiap objek atas pertimbangan warna, tekstur, bentuk, dan ukuran yang akan dipisahkan menjadi kelas penutupan lahan. Setiap objek dengan komposisi warna, tekstur, bentuk dan ukuran yang berbeda akan dipisahkan menjadi kelas tutupan lahan yang berbeda. Selanjutnya, hasil segmentasi tutupan lahan diklasifikasikan menjadi tutupan lahan yang mengacu pada SNI 7645-1: 2014 tentang: Klasifikasi Tutupan Lahan-Bagian 1: Skala kecil dan menengah. Proses segmentasi dan klasifikasi tutupan lahan dilakukan menggunakan software ArcGIS 10.5.

Tahapan Analisis Klasifikasi Tutupan Lahan | Tutupan lahan awal dihasilkan pada tahap pra-penilaian yang akan digunakan untuk mempersiapkan studi pemeriksaan awal. Citra satelit yang digunakan untuk analisis klasifikasi tutupan lahan awal adalah citra satelit Landsat 9 OLI TIRS akuisisi 31 Agustus 2022 yang di bantu menggunakan citra Landsat 9 akuisisi 28 Juni 2022. Analisis klasifikasi tutupan lahan awal dilakukan dengan menggunakan *training sample* berupa Titik Imajiner (**Gambar 54**). Titik Imajiner yang dimaksud adalah verifikasi tutupan lahan aktual melalui citra resolusi tinggi dari *google earth*. Hasil analisis klasifikasi tutupan lahan awal menghasilkan tujuh kelas tutupan lahan yang tersaji pada **Tabel 17** dan **Gambar 55**.

Verifikasi lapangan dilakukan sebagai dasar untuk melakukan validasi data tutupan lahan hasil klasifikasi tutupan lahan awal. Metode verifikasi tutupan lahan dilakukan dengan cara observasi secara visual. Pada penilaian HCV ini, verifikasi tutupan lahan secara observasi visual (*ground truthing*) dilakukan pada tahapan studi pemeriksaan awal dan tahapan penilaian lengkap. Distribusi titik *ground truthing* verifikasi lapangan dilakukan dengan cara *purposive*. Pada tahap studi pemeriksaan awal, distribusi titik *ground truthing* dilakukan dengan mempertimbangkan kelas tutupan lahan yang diduga memiliki rona citra satelit yang berbeda. Sedangkan pada tahap penilaian lengkap, distribusi titik *ground truthing* difokuskan pada area-area yang belum dikunjungi pada tahap studi pemeriksaan awal. Verifikasi lapangan dilakukan

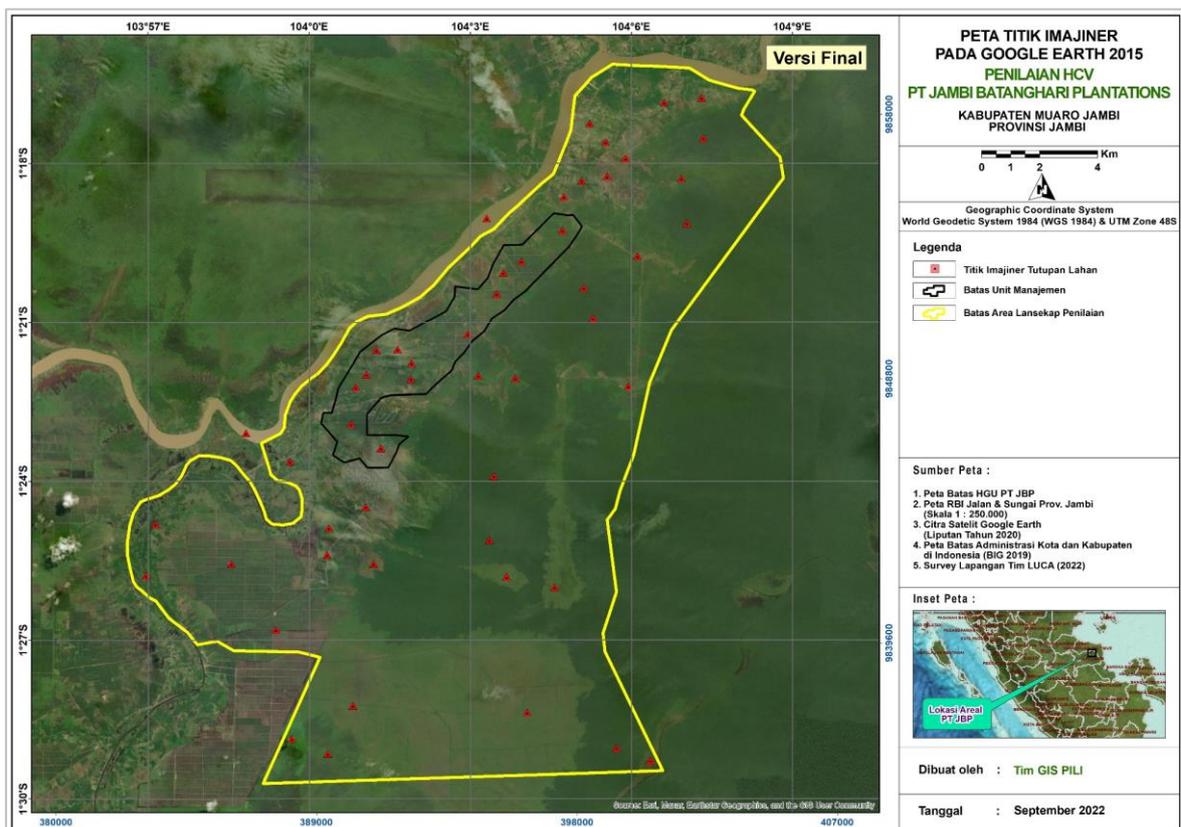
dengan menggunakan alat GPS dan kamera untuk mendata koordinat lokasi dan foto yang diambil dari lima arah yaitu Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tajuk (arah atas).

Jumlah titik *ground truthing* verifikasi tutupan lahan adalah 313 titik (**Tabel 18**), yang terdiri dari 77 titik *ground truthing* saat tahap studi pemeriksaan awal dan 236 titik *ground truthing* saat tahap penilaian lengkap. Berdasarkan sample verifikasi tutupan lahan tersebut, terdapat lima kelas tutupan lahan yang jumlah titik *ground truthing* relatif sedikit (kurang dari 50 titik) yaitu belukar, semak, permukiman, perkebunan karet, dan badan air. Kurangnya titik di tutupan lahan tersebut disebabkan luasan tutupan lahan yang relatif kecil di area penilaian (**Gambar 56**). Selain itu, pada survey tahap penilaian lengkap teridentifikasi dua tutupan lahan baru yaitu kebun karet campuran dan perkebunan karet. Kedua tutupan lahan ini sulit untuk diidentifikasi berdasarkan rona citra satelit, sehingga verifikasi tutupan lahan dilakukan saat kunjungan lapangan.

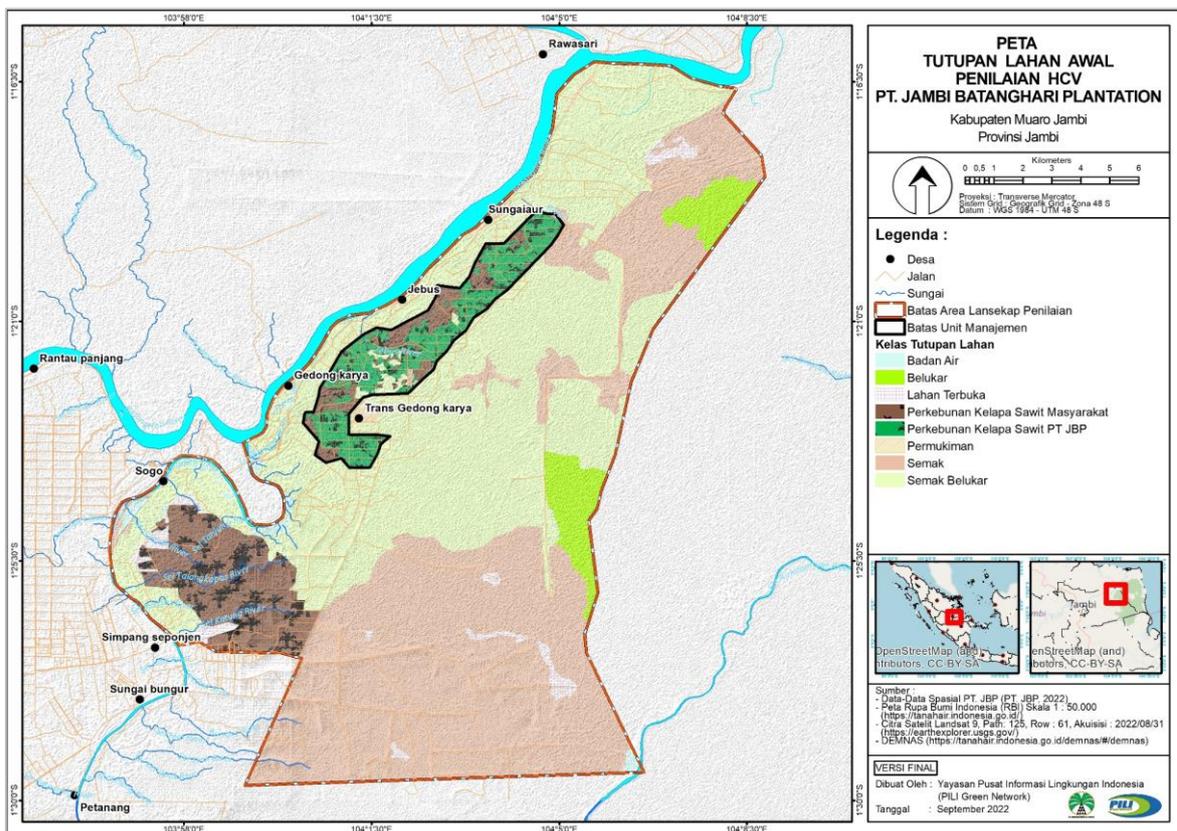
Tabel 17. Luas klasifikasi tutupan lahan awal di area penilaian

Tutupan Lahan*	Unit Management		Area Penilaian**	
	ha	%	ha	%
Belukar	-	-	1,013.5	3.6
Semak Belukar	96.8	5.0	11,945.1	42.5
Semak	17.9	0.9	10,504.6	37.3
Lahan Terbuka	-	-	429.0	1.5
Perkebunan Kelapa Sawit***	1,838.3	94.1	2,370.0	8.4
Permukiman	-	-	192.1	0.7
Badan Air	-	-	357.5	1.3
Total	1,953.0	100.0	28,135.0	100.0

Keterangan: * SNI 7645-1:2014 Klasifikasi penutup lahan – Bagian 1: Skala kecil dan menengah;
 **Perhitungan luas area penilaian keseluruhan, termasuk didalamnya unit manajemen
 *** Luas perkebunan kelapa sawit merupakan penggabungan dari kelapa sawit milik PT JBP dan masyarakat



Gambar 54. Lokasi titik imajiner pada resolusi tinggi Google Earth tahun 2021



Gambar 55. Tutupan lahan awal di area penilaian

Klasifikasi tutupan lahan awal selanjutnya divalidasi dengan titik *ground truthing* dari tahap studi pemeriksaan awal dan tahap penilaian lengkap. Validasi titik *ground truthing* terhadap klasifikasi tutupan lahan awal akan menghasilkan klasifikasi tutupan lahan akhir. Klasifikasi tutupan lahan akhir akan di uji menggunakan *accuracy assessment* dengan menghasilkan *overall accuracy* dan *kappa accuracy*.

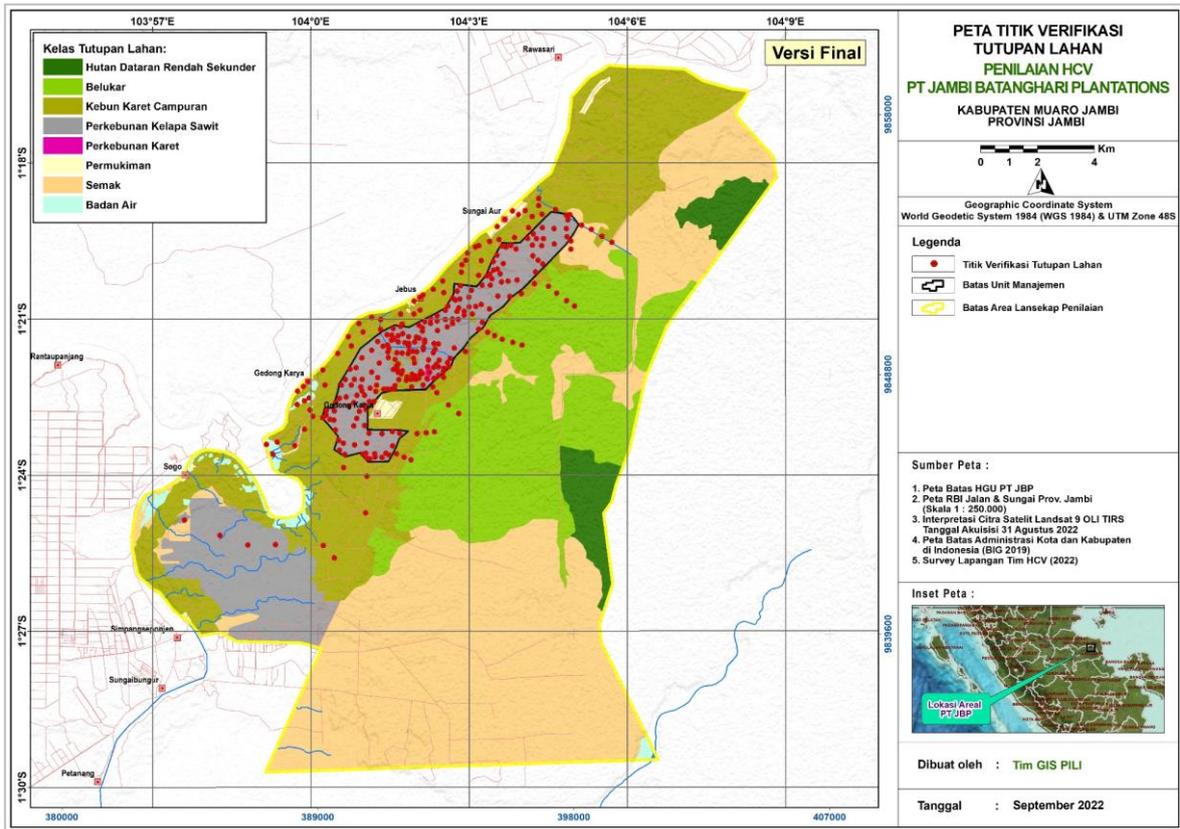
Tabel 18. Jumlah titik *ground truthing* tutupan lahan di area penilaian

Kelas Tutupan Lahan Akhir	Sampel Verifikasi Tutupan Lahan		Jumlah Sampel
	Tahap Studi Pemeriksaan Awal	Tahap Penilaian Lengkap	
Belukar	-	13	41
Semak	1	6	18
Kebun Karet Campuran	12	71	92
Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat	11	98	9
Perkebunan Kelapa Sawit PT JBP	50	29	7
Perkebunan Karet	-	5	58
Permukiman	3	7	273
Badan Air	-	7	
Total	77	236	313

Hasil *accuracy assessment* didapatkan nilai *overall accuracy* adalah 95.4 dan *kappa accuracy* adalah 92.1 (**Tabel 19**). Hasil *kappa accuracy* tersebut berada pada kategori *almost perfect opportunity*⁹. Namun terdapat perbedaan hasil interpretasi tutupan lahan dengan kondisi lapangan, seperti belukar yang diinterpretasi pada tutupan lahan awal ternyata kondisi

⁹ Cohen, J. (1968). Weighted kappa: Nominal scale agreement provision for scaled disagreement or partial credit. *Psychological Bulletin*, 70(4), 213–220. <https://doi.org/10.1037/h0026256>

lapangan berupa kebun karet campuran. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan terhadap tutupan lahan awal, sehingga menghasilkan klasifikasi tutupan lahan akhir. Klasifikasi tutupan lahan akhir menghasilkan delapan kelas tutupan lahan yang tersaji pada **Tabel 20** dan **Gambar 57**. Deskripsi tutupan lahan akhir dan foto kondisi tutupan lahan tersaji pada **Tabel 21**. Pada tutupan lahan akhir ditemukan tutupan hutan dataran rendah sekunder. Tutupan ini berada di AOI bagian Barat. Titik verifikasi *groudtruthing* tidak dilakukan di tutupan lahan ini disebabkan keterbatasan aksesibilitas menuju ke tutupan lahan tersebut. Sehingga penetapan tutupan lahan dilakukan berdasarkan rona citra satelit Landsat 9 OLI TIRS.



Gambar 56. Titik *ground truthing* tutupan lahan di area penilaian

Tabel 19. Accuracy assessment tutupan lahan akhir di area penilaian

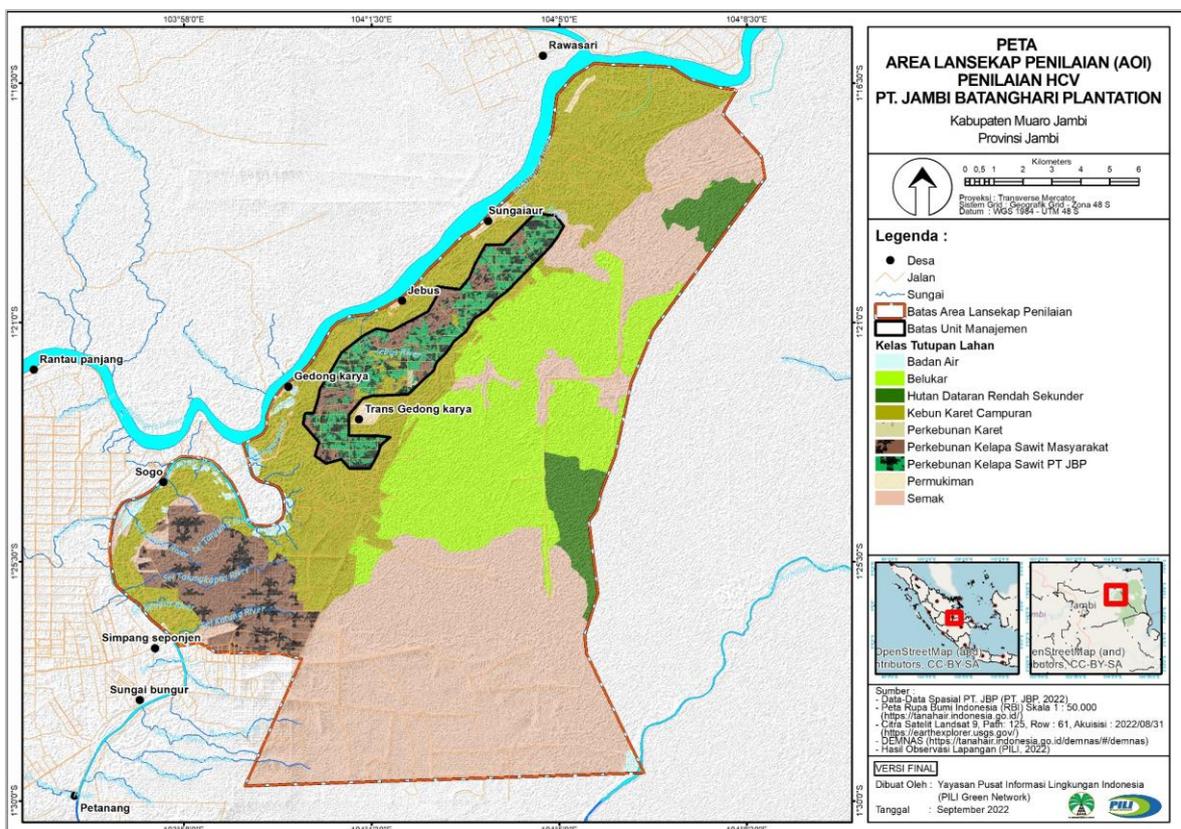
	Landcover	Field Verification Results							Total	User Accuracy	UA %
		1	2	3	4	5	6	7			
Satellite Image Interpretation Results	1	13	-	12	-	-	-	-	25	0.5	52.0
	2	-	7	-	2	-	-	-	9	0.8	77.8
	3	-	-	71	-	-	-	-	71	1.0	100.0
	4	-	-	-	3	-	-	-	3	1.0	100.0
	5	-	-	-	-	188	-	-	188	1.0	100.0
	6	-	-	-	-	-	10	-	10	1.0	100.0
	7	-	-	-	-	-	-	7	7	1.0	100.0
	Total		13	7	83	5	188	10	7	313	
Produser Accuracy		1.0	1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	1.0		Overall Accuracy	
PA %		100.0	100.0	85.4	60.0	100.0	100.0	100.0		95.4	
										Kappa Accuracy	
										92.1	

Note: 1. Belukar, 2. Semak, 3. Kebun Karet Campuran, 4. Perkebunan Karet, 5. Perkebunan Kelapa Sawit, 6. Permukiman, 7. Badan Air

Tabel 20. Luas dan klasifikasi tutupan lahan akhir di area penilaian

Tutupan Lahan*	Unit Management		Area Penilaian**	
	ha	%	ha	%
Hutan Dataran Rendah Sekunder	-	-	1,013.5	3.6
Belukar	-	-	5,366.4	19.1
Semak	3.7	0.2	10,919.1	38.8
Kebun Karet Campuran	96.5	4.9	6,577.3	23.4
Perkebunan Karet	14.5	0.7	14.5	0.1
Perkebunan Kelapa Sawit***	1,837.2	94.1	3,692.1	13.1
Permukiman	-	-	192.1	0.7
Badan Air	1.1	0.1	359.9	1.3
Total	1,953.0	100.0	28,135.0	100.0

Keterangan: * SNI 7645-1:2014 Klasifikasi penutup lahan – Bagian 1: Skala kecil dan menengah;
 **Perhitungan luas area penilaian keseluruhan, termasuk didalamnya unit manajemen
 *** Luas perkebunan kelapa sawit merupakan penggabungan dari kelapa sawit milik PT JBP dan masyarakat



Gambar 57. Tutupan lahan akhir di area penilaian

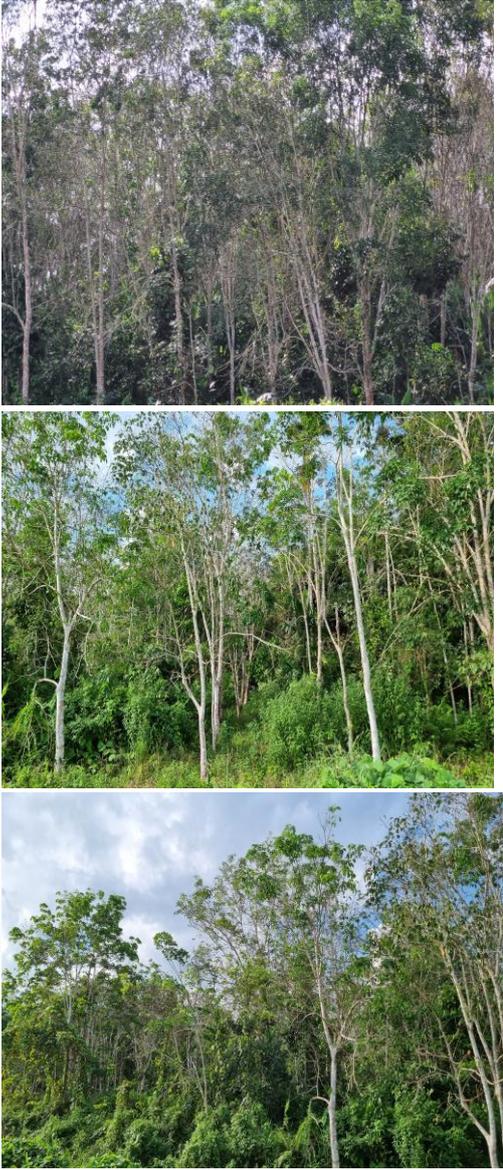
Tabel 21. Deskripsi, keberadaan dan foto tutupan lahan di area penilaian

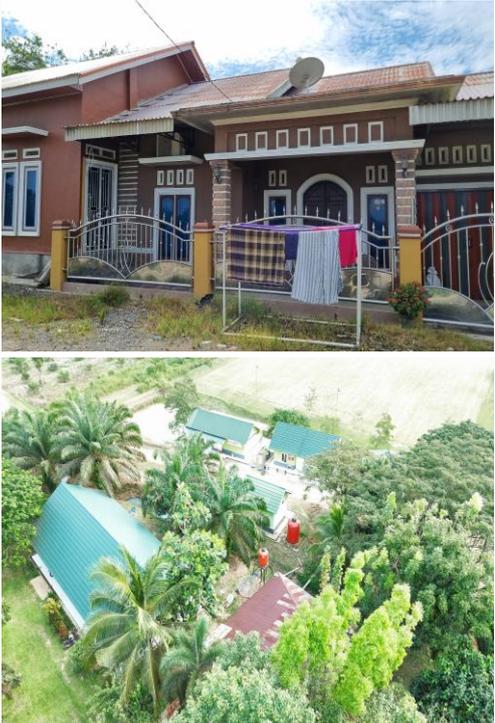
No	Kelas Tutupan Lahan dan Definisi menurut SNI ¹⁾	Keberadaan di Unit Manajemen	Foto
1	Hutan Dataran Rendah Sekunder: Hutan yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering yang berupa hutan dataran rendah, sudah mengalami intervensi manusia. Jika kerapatannya antara 10%-40%.	-	-

No	Kelas Tutupan Lahan dan Definisi menurut SNI*)	Keberadaan di Unit Manajemen	Foto
2	<p>Belukar: Formasi atau struktur vegetasi berupa kumpulan semak dengan ketinggian antara 50 cm sampai dengan 2 m, yang didominasi oleh vegetasi berkayu, yang diselingi oleh pepohonan sangat pendek dengan ketinggian ≤ 5 m atau kawasan lahan kering yang telah ditumbuhi dengan berbagai vegetasi alami heterogen dan homogen dengan tingkat kerapatan jarang hingga rapat. Kawasan tersebut didominasi vegetasi rendah (alami).</p>	<p>Tutupan lahan belukar ditemukan di luar areal HGU PT JBP. Tutupan lahan belukar ini merupakan tutupan yang pernah terbakar pada tahun 2015 yang berada di Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebelah Timur dari areal HGU PT JBP.</p> <p>Tutupan lahan belukar didominasi oleh struktur tiang dan pohon dengan DBH < 15 cm), memiliki tutupan kanopi 20-30%, dan didominasi oleh spesies pionir seperti <i>Peronema canescens</i> Jack, <i>Rhodamnia cinerea</i> Jack., <i>Artocarpus nitidus</i> Trecule, <i>Archidendron clypearia</i> (Jack) Nielsen, <i>Dillenia ovata</i> Wallich., <i>Diospyros glaucophylla</i> Bakh., dan <i>Nauclea subdita</i> (Korth.) Steudel.</p>	

No	Kelas Tutupan Lahan dan Definisi menurut SNI*)	Keberadaan di Unit Manajemen	Foto
3	<p>Kebun karet campuran: Lahan kering (bukan sawah) yang ditanami dengan tanaman tahunan (pepohonan) terkombinasi dengan tanaman semusim. Tanaman tahunan atau pepohonan yang dimaksud di sini misalnya adalah pohon karet atau pohon lainnya, sementara tanaman semusim yang dimaksud adalah tanaman semusim lahan kering.</p>	<p>Tutupan lahan kebun karet campuran ditemukan pada areal HGU PT JBP. Lokasi tutupan kebun karet campuran di areal HGU PT JBP tersebar secara sporadik dan sebagian besar dijumpai di sebelah Selatan dari Sungai Jebus. Tutupan kebun karet campuran ini dikelilingi perkebunan kelapa sawit milik PT JBP maupun milik masyarakat.</p> <p>Kebun karet campuran merupakan area yang diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tanaman utama adalah Karet dan diselingi tanaman Nangka, Cempedak, Durian, Petai, Jengkol, dan Mangga. Hasil survey lapangan, dijumpai beberapa spesies pohon seperti <i>Ficus fulva</i> Reinw. ex Bl., <i>Theobroma cacao</i> L., <i>Macaranga triloba</i> (Bl.)</p>	

No	Kelas Tutupan Lahan dan Definisi menurut SNI*)	Keberadaan di Unit Manajemen	Foto
4	<p>Semak: Penutup lahan berupa tumbuhan yang tumbuh alami dengan ketinggian rata-rata 0,5-2 m, ada yang berkayu ada pula yang tidak</p>	<p>Tutupan lahan semak merupakan area yang pernah terbakar pada tahun 2015 dan tahun 2019. Tutupan lahan semak di areal HGU PT JBP ditemukan di sebelah Utara dari Sungai Palu. Area ini dahulu pernah ditanam namun terbakar pada tahun 2019. Sedangkan tutupan lahan semak dijumpai dengan hamparan luas di sebelah Timur dari Areal HGU PT JBP. Tutupan lahan semak ini masuk dalam Kawasan Taman Hutan Raya yang terbakar pada tahun 2015 dan tahun 2019.</p> <p>Beberapa jenis spesies yang dijumpai seperti <i>Aporosa microcalyx</i> Hassk., <i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer, <i>Macaranga gigantea</i> (Reichb.f. & Zoll.)</p>	
5	<p>Perkebunan Karet: Lahan yang ditanamai dengan tanaman karet dalam bentuk hamparan yang luas dan pola tanam yang teratur.</p>	<p>Tutupan lahan perkebunan karet merupakan area yang dikelola masyarakat dengan komoditi tanaman karet dan dikelola secara aktif. Perkebunan karet masyarakat dijumpai di dalam areal HGU PT JBP, yang berlokasi di sebelah Selatan dari Sungai Jebus dan sebelah Barat dari areal HGU PT JBP yang mengarah ke Desa Gedong Karya.</p>	

No	Kelas Tutupan Lahan dan Definisi menurut SNI*)	Keberadaan di Unit Manajemen	Foto
			
6	<p>Perkebunan kelapa sawit: Lahan yang ditanamai dengan tanaman kelapa sawit dalam bentuk hamparan yang luas dan pola tanam yang teratur, serta berorientasi industri.</p>	<p>Tutupan lahan perkebunan kelapa sawit di areal HGU PT JBP terdiri dari 2 pemilik, yaitu perkebunan kelapa sawit PT JBP dan perkebunan kelapa sawit masyarakat. Persentase luas perkebunan kelapa sawit PT JBP adalah 66.5% dari luas areal HGU PT JBP dan perkebunan kelapa sawit masyarakat adalah 28.7% dari luas areal HGU PT JBP. Kelapa Sawit PT JBP terdiri dari 3 tahun tanam yaitu tahun 2009, 2011, dan 2012, dan pernah dilakukan tanaman ulang pada areal yang sebelumnya tertanam kelapa sawit yaitu tahun 2013 dan tahun 2018.</p>	

No	Kelas Tutupan Lahan dan Definisi menurut SNI*)	Keberadaan di Unit Manajemen	Foto
			
7	<p>Pemukiman: Penutup lahan buatan manusia berupa bangunan yang terutama dimanfaatkan untuk tempat tinggal penduduk di wilayah perdesaan. Bangunan permukiman desa dicirikan oleh kerapatan atau kepadatan bangunan yang relatif rendah, terbuat dari bahan bangunan yang bersifat permanen/tahan lama seperti misalnya dinding tembok, atap genteng/beton/seng namun bisa juga tidak permanen seperti dinding kayu dan atap alang-alang, serta berasosiasi dengan penggunaan lahan pertanian seperti sawah, ladang / tegalan, atau kebun campuran dan pekarangan.</p>	<p>Tutupan lahan permukiman adalah area lahan terbangun yang berbentuk bangunan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Permukiman di sekitar areal HGU PT JBP terdiri dari permukiman Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya.</p>	

No	Kelas Tutupan Lahan dan Definisi menurut SNI*)	Keberadaan di Unit Manajemen	Foto
			
8	Badan air: Semua tubuh air yang terbentuk secara alami, seperti danau, telaga alami, sungai, perairan laut, dan rawa)	Tutupan lahan badan air yang teridentifikasi berupa sungai yang berada di areal HGU PT JBP maupun di sekitar PT JBP. Sungai-sungai yang teridentifikasi di areal HGU PT JBP adalah Sungai Jebus dan Sungai Palu. Sedangkan sungai di luar areal HGU PT JBP adalah sungai Batanghari yang merupakan sungai utama dan seluruh aliran dari Sungai Jebus dan Sungai Palu akan masuk ke Sungai Batanghari	

7 Bagian Sosial: Metode dan Hasil

7.1 Metode Sosial

Pendekatan dalam penilaian sosial menggunakan ‘Metode Kualitatif’ yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif atau naratif dari narasumber (*informant*) terpilih dengan cara: (1) mengumpulkan informasi terkait HCV yang spesifik dengan subjek yang spesifik dan hanya diketahui oleh orang-orang yang spesifik terpilih yang mewakili kelompok sosialnya, (2) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau (historis) untuk memperoleh gambaran umum tentang kehidupan sosial di masa silam, (3) membandingkan fenomena kondisi sosial yang terjadi di beberapa kelompok masyarakat yang berbeda atau di zaman yang berbeda, dan (4) mengeksplorasi isu sosial secara terbatas namun mendalam (studi kasus).

Metode sosial dalam identifikasi ini juga mengacu pada panduan-panduan dasar *Common Guidance for the Identification of High Conservation Values* (Brown et al., 2017) dan *Common Guidance for the Management and Monitoring of High Conservation Values* (Brown et al., 2018) disamping untuk Identifikasi HCV 5 dan HCV 6 masih digunakan Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia (*Tropenbos International Indonesia Programme, 2008*) untuk lebih mendalami konteks desa.

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penilaian sosial dan budaya yang digunakan antara lain: (1) Partisipatif untuk mengidentifikasi elemen kunci bentuk pemanfaatan lahan terkini dan historisnya, jangkauan hak-hak masyarakat dan wilayah pengelolaan adat khusus terkait dengan keberadaan area-area yang masih dianggap bernilai penting oleh masyarakat yang dilakukan melalui FGD di tingkat desa atau komunitas dan dilanjutkan dengan kegiatan observasi lapangan untuk mengetahui letak atau posisi dari lahan yang bernilai penting dan masih dimanfaatkan atau area yang masih dianggap bernilai keramat oleh masyarakat, (2) Studi sosial ekonomi untuk menggali data dan informasi mengenai sumber pendapatan rumah tangga, jenis kebutuhan pokok dan cara pemenuhan kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya.

Wawancara dan pengamatan lapangan menggunakan metode ‘*purposive sampling*’ yaitu dengan penentuan responden / narasumber dengan kriteria yang relevan yang diperoleh dari proses pemetaan partisipatif yang disertai dengan metode ‘*snowball sampling*’ yaitu metode sampling bila populasinya spesifik dan cara pengambilan sampel dilakukan berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil akan menjadi semakin besar seperti bola salju menggelinding. Dari interview narasumber pertama akan diminta untuk menunjukkan referensi narasumber lain yang memiliki spesifikasi informasi yang relevan, biasanya referensi narasumber yang merupakan anggota komunitas yang saling mengenal karena spesialisasi profesinya.

Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) dan secara bertahap melalui proses ‘Pemetaan Pemangku Kepentingan’ (*stakeholders mapping*), ‘Pemetaan Partisipatif’ (*Participatory mapping*) melalui kegiatan ‘Diskusi Kelompok Terarah’ (*Focus Group Discussion*) dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan ‘Pemangku Kepentingan Kunci’ (*key stakeholder*) yang relevan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat. Pemetaan Pemangku Kepentingan dilakukan di salah satu sesi pada saat opening meeting internal dengan staf perusahaan untuk mendapatkan informasi stakeholder penting dari perusahaan selama menjalin relasi sosial dengan masyarakat di desa-desa sekitar.

Tahapan selanjutnya, untuk menggali informasi yang lebih lengkap, maka *focus group discussion* (FGD) diadakan di tempat yang memadai dan relevan dilakukan di selingi dengan ‘participatory mapping’ pada peta kertas kerja yang telah disediakan. Melalui proses-proses tersebut, data dan informasi mengenai kawasan yang memiliki elemen HCV diperoleh dan dipetakan secara spasial serta jika memadai ditentukan delineasi kawasan perlindungannya.

7.1.1 Tinjauan Pustaka dan Penggunaan Data Sekunder

Sejak tahap pra-penilaian, informasi dasar awal tentang area penilaian didapatkan dari PT JBP sebagai panduan untuk mencari kajian pustaka (*literature review*) dan data sekunder terkait populasi, kependudukan, sosial ekonomi, dan mata pencaharian utama yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik terkini, serta hasil penilaian LUCA, UKL, UPL, dan penilaian SIA. Informasi etnis, cagar budaya serta informasi lainnya diperoleh dengan jelajah website situs terkait dan publikasi lain yang relevan.

Data spasial yang digunakan antara lain peta-peta dasar dan tematik dari berbagai sumber, seperti sebaran pemukiman, jaringan sungai, batas DAS, sistem lahan, KHG, geologi, serta data DEM-SRTM, citra satelit Landsat 9 OLI TIRS. Data-data dan informasi yang dihimpun dan dianalisis untuk bidang identifikasi sosial disajikan pada **Tabel 22**.

Tabel 22. Data dan informasi yang dihimpun dan dianalisis untuk bidang identifikasi sosial

Tipe HCV	Jenis data dan informasi	Sumber data
HCV 4	Peta batas DAS	KLHK (2017)
	Peta sistem lahan	RePPPProt (1990)
	Peta jaringan sungai	Badan Informasi Geospasial (2017)
	Peta Kesatuan Hidrologi Gambut	KLHK (2017)
	Data Hotspot	https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov https://global.forestwatch.org
	Digital Elevation Model 30 meter, SRTM	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Tingkat Bahaya Erosi (TBE)	Pusat Litbang Kehutanan & Konservasi Alam, Bogor.
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 28 Juni 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 31 Agustus 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Data pengukuran curah hujan	PT JBP
	Dokumen AMDAL, UKL, dan UPL	PT JBP
	Common Guidance for the Identification of HCV (Brown et al., 2017)	https://hcvnetwork.org/
	Common Guidance for the Management and Monitoring of HCV (Brown et al., 2018)	https://hcvnetwork.org/
	<i>RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for the Management and Rehabilitation of Riparian Reserves</i>	Barclay et al. (2017)
	<i>RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for Exsisting Oil Palm Cultivation On Peat</i>	RSPO, (2019)
	<i>RSPO Manual on BMPs for Management & Rehabilitation of Peatlands</i>	RSPO, (2019)
<i>Land Use Change Analysis</i>	PILI (2022)	
<i>Social Impact Assessment</i>	PILI (2022)	
HCV 5	Prov. Jambi dalam angka 2021	BPS Prov. Jambi (2021)
	Kab. Muaro Jambi dalam angka 2021	BPS Kabupaten Muaro Jambi (2021)
	Kec. Kumpeh dalam angka 2021	BPS Kabupaten Muaro Jambi (2021)
	<i>Social Impact Assessment</i>	PILI (2022)
	Etnis dan Marga	https://joshuaproject.net/people_groups/14529/ID
	Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
	Common Guidance for the Identification of HCV (Brown et al., 2017)	https://hcvnetwork.org/
	Common Guidance for the Management and Monitoring of HCV (Brown et al., 2018)	https://hcvnetwork.org/
	Peta sebaran pemukiman	Badan Informasi Geospasial

Tipe HCV	Jenis data dan informasi	Sumber data
HCV 6	Prov. Jambi dalam angka 2021	BPS Prov. Jambi (2021)
	Kab. Muaro Jambi dalam angka 2021	BPS Kabupaten Muaro Jambi (2021)
	Kec. Kumpeh dalam angka 2021	BPS Kabupaten Muaro Jambi (2021)
	<i>Social Impact Assessment</i>	PILI (2022)
	Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia	BPS, (2011)
	World Heritage sites	UNESCO (www.whc.unesco.org)
	Common Guidance for the Identification of HCV (Brown et al., 2017)	https://hcvnetwork.org/
	Common Guidance for the Management and Monitoring of HCV (Brown et al., 2018)	https://hcvnetwork.org/

7.1.2 Kerja Lapangan Sosial

Dalam pengumpulan data juga mempertimbangkan referensi dan data sekunder. Untuk identifikasi sosial, data BPS terkini seperti kecamatan dan kabupaten dalam angka, informasi etnis berdasarkan referensi yang relevan seperti yang telah di sajikan pada Sub BAB sebelumnya. Selain itu penghimpunan data dan informasi lapangan difokuskan pada area-area yang berpotensi HCV berdasarkan hasil *pre-assessment* dan *scooping study* dengan menggunakan gabungan:

- 1 Pemetaan bersama manajemen PT JBP (*participatory approach*) yang melibatkan pihak-pihak narasumber internal di site area yang memiliki pengetahuan dan informasi mencakup:
 - a) Keberadaan hutan dan ekosistem alami lainnya serta spesies-spesies hidupan liar,
 - b) Keberadaan daerah tangkapan air, sumber air, badan air, dan aliran-aliran sungai,
 - c) Keberadaan area yang secara tradisional dimanfaatkan tempatnya atau sumberdaya alam didalamnya oleh masyarakat setempat, baik untuk pemenuhan kebutuhan mendasar maupun sebagai bagian dari identitas budaya dan tradisi.
- 2 Pengecekan lapangan berdasarkan hasil interpretasi citra satelit hasil *pre-assessment* dan pemetaan bersama manajemen PT JBP untuk menduga potensi area HCV serta hasil dari wawancara dan pemetaan partisipatif bersama responden/narasumber dari masyarakat.
- 3 Pengambilan data lapangan dilaksanakan terintegrasi dengan pengecekan lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya elemen HCV. Kegiatan difokuskan di area-area yang diperkirakan merupakan area HCV berdasarkan informasi dan peta sketsa kerja sebelumnya.
- 4 Konsultasi dengan masyarakat (interview) dihimpun melalui wawancara dengan narasumber terpilih, yaitu warga masyarakat atau karyawan perusahaan serta tokoh-tokoh kunci yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan.

Kunjungan ke lapangan dilakukan dengan pelibatan warga desa yang ditunjuk atas bantuan kepala desa, kepala adat, tokoh masyarakat dan staf dari perusahaan sebagai penunjuk lokasi kawasan yang didukung informasi spasial hasil overlay peta-peta referensi pendukung. Lokasi-lokasi kunjungan survei sosial tersaji pada **Gambar 59**.

Tahap Pertama | *Opening meeting* penilaian lengkap dilakukan pada hari pertama dengan melibatkan anggota tim dan staf PT JBP yang relevan, dengan tujuan menyamakan persepsi untuk menuntaskan kegiatan identifikasi antara semua tim konsultan dan semua '*person in charge*' dari PT JBP. Masing-masing bidang dari HCV memaparkan rencana kerja, kebutuhan pendamping, konsumsi dan transportasi selama kegiatan yang dilanjut dengan pembuatan jadwal tentatif serta rencana overview hasil assessment dalam '*public consultation*'.

Dalam *opening meeting* juga dilakukan lagi FGD (*Focus Group Discussion*) dan pemetaan partisipatif sesuai kelompok bidang masing-masing termasuk merencanakan menetapkan tempat-tempat yang akan dikunjungi baik di dalam ataupun di luar unit manajemen. Selain itu juga menggali informasi, kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta informasi *key stakeholders* yang memiliki peran. Informasi dasar yang diharapkan dicoba digambarkan dalam 'sketsa' yang telah disediakan, terutama berkaitan dengan aksesibilitas menuju titik pengamatan dan lokasi penting lainnya. **Gambar 58** menyajikan foto proses kegiatan *opening meeting*, sharing informasi internal, dan pemetaan partisipatif dengan manajemen PT JBP.



Gambar 58. Foto kegiatan *opening meeting* dan pemetaan partisipatif

Tahap Kedua | Kunjungan dan survey lapangan dibagi atas Tim Lingkungan (Tim HCV 1, 2, dan 3; Tim HCV 4; dan Tim Inventarisasi Hutan) dan Tim Sosial (Tim HCV 5 dan 6). Berdasarkan hasil '*scoping study*', sosialisasi dan perizinan ke perwakilan masyarakat sudah dilakukan, dan telah ditunjuk perwakilan masyarakat yang mendampingi dilapangan, maka tim lingkungan langsung melakukan kegiatannya.

Sedangkan tim sosial melakukan kunjungan ke desa-desa. Agenda kunjungan yaitu (1) untuk mengulang memberikan pemahaman kegiatan penilaian HCV, (2) Menggali informasi terkait HCV mulai dari sejarah lahan, status tanah adat / ulayat / komunitas, SDA yang masih dimanfaatkan, pengelolaan budidaya / sumber pendapatan, budaya, lokasi penting dan rencana pengembangan desa serta lainnya yang relevan, (3) Menggambarkan pada 'peta sketsa' letak lokasi-lokasi penting terkait identifikasi (pemetaan partisipatif), dan (4) Menampung kekhawatiran terkait kegiatan identifikasi atau masa depan dengan hadirnya PT JBP. Peta sketsa dibuat dari data spasial melanjutkan sketsa dari *scoping study* hingga penilaian lengkap yang menggambarkan: (a) Batas-batas wilayah, (b) Penggunaan lahan seperti pemukiman, kawasan produksi, kawasan lindung, (c) Lanscape seperti bukit, danau, sungai, kawasan hutan, (d) Tempat penting seperti kampung tua, kuburan dan situs bersejarah.

Informasi sosial lainnya yang dihimpun antara lain mengetahui kondisi sosial-ekonomi masyarakat untuk sebagai data pendukung seperti: (a) Sejarah; kampung/desa, suku dan sub-suku, (b) Kelembagaan adat/desa, nama, struktur, tugas dan fungsi, cara 'pengambilan keputusan', (c) Wilayah/tempat; sejarah batas-batas wilayah, sejarah lokasi penting, informasi bentang alam dan (d) Tata kelola wilayah adat/desa (aturan-aturan pengelolaan), kearifan lokal, areal produksi dan areal lindung. Untuk pengumpulan data HCV 4 dilakukan pada aspek fisik seperti keberadaan sungai, jenis tanah, lahan gambut, topografi, dan melakukan overview AOI secara keseluruhan. Data dan informasi yang diverifikasi adalah kondisi tutupan lahan di sempadan sungai; kondisi kualitas air sungai; pemanfaatan sungai sebagai sumber air; kejadian banjir; area rawan longsor dan memiliki Tingkat Bahaya Erosi Potensial; lahan gambut; rawa; dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Pada penilaian lengkap, stakeholder kunci yang menjadi narasumber tersaji pada **Tabel 23**. Seluruh agenda dan pengumpulan informasi ini dilakukan dengan wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*), pemetaan partisipatif, dan pengecekan lapangan. Identifikasi HCV 5 dan 6

menggunakan metode dan pendekatan yang sifatnya kualitatif karena keberadaannya tetap penting tanpa mengacu pada jumlahnya. Untuk menilai keberadaannya maka dilakukan pemetaan partisipatif, dengan melibatkan narasumber kunci untuk menunjukkan atau memetakan lokasi area HCV di dalam sketsa peta. Pendalaman informasi mengenai keberadaan HCV dilakukan dengan metode wawancara mendalam terhadap narasumber kunci menggunakan daftar pertanyaan yang mengacu pada Panduan Penilaian HCV dari HCVRN.

Pemilihan stakeholder kunci untuk menjadi narasumber dilakukan secara partisipatif dan mengedepankan prinsip FPIC. setiap awal pertemuan dengan narasumber, tim penilai menyampaikan tujuan penilaian dan menanyakan ketersediaan berpartisipasi dalam kegiatan penilaian ini. Apabila narasumber tidak bersedia, maka keputusannya dihargai dan tim akan meminta petunjuk dari pihak Desa kembali terkait narasumber lain yang dapat mewakili kelompok stakeholder tersebut.

Tahap Ketiga | *Closing meeting* dilakukan bersama manajemen/staf PT JBP dengan mempresentasikan hasil penilaian lengkap secara lapangan dan konsultasi awal dengan desa-desa terkait, menyampaikan hasil sementara, dan memberikan rencana kegiatan konsultasi publik.

7.2 Hasil HCV Sosial

Telah di uraikan di atas, bahwa metode *'snowball sampling'* memiliki keterbatasan representative jumlah sampling terhadap seluruh populasi, sehingga penilai berupaya untuk melakukan identifikasi ke semua desa tanpa menggunakan sampling desa, hal ini terkait pemenuhan proses FPIC ke semua desa yang wilayahnya masuk dalam unit manajemen. Wawancara dan konsultasi juga diupayakan bertemu dengan *'key stakeholder'* atau narasumber penting yang memahami konteks desa. Kepala Desa atau narasumber lainnya saat dilakukan wawancara jika kurang memahami langsung membantu menunjuk narasumber yang kompeten. Informasi yang diperoleh selalu diimbangi juga dengan triangulasi kepada narasumber lainnya sehingga memperoleh informasi yang memadai. Sehingga dengan demikian, secara keseluruhan tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam penentuan HCV sosial dan budaya. Gambaran kegiatan wawancara, FGD, dan pemetaan partisipatif pada tahapan penilaian lengkap tersaji pada **Lampiran 5**.

7.2.1 Status Padiatapa

Verifikasi prinsip FPIC dilakukan tim penilai dengan konsultasi dan diskusi bersama perwakilan masyarakat. Dalam konsultasi, tim penilai selalu menjelaskan kembali tujuan dari penilaian HCV di KPT JBP (*Berita Acara Penilaian Lengkap tersaji pada Lampiran 5*). Narasumber dari perwakilan masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk menjawab/tidak menjawab sesuai dengan pengetahuan narasumber. Sebagai umpan balik, tim penilai memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk bertanya kembali kepada tim penilai.

Desa yang terkena dampak dari pembangunan perkebunan PT JBP terdiri dari tiga desa yaitu Desa Sungai Aur, Desa Jebus, dan Desa Gedong Karya. Fokus verifikasi prinsip FPIC dilakukan di ketiga desa tersebut. Verifikasi prinsip FPIC untuk penilaian HCV dilakukan sejak *scoping study* dan penilaian lengkap. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada perwakilan masyarakat terkait detail penilaian HCV serta meminta persetujuan untuk melakukan penilaian HCV dengan dampingan dari perwakilan masyarakat. Tentunya informasi ini penting diberitahukan kepada perwakilan masyarakat, karena di masa yang akan datang area-area yang teridentifikasi sebagai area konservasi (HCV-HCS) akan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan.

Hasil verifikasi prinsip FPIC untuk penilaian HCV adalah pemerintah desa dan perwakilan masyarakat menerima dan memberikan persetujuan dilakukannya penilaian HCV (*lihat BAB 4.1*). Pemerintah desa dan perwakilan masyarakat siap membantu dalam kelancaran penilaian ini. Menurut pemerintah desa dan perwakilan masyarakat, penilaian ini sangat penting untuk melihat area-area penting untuk dikonservasi baik di areal HGU PT JBP maupun di sekitar desa yang masuk dalam AOI. Selain itu, penilaian ini juga berguna untuk mengamankan area-area penting secara lingkungan dan sosial.

Seluruh kegiatan sosial seperti wawancara, diskusi, pemetaan partisipatif, dan FGD selalu mengedepankan prinsip FPIC. Dimana setiap memulai kegiatan sosial, perwakilan masyarakat atau narasumber selalu ditanya kesediaan berpartisipasi dalam penilaian ini, dan selalu diberikan keleluasan untuk menjawab/tidak menjawab.

Verifikasi Prinsip FPIC terkait pembangunan perkebunan PT JBP telah dilakukan menurut informasi narasumber/perwakilan masyarakat. Namun demikian, seluruh dokumen mulai dari sosialisasi pertama hingga pembangunan perkebunan PT JBP sudah tidak tersedia. Perubahan manajemen dari *takeover* PT JBP membuat dokumen-dokumen sosialisasi sudah tidak dijumpai. Namun demikian, menurut Kepala Desa Sungai Aur, sejak diambil alih oleh manajemen yang baru, sosialisasi dan diskusi ke pihak desa sudah sangat baik.

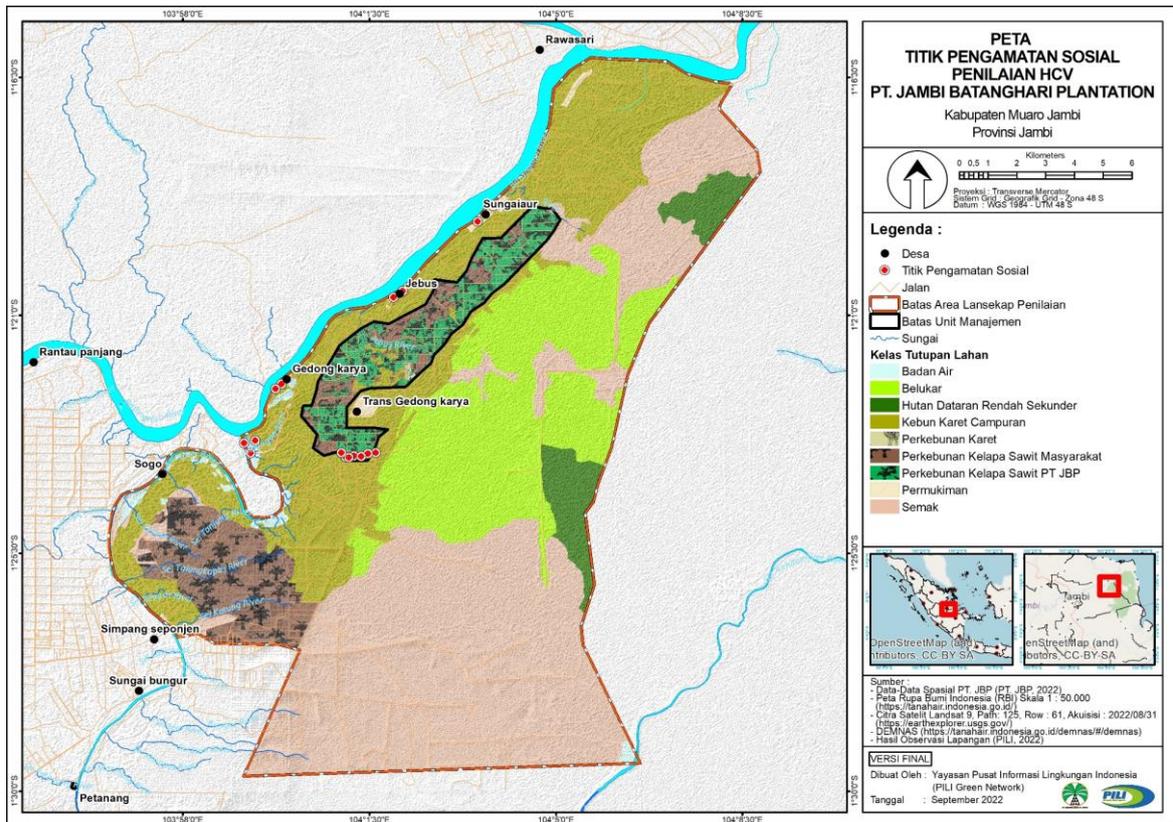
7.2.2 Hasil Kerja Lapangan Sosial

Jumlah lokasi kegiatan sosial adalah 19 lokasi yang terdiri dari 16 lokasi kunjungan lapangan dan 3 lokasi wawancara/FGD/PM (**Gambar 60**). Kunjungan lapangan dilakukan setelah proses wawancara/FGD/PM dilaksanakan, sehingga mendapatkan informasi area-area yang memiliki nilai HCV. Observasi lapangan bagian sosial juga mencakup area-area yang berpotensi memiliki nilai jasa lingkungan (HCV 4), seperti keberadaan sungai, mata air sebagai sumber air, dan bukit sebagai daerah resapan air.

Kegiatan wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*), dan pemetaan partisipatif dilakukan kepada masyarakat di tiga desa. Hasil ringkasan wawancara dan FGD tersaji pada **Tabel 24**. Kegiatan pemetaan partisipatif dilakukan untuk memetakan penggunaan lahan oleh masyarakat dan lokasi-lokasi yang memiliki nilai penting bagi masyarakat, yaitu area-area yang terkait dengan HCV 4, HCV 5, HCV 6, serta lahan masyarakat untuk penghidupan di masa depan. Pemetaan partisipatif kepada masyarakat dilakukan dengan peta yang memiliki acuan lapangan seperti sungai, jalan, areal HGU PT JBP, lokasi desa, dan arah mata angin. Lokasi-lokasi yang ditunjukkan dalam sketsa peta kemudian dikunjungi guna mendapatkan titik koordinat dengan alat bantu GPS. Beberapa gambaran kegiatan pemetaan partisipatif tersaji pada **Gambar 59**.



Gambar 59. Foto kegiatan pemetaan partisipatif



Gambar 60. Peta hasil kerja lapangan pengamatan identifikasi HCV Sosial

Sketsa Pemetaan Partisipatif | Hasil Pemetaan Partisipatif tidak begitu banyak yang dapat digambarkan karena sebagian wilayah di dalam HGU PT JBP yang sudah menjadi area taman kelapa sawit. Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, setiap pertemuan dilakukan FGD, wawancara, dan konsultasi yang selalu disertai dengan Pemetaan Partisipatif. Hasil pemetaan parsitipatif yang dilakukan saat identifikasi area HCV di desa-desa sekitar unit manajemen, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Memahami letak lokasi perkebunan PT JBP beserta jalan produksi dan jalan transportasi CPO.
2. Memahami desa-desa yang berdampingan dan berelasi dengan Perkebunan PT JBP beserta sekilas sejarah perkembangan dan penggunaan lahan di tingkat kawasan.
3. Memahami konteks budaya dan tradisi serta kondisi etnis asli dan pendatang serta mengetahui lokasi-lokasi area penting yang bernilai kehidupan bagi masyarakat desa-desa.
4. Memahami sejarah matapencaharian utama dan kronologi sejarah penduduk asli.
5. Memahami beberapa usulan masyarakat terkait pemanfaatan sungai dan tempat-tempat yang perlu dilindungi terkait isu lingkungan dan social budaya.
6. Memetakan penggunaan lahan oleh masyarakat dan lokasi-lokasi yang memiliki nilai penting bagi masyarakat yaitu area-area yang terkait dengan HCV 4, HCV 5, HCV 6, serta lahan masyarakat untuk penghidupan di masa depan.

7.2.3 HCV 4: Jasa Ekosistem yang Kritis

HCV	Elemen	Hasil
4	Layanan ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian erosi tanah, dan lereng yang rentan	Ada

Jasa ekosistem merupakan segala keuntungan yang didapatkan manusia dari sebuah ekosistem, termasuk (i) jasa penyediaan seperti makanan dan air; (ii) jasa pengaturan seperti pengaturan terhadap banjir, kekeringan, degradasi tanah, dan penyakit, keuntungan rekreasi dan keuntungan non-materiil lainnya; serta (iii) jasa pendukung lainnya seperti pembentukan tanah dan daur nutrisi.

Jasa ekosistem menjadi kritis saat ditemukan adanya gangguan terhadap keberlangsungan atas jasa tersebut, mengakibatkan ancaman yang parah, katastrofik atau berdampak negatif secara kumulatif terhadap kesejahteraan, kesehatan atau keberlanjutan masyarakat lokal. Suatu area dapat dipertimbangkan sebagai HCV 4, jika berperan dalam melindungi atau menyediakan salah satu dari jasa-jasa tersebut dalam situasi yang kritis. Dalam melakukan identifikasi keberadaan HCV 4, digunakan panduan *Common Guidance for the Identification of High Conservation Values* (Brown et al., 2017). **Tabel 23** menyajikan ringkasan keberadaan HCV 4 di area penilaian.

Tabel 23. Ringkasan keberadaan HCV 4 di area penilaian

Situasi yang dapat dikategorikan sebagai HCV 4	Indikasi area penilaian
Pengelolaan kejadian aliran air yang ekstrim, termasuk zona penyangga mintakat yang bervegetasi/lahan banjir yang utuh	Ada. Seluruh sungai-sungai yang dijumpai di dalam unit manajemen maupun di area lanskap memiliki fungsi mengendalikan limpasan permukaan.
Pemeliharaan rezim aliran sungai bagian hilir	Ada. Seluruh sungai-sungai yang dijumpai di dalam unit manajemen maupun di area lanskap turut berkontribusi terhadap aliran Sungai Batanghari
Pemeliharaan karakteristik kualitas air	Tidak Ada. Seluruh sempadan sungai di AOI telah menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet.
Pencegahan dan perlindungan dari kebakaran	Ada. Sungai yang berfungsi sebagai sekat bakar alami hanya terdapat di area lanskap yaitu Sungai Batanghari
Perlindungan terhadap tanah yang rentan, akuifer, atau sektor perikanan	Ada. Seluruh sempadan sungai yang dijumpai di dalam unit manajemen telah bertutupan kelapa sawit, namun demikian masih memiliki peranan terhadap kontrol morfoerosi dan sedimentasi. Selain itu pemanfaatan sektor perikanan terdapat pada Sungai Batanghari, Sungai Jebus, dan Sungai Palu.
Penyediaan air bersih; dan ekosistem alami yang berperan penting dalam menstabilisasi lereng-lereng yang curam.	Ada. Sungai Batanghari dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai sumber air. Sedangkan Sungai Jebus dan Sungai Palu tidak dimanfaatkan sebagai sumber air.
Perlindungan terhadap angin, dan pengaturan kelembaban, curah hujan, dan elemen iklim lainnya	Ada. Terdapat tutupan vegetasi yang berkualitas baik dan dinilai memadai untuk berperan dalam pengaturan iklim mikro.
Jasa penyerbukan, contohnya penyerbukan eksklusif bagi tanaman pangan subsisten	Ada. Terdapat ekosistem yang memenuhi kriteria sebagai habitat agen penyerbuk namun keberadaannya di area lanskap.

Hasil survei lapang HCV 4 menunjukkan bahwa terdapat 2 segmen sungai di area penilaian (**Tabel 4**). Sedangkan terdapat beberapa segmen Sungai di areal lanskap. Sebagian besar segmen sungai yang berada di dalam unit manajemen memiliki kualitas sempadan sungai yang

kurang baik, hal ini berkenaan dengan adanya tanaman kelapa sawit hingga tepi sungai. Sedangkan di area lanskap, kualitas sempadan sungai juga kurang baik karena adanya tanaman kelapa sawit dan karet hingga tepi sungai.

Selanjutnya, tutupan alami berupa hutan dataran rendah sekunder tidak dijumpai di dalam unit manajemen. Namun demikian, masih ditemukan fragmen tutupan alami berupa hutan dataran rendah sekunder di areal lanskap. Seluruh fragmen hutan alami tersebut berada di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Penjelasan yang lebih terperinci berkaitan dengan situasi yang mengindikasikan keberadaan HCV 4 di dalam unit manajemen adalah sebagai berikut:

Pengelolaan kejadian aliran air yang ekstrim, termasuk zona penyangga mintakat yang bervegetasi atau lahan banjir yang utuh | situasi yang umum dijumpai pada indikator ini adalah keberadaan sungai, danau, sempadan sungai/danau, rawa, dan bukit.

Seluruh temuan sungai di dalam unit manajemen berperan sebagai alur drainase utama, terutama pada saat kejadian curah hujan ekstrim (*lihat konteks fisik bagian iklim*). Total terdapat 25 segmen aliran sungai di AOI (**Tabel 24**), 2 segmen aliran sungai yaitu Sungai Jebus dan Sungai Palu masuk ke unit manajemen. Sedangkan 23 segmen aliran sungai berada di areal lanskap.

Bentuk fisik seluruh sempadan sungai yang dijumpai di dalam unit manajemen didominasi oleh tanaman kelapa sawit. PT JBP telah menetapkan sempadan sungai berjarak 50 meter (kiri-kanan) untuk tidak dilakukan pengelolaan perkebunan. Hal ini menjadi langkah awal yang baik dalam upaya merevitalisasi kondisi sempadan sungai yang telah dikonversi menjadi kelapa sawit.

Selanjutnya, hasil tinjauan lapangan menunjukkan bahwa Sungai Jebus dan Sungai Palu, merupakan sungai yang memiliki aliran langsung ke Sungai Batanghari sebagai sungai utama. (**Gambar 58**). Sungai Jebus memiliki lebar 10-15 meter sedangkan Sungai Palu memiliki lebar 8-10 meter. Sungai-sungai tersebut tidak pernah mengalami kekeringan. Pada kondisi musim hujan seringkali mengalami luapan akibat meluapnya Sungai Batanghari, namun luapan ini cepat surut sehingga tidak mengakibatkan banjir.

Keberadaan sungai-sungai di wilayah ini memiliki nilai penting terkait pengelolaan kejadian aliran air yang ekstrim. Fungsi penting tersebut berkaitan dengan ketersediaan ruang dalam menampung dan mengendalikan limpasan permukaan (Hapsari dan Zenurianto, 2016; Nienhuis and Leuven, 2001), terutama ketika wilayah ini terjadi curah hujan yang tinggi. Secara alami, keberadaan sungai dan sempadan sungai akan mengendalikan limpasan permukaan sesuai dengan kapasitas tampungannya masing-masing (Hooijer *et al.*, 2004; FOWG, 2001; Tabacchi *et al.*, 2000).



Sungai Batanghari



Sungai Jebus



Sungai Palu

Gambar 61. Sungai-sungai yang dijumpai di unit manajemen dan sekitarnya

Tabel 24. Ringkasan keberadaan sungai-sungai di area penilaian

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)*	Lebar (m)**	Tutupan Lahan***
A Sungai Utama					
1	Sungai Batanghari	Area Lanskap	-	150-200	Kelapa sawit, semak belukar, dan semak
B Anak Sungai					
2	Sungai Jebus	Unit Manajemen	4.1	5-12	Kelapa sawit
3	Sungai Palu	Unit Manajemen	4.6	3-10	Semak Belukar, Kelapa sawit
4	Sungai Air Hitam Luar	Area Lanskap	0.8	-	Hutan dan belukar
5	Sungai Bemban	Area Lanskap	1.3	-	Kelapa sawit
6	Sungai Buaya Besar	Area Lanskap	1.0	-	Kebun karet campuran
7	Sungai Buaya Kecil	Area Lanskap	0.7	-	Kebun karet campuran
8	Sungai Bungur	Area Lanskap	1.0	-	Semak
9	Sungai Cempa	Area Lanskap	0.3	-	Kebun karet campuran
10	Sungai Kajang	Area Lanskap	1.0	-	Kebun karet campuran
11	Sungai Kale	Area Lanskap	0.8	-	Kebun karet campuran
12	Sungai Katung	Area Lanskap	5.2	-	Kelapa sawit
13	Sungai Kumpeh	Area Lanskap	30.6	-	Kebun karet campuran
14	Sungai Limbungan	Area Lanskap	1.7	-	Kebun karet campuran
15	Sungai Malapani	Area Lanskap	2.3	-	Kebun karet campuran
16	Sungai Melapo	Area Lanskap	0.6	-	Kebun karet campuran
17	Sungai Pauh	Area Lanskap	0.9	-	Kebun karet campuran
18	Sungai Pelayangan	Area Lanskap	0.0	-	Kebun karet campuran
19	Sungai Pintasan	Area Lanskap	1.9	-	Kebun karet campuran
20	Sungai Rengat	Area Lanskap	1.8	-	Kelapa sawit
21	Sungai Sebiak	Area Lanskap	4.1	-	Kelapa sawit
22	Sungai Sirih	Area Lanskap	2.0	-	Semak
23	Sungai Talangkapas	Area Lanskap	7.3	-	Kelapa sawit
24	Sungai Tanjung	Area Lanskap	2.5	-	Kelapa sawit

Keterangan: *) hasil pengukuran GIS – Panjang sungai di dalam AOI; **) hasil observasi; ***) tutupan dominan

Pemeliharaan rezim aliran sungai bagian hilir | terdapat 2 hal yang sering dijumpai pada indikator ini yaitu (i) menjaga kontinuitas aliran air di sungai sekalipun pada musim kemarau (berkontribusi terhadap *baseflow*¹⁰), (ii) menurunkan debit maksimum sungai terutama pada musim hujan (mengurangi limpasan permukaan). Rezim aliran sungai yang baik adalah perbedaan antara aliran air pada musim hujan dan musim kemarau tidak terlalu ekstrim.

¹⁰ Baseflow merupakan aliran bawah permukaan tanah, meliputi aliran lateral dan groundwater flow. Aliran lateral merupakan aliran yang berasal dari rembesan air dari perakaran (masih dipengaruhi hujan). Groundwaterflow merupakan kontribusi dari aliran air yang berasal dari lapisan akuifer (tidak dipengaruhi hujan secara langsung). Baseflow menyebabkan sungai mengalirkan air pada musim kemarau

Secara alamiah, keberadaan alur sungai dapat menampung limpasan permukaan (baik limpasan dari hulu ataupun dari lahan sekitar). Sungai Jebus dan Sungai Palu di unit manajemen memiliki peranan yang sesuai dengan indikator ini. Hal tersebut ditandai dengan kondisi debit air pada kedua sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, sehingga memiliki peran penting dalam pemeliharaan rezim aliran hingga menyatu dan membentuk aliran Sungai Kapuas sebagai sungai utama.

Pemeliharaan karakteristik kualitas air | situasi yang umum dijumpai berkaitan dengan indikator ini adalah keberadaan vegetasi alami di sempadan sungai. Tutupan alami di sempadan sungai berfungsi sebagai filter bahan pencemar, baik yang berasal dari erosi lahan maupun dari residu bahan agrokimia yang terbawa oleh limpasan permukaan.

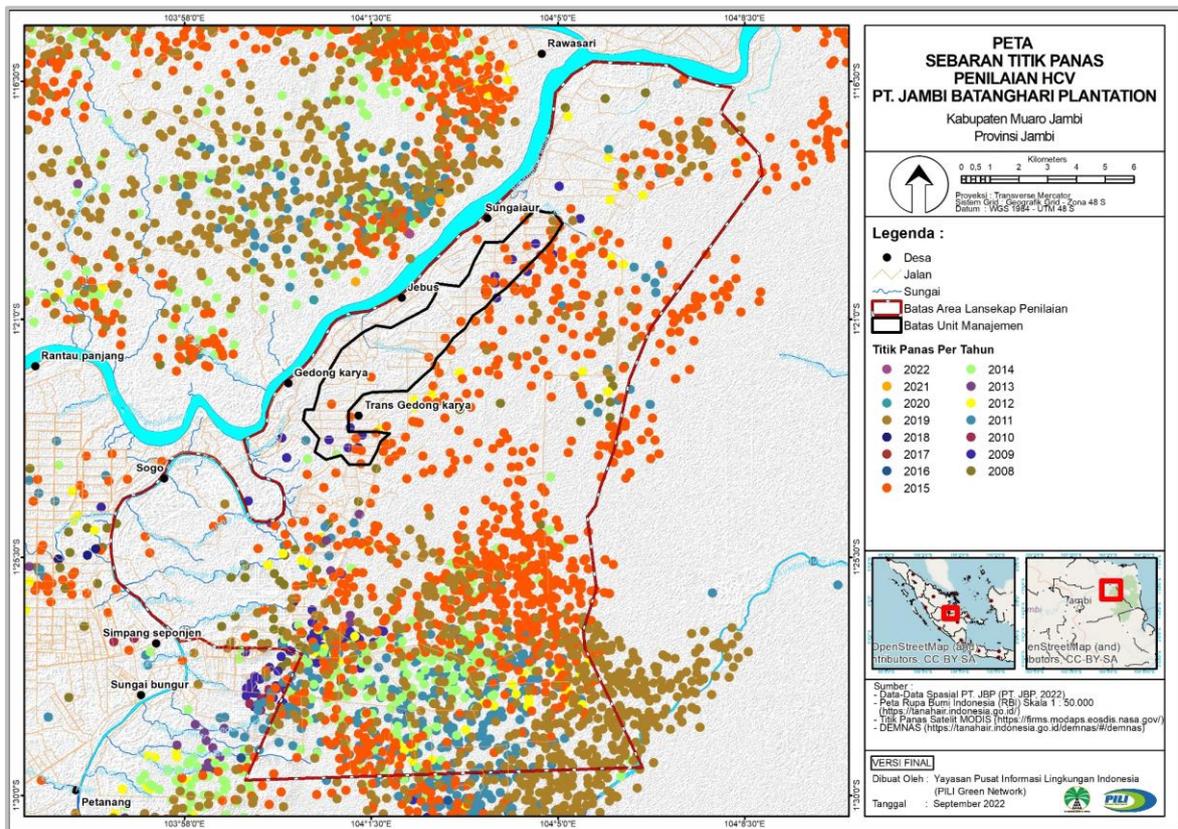
Sebagian besar sempadan sungai telah dikonversi menjadi kebun kelapa sawit (*lihat Gambar 61*), Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi sempadan sebagai filter bahan pencemar semakin rendah. Area sempadan sungai yang telah dikonversi menjadi lahan budidaya, harus dilakukan pengelolaan, bahkan ditingkatkan fungsinya agar dapat memberikan daya dukung dalam memelihara kualitas air sungai yang optimal. Oleh sebab itu, seluruh sempadan badan air yang sudah terdegradasi masih memiliki potensi sebagai area HCV 4 dan di masa depan tidak direkomendasikan untuk dilakukan *replanting*.

Sementara di area lanskap, temuan lapangan yang memenuhi kriteria ini ditunjukkan oleh adanya beberapa segmen sempadan sungai yang bertutupan alami yaitu hutan dataran rendah sekunder dan belukar. Area sempadan bertutupan alami ini sebagai vegetasi riparian dengan tingkat keragaman spesies yang tinggi dapat memberikan dampak langsung pada sungai.

Pencegahan dan perlindungan dari kebakaran | Sekat bakar alami pada umumnya merupakan area-area yang cenderung basah atau lembab sepanjang tahun. Kondisi fisik tersebut dikatakan ideal untuk menghambat perilaku api secara alami. Karakteristik area seperti kelerengan, debit aliran permukaan (sungai), iklim mikro dan kualitas dari tutupan lahan di riparian turut berkontribusi terhadap pencegahan dan perlindungan dari kebakaran.

Pada penilaian ini, terdapat sungai yang memiliki potensi sebagai sekat bakar alami namun berada di area lanskap yaitu Sungai Batanghari. Lebar penampang pada sungai tersebut >10 meter, sehingga kanopi antara sisi kanan-kiri sungai tidak terkoneksi secara langsung. Selain itu, sungai tersebut didukung dengan ketersediaan air di sepanjang tahun. Hal ini sesuai dengan Byram (2004) dan Gisborne (2004) yang menjelaskan bahwa variabel kunci yang menghambat perilaku api secara alami adalah kandungan air pada bahan bakar yang tersedia.

Berdasarkan data hotspot Modis periode 2008-2022 dijumpai adanya *hotspot* di dalam unit manajemen pada tahun 2015, 2018, dan 2019 (**Gambar 61**). Dari rentang data tersebut, lokasi *hotspot* bersifat sporadik dan tidak terpusat pada suatu tempat. Sebagian besar *hotspot* berada di luar unit manajemen. Peluang kebakaran yang terjadi pada periode 2015 merupakan kebakaran skala besar yang terjadi di Indonesia, sedangkan periode 2018-2019 merupakan kebakaran kecil di sekitar perkebunan kelapa sawit masyarakat atau karena pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar yang masih menggunakan cara membakar.



Gambar 62. Sebaran titik panas tahun 2008-2022 di area penilaian

Perlindungan terhadap tanah yang rentan, akuifer, atau sektor perikanan | temuan yang umum menjadi indikator berupa tanah gambut, tanah di daerah bakau dan daerah rawa dengan potensi kandungan atau kandungan asam sulfat. Selain itu, keberadaan sungai-sungai yang masih dimanfaatkan masyarakat sebagai pemenuhan sumber protein hewani (sumber ikan) termasuk dalam bagian dari indikator ini.

Berdasarkan hasil survei lapang, ditemukan keberadaan jenis tanah rentan¹¹ baik di dalam unit manajemen ataupun di area lanskap baik yang tergolong jenis tanah gambut,. Hasil temuan ini diperkuat dengan data laporan survey tanah detail dan inventarisasi gambut PT JBP (BPH, 2021) (*lihat Gambar 12 dan konteks fisik bagian jenis tanah*). Tanah gambut di unit manajemen memiliki jenis Histosols dengan tingkat kematangan Fibrists dan Hemists. Tanah/lahan gambut di unit manajemen telah tertanam menjadi kelapa sawit sejak tahun 2009, sehingga fungsi hidrologis sudah berkurang akibat adanya kanalisasi yang digunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, PT JBP telah melakukan rencana pemulihan ekosistem gambut dengan melakukan pengelolaan air (restorasi tata air), serta melakukan pengukuran secara terjadwal untuk subsidi gambut. Seluruh kegiatan rencana pemulihan ekosistem gambut tersebut sudah dimuat dalam pelaporan rencana pemulihan ekosistem gambut yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Area yang identik dengan perlindungan terhadap akuifer (sebagai contoh keberadaan bukit) tidak dijumpai di area penilaian. Secara umum, area penilaian berada pada kelerengan 0-8% (lebih lanjut dibahas pada bab **konteks fisik**). Sehingga tidak ditemukan area-area yang penting untuk keperluan perlindungan terhadap akuifer.

Adapun sektor perikanan yang hingga saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Sungai Aur, Desa Jebus, dan Desa Gedong Karya terdapat pada

¹¹ Dalam Prinsip dan Kriteria RSP0 tahun 2018, jenis tanah yang tergolong rentan adalah tanah gambut, tanah di daerah bakau dan daerah rawa dengan potensi kandungan atau kandungan asam sulfat

Sungai Batanghari (di area lanskap). Sungai-sungai lainnya juga dimanfaatkan oleh pemancing namun sifatnya hanya sekedar menghabiskan waktu atau hobby. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat di ketiga desa yang menyatakan bahwa pemanfaatan sungai sebagai sumber air MCK dan sumber ikan hanya terdapat di sungai utama yaitu Sungai Batanghari. Selain itu, posisi desa berada di sempadan Sungai Batanghari yang membuat masyarakat sangat mudah menuju ke sungai tersebut.

Penyedia air bersih dan ekosistem alami yang berperan penting dalam menstabilisasi lereng-lereng yang curam | situasi yang umum dijumpai pada indikator ini yaitu berupa pemanfaatan sumber mata air, sungai, serta keberadaan bukit dengan ekosistem alami.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat sungai-sungai di area penilaian yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Sungai-sungai tersebut berada di unit manajemen dan area lanskap seperti Sungai Jebus, Sungai Palu dan Sungai Batanghari. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sanitasi/MCK dan mencari ikan. Sumber air bersih untuk keperluan minum didapatkan dari air minum kemasan (galon).

Perlindungan terhadap angin dan pengaturan kelembaban, curah hujan, dan elemen klimatik lainnya | Fungsi pengaturan iklim mikro umumnya terdapat di sempadan sungai bertutupan vegetasi alami dengan kualitas baik. Rodríguez-Gonzalez *et al.*, (2021) menyatakan bahwa vegetasi alami di riparian sungai dapat merespon dengan baik terhadap kejadian cuaca dan iklim contohnya curah hujan, suhu permukaan, kelembaban sekitar dan gangguan fluvial lainnya. Hal serupa juga disebutkan oleh Qiao *et al.*, (2017) bahwa keberadaan pohon berkayu pada sempadan sungai berimplikasi terhadap kondisi hidroklimat disepanjang koridornya. Atas kondisi tersebut, fungsi area sempadan masih memadai sebagai perlindungan angin, serta pengaturan iklim mikro terutama pada bagian hilir sungai. Hasil tinjauan lapangan menunjukkan area sempadan sungai di unit manajemen secara umum telah terkonversi menjadi kelapa sawit.

Jasa Penyerbukan | Identifikasi terhadap fungsi jasa penyerbukan menggunakan pendekatan atas keberadaan dan kualitas hutan. Pendekatan ini digunakan karena agen penyerbukan umumnya bergantung pada keberadaan hutan sebagai habitat. Agen penyerbuk yang umum dijumpai pada perkebunan kelapa sawit adalah dari spesies jenis serangga, burung, dan kelelawar. Keberadaan agen penyerbuk atau polinator menjadi penting bagi keberlangsungan tanaman-tanaman berbunga serta beberapa jenis tanaman pertanian (Garibaldi *et al.*, 2016). Ferreira *et al.*, (2015) mencontohkan jenis lebah tropis sangat sensitif terhadap gangguan habitat, bergantung pada keberadaan pohon-pohon yang tinggi dan besar sebagai tempat bersarang, dan keberadaan keragaman spesies tumbuhan sebagai peluang penyedia serbuk sari dan nektar sepanjang tahun.

Berdasarkan hasil verifikasi tutupan lahan, dijumpai adanya tutupan lahan alami berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar yang berada di area lanskap kedua tutupan ini berada di Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA). Tutupan lahan alami ini berperan sebagai habitat bagi agen penyerbuk. Berdasarkan temuan tersebut maka area yang memiliki fungsi sebagai jasa penyerbukan masih terdapat di area lanskap.

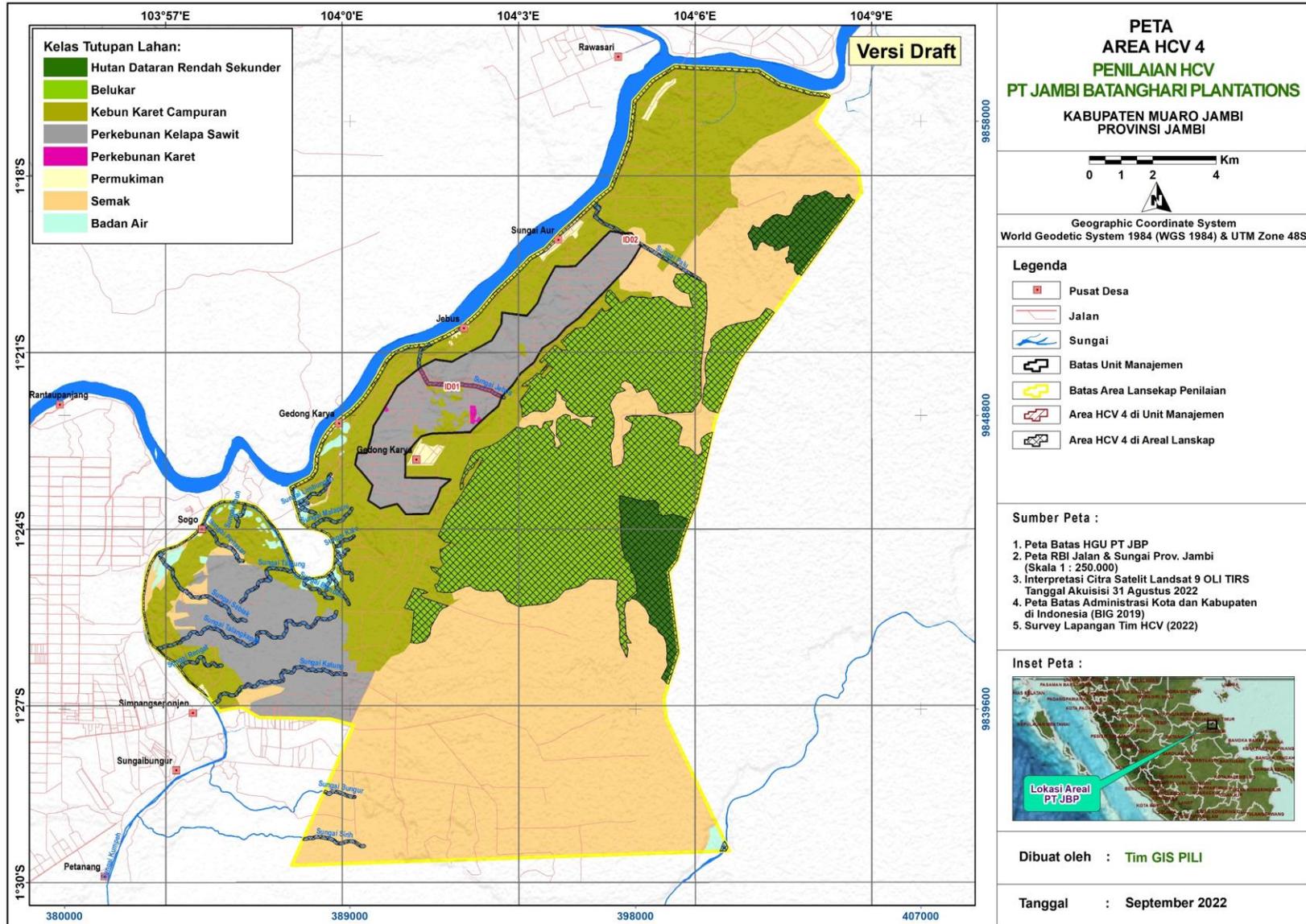
Lokasi dan luas area HCV 4 | Area yang memiliki nilai/elemen HCV 4 di unit manajemen terdapat di seluruh aliran Sungai Jebus dan Sungai Palu beserta sempadannya (**Gambar 63**). Area-area HCV 4 di unit manajemen terletak di 2 lokasi (ID) dengan total luas 35.9 ha (**Tabel 25**). Seluruh sempadan sungai di unit manajemen juga merupakan area pengelolaan HCV (HCVMA) dan tidak direkomendasikan untuk kegiatan penanaman ulang. Sedangkan area yang memiliki nilai/elemen HCV di areal lanskap terdapat di seluruh aliran sungai beserta sempadannya, tutupan lahan alami berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar, dan lahan gambut yang bertutupan alami dengan total keseluruhan adalah 7,156.4 ha.

Penetapan jarak sempadan sungai mengacu pada peninjauan terhadap aspek legal. Aspek legal diartikan sebagai penggunaan produk hukum pada tingkat daerah hingga nasional (UU, PP, Kepres, Permen, Perda, Pergub) tentang lebar sempadan sungai. Dalam penilaian ini, penetapan sempadan sungai pada seluruh segmen sungai yang teridentifikasi adalah mengacu pada aspek legal¹² yaitu 100 meter khusus untuk Sungai Batanghari dan 50 meter untuk Sungai Jebus dan Sungai Palu serta sungai lainnya.

Tabel 25. Lokasi dan luas area HCV 4 di area penilaian

Indeks	Keterangan	Luas (ha)	
		Unit Manajemen	Area Penilaian
ID01	Sungai Jebus dan sempadannya	29.7	39.0
ID02	Sungai Palu dan sempadannya	6.1	44.7
-	Sungai Air Hitam Luar dan sempadannya	-	4.5
-	Sungai Batanghari dan sempadannya	-	239.2
-	Sungai Bemban dan sempadannya	-	13.6
-	Sungai Buaya Besar dan sempadannya	-	10.0
-	Sungai Buaya Kecil dan sempadannya	-	6.7
-	Sungai Bungur dan sempadannya	-	10.6
-	Sungai Cempa dan sempadannya	-	3.1
-	Sungai Kajang dan sempadannya	-	12.3
-	Sungai Kale dan sempadannya	-	7.7
-	Sungai Katung dan sempadannya	-	52.7
-	Sungai Kumpeh dan sempadannya	-	80.2
-	Sungai Limbungan dan sempadannya	-	17.0
-	Sungai Malapani dan sempadannya	-	22.7
-	Sungai Melapo dan sempadannya	-	5.7
-	Sungai Pauh dan sempadannya	-	9.3
-	Sungai Pelayangan dan sempadannya	-	0.4
-	Sungai Pintasan dan sempadannya	-	19.5
-	Sungai Rengat dan sempadannya	-	17.7
-	Sungai Sebiak dan sempadannya	-	40.7
-	Sungai Sirih dan sempadannya	-	20.6
-	Sungai Talangkapas dan sempadannya	-	72.9
-	Sungai Tanjung dan sempadannya	-	25.8
-	Tutupan Hutan dan Belukar	-	6,379.9
Total		35.9	7,156.4
Luas Area Penilaian		1,953.0	28,135.0
% Terhadap Luas Area Penilaian		1.8	25.4

¹² Penentuan lebar sempadan mengacu pada peraturan menteri Pekerjaan Umum No 28 tahun 2015 tentang lebar sempadan sungai. Seluruh sungai diklasifikasikan sebagai sungai tidak bertanggung diluar perkotaan dengan lebar minimum 50 meter untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar. Sungai kecil dan sungai besar dibedakan melalui luasan DAS <500 km² dan >500 km² (Pasal 7 ayat 1)



Gambar 63. Peta area HCV 4 di area penilaian

7.2.4 HCV 5: Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal

HCV	Elemen	Hasil
5	Situs dan sumber daya fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (misalnya sebagai sumber mata pencaharian, protein, dan air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas atau masyarakat adat.	Ada

Tabel 26. Ringkasan keberadaan HCV 5 di area penilaian

Situasi HCV 5	Indikasi di area penilaian
Lahan berburu dan penjeratan (untuk daging hewan buruan, kulit dan bulu)	Tidak ada Sudah tidak ada masyarakat yang berburu dan menjerat untuk mendapatkan daging, kulit dan bulu, di kawasan sekitar Perkebunan PT JBP, mayoritas merupakan kawasan budidaya yang di kelola perusahaan dan masyarakat.
PHBK, seperti kacang-kacangan, beri, jamur, tanaman obat, rotan	Tidak ada Produk hutan bukan kayu (PHBK) dapat dikatakan sudah sangat terbatas dan tidak ada yang memanfaatkan.
Bahan bakar untuk aktivitas rumah tangga seperti: memasak, penerangan dan pemanasan	Tidak ada Energi untuk penerangan keluarga umumnya diperoleh dari berlangganan listrik PLN. Masyarakat tidak memerlukan untuk pemanasan. Sebagian besar masyarakat sudah menggunakan bahan bakar gas LPG konversi bantuan Pemerintah dan pemakaian kayu bakar sebagai substitusi yang di peroleh dari halaman / kebun di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa desa masih ada yang belum terlayani listrik PLN, mengupayakan dengan menggunakan genset pribadi di setiap rumah / keluarga.
Ikan (sebagai sumber protein utama) dan spesies air tawar lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal	Ada Ikan merupakan salah satu sumber protein yang masih sering dikonsumsi selain daging unggas dan sapi. Beberapa warga masih ada yang memanfaatkan waktu luang untuk mencari ikan hanya sekedar hobby. Profesi sebagai pencari ikan sungai masih ada, utamanya di Sungai Batanghari.
Bahan bangunan (tiang, jerami, kayu)	Tidak ada Sebagian besar bahan bangunan dibuat dari material bangunan modern seperti: semen, besi, baja ringan, aluminium, kaca, genteng dan seng. Material bangunan cukup mudah dibeli di pasar setempat. Bangunan rumah kayu sebagian besar adalah rumah lama warisan saat sumber kayu masih tersedia di kawasan ini. Kini kayu masih bisa diperoleh secara khusus dengan aturan adat yang ketat dan hanya untuk keperluan keluarga dari komunitas.
Pakan ternak dan penggembalaan musiman	Tidak ada Kegiatan penggembalaan musiman belum berkembang baik, hanya beberapa warga saja yang memiliki ternak, padahal potensi lahan sangat potensial.
Sumber air yang penting untuk air minum dan sanitasi	Ada Air minum keluarga umumnya diperoleh dari dari instalasi sumur (gali / bor) dan air kemasan / air galon isi ulang. Sebagian besar rumah telah memiliki kamar mandi untuk keperluan mandi mencuci dan kakus. Namun demikian, masih cukup banyak warga yang memanfaatkan air Sungai Batanghari untuk keperluan mandi, cuci dan kakus utamanya di saat musim kemarau.
Barang yang dipertukarkan dengan barang esensial lainnya, atau dijual tunai untuk digunakan membeli barang esensial atau membayar uang sekolah.	Tidak ada Hasil TBS kelapa sawit merupakan komoditas unggulan masyarakat yang dijual untuk membeli barang-barang esensial dan kebutuhan lainnya. Beberapa warga desa-desa sekitar perusahaan cukup banyak yang bekerja sebagai staf dan pekerja di perkebunan. Disamping bekerja sebagai tenaga lepas untuk panen dan perawatan serta usaha lain terkait dengan kebun-kebun kelapa sawit masyarakat.

Lahan Berburu dan Penjeratan | Menurut keterangan dari narasumber, tidak ada tempat berburu di areal PT JBP dan sekitarnya. Hal ini disebabkan, seluruh area dan sekitarnya telah menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan dan masyarakat. Kebutuhan dasar terkait daging, kulit, dan bulu telah mudah didapatkan dengan membeli di toko dan pasar kecamatan. Selain itu, terdapat pedagang keliling ada secara rutin berkeliling menjajakan beraneka ragam kebutuhan pokok, seperti: daging, ikan, sayuran dan buah tertentu.

Selain itu, sebagian keluarga masih memanfaatkan sebagian lahannya untuk berbudidaya seperti: singkong, ubi, buah pepaya di sebagian lahan di sekitar pemukiman. Dengan demikian, di unit manajemen dan AOI tidak ada lahan berburu dan penjeratan yang memenuhi syarat sebagai HCV 5.

Produk Hasil Hutan Bukan Kayu | Menurut keterangan dari narasumber, masyarakat sudah tidak mencari produk hasil hutan bukan kayu sejak dari lama. Hal ini disebabkan lahan-lahan di wilayah desa telah dimanfaatkan untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Hilangnya tutupan alami berupa hutan yang menjadi faktor utama produk hasil hutan bukan kayu sudah tidak dimanfaatkan. Selain itu, lahan disekitar desa merupakan lahan rendahan yang sering tergenang air, sehingga didominasi tumbuhan semak yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat telah mengganti kebutuhan tersebut dengan membeli barang jadi yang dijual di pasar atau toko di sekitar wilayah desa.

Untuk kebutuhan bahan pakaian diperoleh dengan membeli di pasar, sebagian kecil diperoleh dari bantuan. Sudah tidak ada tradisi untuk bertenun dengan sumber bahan dari alam untuk dijadikan kain pakaian.

Kebutuhan akan obat-obatan sebagian besar diperoleh dari Puskesmas, dokter praktek, bidan (baik membeli dan bantuan), obat generik umum juga dapat dibeli di apotik di ibukota kecamatan atau kios yang banyak tersedia. Dengan demikian, di unit manajemen dan AOI tidak ada lahan untuk produk hasil hutan bukan kayu yang memenuhi syarat sebagai HCV 5.

Bahan Bakar untuk Aktifitas Rumah Tangga | Menurut keterangan dari narasumber, masyarakat telah menggunakan LPG (*Liquid Petroleum Gas*) untuk keperluan memasak. LPG dengan mudah didapatkan di warung dan toko kelontong. Harga isi ulang tabung LPG 3 kg antara 23-30 ribu per tabung tergantung lokasi desa. Kayu bakar masih digunakan sebagai pengganti LPG jika sedang kosong. Kayu bakar didapatkan dari kebun-kebun masyarakat dan sekitar perkarangan rumah. Selain LPG, masyarakat menggunakan bensin untuk konsumsi kendaraan bermotor. Harga bensin berkisar 10-12 ribu per liter tergantung lokasi penjualan.

Penerangan masyarakat telah menggunakan listrik PLN. Sebagian besar masyarakat menggunakan PLN dengan kapasitas 900-1,300 volt. Selain itu, di beberapa dusun juga terdapat panel surya dan gendset yang digunakan jika listrik PLN mengalami pemadaman. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak ada area-area yang berkaitan dengan sumber bahan bakar yang memenuhi kriteria sebagai area HCV 5.

Area Mencari Ikan | Masyarakat sudah tidak bergantung kepada sungai-sungai untuk melakukan kegiatan mencari ikan. Kegiatan mencari ikan hanya dilakukan sebagai hobi. Sungai-sungai yang dimanfaatkan untuk mencari ikan berupa Sungai Batanghari (sebagai sungai utama mencari ikan), Sungai Jebus, Sungai Palu, dan beberapa sungai lainnya. Kebutuhan ikan didapatkan dari membeli di pasar atau toko kelontong. Harga beli umum untuk ikan sungai seperti ikan Lele, Lais, Toman, Udang (termasuk udang Galah), Baong, Gabus, Tawes, Jambal/Patin dengan harga sekitar Rp 20-100 ribu/Kg. Pendapatan rumah tangga yang meningkat dari kebun kelapa sawit pribadi membuat berbagai kebutuhan diperoleh dari membeli. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat area-area yang berkaitan dengan sumber area mencari ikan yang memenuhi kriteria sebagai area HCV 5.

Area Sumber Bahan Bangunan | Menurut keterangan dari narasumber, sudah tidak terdapat area sumber bahan bangunan. Saat ini, kebutuhan bahan bangunan sangat mudah didapatkan di toko material. Toko material ada di setiap desa dengan kondisi yang kecil, sedangkan toko material dengan kondisi yang lebih besar terdapat di Ibukota. Perumahan masyarakat telah menggunakan material modern seperti atap seng, kaca, plafon yang kini sudah tersedia di toko material.

Area Tempat Pakan Ternak | Menurut keterangan dari narasumber, kegiatan perternakan seperti kambing dan kerbau dilakukan menggunakan kandang di sekitar permukiman dan kebun kelapa sawit pribadi masyarakat. Seperti rumput untuk pakan kambing dan kerbau sangat mudah didapatkan dari kebun kelapa sawit masyarakat. Dengan demikian, tidak ada area untuk penggembalaan ternak yang diperlukan masyarakat sehingga tidak ada HCV 5 yang memenuhi kriteria ini.

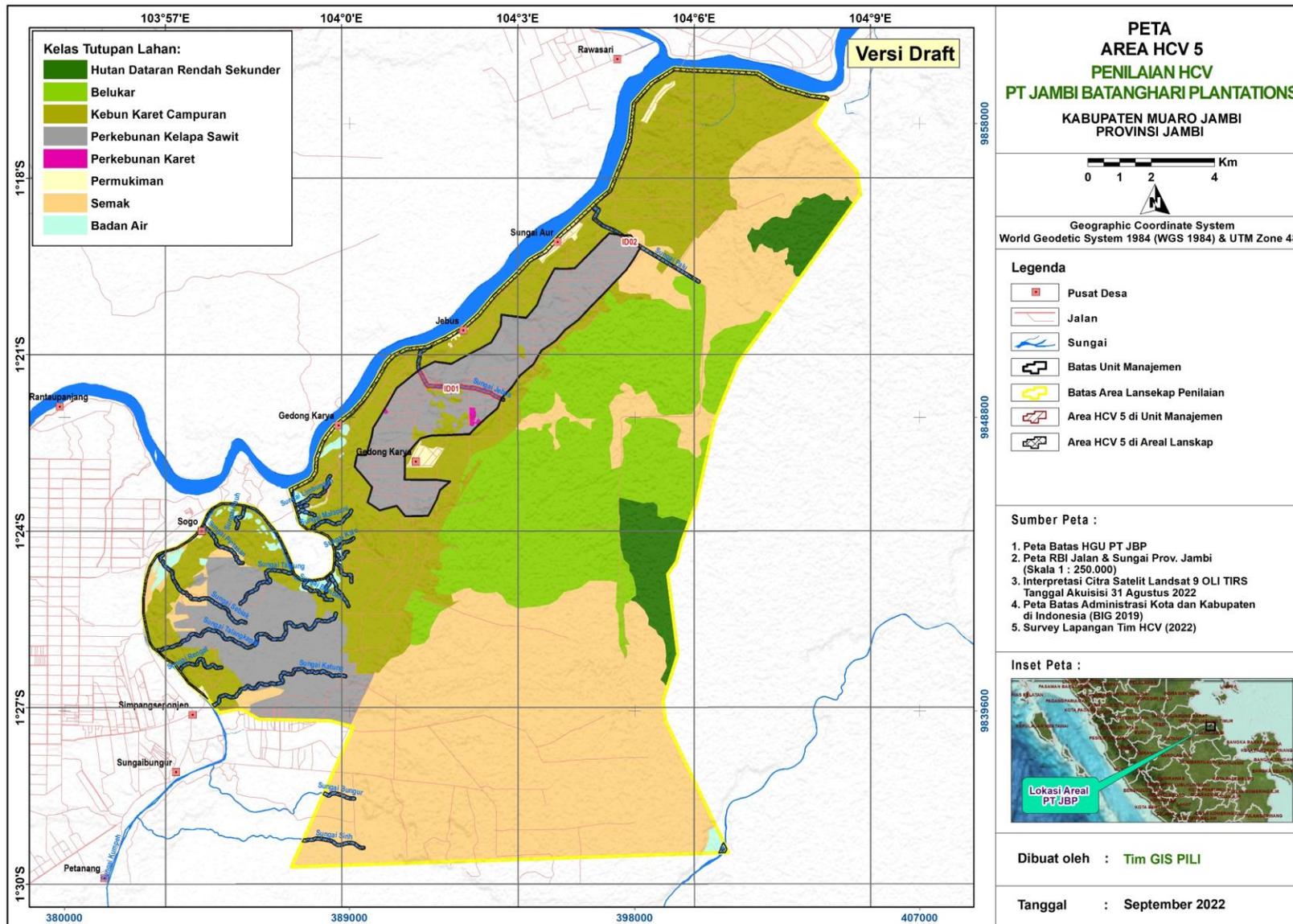
Sumber Air | Berdasarkan wawancara dan pemetaan partisipatif, sumber air masyarakat dari tiga desa didapatkan dari sumur bor, sumur gali, dan sungai. Pemanfaatan sumber air tersebut bisa dinikmati hingga rumah masyarakat dengan menggunakan jalur pipanisasi. Sumber air tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan sanitasi. Pemanfaatan air sungai dilakukan jika terjadi musim kemarau panjang dikarenakan sebagian air sumur gali kering dan terpaksa mengambil air langsung ke sungai. Sungai yang digunakan oleh masyarakat dari ketiga desa adalah Sungai Batanghari untuk keperluan MCK/Sanitasi. Sedangkan keperluan air minum didapatkan dari pengisian ulang di depot galon dan warung. Pembelian air galon isi ulang di kios yang berada di setiap desa dengan harga sekitar Rp. 5-7 ribu per galon (*lihat pada bab 6.4 konteks sosial*).

Barang-barang yang dipertukarkan dengan barang esensial lainnya | Pendapatan masyarakat bersumber dari kebun kelapa sawit pribadi dan bekerja di perusahaan kelapa sawit. Hasil pendapatan tersebut digunakan masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan kebun kelapa sawit oleh masyarakat dilakukan oleh seluruh desa sehingga tidak ada area yang menghasilkan barang-barang yang dipertukarkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tempatan yang bernilai HCV 5 di unit manajemen dan AOI.

Lokasi dan luas area HCV 5 | Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan narasumber dan stakeholders, teridentifikasi keberadaan area HCV 5 berupa sungai beserta sempadannya untuk tambahan asupan protein dan kebutuhan sumber air kehidupan keluarga untuk santiasi untuk mandi, cuci dan kakus. Area-area HCV 5 di unit manajemen terletak di 2 lokasi (ID) dengan total luas 35.9 ha (**Tabel 27**). Secara lengkap, keberadaan area HCV 5 di area penilaian (unit manajemen dan area lanskap) disajikan pada **Tabel 27** serta **Gambar 64** menyajikan Peta keberadaan HCV 5 di area penilaian.

Tabel 27. Lokasi dan luas area HCV 5 di area penilaian

Indeks	Keterangan	Luas (ha)	
		Unit Manajemen	Area Penilaian
ID01	Sungai Jebus dan sempadannya	29.7	39.0
ID02	Sungai Palu dan sempadannya	6.1	44.7
-	Sungai Air Hitam Luar dan sempadannya	-	4.5
-	Sungai Batanghari dan sempadannya	-	239.2
-	Sungai Bemban dan sempadannya	-	13.6
-	Sungai Buaya Besar dan sempadannya	-	10.0
-	Sungai Buaya Kecil dan sempadannya	-	6.7
-	Sungai Bungur dan sempadannya	-	10.6
-	Sungai Cempa dan sempadannya	-	3.1
-	Sungai Kajang dan sempadannya	-	12.3
-	Sungai Kale dan sempadannya	-	7.7
-	Sungai Katung dan sempadannya	-	52.7
-	Sungai Kumpeh dan sempadannya	-	80.2
-	Sungai Limbungan dan sempadannya	-	17.0
-	Sungai Malapani dan sempadannya	-	22.7
-	Sungai Melapo dan sempadannya	-	5.7
-	Sungai Pauh dan sempadannya	-	9.3
-	Sungai Pelayangan dan sempadannya	-	0.4
-	Sungai Pintasan dan sempadannya	-	19.5
-	Sungai Rengat dan sempadannya	-	17.7
-	Sungai Sebiak dan sempadannya	-	40.7
-	Sungai Sirih dan sempadannya	-	20.6
-	Sungai Talangkapas dan sempadannya	-	72.9
-	Sungai Tanjung dan sempadannya	-	25.8
Total		35.9	776.5
Luas Area Penilaian		1,953.0	28,135.0
% Terhadap Luas Area Penilaian		1.8	2.8



Gambar 64. Peta area HCV 5 di area penilaian

7.2.5 HCV 6: Nilai Kultural

HCV	Elemen	Indikasi
6	Situs, sumber daya, habitat dan lanskap yang memiliki signifikansi kultural, arkeologis atau sejarah di tingkat global atau nasional dan atau yang memiliki kepentingan kultural, ekologis, ekonomi atau religi/sakral yang kritis bagi budaya tradisional komunitas lokal atau masyarakat adat yang diidentifikasi melalui interaksi dengan komunitas lokal atau masyarakat adat terkait.	Tidak Ada

Identifikasi keberadaan HCV 6 berdasarkan pada Panduan Umum Nilai Konservasi Tinggi 2017 (*Common Guidance for the Identification of High Conservation Values* (Brown et al., 2017)). Identifikasi HCV 6 terkait pada tempat, sumber daya, habitat dan lanskap yang memiliki nilai-nilai historis dan kultural penting yang diakui, bahkan apabila tidak dilindungi oleh legislasi dan situs religi atau lahan pemakaman yang memiliki peranan penting bagi masyarakat lokal atau adat. Indikasi yang akan memenuhi keberadaan HCV 6 disajikan pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Indikasi yang akan memenuhi keberadaan HCV 6

Situasi yang memenuhi syarat sebagai HCV 6	Indikasi
Situs yang diakui oleh kebijakan dan legislasi nasional memiliki nilai kultural yang tinggi	Tidak ada Di sekitar AOI tidak ditemukan situs yang diakui oleh kebijakan dan legislasi nasional yang memiliki nilai kultural tinggi.
Situs yang memiliki penetapan resmi dari pemerintah nasional dan/atau lembaga internasional seperti UNESCO	Tidak ada Pulau Sumatera memiliki situs yang diakui UNESCO yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat. Lokasi Taman Nasional ini berada di cukup jauh dari AOI.
Situs dengan nilai-nilai historis dan kultural penting yang diakui, bahkan apabila tidak dilindungi oleh legislasi	Tidak Ada Di sekitar AOI tidak ditemukan situs dengan nilai historis dan kultural yang diakui secara adat.
Situs religi atau sakral, lahan pemakaman atau situs yang dijadikan lokasi penyelenggaraan upacara adat yang memiliki peranan penting bagi masyarakat lokal atau adat	Tidak Ada Tidak ditemukan situs religi atau sakral atau pemakaman yang menjadi area upacara adat bagi masyarakat.
Sumber daya tumbuhan atau hewan yang memiliki nilai totem atau digunakan dalam upacara adat	Tidak ada Tidak terdapat area di AOI yang secara tradisi kultural memiliki nilai tinggi yang masih dikunjungi, dikelola, dirawat juga ada sumberdaya tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat.

Situs yang diakui oleh kebijakan dan legislasi nasional memiliki nilai kultural yang penting | Pada AOI tidak terdapat situs yang memenuhi kriteria ini. Kabupaten Muaro Jambi memiliki situs yang diakui pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yaitu Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan situs purbakala yang diyakini sebagai salah satu pusat pengembangan agama Budha di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Candi Muaro Jambi ini memiliki nilai kultural yang penting bagi masyarakat Provinsi Jambi. Namun demikian, area Candi Muaro Jambi ini berada cukup jauh dari AOI.

Situs yang memiliki penetapan resmi dari pemerintah nasional dan/atau lembaga internasional seperti UNESCO | Tidak ada situs-situs di AOI yang memenuhi kriteria sebagai situs penetapan resmi dari pemerintah nasional, maupun UNSECO. Informasi dari halaman UNESCO terdapat tiga situs di Pulau Sumatera yaitu *Taman Gunung Leuser*, *Taman Nasional Kerinci Seblat*, dan *Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Situs ini berada jauh dari AOI. Taman Gunung Leuser berada di Provinsi Sumatera Utara, Taman Nasional Kerinci Seblat berada di

Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berada di Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Bengkulu.

Situs dengan nilai-nilai historis dan kultural penting yang diakui, bahkan apabila tidak dilindungi oleh legislasi | Pada AOI tidak terdapat situs yang memenuhi kriteria ini. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kebudayaan, terdapat dua situs yang bernilai historis dan kultural penting namun tidak ada penetapan secara legalasi pemerintah yaitu Kawasan Kota Lama Kolonial Belanda dan Bunker Jepang. Kedua lokasi situs ini berada di kota jambi, sekitar 110 km dari AOI.

Situs religi atau sakral, lahan pemakaman atau situs yang dijadikan lokasi penyelenggaraan upacara adat yang memiliki peranan penting bagi masyarakat lokal atau adat | Pada AOI tidak terdapat lahan pemakaman yang bernilai sejarah atau masih dilakukan ritual adat. Menurut narasumber, seluruh masyarakat dari ketiga desa telah memeluk agama islam, sehingga kegiatan ritual adat secara sejarah sudah tidak dilakukan dan ditinggalkan dalam waktu lama.

Ritual keagamaan yang dilakukan “Seloko” (*lihat* pada bab **6.4 konteks sosial**). Seloko merupakan kegiatan pengajian yang dilakukan di rumah-rumah masyarakat secara bergantian. Ritual ini tidak memiliki nilai sakral maupun lokasi tertentu untuk melakukan kegiatan ini.

Sumber daya tumbuhan atau hewan yang memiliki nilai totem atau digunakan dalam upacara adat | Tradisi budaya masyarakat di tiga desa yang menganut agama Islam sudah tidak mengenal sumber daya tumbuhan atau hewan yang memiliki nilai totem. Menurut narasumber, sudah tidak ada sumber daya tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk upacara adat oleh masyarakat.

Lokasi dan luas area HCV 6 | Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan narasumber dan stakeholders, tidak teridentifikasi keberadaan area HCV 6 baik di unit manajemen maupun areal lanskap.

8 Bagian Lingkungan Metode dan Hasil

8.1 Metode Lingkungan

Penilaian aspek lingkungan menggunakan beberapa panduan, yaitu: (i) *Common Guidance for the Identification of High Conservation Values* (Brown et al., 2017); (ii) *Common Guidance for the Management and Monitoring of High Conservation Values* (Brown et al., 2018); (iii) *HCV Assessment Manual* (HCVRN, 2014); dan (iv) *Toolkit HCV Indonesia* (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008) khusus untuk identifikasi HCV 3. Pengumpulan data penilaian HCV pada bagian lingkungan ditujukan pada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

8.1.1 Tinjauan Pustaka dan Penggunaan Data Sekunder

Data sekunder (**Tabel 29**) dikumpulkan sejak tahap pra-penilaian sampai tahap penyusunan laporan akhir. Berbagai informasi yang relevan dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Kemudian untuk mengkaji HCV 1, 2, dan 3, dihimpun peta-peta tematik mengenai keanekaragaman hayati Sumatera dan informasi spesies penting terkini dalam konteks global dan nasional, seperti dipublikasikan oleh IUCN, CITES, BirdLife International, Ramsar, Intact Forest Landscape, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tabel 29. Data dan informasi yang dihimpun dan dianalisis pada bidang kajian lingkungan

Tipe HCV	Jenis data dan informasi	Sumber data
HCV 1	Peta kawasan hutan dan kawasan konservasi	KLHK (2014)
	IUCN Red List	IUCN (www.iucnredlist.org)
	CITES Appendices (valid mulai 1 Januari 2017)	CITES (2017)
	Daftar Tumbuhan dan Satwa Dilindungi	PermenLHK No. 106 tahun 2018
	Fieldguide Burung SKJB	MacKinnon <i>et al.</i> , 2010
	Fieldguide Vegetasi	Tantra, <i>et al.</i> (1990)
	Pengenalan Jenis Tumbuhan	Ferry Slik (asianplant.net)
	Fieldguide Mamalia	Payne, <i>et al.</i> (2000)
	Fieldguide Burung	MacKinnon <i>et al.</i> , 2010
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 28 Juni 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 31 Agustus 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Daftar Burung Indonesia	Sukmantoro dkk., 2006
	Panduan Identifikasi Reptil dan Amfibi Dilindungi di Indonesia	Nathan rusli, 2019
	Kura-kura dan buaya Indonesia dan Papua Nugini	Iskandar, 2000
	Peta IBA; EBA; KBA	BirdLife International (www.birdlife.org)
	Ramsar	Ramsar (www.ramsar.org)
HCV 2	<i>Land Use Change Analysis</i>	PILI (2022)
	Dokumen UKL dan UPL	PT JBP (2008)
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 28 Juni 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 31 Agustus 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Peta sistem lahan	RePPPProt, 1990
HCV 3	Peta Intact Forest Landscape	IFL (www.intactforests.org)
	Peta sebaran pemukiman	Badan Informasi Geospasial
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 28 Juni 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Citra satelit Landsat 9 tanggal 31 Agustus 2022	USGS (www.earthexplorer.usgs.gov)
	Peta Ekosistem Langka	2013-2015 (www.iucnredlist.org)
	Peta sistem lahan	RePPPProt, 1990
Peta ecoregion Sumatera	KLHK (2018)	
<i>Land Use Change Analysis</i>	PILI (2022)	

8.1.2 Kerja Lapangan Lingkungan

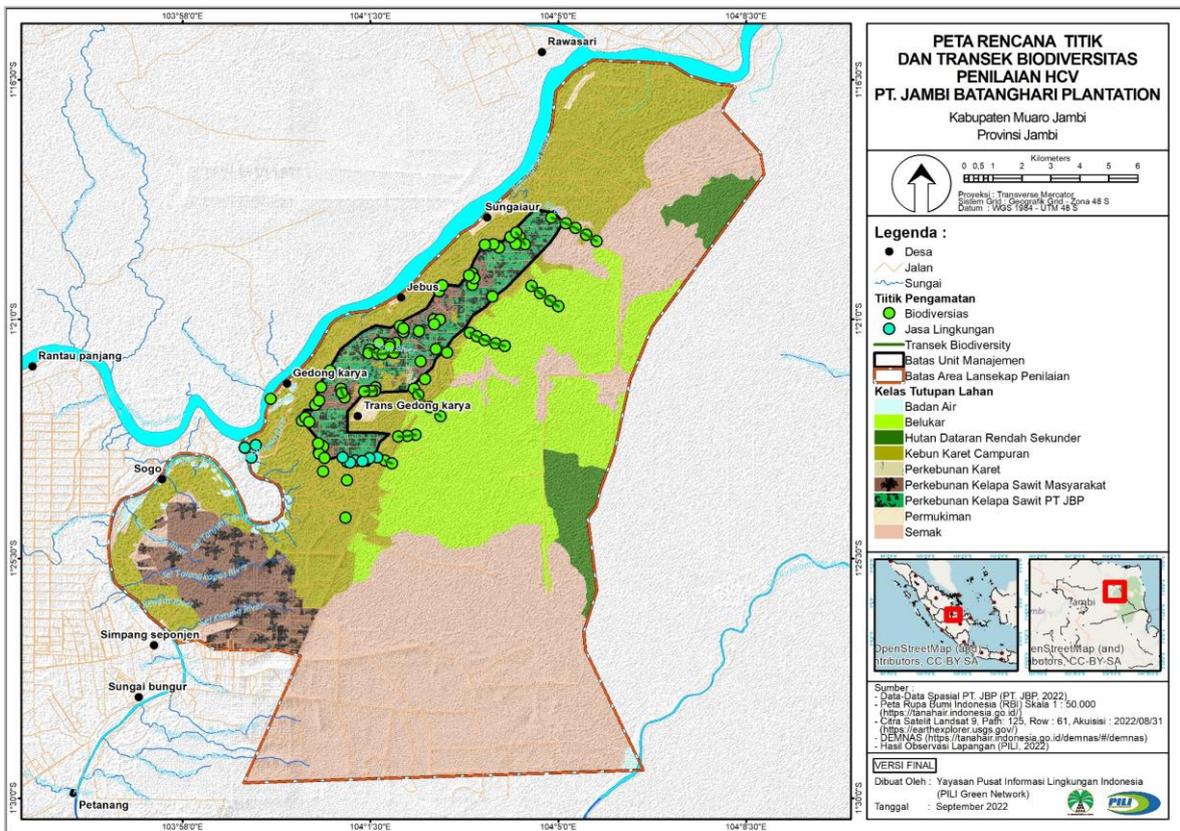
HCV 1: Satwa dan Tumbuhan | Fokus pengumpulan data lapangan yaitu pendataan spesies fauna (pada tiga kelompok: mamalia, burung, dan reptilia) serta flora tingkat tinggi. Setelah data inventarisasi spesies terkumpul, kemudian setiap spesies dilengkapi dengan status konservasi, mencakup kategori RTE (*Rare Threatened Endangered* berdasarkan IUCN *Red Data List*), tingkat sebaran (endemik atau sebaran terbatas), CITES (status perdagangan internasional), dan perlindungan nasional. Berdasarkan hasil *scoping study*, spesies berprofil tertinggi yang terdapat di AOI adalah Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Rusa sambar (*Rusa unicolor*), Lutung kelabu (*Trachypithecus cristatus*), dan Kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Keberadaan empat spesies ini terdeteksi berdasarkan wawancara.

Identifikasi keberadaan spesies keanekaragaman hayati dilakukan berdasarkan bukti: i) perjumpaan langsung; ii) suara; iii) jejak atau tanda yang ditinggalkan: tapak di atas tanah, cakaran pada batang pohon, kotoran, sarang, sisa-sisa bagian tubuh (misalkan: kulit luar, sisik, bulu, rambut yang terlepas, tengkorak, tanduk, taring, atau bagian tubuh lainnya yang masih bisa dikenali). Data lain yang dikumpulkan yaitu terkait kondisi tutupan lahan vegetasi alami secara kualitatif mencakup struktur vegetasi (stratifikasi tegakan vegetasi), fase suksesi (awal, lanjutan, klimaks), dan kualitas tegakan vegetasi (utuh, relative utuh, sedikit terganggu, terganggu, terdegradasi, sangat terdegradasi).

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan metode survei:

- i) Titik hitung pada transek, yaitu penempatan beberapa titik pengamatan pada transek dengan jarak antar titik pengamatan berkisar antara 50-100 m tergantung kondisi lapangan. Data yang dikumpulkan yaitu kehadiran fauna (terutama spesies burung) serta inventarisasi jenis flora. Pada sepanjang transek yang dilalui dilakukan juga pencatatan kondisi habitat dan potensi pakan. Transek yang dilalui sebagian merupakan jalan setapak yang sudah ada dan lainnya merupakan rintisan baru. Jumlah transek pada penilaian ini sebanyak 8 transek dengan panjang berkisar antara 50 m s.d. 500 m. Sedangkan jumlah titik pengamatan pada transek yaitu sebanyak 86 titik. Penempatan transek dan titik pengamatan diilustrasikan pada **Gambar 65**.
- ii) Eksplorasi, yaitu pengumpulan data bersifat *opportunistic* dengan mencatat kehadiran semua spesies satwa dan tumbuhan. Pengamatan dilakukan pada sepanjang jalur perjalanan survey dan verifikasi lapangan.
- iii) Wawancara, dilakukan terhadap masyarakat setempat mengenai informasi keberadaan spesies keanekaragaman hayati penting, keberadaan fragmen hutan yang tersisa, dan interaksi masyarakat dalam pemanfaatannya.
- iv) Data inventarisasi tumbuhan tim HCV keanekaragaman hayati dilengkapi dengan data inventarisasi yang dikumpulkan oleh tim HCV Sosial.

HCV 2: Lanskap Alami Luas | Identifikasi HCV 2 dilakukan melalui analisis spasial dan observasi lapangan. Analisis spasial dilakukan untuk mengetahui posisi area penilaian terhadap lanskap alami luas di sekitarnya. Data tersebut didapatkan dengan menyiapkan peta tutupan lahan yang mengandung informasi antara lain area IFL, kawasan konservasi, dan potensi habitat spesies dengan jelajah luas. Selanjutnya, data tutupan lahan diverifikasi lapangan dengan metode observasi visual (*ground truthing*). Observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi: (i) keberadaan lanskap ekosistem alami yang luas; (ii) tingkat aktivitas manusia pada lanskap alami tersebut; (iii) tingkat konektivitas antara dua atau lebih area yang potensial menjadi bagian lanskap luas atau habitat bagi spesies dengan daerah jelajah luas; dan, (iv) keberadaan ekosistem alami yang ukurannya kecil tetapi menyediakan fungsi kunci bagi lanskap seperti keterhubungan dan penyanggaan. Bila ada ekosistem alami di area penilaian yang menjadi bagian dari lanskap alam yang luas, maka wilayah tersebut dipertimbangkan menjadi HCV 2



Gambar 65. Lokasi transek dan titik pengamatan keanekaragaman hayati

HCV 3: Ekosistem Langka dan Terancam | Identifikasi HCV 3 dilakukan melalui gabungan metode analisis spasial dan observasi lapangan. Metode analisis spasial dilakukan dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian (*Precautionary Approach*) pada *HCV Toolkit for Indonesia* (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008). Penerapan pendekatan kehati-hatian dilakukan melalui: (i) pemetaan tipe ekosistem di seluruh AOI berdasarkan peta sistem lahan dan observasi lapangan; (ii) penentuan tipe ekosistem terancam dan/atau langka; (iii) *overlay* peta tipe ekosistem terancam dan/atau langka dengan peta vegetasi alami tersisa yang diperoleh dari interpretasi tutupan lahan. Hasil akhir dari analisis tersebut yaitu area dengan tutupan vegetasi alami pada ekosistem terancam dan/atau langka yang bernilai HCV 3.

Fungsi Hidrologi dan Jasa Lingkungan | Kegiatan lapang untuk mengidentifikasi fungsi hidrologi dan jasa lingkungan, termasuk observasi jenis tanah, dilakukan berdasarkan objek yang dikaji. Pada setiap tipe obyek kajian, pertanyaan dasar yang harus dijawab adalah nilai, fungsi, dan manfaat jasa lingkungan seperti apa yang sangat penting dan dapat diberikan oleh obyek kajian tersebut. Setiap objek kajian yang ditemukan harus dilengkapi dengan: (i) toponimi, (ii) deskripsi lokasi, (iii) status saat ini (misalnya jenis dan intensitas pemanfaatan), (iv) ancaman dan potensi ancaman, (v) titik koordinat, dan (vi) dokumentasi berupa foto lapangan. Pada objek kajian berupa sungai dilakukan identifikasi morfologi sungai, estimasi fluktuasi debit dengan *proxy* vegetasi dan sedimen, verifikasi tutupan lahan di sempadan, penilaian kualitas air berdasarkan *proxy* fisik dan biologi, dan mengestimasi fungsi bantaran sebagai bahan untuk penentuan lebar sempadan sungai. Pada objek kajian berupa bukit dilakukan penilaian kondisi fisiografi (topografi, kelerengan, bentuk permukaan), verifikasi tutupan lahan, estimasi batas area bukit, serta mengidentifikasi keberadaan/ketidakberadaan sumber air (*seepage, spring*). Observasi jenis tanah dilakukan terutama untuk memverifikasi keberadaan/ketidakberadaan tanah gambut dan kedalaman gambut.

8.2 Hasil HCV Lingkungan

8.2.1 Hasil Kerja Lapangan Lingkungan

Ringkasan wawancara dan diskusi | Pengumpulan data melalui wawancara terhadap masyarakat setempat dan karyawan perusahaan untuk menggali informasi terkait aspek keanekaragaman hayati dan lingkungan telah dilakukan selama pelaksanaan kajian lengkap. Secara umum, informasi penting yang terkumpul dari pengumpulan data tersebut adalah mengenai keberadaan beruk, kijang, musang, rusa, dan spesies penting lainnya. Selain itu, kondisi bentang alam saat ini dan sebelumnya, serta ancaman terhadap keberadaan spesies penting dan habitatnya.

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi keberadaan spesies Beruk, Kera ekor panjang, Rusa sambar, Lutung kelabu, Sero Ambrang masih dijumpai di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Sedangkan Harimau sumatera sudah tidak pernah dijumpai oleh masyarakat. Selain itu, konflik satwa pun belum pernah terjadi di sekitar desa-desa. Harimau sumatera menurut Kepala Desa Sungai Aur berada di Taman Nasional Berbak yang cukup jauh dari PT JBP maupun Desa. Hal ini diperkuat dengan tutupan lahan alami yang masih tersisa di sebelah Timur dari AOI yaitu hutan dataran rendah sekunder dan belukar yang memungkinkan sebagai habitat hidup satwa tersebut.

Kegiatan Lapangan | Secara keseluruhan, kegiatan lapangan untuk bagian lingkungan dilakukan di 304 titik observasi. Jumlah titik survei tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam lokasi survei (**Tabel 30**). Kegiatan survei bidang kajian lingkungan terdiri atas *ground-truth* tutupan lahan (200 titik observasi); serta 104 titik observasi HCV 1-3 (86 titik diantaranya dilakukan dengan metode titik hitung pada transek) yang mencakup identifikasi fauna/flora dan verifikasi keberadaan ekosistem langka dan terancam (**Gambar 65**). Observasi lapangan terkait sungai, dan tanah di 29 titik, serta lokasi observasi pada lingkup survei lapangan HCV 4 (*lihat Bab 7*).

Jalur survei yang dilalui berupa akses jalan melalui jalan blok kelapa sawit. Namun, ketika pada lokasi yang dituju tidak terdapat akses jalan maka dilakukan perintisan jalan. Hal tersebut terutama dilakukan pada kegiatan survei biodiversity.

Tabel 30. Rekapitulasi kegiatan survei lapangan bagian lingkungan

No	Lokasi	Identifikasi		Verifikasi		Sungai	Tanah
		Fauna	Flora	Tutupan Lahan	Ekosistem		
1	Area Kebun Karet Campuran	✓	✓	✓	✓	-	✓
2	Sempadan Sungai Jebus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Sempadan Sungai Palu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Areal HGU PT JBP	✓	-	✓	✓	-	✓
5	Kawasan TAHURA	✓	✓	✓	✓	-	✓
6	Areal Lanskap	✓	-	✓	✓	-	✓

Keterangan: ✓ = jenis kegiatan yang dilakukan; - = tidak dilakukan

Secara keseluruhan tercatat sebanyak 108 spesies mencakup 25 spesies fauna dan 108 spesies flora (**Tabel 31**; daftar lengkap disajikan pada **Lampiran 6**). Hasil survey lapangan dan konsultasi para pihak menunjukkan keberadaan spesies bernilai penting mencakup spesies RTE, endemik, terdaftar pada CITES, dan dilindungi peraturan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan spesies tersebut mengindikasikan keberadaan area yang berperan sebagai habitat dan bernilai konservasi tinggi. Selain itu, observasi lapangan berhasil mencatat keberadaan ekosistem terancam di area penilaian.

Tabel 31. Jumlah spesies keanekaragaman hayati di area penilaian berdasarkan kelompok dan statusnya

Grup	Jumlah Spesies	Endemik	Migran	IUCN			CITES		UU
				CR	EN	VU	App I	App II	
Mamalia	8	-	-	2	1	4	2	5	5
Burung	9	-	1	-	-	3	-	5	6
Reptilia	8	-	-	-	-	3	1	7	1
Tumbuhan	83	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	108	-	1	2	1	10	3	17	12

Keterangan: Kriteria IUCN: CR=Critically Endangered; EN=Endangered; VU=Vulnerable. Kriteria CITES: Appendix I; Appendix II. UU= Perlindungan berdasarkan PermenLHK No. 106/2018

8.2.2 HCV 1: Konsentrasi Keanekaragaman Hayati

HCV	Elemen	Hasil
1	Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik dan spesies langka, terancam atau terancam punah yang signifikan pada tingkat global, regional atau nasional.	Ada

Area penilaian tersusun atas tutupan lahan yaitu hutan dataran rendah sekunder, belukar, semak, kebun karet campuran, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, permukiman, dan badan air (*lihat Sub Bab 6.6*). Berdasarkan penggunaan lahan, hampir seluruh area penilaian merupakan lahan budidaya yang didominasi oleh perkebunan sawit yang sudah tertanam sejak tahun 2009. Kemudian, bila dilihat berdasarkan tipe ekosistem maka sebagian besar area penilaian merupakan ekosistem rawa gambut. Kondisi aktual lapangan, tutupan vegetasi alami yang tersisa berupa fragmen-fragmen hutan dataran rendah sekunder dan belukar yang terdapat pada areal lanskap atau sebelah Timur dari unit manajemen, sedangkan sisanya sudah menjadi area budidaya, seperti kebun kelapa sawit, kebun karet, dan area kebun karet campuran masyarakat.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa masih terdapat bagian di area penilaian yang memiliki potensi menjadi lokasi konsentrasi keanekaragaman hayati. Fitur ekosistem yang potensial tersebut yaitu tutupan vegetasi alami berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar.

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, di area penilaian tercatat beberapa spesies satwa dan tumbuhan penting berkategori *Rare, Threatened or Endangered* (RTE), Endemik, terdaftar pada *appendix* CITES, dan Dilindungi berdasarkan peraturan perlindungan yang berlaku (*lihat Tabel 33*). Oleh karena itu, maka di area penilaian terdapat spesies dan habitatnya yang bernilai konservasi tinggi dan dipertimbangkan sebagai HCV 1.

Tabel 32. Indikasi keberadaan HCV 1 di area penilaian

Situasi yang memenuhi syarat sebagai HCV 1	Indikasi di area penilaian
Kekayaan, keanekaragaman, atau keunikan spesies yang tinggi yang tercakup dalam wilayah yang terdefinisi	Tidak ada Sebagian besar area penilaian berupa kebun kelapa sawit. Kondisi aktual menunjukkan hanya terdapat beberapa lokasi yang berpotensi memiliki atau mampu menghadirkan keanekaragaman hayati cukup baik, yaitu area hutan dataran rendah sekunder dan belukar yang berada di areal lanskap.
Populasi beberapa spesies endemik atau RTE (<i>rare, threatened or endangered</i>)	Ada Spesies RTE masih dijumpai di aliran Sungai Jebus dan Sungai Palu yaitu Kura-kura katup dada dan buaya sinyulong.

Situasi yang memenuhi syarat sebagai HCV 1	Indikasi di area penilaian
Populasi penting atau spesies endemik atau RTE individu yang berjumlah banyak	Tidak ada Tidak tercatat spesies endemik dan/atau RTE di area penilaian.
Populasi kecil dari spesies endemik atau spesies RTE, di mana kelangsungan hidupnya baik secara nasional, regional atau global dianggap penting bergantung secara kritis pada kawasan terkait	Ada Tercatat informasi kuat dari masyarakat mengenai populasi kecil Monyet ekor panjang, Beruk, dan Lutung yang berada di sempadan Sungai Jebus.
Situs dengan kekayaan spesies RTE signifikan atau populasi spesies prioritas yang mendekati/diam pada kawasan situs prioritas tersebut	Tidak ada Spesies RTE tidak terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu saja, melainkan tersebar di beberapa lokasi di area penilaian.
Varian, subspecies atau varietas genetik penting	Tidak ada Pada area penilaian tidak tercatat keberadaan populasi anak jenis atau variasi genetik spesies tertentu.

Kawasan lindung sebagai proxy indikator keanekaragaman hayati | Area penilaian meliputi unit manajemen dan area lanskap. Area lanskap mencakup bagian dari Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan Taman Nasional Berbak. Kedua kawasan ini dinilai memiliki kecukupan sebagai proxy indikator keanekaragaman hayati. Namun demikian, antara kawasan konservasi dengan unit manajemen tidak terdapat keterhubungan dari aspek tegakan vegetasi alami. Keduanya terpisahkan oleh area budidaya terutama kebun masyarakat dan sungai Palu, ladang, jalan kebun dan masyarakat serta parit perkebunan. Kondisi ini tidak cukup memberikan indikasi keberadaan keanekaragaman hayati yang tinggi di dalam unit manajemen, terutama spesies bernilai konservasi tinggi.

Berdasarkan peta fungsi Kawasan (*lihat Gambar 28*), terdapat hutan lindung di sebelah Barat dari AOI, dan TAHURA serta Taman Nasional Berbak di timur dari AOI. Kawasan hutan lindung ini tidak memiliki konektivitas ke TAHURA maupun ke Taman Nasional Berbak, sebab terputus dengan Sungai Batanghari.

Spesies RTE (*Rare, Threatened or Endangered*) | Berdasarkan hasil survey, di AOI tercatat sebanyak 13 spesies fauna berstatus RTE, terdiri atas 7 spesies mamalia, 4 spesies burung, dan 2 spesies reptilia (**Tabel 33**). Selain itu, terdapat dua spesies mamalia RTE yang tercatat di luar AOI tetapi dipertimbangkan memiliki potensi untuk suatu waktu muncul di area penilaian. Kedua spesies fauna RTE tersebut yaitu gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Jebus, Desa Sungai Aur, dan Desa Gedong Karya serta verifikasi lapangan kedua spesies fauna RTE tersebut tidak pernah masuk ke wilayah desa, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik antara manusia dan fauna tersebut. Dua mamalia besar lainnya, yaitu Orangutan sumatera (*Pongo abelii*) dan Orangutan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) tersebar jauh dari area penilaian dan berada di Aceh hingga Sumatera Utara (Tapanuli). Tidak satupun spesies flora yang termasuk dalam kategori RTE.

Sementara itu, spesies mamalia RTE lainnya seperti lutung kelabu (*Trachypithecus cristatus*, VU), beruk (*Macaca nemestrina*, VU), Monyet ekorpanjang (*Macaca fascicularis*, EN), sero ambrang (*Aonyx cinereus*, VU), dan Rusa sambar (*Rusa unicolor*, VU) yang sudah adaptif terhadap kondisi habitatnya sekarang, masih dijumpai di beberapa kebun masyarakat dan area sekitar kebun kelapa sawit. Habitat penting bagi lutung, beruk, dan sero berupa tutupan kebun karet campuran di sekitar sempadan Sungai Jebus. Spesies burung RTE yang tercatat di unit

manajemen adalah kerak kerbau (*Acridotheres javanicus*, CR). Burung ini merupakan burung yang bisa hidup di sekitar pemukiman, lahan terbuka, dan lahan budidaya (MacKinnon *et al.*, 2010), oleh karena itu lokasi perjumpaannya tidak dipertimbangkan sebagai area NKT. Pada kelompok reptilia tercatat 1 spesies berstatus Rentan yaitu buaya sinyulong (*Tomistoma schlegelii*), dan 1 'Genting', yaitu 'kura katup (*Cuora amboinensis*). Catatan keberadaan buaya sinyulong diperoleh dari informasi hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dengan indikasi kuat bahwa spesies ini masih terdapat di dua aliran sungai utama yaitu Sungai Batanghari dan Sungai Jebus. Secara spesifik, pada tahun 2021-an, setelah kejadian banjir, seekor buaya sinyulong dijumpai Sungai Jebus. Keberadaan spesies RTE di area penilaian dipertimbangkan telah memenuhi kriteria keberadaan HCV 1. Keberadaan spesies RTE tersebut menjadi spesies paling penting yang akan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan area HCV 1 di area penilaian.

Tabel 33. Daftar spesies penting di area penilaian

No	Nama ilmiah	Nama Indonesia	Status			
			R	IUCN	CITES	UU
Mamalia						
1	<i>Elephas maximus sumatranus</i>	Gajah Sumatra	-	CR	I	+
2	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau sumatera	-	CR	I	+
3	<i>Aonyx cinereus</i>	Sero ambrang	-	VU	II	-
4	<i>Trachypithecus cristatus</i>	Lutung kelabu	-	VU	II	+
5	<i>Rusa unicolor</i>	Rusa sambar	-	VU	-	+
6*	<i>Macaca fascicularis</i>	Kera ekor-panjang	-	EN	II	-
7*	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk	-	VU	II	-
Burung						
8	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Kangkareng hitam	-	VU	II	+
9	<i>Psittacula longicauda</i>	Betet ekor-panjang	-	VU	-	+
10*	<i>Acridotheres javanicus</i>	Kerak kerbau	-	VU	-	-
11*	<i>Hirundo rustica</i>	Layang-layang api	M	LC	-	-
Reptilia						
12*	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya sinyulong	-	VU	I	+
13	<i>Cuora amboinensis</i>	Kura-kura patah dada	-	EN	II	-

Keterangan: - = tidak termasuk kategori endemik atau RTE atau dilindungi; + = spesies dilindungi;

R= Sebaran; E=Endemik: Pulau Sumatra dan pulau satelitnya, M= spesies migran musim dingin;

IUCN status: CR= *Critically Endangered*, EN= *Endangered*, VU= *Vulnerable*;

CITES status: App. I= terdaftar pada Appendix I, II= terdaftar pada Appendix II;

UU: Perlindungan hukum berdasarkan UU No. 5 tahun 1990, PP No. 7/1999, Permen LHK No. P.106/2018;

*: jenis satwa yang adaptif/ mampu hidup pada habitat terbuka mencakup kawasan pemukiman, area budidaya dan semak belukar.

** : jenis burung dengan wilayah jelajah yang luas mencakup kawasan budidaya hingga vegetasi alami, tercatat melintas di wilayah kajian.

Spesies endemik dan sebaran terbatas | Spesies endemik biasanya diartikan sebagai jenis keanekaragaman hayati yang hanya ditemukan hidup pada suatu wilayah tertentu (umumnya dibatasi dengan ukuran pulau atau negara). Pada penilaian ini, spesies endemik didefinisikan sebagai spesies yang hanya tercatat keberadaannya terbatas di Pulau Sumatera. Sementara, spesies dengan sebaran terbatas (*restricted range species*) merupakan jenis keanekaragaman hayati yang hanya ditemukan pada wilayah yang sangat spesifik, misalkan spesies tersebut hanya ada di suatu danau atau gunung. Berdasarkan data lapangan, tidak ditemukan beberapa spesies endemik di area penilaian. Hal tersebut diakibatkan aktifitas di area penilaian sudah dimulai sejak tahun 1980 dan budidaya kelapa sawit di mulai sejak tahun 2009.

Spesies dilindungi | Acuan terbaru dalam penentuan spesies dilindungi secara nasional adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Perlindungan terhadap spesies keanekaragaman hayati umumnya berdasarkan antara lain karena penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam (contoh: orangutan karena tingkat perburuan tinggi dan kehilangan habitat), jumlah populasi yang kecil (contoh: kalawiat karena populasi sudah sedikit di alam), daerah penyebaran terbatas (spesies endemik, contoh: bekantan), dan fungsi penting pada ekosistem (contoh: elang sebagai *top predator*; *Bucerotidae* sebagai penyebar biji; dst.).

Hasil kompilasi data inventarisasi spesies fauna mencatat sebanyak 13 spesies fauna merupakan spesies dilindungi oleh peraturan perlindungan yang berlaku di Indonesia. Komposisi spesies fauna dilindungi tersebut yaitu, 4 spesies mamalia, 2 spesies burung, dan 1 spesies reptilia. Pada kelompok tumbuhan tidak terdapat spesies yang dilindungi (**Tabel 33**). Bila melihat status perlindungan dengan status keterancamannya IUCN maka terdapat 4 spesies mamalia, 2 spesies burung, dan 3 spesies reptilia dilindungi yang juga berkategori sebagai satwa RTE. Dengan demikian, spesies dilindungi yang memenuhi kriteria sebagai NKT 1 telah tercakup dalam kriteria spesies RTE.

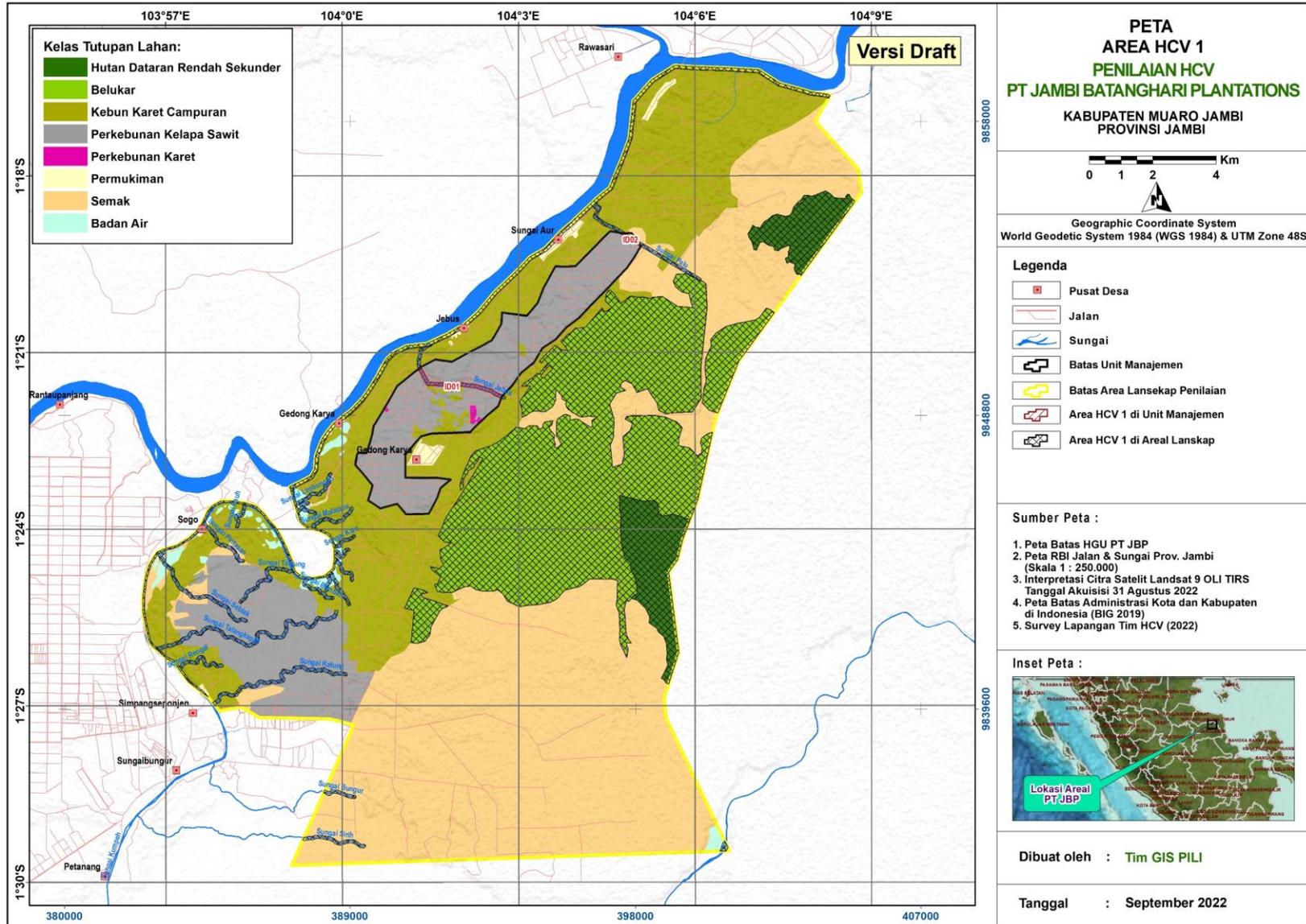
Konsentrasi spesies secara spasial dan temporal | Spesies fauna yang tercatat dalam kajian ini seluruhnya adalah spesies penetap, kecuali 1 spesies burung migran yaitu layang-layang api (*Hirundo rustica*). Jenis burung migran tersebut merupakan jenis burung migran yang cukup umum berkunjung ke wilayah Indonesia. Burung ini biasa memanfaatkan jaringan kabel listrik di wilayah pemukiman sebagai tempat bertengger dan bermalam serta memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan sebagai tempat mencari makan. Kondisi ini menunjukkan ekosistem binaan manusia tidak mengganggu keberadaan spesies migran tersebut.

Selain itu, di AOI tidak terdapat area berupa kubangan lumpur, dataran banjir atau badan air berukuran luas yang biasanya menjadi tujuan utama spesies burung air/ burung pantai pengembara yang biasa bermigrasi dalam kelompok besar. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi spesies secara spasial dan temporal dipertimbangkan tidak ada di wilayah kajian.

Lokasi dan luas area HCV 1 | Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan narasumber serta verifikasi dan pengecekan lapangan, teridentifikasi keberadaan area HCV 1 berupa aliran Sungai Jebus dan Sungai Palu di unit manajemen. Sedangkan di areal lanskap keberadaan area HCV 1 berupa aliran Sungai Batanghari dan Sungai lainnya dan fragmen-fragmen hutan dataran rendah sekunder dan belukar. Fragmen hutan tersebut dapat menjadi habitat hidup spesies-spesies penting. Fragmen-fragmen hutan tersebut teridentifikasi di luar unit manajemen atau berada di area lanskap. Secara lengkap, keberadaan area HCV 1 di area penilaian disajikan pada **Tabel 34** serta **Gambar 66** menyajikan Peta keberadaan HCV 1 di area penilaian.

Tabel 34. Lokasi dan luas area HCV 1 di area penilaian

Indeks	Keterangan	Luas (ha)	
		Unit Manajemen	Area Penilaian
ID01	Sungai Jebus dan sempadannya	29.7	39.0
ID02	Sungai Palu dan sempadannya	6.1	44.7
-	Sungai Air Hitam Luar dan sempadannya	-	4.5
-	Sungai Batanghari dan sempadannya	-	239.2
-	Sungai Bemban dan sempadannya	-	13.6
-	Sungai Buaya Besar dan sempadannya	-	10.0
-	Sungai Buaya Kecil dan sempadannya	-	6.7
-	Sungai Bungur dan sempadannya	-	10.6
-	Sungai Cempa dan sempadannya	-	3.1
-	Sungai Kajang dan sempadannya	-	12.3
-	Sungai Kale dan sempadannya	-	7.7
-	Sungai Katung dan sempadannya	-	52.7
-	Sungai Kumpeh dan sempadannya	-	80.2
-	Sungai Limbungan dan sempadannya	-	17.0
-	Sungai Malapani dan sempadannya	-	22.7
-	Sungai Melapo dan sempadannya	-	5.7
-	Sungai Pauh dan sempadannya	-	9.3
-	Sungai Pelayangan dan sempadannya	-	0.4
-	Sungai Pintasan dan sempadannya	-	19.5
-	Sungai Rengat dan sempadannya	-	17.7
-	Sungai Sebiak dan sempadannya	-	40.7
-	Sungai Sirih dan sempadannya	-	20.6
-	Sungai Talangkapas dan sempadannya	-	72.9
-	Sungai Tanjung dan sempadannya	-	25.8
-	Tutupan Hutan dan Belukar	-	6,379.9
Total		35.9	7,1564
Luas Area Penilaian		1,953.0	28,135.0
% Terhadap Luas Area Penilaian		1.8	25.4



Gambar 66. Peta area HCV 1 di area penilaian

8.2.3 HCV 2: Lanskap Besar

HCV	Elemen	Hasil
2	Ekosistem lanskap / bentang alam luas yang memiliki mosaik ekosistem, dan bentang hutan utuh yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional.	Tidak

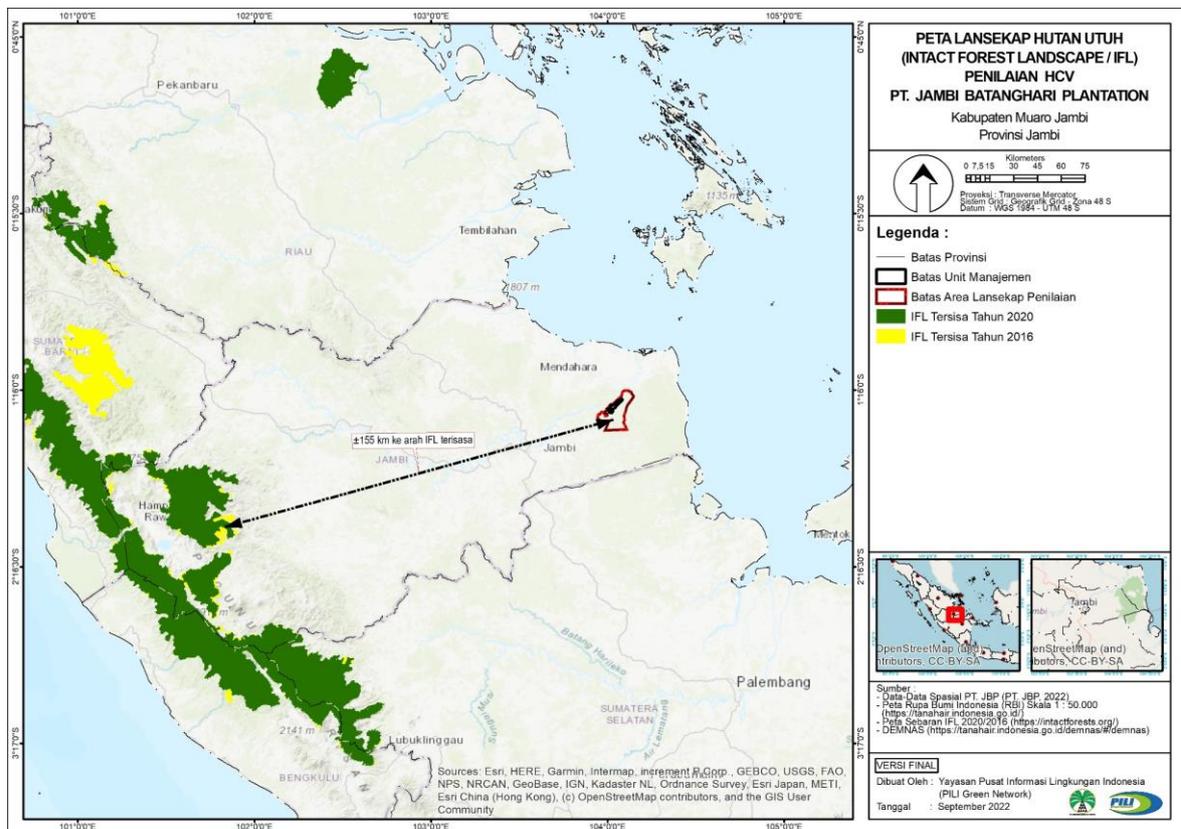
Keberadaan HCV 2 ditandai dengan keberadaan ekosistem dan mosaik ekosistem alami pada level lanskap yang luas yang memiliki signifikansi pada tingkat global, regional atau nasional. HCV 2 tidak selalu berupa wilayah yang luas (>50.000 ha), tetapi bisa juga berupa wilayah yang ukurannya lebih kecil yang menyediakan fungsi-fungsi kunci bagi lanskap seperti keterhubungan dan penyanggaan, contohnya zona penyangga kawasan lindung atau koridor yang menjadi penghubung antara kawasan lindung atau habitat berkualitas tinggi (Brown *et al.*, 2017). Hasil penilaian menunjukkan tidak terdapat situasi-situasi yang dapat memenuhi syarat sebagai HCV 2 (**Tabel 35**).

Tabel 35. Indikasi keberadaan HCV 2 di area penilaian

Situasi yang memenuhi syarat sebagai HCV 2	Indikasi di area penilaian
Wilayah yang luas (contoh: > 50.000 ha), yang letaknya relatif jauh dari pemukiman manusia, jalanan atau akses lainnya.	Tidak ada. Area Penilaian sebagiannya berupa lahan budidaya dan di sekitarnya terdapat pemukiman, area terbangun lainnya, beserta akses jalan. Di area penilaian terdapat hamparan hutan sekunder dengan ukuran tidak terlalu luas (< 50.000 ha)
Wilayah yang ukurannya lebih kecil yang menyediakan fungsi-fungsi kunci bagi lanskap seperti keterhubungan dan penyanggaan	Tidak ada. Tidak ada lanskap alami utuh yang bisa dihubungkan.
Wilayah yang luas yang bersifat lebih alami dan utuh dibandingkan wilayah serupa lainnya	Tidak ada. Tidak terdapat area yang bersifat lebih alami atau lebih utuh dari sekitarnya. Hutan sekunder yang tersisa di Tlimur area penilaian berukuran kecil.

Sebagian besar area penilaian saat ini berupa kawasan budidaya dengan dominasi perkebunan kelapa sawit. Pada area penilaian tidak terdapat lagi ekosistem atau mosaik ekosistem alami yang bernilai signifikan secara bentang lahan. Juga, tidak ditemukan lagi bagian ekosistem yang berperan sebagai koridor atau penyangga bagi kawasan alami yang masih tersisa di sekitar area penilaian. Ekosistem alami yang dimaksud adalah kawasan lindung/konservasi berdasarkan kriteria lembaga internasional dan nasional dengan habitat bernilai tinggi, seperti Lanskap Hutan Utuh (*Intact Forest Landscape*) dan kawasan konservasi (KK).

Jarak terdekat antara area penilaian dengan IFL adalah 155 km ke fragmen hutan utuh di sebelah Barat Daya (**Gambar 67**). Berdasarkan pembahasan pada **Sub Bab 6.3** sebelumnya, area konservasi terdekat dari area penilaian adalah Hutan Lindung di sebelah Barat dari AOI dengan jarak 14 km, Taman Nasional Berbak yang berjarak 6 km ke arah Timur. Taman Nasional Berbak dapat dijadikan sebagai indikator HCV 2 dikarenakan memiliki luas area 141 ribu hektar. Namun demikian, pada penilaian ini, Taman Nasional Berbak berada diluar AOI sehingga tidak dapat dipetakan sebagai area HCV 2.



Gambar 67. Posisi area penilaian pada *Intact Forest Landscape* tahun 2000, 2013 dan 2016

8.2.4 HCV 3: Ekosistem Langka

Ekosistem yang memenuhi kriteria HCV 3 antara lain adalah ekosistem yang diklasifikasikan terancam dalam sistem nasional atau internasional (Brown *et al.*, 2017). Pada penilaian ini, daftar ekosistem terancam secara nasional di Indonesia yang terdapat pada HCV Toolkit Indonesia (Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia) digunakan sebagai acuan. Sejalan dengan hal tersebut maka identifikasi keberadaan HCV 3 dilakukan dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary principles*) pada HCV Toolkit Indonesia tersebut (Konsorsium HCV Toolkit Indonesia, 2008).

Ekosistem alami di area penilaian | Penentuan tipe ekosistem dan verifikasi lapangan dilakukan terhadap peta sistem lahan (RePPPProT, 1990; lihat **Sub Bab 6.2**). Berdasarkan peta sistem lahan, terdapat tiga tipe ekosistem di area penilaian yaitu ekosistem Rawa Air Tawar, ekosistem Rawa Gambut, dan Ekosistem Rawa Mangrove - Pasang Surut (**Gambar 68**). Ekosistem di unit manajemen adalah tipe ekosistem Rawa Gambut dan ekosistem Rawa Mangrove - Pasang Surut yang kondisi aktual terkini telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

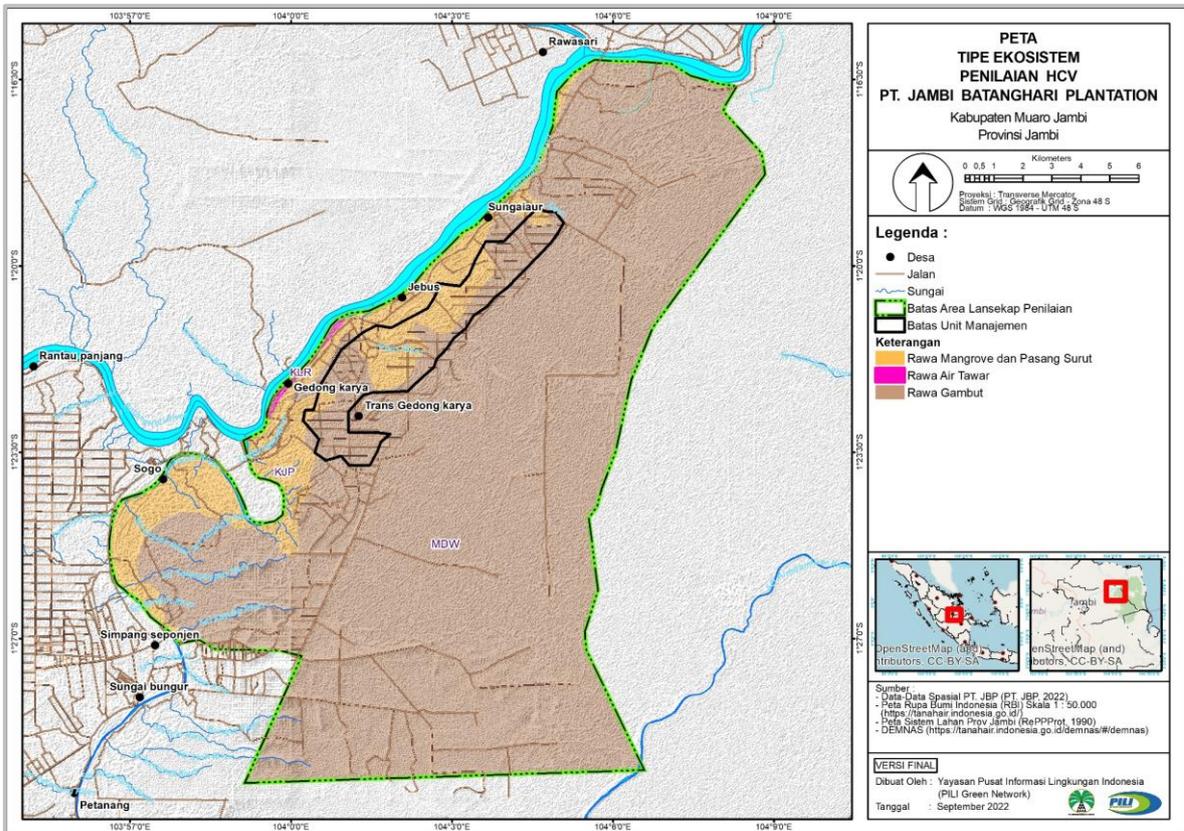
Tipe ekosistem rawa air tawar berada pada sistem lahan Klaru (KLR), ekosistem rawa gambut berada pada sistem lahan Mendawai (MDW), dan ekosistem rawa mangrove dan pasang surut berada pada system lahan Kajapah (KJP). Menurut daftar ekosistem terancam dari Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia, ekosistem rawa gambut dan ekosistem rawa mangrove dan pasang surut termasuk status terancam. Sedangkan ekosistem air tawar belum termasuk dalam status terancam atau langka. Pada ekosistem gambut masih dijumpai tutupan lahan alami berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar yang berada di sebelah Timur dari AOI. Keberadaan tutupan vegetasi alami berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar pada tipe ekosistem diatas dipertimbangkan memenuhi kriteria HCV 3 berdasarkan hasil penerapan pendekatan kehati-hatian (**Tabel 36** dan **Tabel 37**).

Tabel 36. Identifikasi HCV 3 pada ekosistem rawa gambut di area penilaian melalui pendekatan kehati-hatian

Pertanyaan	Jawaban	Petunjuk	Kriteria
3.1 Apakah satu atau lebih ekosistem yang dikategorikan sebagai terancam atau langka dalam Tabel 8.3.1 atau 8.3.2 berada (i) di dalam kawasan UP, atau (ii) diluar kawasan UP tetapi kemungkinan akan dipengaruhi pemanfaatan yang direncanakan UP?	Ya	Kemungkinan ada HCV 3 di area penilaian; teruskan ke 3.2	Ekosistem rawa gambut pada sistem lahan Mendawai (MDW)
	-	-	-
3.2 Apakah ekosistem tersebut merupakan vegetasi atas lahan gambut?	Ya	Teruskan ke 3.3	Lapisan bahan organik dengan ketebalan rata-rata 25 cm atau lebih
	-	-	-
3.3 Apakah lahan gambut tersebut sudah mengalami perubahan drastis yang menghalangi proses hidrologi alami sehingga tidak mungkin fungsi hidrologi alami dapat direstorasi?	Ya	Tidak ada HCV untuk unit manajemen	Lahan gambut telah tertanami perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan kanalisasi
	Tidak	Terdapat area HCV 3 pada areal lanskap	Lahan gambut yang masih bertutupan lahan alami dan belum memiliki drainase kanalisasi.
3.4 Apakah ekosistem tersebut sudah mengalami perubahan tutupan lahan drastis sehingga memenuhi kriteria "lahan tidak produktif" berdasarkan Keputusan Menhut No. 21/Kpts-II/2001 3.5 Apakah masih mungkin ekosistem tersebut dapat direstorasi melalui proses alami jika tidak dikonversikan dengan mempertimbangkan faktor berikut ini: (i) atribut atau ciri khas ekologi ekosistem terkait, (ii) kondisi dan status lahan disekitarnya, (iii) tata-ruang yang berlaku, dan (iv) perencanaan pembangunan daerah?	-	-	-
	Tidak	HCV 3 berada di areal lanskap	Jumlah biomassa vegetasi alami berkayu lebih dari 5 m ³ per ha. Beberapa fragmen vegetasi alami di area lanskap berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar
3.5 Apakah masih mungkin ekosistem tersebut dapat direstorasi melalui proses alami jika tidak dikonversikan dengan mempertimbangkan faktor berikut ini: (i) atribut atau ciri khas ekologi ekosistem terkait, (ii) kondisi dan status lahan disekitarnya, (iii) tata-ruang yang berlaku, dan (iv) perencanaan pembangunan daerah?	Ya	HCV 3 berada di areal lanskap	Ekosistem tersebut berada tutupan alami yang berstatus Kawasan lindung
	-	-	-

Tabel 37. Identifikasi HCV 3 pada ekosistem rawa mangrove dan pasang surut di area penilaian melalui pendekatan kehati-hatian

Pertanyaan	Jawaban	Petunjuk	Kriteria
3.1 Apakah satu atau lebih ekosistem yang dikategorikan sebagai terancam atau langka dalam Tabel 8.3.1 atau 8.3.2 berada (i) di dalam kawasan UP, atau (ii) diluar kawasan UP tetapi kemungkinan akan dipengaruhi pemanfaatan yang direncanakan UP?	Ya	Kemungkinan ada HCV 3 di area penilaian; teruskan ke 3.2	Ekosistem rawa mangrove dan pasang surut pada sistem lahan Kajapah (KJP)
	Tidak	-	-
3.2 Apakah ekosistem tersebut merupakan vegetasi atas lahan gambut?	-	-	-
	Tidak	Teruskan ke 3.4	Seluruh ekosistem rawa mangrove dan pasang surut berada pada lahan mineral
3.3 Apakah lahan gambut tersebut sudah mengalami perubahan drastis yang menghalangi proses hidrologi alami sehingga tidak mungkin fungsi hidrologi alami dapat direstorasi?	-	-	-
	-	-	-
3.4 Apakah ekosistem tersebut sudah mengalami perubahan tutupan lahan drastis sehingga memenuhi kriteria "lahan tidak produktif" berdasarkan Keputusan Menhut No. 21/Kpts-II/2001 3.5 Apakah masih mungkin ekosistem tersebut dapat direstorasi melalui proses alami jika tidak dikonversikan dengan mempertimbangkan faktor berikut ini: (i) atribut atau ciri khas ekologi ekosistem terkait, (ii) kondisi dan status lahan disekitarnya, (iii) tata-ruang yang berlaku, dan (iv) perencanaan pembangunan daerah?	Ya	HCV 3 tidak ada tetapi perlu teruskan ke 3.5	Jumlah biomassa vegetasi alami berkayu kurang dari 5 m ³ per ha. Tutupan lahan di ekosistem rawa mangrove dan pasang surut adalah perkebunan karet, kebun karet campuran, dan permukiman
	-	-	-
3.5 Apakah masih mungkin ekosistem tersebut dapat direstorasi melalui proses alami jika tidak dikonversikan dengan mempertimbangkan faktor berikut ini: (i) atribut atau ciri khas ekologi ekosistem terkait, (ii) kondisi dan status lahan disekitarnya, (iii) tata-ruang yang berlaku, dan (iv) perencanaan pembangunan daerah?	-	-	-
	Tidak	Tidak ada HCV 3	Ekosistem telah sangat terdegradasi. Tutupan lahan di ekosistem rawa mangrove dan pasang surut adalah perkebunan karet, kebun karet campuran, dan permukiman

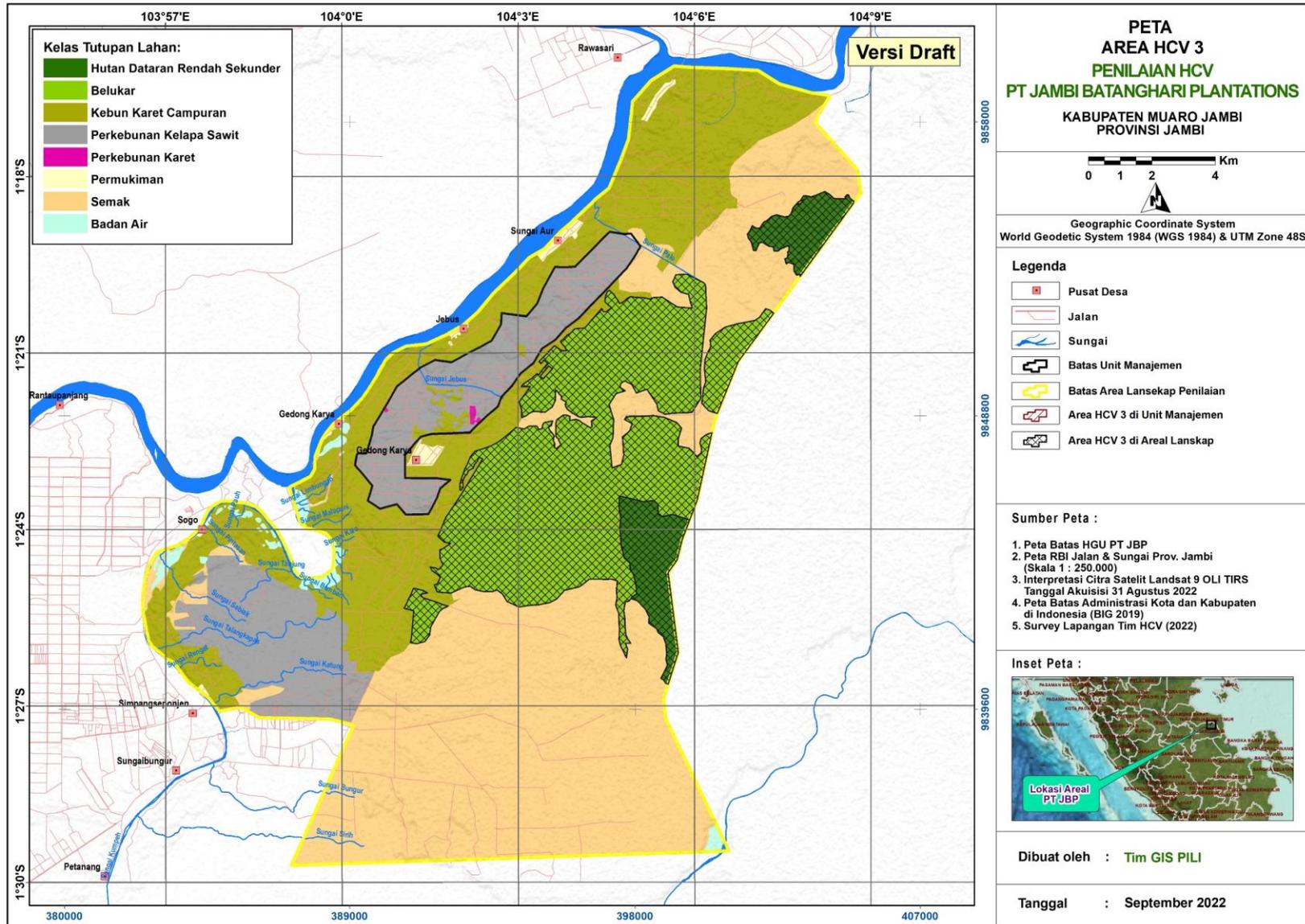


Gambar 68. Peta sebaran tutupan vegetasi alami tersisa pada setiap tipe ekosistem

Lokasi dan luas area HCV 3 | Area bernilai HCV 3 di area penilaian terdapat pada tipe ekosistem rawa gambut. Area bernilai HCV 3 berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar di ekosistem rawa gambut yang berada di luar unit manajemen atau area lanskap. Luas serta lokasi area bernilai HCV 3 ditampilkan secara lengkap pada **Tabel 38** dan **Gambar 69**.

Tabel 38. Lokasi dan luas area HCV 3 di area penilaian

Indeks	Keterangan	Luas (ha)	
		Unit Manajemen	Area Penilaian
-	Tutupan Hutan dan Belukar	-	6,379.9
	Total	-	6,379.9
	Luas Area Penilaian	1,953.0	28,135.0
	% Terhadap Luas Area Penilaian	-	22.7



Gambar 69. Peta area HCV 3 di area penilaian

9 Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan

9.1 Penilaian Ancaman

Memahami ancaman HCV yang teridentifikasi merupakan langkah penting dalam membuat keputusan pengelolaan untuk melindungi dan/atau meningkatkan elemen HCV (Stewart *et al.* 2008). Ancaman pada HCV dapat datang dari lingkup internal pengelola lahan atau dari faktor eksternal (institusi atau personal masyarakat). Penilaian ancaman bertujuan membantu manajemen PT JBP untuk mengatasi ancaman internal dengan pengelolaan yang baik dan meningkatkan kemampuan untuk mengurangi berbagai ancaman eksternal.

Penilaian ancaman dilakukan dengan menerapkan pendekatan Skema Klasifikasi Ancaman IUCN (berdasarkan Salafsky dkk., 2008). Pendekatan ini dikembangkan untuk memudahkan dalam mengenali ancaman beserta sumbernya. Setelah diidentifikasi ancaman beserta sumbernya, kemudian dilakukan penilaian tingkat dampak serta risiko yang akan muncul terhadap setiap lokasi beserta elemen HCV yang ada. Kemudian, dilakukan pembobotan untuk menilai ancaman mana yang menjadi prioritas untuk dijadikan acuan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan.

Pada unit manajemen terdapat tiga kategori HCV yaitu HCV 1, HCV 4, dan HCV 5 berupa sungai serta sempadannya. Sedangkan pada areal lanskap terdapat empat kategori HCV yaitu HCV 1, HCV 3, HCV 4, dan HCV 5 berupa sungai serta sempadannya dan tutupan lahan alami hutan dataran rendah sekunder dan belukar. Adapun HCV 2 tidak dijumpai indikasi keberadaannya, baik di unit manajemen maupun di area lanskap. **Tabel 39** menyajikan ringkasan hasil penilaian ancaman terhadap nilai konservasi yang teridentifikasi di area penilaian.

Tabel 39. Ringkasan hasil penilaian ancaman nilai konservasi di area penilaian (AOI)

Nilai Konservasi	Ringkasan nilai penting di Area Identifikasi	Ancaman Utama
HCV 1	Populasi spesies satwa dan tumbuhan endemic atau species RTE - masih terdapat satwa <i>Endangered</i> (EN, Genting) dan <i>Vulnerable</i> (VU, Rentan)	Perburuan satwa dan konflik satwa liar-manusia
		Kebakaran hutan dan lahan
		Potensi penurunan kualitas habitat akuatik akibat residu bahan agrokimia perkebunan
HCV 3	Keberadaan area tutupan hutan alami yaitu hutan dataran rendah sekunder yang merupakan ekosistem terancam punah	Pembalakan kayu
		Kebakaran hutan dan lahan
HCV 4	Jasa lingkungan dasar terkait tata air yang terdapat di aliran sungai, anak sungai dan alur sungai beserta sempadannya, dan area tutupan hutan alami yaitu hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah.	Penurunan kualitas air akibat pencemaran dari residu <i>agrochemical</i>
		Potensi alih fungsi lahan
HCV 5	Keberadaan sungai sebagai sumber air dan tempat mencari ikan	Penurunan kualitas air akibat pencemaran dari residu <i>agrochemical</i>
		Potensi alih fungsi lahan

Hasil dari penilaian ancaman menunjukkan bahwa secara umum intensitas dampak ancaman terhadap area HCV tergolong rendah (**Tabel 40**). Ancaman yang memiliki intensitas dampak yang sedang adalah kebakaran hutan dan lahan serta residu bahan agrokimia yang terbawa limpasan permukaan.

Tabel 40. Ringkasan hasil penilaian sumber ancaman, status, risiko, dan intensitas dampak nilai konservasi di area penilaian (AOI)

Nilai Konservasi	Sumber Ancaman	Status Sumber Ancaman	Risiko	Intensitas Dampak
HCV 1				
Spesies Satwa RTE/dilindungi antara lain lutung kelabu, kera ekor panjang, beruk, dan rusa	Perburuan satwa	Potensial: ancaman perburuan dari internal dan eksternal sangat rendah bahkan tidak ada tetapi potensi ancaman dari eksternal masih mungkin muncul	Penurunan populasi jenis RTE.	Rendah
	Kebakaran hutan dan lahan	Pernah terjadi kebakaran skala besar tahun 1982 dan 1997.	Kehilangan habitat spesies satwa RTE	Sedang
Spesies satwa RTE/dilindungi antara lain buaya sinyulong, kura-kura katup, dan sero ambrang	Konflik buaya-manusia	Potensial: serangan buaya jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi, tetapi potensi untuk terjadi tetap ada;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancaman keselamatan bagi manusia dan buaya; ▪ Penurunan populasi 	Rendah
	Limpasan air membawa residu <i>agrochemical</i>	Potensial: residu bahan <i>agrochemical</i> dari lahan perkebunan yang berpotensi mencemari sungai, terutama jika sempadan sungai dikonversi menjadi lahan budidaya. Saat ini sempadan sungai sudah dicadangkan Perusahaan menjadi area konservasi	Penurunan kualitas habitat akuatik	Rendah
HCV 3				
Keberadaan area tutupan hutan alami yaitu hutan dataran rendah sekunder dan belukar	Pembalakan kayu	Potensi kayu masih ada pada tutupan lahan alami dan peluang alihfungsi lahan mungkin akan terjadi jika tidak ada pencegahan dari semua pihak.	Penurunan populasi jenis tumbuhan RTE.	Rendah
	Kebakaran hutan dan lahan	Pernah terjadi kebakaran skala besar tahun 1982 dan 1997.	Kehilangan tutupan alami berupa hutan dataran rendah dan belukar	Sedang
HCV 4				
Jasa lingkungan dasar terkait tata air yang terdapat di aliran sungai, anak sungai dan alur sungai beserta	Residu bahan agrokimia yang terbawa limpasan permukaan	Potensial: residu bahan <i>agrochemical</i> dari lahan perkebunan yang berpotensi mencemari sungai, terutama jika sempadan sungai dikonversi menjadi lahan budidaya. Saat ini sempadan sungai sudah dicadangkan oleh Perusahaan menjadi area konservasi	Penurunan kualitas air sungai	Sedang

Nilai Konservasi	Sumber Ancaman	Status Sumber Ancaman	Risiko	Intensitas Dampak
sempadannya, mata air, dan area tutupan hutan alami yaitu hutan dataran rendah sekunder.	Potensi alih fungsi lahan	Potensial: sempadan sungai yang tidak ditanami Perusahaan dapat diasumsikan bukan merupakan areal kelola Perusahaan sehingga dialihfungsikan oleh pihak lain menjadi lahan budidaya	Pengurangan luas area sempadan sebagai daerah daerah penyangga badan air	Rendah
HCV 5				
Sungai, anak sungai serta alur sebagai sumber air untuk sanitasi (MCK)	Residu bahan agrokimia yang terbawa limpasan permukaan	Potensial: kualitas air masih tergolong baik karena digunakan sebagai cadangan air bersih oleh masyarakat.	Penurunan kualitas air.	Sedang
	Potensi alih fungsi lahan	Potensial: sempadan sungai yang tidak ditanami Perusahaan dapat diasumsikan bukan merupakan areal kelola Perusahaan sehingga dialihfungsikan oleh pihak lain menjadi lahan budidaya		

9.2 Rekomendasi Setiap Nilai

Tujuan dari pengelolaan HCV adalah melindungi elemen dan area HCV dari kerusakan, serta memelihara dan meningkatkan nilai atau fungsinya. Hasil penilaian ancaman telah memberi pilihan terhadap tindakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi ancaman. Selanjutnya, pengelola kebun perlu mengembangkan rencana tertulis (yang didokumentasikan) untuk memelihara atau meningkatkan HCV, serta mengintegrasikannya ke dalam rencana pengelolaan yang operasional. PT JBP telah memiliki 'Standard Operasional Procedure' (SOP) dan segera di implementasikan dengan dipadukan rekomendasi dan pemantauannya.

Penguatan area HCV segera dilakukan dengan melakukan deliniasi area HCV, verifikasi atas hasil deliniasi dan menetapkan hasil akhirnya sebagai Peta final area HCV disertai dokumentasi proses yang memadai dalam suatu berita acara deliniasi area HCV. Tindakan selanjutnya adalah pemancangan patok batas pengelolaan area HCV dan pemasangan *signboard*. Penguatan area HCV juga disertai sosialisasi dan konsultasi dengan baik dan tepat sasaran terhadap: (a) Internal perusahaan (karyawan lapangan, staf, kontraktor, dan anggota koperasi kemitraan). (b) Masyarakat sekitar (pengguna lahan, pemerintah desa, lembaga adat), (c) perusahaan sekitar, dan (d) Instansi terkait.

Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) dan Pemantauan (*Monitoring Plan*) area HCV juga segera dilakukan dengan mempertimbangkan: (a) Aspek perlindungan spesies, diantaranya mengelola konflik satwa dengan manusia, membuat koridor antar habitat yang terfragmentasi, dan pengkayaan habitat, (b) Penguatan jalinan komunikasi dengan perusahaan sekitar untuk membangun rencana kelola dan rencana aksi perlindungan area HCV dan (c) Melibatkan masyarakat setempat, karena kepentingan dan manfaat dari keberadaan area HCV merupakan kepentingan dan manfaat semua pihak.

Sejalan dengan pengelolaan area HCV, perusahaan perlu membangun kelembagaan dengan cara melatih staf atau merekrut staf yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan area HCV. Penguatan kapasitas staf dalam identifikasi pengelolaan, pemantauan dan evaluasi antara lain: (a) Pelatihan *monitoring*, misalnya dasar-dasar identifikasi satwa, pengukuran kualitas air, *stakeholder engagement* dan penerapan prosedur serta kebijakan yang telah tersedia di perusahaan. Rekomendasi-rekomendasi pengelolaan dan pemantauan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun dokumen lengkap Rencana Pengelolaan dan Pemantauan area HCV disajikan pada **Tabel 41**.

Tabel 41. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan area HCV di area penilaian (AOI)

HCV	Ancaman	Rekomendasi Pengelolaan	Rekomendasi Pemantauan
HCV 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemburuan satwa dan konflik satwa liar-manusia • Kebakaran hutan dan lahan • Potensi penurunan kualitas habitat akuatik akibat residu bahan agrokimia perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi tentang keberadaan satwa penting dan dilindungi pada setiap briefing internal dan setiap pertemuan yang relevan baik internal dan eksternal • Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi tentang keberadaan satwa penting dan dilindungi kepada masyarakat tempatan • Mengurangi peluang perburuan satwa dan menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat/pekerja • Mempertahankan sempadan sungai sebagai koridor supaya habitat tidak terfragmentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau secara regular setiap 3 bulan keberadaan spesies satwa. • Mencatat setiap kejadian perburuan, dan kerusakan atau berkurangnya luas habitat

HCV	Ancaman	Rekomendasi Pengelolaan	Rekomendasi Pemantauan
		<ul style="list-style-type: none"> Menjaga keutuhan habitat, di antaranya dengan pengukuhan area HCV dan patroli pengamanan Membuat sistem pelaporan dan aksi atas temuan satwa RTE kepada BKSDA setempat 	
HCV 3	<ul style="list-style-type: none"> Pembalakan kayu Kebakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi tentang keberadaan area hutan yang harus dikelola kepada masyarakat tempatan Bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengelola area konservasi pada Kawasan Tahura dan Taman Nasional Berbak. 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara regular
HCV 4	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan kualitas air akibat pencemaran dari residu <i>agrochemical</i> Potensi alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan informasi mengenai batas-batas area HCV dan fungsi penting HCV pada setiap briefing internal dan setiap pertemuan yang relevan baik internal dan eksternal Melakukan kegiatan deliniasi (batas) dan demarkasi (patok) di sempadan sungai yang telah ditetapkan menjadi area HCV Melakukan pemasangan <i>sign board</i> untuk pembatasan area HCV Melakukan sosialisasi kepada karyawan terkait pelarangan aplikasi bahan kimia di sempadan sungai yang telah ditetapkan menjadi area HCV Penerapan <i>best practice management</i> untuk mempertahankan kualitas air seperti: mempertahankan sempadan sungai, tidak melakukan aktivitas penyemprotan/ pemupukan dekat area sungai/badan air. Pengelolaan air untuk mempertahankan tinggi muka air tanah dan melakukan pemantauan subsidensi gambut. Kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah (dari tingkat desa hingga daerah), maupun LSM berkaitan dengan program pelestarian dan perlindungan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi sosialisasi dengan <i>stakeholder</i> terkait Memantau batas dan luas area HCV secara berkala. Mendokumentasikan proses pembukaan lahan Mengukur tinggi muka air tanah dan subsidensi gambut Memeriksa kualitas air secara berkala (minimal 6 bulan sekali) di titik-titik pemantauan air (<i>inlet-outlet</i> sungai), baik secara visual maupun uji laboratorium
HCV 5	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan kualitas air akibat pencemaran dari residu <i>agrochemical</i> Potensi alih fungsi lahan 	<i>Lihat pengelolaan untuk HCV 4</i>	<i>Lihat pemantauan untuk HCV 4</i>

9.3 Rekomendasi Lintas Sektoral

Pengelolaan umum yang berlaku pada setiap area konservasi antara lain: (i) pengukuhan area konservasi, (ii) kegiatan sosialisasi dan pelibatan *stakeholder* dan (iii) penguatan kapasitas pengelola area konservasi. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan area HCV perlu bekerja sama dengan pemerintah terkait, masyarakat, dan perusahaan sekitar. Rekomendasi lintas sektoral secara bagi seluruh area HCV tersaji pada **Tabel 42**.

Tabel 42. Pengelolaan yang berlaku umum bagi setiap area HCV

Pengukuhan Area HCV	Sosialisasi dan Pelibatan Pengelolaan Area HCV	Penguatan Kapasitas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan deliniasi area HCV, memverifikasinya, kemudian menetapkannya sebagai area HCV definitif ▪ Membuat patok penanda batas area HCV ▪ Membuat papan penanda di area HCV 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internal perusahaan ▪ Masyarakat sekitar (pemerintahan desa, lembaga adat dan masyarakat umum) ▪ Intansi pemerintah ▪ Perusahaan sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan <i>monitoring</i> area HCV (identifikasi dasar, pengukuran kualitas air dan hal-hal yang terkait dengan keberlanjutan) ▪ Penerapan Standar Operasional Prosedur dan kebijakan <i>monitoring</i> area HCV

9.4 Peta Rangkuman

Luas area HCV yang teridentifikasi di area penilaian (AOI) adalah 7,156.4 ha yang terdiri dari HCV 1, HCV 3, HCV 4, dan HCV 5 (**Tabel 43**). Luas area HCV yang teridentifikasi di unit manajemen adalah 35.9 ha yang berada di area sungai dan sempadannya dengan nilai HCV 1, HCV 4, dan HCV 5 (**Tabel 44**). Sedangkan area HCV yang teridentifikasi di area lanskap terdiri dari sungai serta sempadannya, dan tutupan alami berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar. Seluruh tutupan alami berupa hutan dataran rendah sekunder dan belukar berada diluar unit manajemen. Luas dan ringkasan area HCV tersaji pada **Tabel 45** dan Peta ringkasan area HCV ditunjukkan pada **Gambar 70**.

Tabel 43. Rangkuman area HCV di unit manajemen

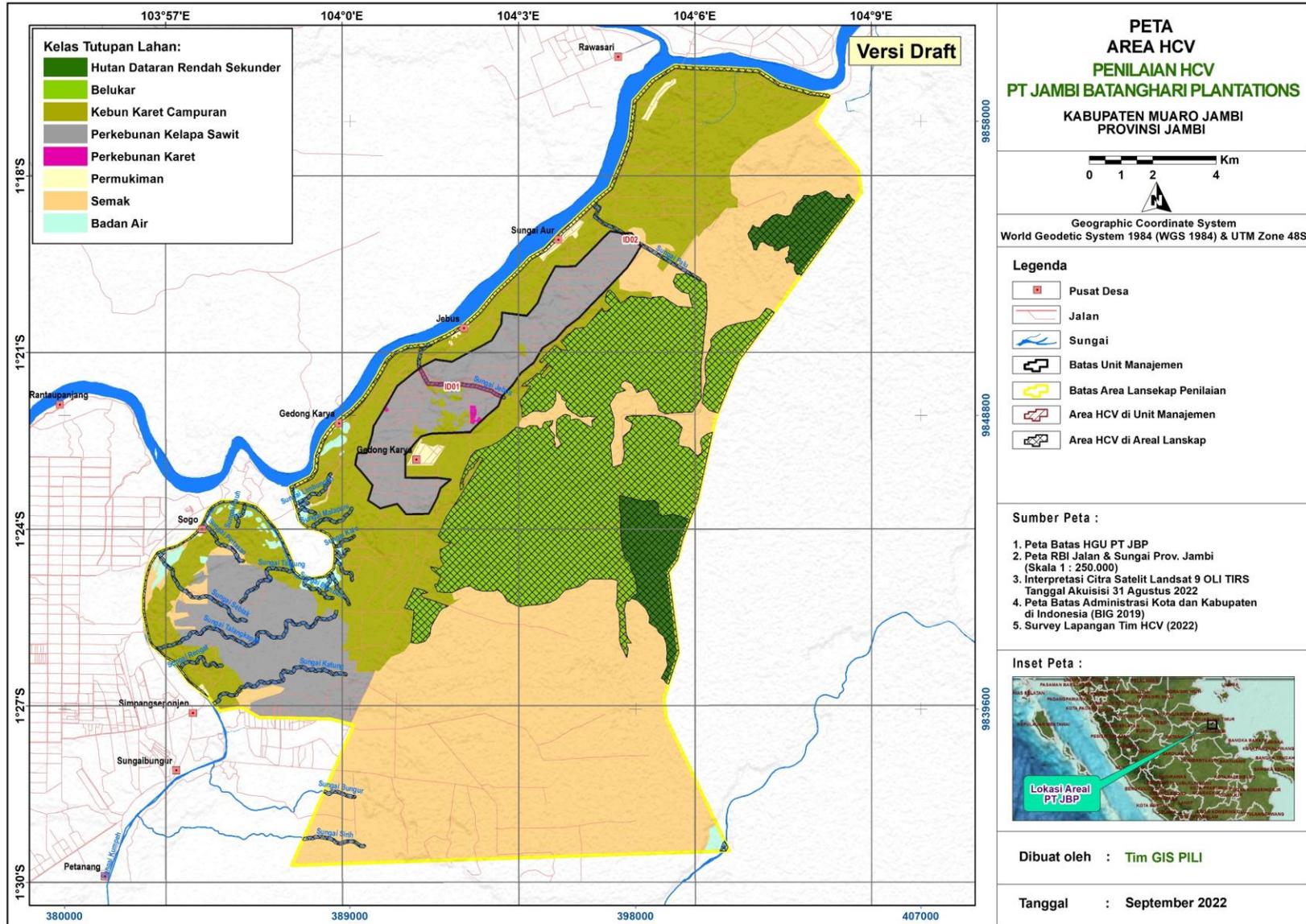
HCV	Definisi	Ringkasan Deskripsi dan Justifikasi		
		Ada	Potensi	Tidak Ada
1	Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau genting (RTE), yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional	Ada		
2	Mosaik ekosistem dan ekosistem tingkat lanskap besar yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional, dan berisi mayoritas populasi spesies yang timbul secara alami dan mampu bertahan hidup dalam pola persebaran dan kelimpahan alami			Tidak Ada
3	Ekosistem, habitat atau refugia langka, terancam, atau genting			Tidak Ada
4	Jasa ekosistem dasar dalam kondisi kritis, termasuk perlindungan tangkapan air, pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan	Ada		
5	Tempat dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk setempat atau masyarakat adat (misal untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air), yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan penduduk atau masyarakat adat terkait	Ada		
6	Tempat, sumber daya, habitat dan lanskap yang memiliki nilai penting budaya, arkeologis, atau historis secara global/nasional, atau nilai budaya, ekonomi atau religi/sakral yang sangat penting bagi penduduk setempat atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui keterlibatan penduduk atau masyarakat adat ini			Tidak Ada

Tabel 44. Rekapitulasi luas area HCV dan area pengelolaan di unit manajemen

Nilai konservasi lingkungan dan sosial	Luas (ha) area HCV di unit manajemen	Luas (ha) area pengelolaan di unit manajemen
HCV 1	35.9	35.9
HCV 2	-	-
HCV 3	-	-
HCV 4	35.9	35.9
HCV 5	35.9	35.9
HCV 6	-	-
Total netto (gabungan)	35.9	35.9

Tabel 45. Rekapitulasi luas area HCV di area penilaian.

Indeks	Keterangan	Luas (ha)	
		Unit Manajemen	Area Penilaian
ID01	Sungai Jebus dan sempadannya	29.7	39.0
ID02	Sungai Palu dan sempadannya	6.1	44.7
-	Sungai Air Hitam Luar dan sempadannya	-	4.5
-	Sungai Batanghari dan sempadannya	-	239.2
-	Sungai Bemban dan sempadannya	-	13.6
-	Sungai Buaya Besar dan sempadannya	-	10.0
-	Sungai Buaya Kecil dan sempadannya	-	6.7
-	Sungai Bungur dan sempadannya	-	10.6
-	Sungai Cempa dan sempadannya	-	3.1
-	Sungai Kajang dan sempadannya	-	12.3
-	Sungai Kale dan sempadannya	-	7.7
-	Sungai Katung dan sempadannya	-	52.7
-	Sungai Kumpeh dan sempadannya	-	80.2
-	Sungai Limbungan dan sempadannya	-	17.0
-	Sungai Malapani dan sempadannya	-	22.7
-	Sungai Melapo dan sempadannya	-	5.7
-	Sungai Pauh dan sempadannya	-	9.3
-	Sungai Pelayangan dan sempadannya	-	0.4
-	Sungai Pintasan dan sempadannya	-	19.5
-	Sungai Rengat dan sempadannya	-	17.7
-	Sungai Sebiak dan sempadannya	-	40.7
-	Sungai Sirih dan sempadannya	-	20.6
-	Sungai Talangkapas dan sempadannya	-	72.9
-	Sungai Tanjung dan sempadannya	-	25.8
-	Tutupan Hutan dan Belukar	-	6,379.9
Total		35.9	7,156.4
Luas Area Penilaian		1,953.0	28,135.0
% Terhadap Luas Area Penilaian		1.8	25.4



Gambar 70. Peta ringkasan area HCV di area penilaian

10 Konsultasi Akhir

Hasil dari semua kegiatan penilaian HCV dipresentasikan dalam ‘Konsultasi Publik’ untuk mendapatkan masukan akhir dengan mengundang pihak dari stakeholder dan institusi Desa dan Kecamatan. Daftar absensi konsultasi akhir dan bahan presentasi konsultasi akhir disajikan pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

Konsultasi Publik dengan mengundang wakil dari Desa, Kecamatan, Instansi Pemerintah dan institusi terkait dilakukan dengan mempresentasikan hasil analisis final untuk mendapatkan masukan akhir. Catatan ringkasan konsultasi akhir disajikan **Tabel 46**.

Tabel 46. Notulensi konsultasi publik penilaian HCV PT JBP

Nama	Jabatan	Tanggapan/Masukan
Pembawa Acara: Siti Suprehatin (Yayasan PILI)		
Sesi I - Sambutan Yayasan PILI: Andrea Aditya W (Tenaga Ahli HCV 5 dan 6)		
Sesi II – Sambutan Krisna (Sekretaris Kecamatan Kumpeh)		
Sesi III - Pemaparan Hasil dari Tim PILI: Sigit Setyanto dan Andrea Aditya W (Tenaga Ahli HCV 5 dan 6) dan Ryan Karida Pratama (Tenaga Ahli HCV 4)		
Sesi IV - Diskusi, Tanya Jawab, dan Dengan Pendapat/Masukan		
Krisna	Sekretaris Kecamatan Kumpeh	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki istilah ladang sawah yang semula umo menjadi humo. Perbaiki nama sungai yang dimanfaatkan di Desa Sungai Aur yaitu Sungai Batanghari
Bahari	Desa Sungai Aur	Pertanyaan/masukan: <ol style="list-style-type: none"> Pernah ditemukan Harimau Sumatera diperbatasan PT JBP dan Tahura tahun 2022, namun temuan itu belum dikonfirmasi dari BKSDA, dan memang sejak dahulu belum ada konflik manusia (baik hewan peliharaan) dengan satwa Harimau Sumatera. Namun mungkin bisa jadi fokus perhatian tim. Tanggapan: <ol style="list-style-type: none"> Akan menjadi catatan, namun untuk memastikan itu harimau Sumatera atau bukan diperlukan analisis oleh ahli khusus, karena ada beberapa jejak yang mirip, misalnya jejak tapir dan jejak Harimau Sumatera.
Irwinskyah	Pemerintah Desa Gedong Karya	Pertanyaan/masukan: <ol style="list-style-type: none"> Monyet ekor Panjang dan lutung masih banyak ditemukan dan menjadi hama untuk masyarakat, hewan ini diindungi, masyarakat tidak bisa berbuat apa – apa, bagaimana solusinya? Monyet ekor panjang dan lutung memang belum mengganggu Masyarakat hingga saat ini, namun ketakutan masyarakat adalah populasinya yang terus meningkat akan berpotensi menjadi konflik satwa dan manusia. Tanggapan: <ol style="list-style-type: none"> Terkait hal ini dicatat dan didiskusikan dengan teman – teman BKSDA Jambi.
Tamrin	Pemerintah Desa Jebus	Pertanyaan/masukan: <ol style="list-style-type: none"> Manfaat apa yang didapat setelah menetapkan area HCV ini Tanggapan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi sertifikasi RSPO sebagai kewajiban PT JBP. Salah satu manfaat lainnya adalah contoh nantinya harga CPO akan lebih bagus dibandingkan kebun lain yang tidak memiliki sertifikat RSPO
Musa	Tokoh Adat	Pertanyaan/masukan: <ol style="list-style-type: none"> Kenapa baru sekarang dilakukan penilaian HCV? Tanggapan: <ol style="list-style-type: none"> PT JBP setelah diambil alih oleh manajemen yang baru memiliki komitmen untuk melakukan penilaian HCV, sehingga memulai

Nama	Jabatan	Tanggapan/Masukkan
		beroperasi dari tahun 2018, dan saat ini sedang proses untuk sertifikasi RSPO.
Bahari	Desa Sungai Aur	<p>Pertanyaan/masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapannya hasil penilaian ini bisa diinformasikan ke desa, agar masyarakat juga memegang hasil penilaian. 2. Perkembangan buaya di 3 desa semakin banyak, sehingga meresahkan warga, karena masih banyak anak – anak yang berenang disungai, dan jika musim kemarau masyarakat masih menggunakan sungai untuk kebutuhan sehari – hari. Konflik satwa dengan buaya memang belum pernah terjadi, tapi potensi itu bisa terjadi dengan populasi yang meningkat dan pakan yang kurang. 3. Terkait kegiatan persawahan, harapannya ada kerjasama dengan pihak dinas atau pihak lain terkait upaya pengadaan irigasi, dan ada bantuan bibit padi bantuan pemerintah, namun terkadang turunnya tidak sesuai musim, Ketika musim tanam bibit belum sampai ke masyarakat, dan baru sampai ketika masa tanam sudah selesai. <p>Tanggapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan terkait Salinan hasil kajian akan disampaikan ke PT JBP 2. Biasanya BBKSDA akan turun ke lapang apabila ada konflik, namun sebagai langkah mitigas/pencegahan akan didiskusikan dengan BKSDA Jambi. 3. Terkait persawahan kami hanya bisa mencatatkan, namun mungkin dari kecamatan bisa mengkomunikasikan langsung Dinas Pertanian.
Deni Akbar	Pemerintah Desa Gedong Karya	<p>Pertanyaan/masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai tidak hanya ada di areal PT JBP, tapi juga di areal masyarakat, apabila akan dilakukan penanaman pohon harapannya ada sosialisasi dan bantuan bibit ke masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa menanam pohon di sempadan sungai. 2. Berharap ada penyaluran air bersih yang dimanfaatkan secara bersama. <p>Tanggapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan menjadi catatan dan ditindaklanjuti dengan diskusi bersama PT JBP dan dinas terkait. 2. Untuk poin 2 akan di jawab oleh Bapak Sekretaris kecamatan.
Krisna	Sekretaris Kec. Kumpeh	<p>Tanggapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila penyediaan sumur diperlukan bisa diajukan agar dibangun menggunakan dana desa. Atau bisa diusulkan ke kecamatan biar diusulkan ke dinas terkait. 2. Pemerintah terbentur dengan tahapan – tahapan penurunan anggaran sehingga bantuan terlambat sampai ke Masyarakat. 3. Pada waktu musrembang, desa bisa memfokuskan diskusi terkait apa saja yang dibutuhkan, sehingga pengajuan yang masuk ke kecamatan sudah terfokus. 4. Terkait buaya muara, mari kita saling jaga terkait habitatnya juga, apabila kesediaan pangan terpenuhi maka mereka tidak akan mengganggu masyarakat. 5. Terkait air bersih bisa dengan sistem PANSIMAS. Program dari pemerintah sudah ada, namun belum dilaksanakan. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut solusinya.
Pertanyaan, Saran dan Rekomendasi		
Nely	Desa Jebus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semoga penilaian ini bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan desa. 2. Adanya perusahaan semoga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Apianto	Desa Sungai Aur	<p>Terkait pengembangan tanaman (Padi) yang sekarang mulai menurun dikarenakan hal – hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya banjir, pengelolaan tidak boleh membakar, alih fungsi lahan, banyaknya tanah terlantar. 2. Mohon solusinya untuk membuat pola tani tanpa bakar agar petani tetap berkelanjutan.
Bunga	Sungai Aur	Bagaimana upaya kita supaya dapat melindungi monyet yang masuk ke pemukiman warga, dan bagaimana tindak lanjut masyarakat yang masih memburu rusa.

Nama	Jabatan	Tanggapan/Masukkan
Bustari	Sungai Aur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapannya ada program untuk pelestarian satwa yang dilindungi agar aktivitas petani berjalan dengan maksimal. 2. Langkah pencegahan untuk pertanian, harapannya ada solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Heriwindra	Desa Gedong Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta hasil riset tim dibukukan dan dikirim ke desa untuk pedoman desa. 2. Terkait buaya muara, mohon ada solusi apabila sudah Nampak berbahaya dan mengganggu. 3. Mohon solusi untuk lahan perawahan masyarakat.
Jupni	Desa Gedong Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saran : agar aliran/pembuangan air dari PT JBP di cek kembali, takutnya air yang keluar dari PT JBP mengalir ke sungai Batanghari, dan air akan tercemar oleh limbah beracun. 2. Harapan : lahan PT JBP yang berbatasan dengan Tahura agar ditanami kembali, agar habitat burung/makhluk hidup yang ada di Tahura tetap hidup dan terjaga.

Sesi IV - Sambutan Penutup: Enar (Manajemen PT JBP)



Foto Peserta Konsultasi Finas



Peserta menyampaikan klarifikasi terkait nama sungai



Penandatanganan Berita Acara Konsultasi Final oleh Sekretaris Kecamatan Kumpeh



Penyampaian Pertanyaan dari Peserta Diskusi

Peserta/*stakeholder* konsultasi publik mengkonfirmasi beberapa isu dan memberikan masukan penting yang menjadi rujukan dan perhatian tim penilaian. Seluruh isu dan masukan akan ditambahkan pada bagian temuan dan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan area konservasi di manajemen PT JBP. Berikut isu dan masukan dari peserta/*stakeholder*:

1. Keterlibatan kecamatan, desa dan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan sosial serta program CSR yang mendorong ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
2. Keterlibatan PT JBP dalam Program Kelapa Sawit masyarakat, terutama bibit kelapa sawit yang benar dan bagus.

3. Terkait populasi monyet ekor panjang dan buaya yang mulai meresahkan masyarakat. Potensi konflik akan bisa terjadi jika populasi selalu meningkat dan sumber makanan satwa tersebut berkurang. Mungkin perlu ada solusi di masa depan.
4. Lahan persawahan menurun luasannya karena dikonversi menjadi kelapa sawit oleh masyarakat. Namun demikian, opsi konversi menjadi kelapa sawit dipilih masyarakat karena bibit padi sulit didapatkan, serta aliran irigasi dan sering tergenang banjir membuat masyarakat cenderung takut untuk bersawah kembali. Mungkin perlu bantuan dari PT JBP terkait membantu berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Muaro Jambi.

11 Langkah Selanjutnya

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut pasca penilaian HCV antara lain:

- 1) Pengukuhan area HCV dengan tahapan sebagai berikut: melakukan deliniasi lapang atas peta area HCV indikatif, verifikasi atas hasil deliniasi, dan menetapkan hasil akhirnya sebagai peta area HCV definitif (versi final). Perusahaan perlu mendokumentasikan proses ini dalam suatu berita acara deliniasi area HCV.
- 2) Demarkasi dengan cara pemasangan patok (tanda) batas area HCV, yang diikuti dengan pemasangan *sign board* pada tempat tertentu yang diperlukan.
- 3) Melakukan sosialisasi dan kolaborasi terkait pengelolaan area HCV, terhadap: (a) Internal perusahaan (karyawan lapangan, staf, dan anggota koperasi kemitraan), (b) Masyarakat sekitar (pengguna lahan, pemerintah desa dan institusi terkait), (c) Perusahaan tetangga (kolaborasi program), (d) LSM atau institusi yang relevan (kolaborasi program), (e) Instansi terkait (konsultasi).
- 4) Menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan dengan mempertimbangkan: (a) Aspek perlindungan spesies, di antaranya mengelola potensi konflik satwa dengan manusia, memelihara dan meningkatkan fungsi koridor antar habitat yang terfragmentasi, dan pengayaan habitat, (b) Penguatan jalinan komunikasi dengan perusahaan sekitar untuk membangun rencana kelola dan rencana aksi perlindungan nilai konservasi dan (c) Melibatkan masyarakat setempat, karena kepentingan dan manfaat dari keberadaan area konservasi merupakan kepentingan dan manfaat semua pihak, terutama HCV 5. Proses pelibatan masyarakat harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC.
- 5) Membangun kelembagaan untuk pengelolaan area HCV: (a) Membentuk tim manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan dan (b) Melatih atau merekrut staf yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk pengelolaan area konservasi.
- 6) Penguatan kapasitas dalam identifikasi pengelolaan, monitoring dan evaluasi: (a) Pelatihan monitoring, seperti dasar-dasar identifikasi satwa, pengukuran kualitas air, stakeholder engagement dan (b) Penerapan prosedur dan kebijakan yang telah tersedia di perusahaan.
- 7) Mendokumentasikan catatan permasalahan dari desa-desa sekitar unit manajemen antara lain terkait (a) banjir di musim hujan, (2) perbaikan jalan dan jembatan transportasi TBS, (3) pengelolaan dan kerja sama kelapa sawit masyarakat, (4) mendorong koperasi untuk bergabung dalam jaringan, (5) potensi konflik manusia dan satwa dimasa depan. Melakukan evaluasi sesuai dengan rencana besar dari perusahaan dalam berkontribusi berdasarkan prioritas.

Daftar Pustaka

- Aris Bahariyono. 2016. Penilaian Dampak Sosial, The Forest Trust.
- Belinda Arunarwati Margono, Peter V. Potapov, Svetlana Turubanova, Fred Stolle and Matthew C. Hansen. 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. *Nature Climate Change*.
(<http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html>)
- BirdLife International. 2019. Endemic Bird Area Factsheet:Sumatra and Peninsular Malaysia. BirdLife International Data Zone.
- BirdLife International. 2019. Important Bird Areas factsheet: Kerinci Seblat. BirdLife International Data Zone at <http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/kerinci-seblat-iba-indonesia>. Accessed on 20/04/2019.
- Brown, E., Dudley, N., Lindhe, A., Muhtaman, D.R., Stewart, C. dan Synnott, T. (eds.). 2017. *Common Guidance for The Identification of High Conservation Values: A Good Practice Guide for Identifying HCVs Across Different Ecosystems and Production Systems*. HCV Resource Network. Oxford, UK.
- Brown, E. and M.J.M. Senior. 2014 (Amended April 2018). *Common Guidance for the Management and Monitoring of High Conservation Value: A good practice guide for the adaptive management of HCVs*. HCV Resource Network, September 2014.
- CEPF. 2001. Ecosystem Profile:Sumatra forest ecosystem of the Sundaland biodiversity hotspot, Indonesia. Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) Report.
- CITES. 2014. Appendices I, II and III valid from 14 September 2014. UNEP, Geneva, Switzerland (<http://www.cites.org/eng/app/appendices.php>).
- CITES. 2017. Appendices I, II and III valid from 04 October 2017. UNEP, Geneva, Switzerland. <https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2017/E-Appendices-2017-10-04.pdf>. Accessed on 20/05/2018.
- Corenblit, D., Tabacchi, E., Steiger, J., Gurnell, A.M., 2007. Reciprocal interactions and adjustments between fluvial landforms and vegetation dynamics in river corridors: a review of complementary approaches. *Earth Sci. Rev.* 84 (1-2), 56-86. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2007.05.004>.
- Dunson WA, Moll EO. 1980. Osmoregulation in seawater of hatching Emydid turtles from a Malaysian sea beach. *J. Herpetol.* 14: 31-36.
- Ernst CH, Altenburg RGM, Barbour RW. 2005. *Turtles of the World*. CD catalogue. ETI Information Services Ltd. Ver. 1.2.
- Francis, C.M. 2001. *A Photographic guide to The Mammals of South-east Asia*. London: New Holland Ltd.
- García-Ruiz, J.M., Lana-Renault, N., 2011. Hydrological and erosive consequences of farmland abandonment in Europe, with special reference to the Mediterranean region - a review. *Agric. Ecosyst. Environ.* 140 (3-4), 317-338.
- Gumbert. A.A., Higgins, S., and Agouridis, C. 2009. Riparian buffers: a livestock best management practice for protecting water quality. University of Kentucky, College of Agriculture. Lexington.
- Guntoro J. 2012. The Body Size and Some Field Notes of Painted Terrapin (*Tuntong laut*) in District of Aceh Tamiang, Indonesia. *Asian Journal of Conservation Biology* 1 (2): 73-76.
- IUCN. 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-1. (various species detected in study area) <www.iucnredlist.org>. Accessed on 28 April 2019
- IUCN/SSC Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group. 2010. A study of progress on conservation of and trade in CITES-listed tortoises and freshwater turtles in Asia. In: CoP15, Inf. 22. Convention on international trade in endangered species of wild fauna

- and flora. Fifteenth meeting of the conference of the parties, Doha (Qatar). 13–25 March. [diacu 2014 Desember12].
- Iskandar, D.T. 2000. Kura-kura dan Buaya Indonesia dan Papua Nugini. ITB, Bandung.
- KLHK. 2018. Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Peraturan MenLHK no P.20, P.92, dan P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018
- Konsorsium Revisi NKT Toolkit Indonesia. 2008. Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Di Indonesia. Tropenbos International Indonesia Programme.
- Lim, K.K.P. & F.L.K. Lim. 1992. A Guide to The Amphibians and Reptiles of Singapore. Singapore: Singapore Science Centre.
- Mac Kinnon, J., K. Phillipps, B. van Balen. 2000. Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. LIPI dan BirdLife IP.
- Moll, E.O. 1985. Estuarine Turtles of Tropical Asia: Status and Management. Proceeding Symp En-dangered Marine Animals and Marine Parks, 1: 214- 226.
- McPherson & Robinson. 2012. Field Guide to the Pitcher Plants of Sumatra and java. Redfern Natural History Productions
- Mossbrucker, A. M. 2020. *Sumatran Mammals: Photographs from Camera Traps in the Bukit Tigapuluh Landscape*. Frankfurt Zoological Society, Jambi, Indonesia..
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., da Fonseca, G.A.B. dan Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* (403): 853-858
- Nijman, V. & Geissman, T. (2008). *Symphalangus syndactylus*. In IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2. Diakses tanggal 4 Juli 2020 dari <http://www.iucnredlist.org/>.
- Noerdjito, M. dan I. Maryanto (ed.). 2001. Jenis-jenis Hayati Yang Dilindungi Perundang-undangan Indonesia. 2nd Ed. Museum Zoologicum Bogoriense, The Nature Conservancy dan USAID.
- Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., D'Amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura, Y., Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., Kassem, K. R. 2001. *Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth*. *Bioscience* 51(11):933-938.
- Phillipps, Q dan Phillipps, K. 2016. Phillipps' Field Guide to the Mammals of Borneo and Their Ecology: Sabah, Sarawak, Brunei, and Kalimantan. New Jersey, US: Princeton University Press.
- PHKA. 2003. *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*. Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry: Indonesia.
- ProForest. 2003. The High Conservation Value Forest Toolkit. Edition 1 (December 2003). ProForest. Oxford, UK.
- ProForest. 2008. Good Practice Guidelines for High Conservation Value Assessment: A Practical Guide for Practitioners and Auditors. First edition (July 2008). ProForest. Oxford, UK.
- Purwaningsih (2004)* Review: sebaran ekologi jenis-jenis *Dipterocarpaceae* di Indonesia. *Biodiversitas* 5(2):89–95.
- Ramsar. 2019. Ramsar sites information services. Region/country: Indonesia.
- Rayan DM, SW. Mohamas, L. Dorward, SA. Aziz, GP. Clements, WCT. Christopher, C. Traeholt & D. Magintan. 2012. Estimating the population of the Asian Tapir (*Tapirus indicus*) in a selectively logged forest in Penninsular Malaysia. *Integrative Zoology*. Vol 7: 373-380.
- RePPPProT. 1989. The Land Resources of Indonesia: A National Overview. Regional Physical Planning Programme for Transmigration. Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Penyiapan Permukiman, Departemen Transmigrasi; Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; Department Natural Resources Institute, UK Overseas Development Administration. Jakarta.

- Retnowati A, Rugayah, Rahajoe JS, and Arifani D. 2019. Status Keanekaragaman Hayati Indonesia: Kekayaan Jenis Tumbuhan dan Jamur Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Roos, M.C., Keßler, P.J.A., Robbert Gradstein, S., dan Baas, P. 2004. Species diversity and endemism of five major Malesian islands: diversity-area relationships. *Journal of Biogeography* 31: 1893-1908.
- RSPO. 2007. RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production.
- RSPO. 2015. Free, Prior and Informed Consent Guide for RSPO Members. RSPO. Kuala Lumpur.
- Slik, J.W.F., Poulse, A.D., Ashton, P.S., *et al.* 2003. A floristic analysis of the lowland dipterocarp forests of Borneo. *Journal of Biogeography* (30): 1517-1531.
- SNI. 2010. Standar Nasional Indonesia Klasifikasi Penutup Lahan. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta
- SNI. 2014. Standar Nasional Indonesia Klasifikasi Penutup Lahan – Bagian 1: Skala kecil dan menengah. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta
- Soepadmo, E. dan Wong, K. M. 1995. *Tree Flora of Sabah and Sarawak: Volume One*. Forest Research Institute (FRIM), Sabah Forestry Department and Sarawak Forestry Department, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Soerianegara, Ishemat dan Indrawan, Andry. 1980. Ekologi Hutan Indonesia. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sukmanto W., M. Irham, W. Novarino, F. Hasudungan, N. Kemp dan M. Muchtar. 2007. *Daftar Burung Indonesia no. 2*. Indonesian Ornithologists' Union, Bogor.
- Sunarto. 2020. Webinar: Rembug Ragam Flora Fauna Sumatera – 19 Juni 2020. Marine Buddies Medan & Earth Hour.
- Stewart, C., George, P., Rayden, T & Nussbaum, R. 2008. Good practice guidelines for High Conservation Value assessments; A practical guide for practitioners and auditors. ProForest, Oxford. UK
- Sugiarto, dkk. 2001. Teknik Sampling, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sukmanto W., M. Irham, W. Novarino, F. Hasudungan, N. Kemp & M. Muchtar. 2007. *Daftar Burung Indonesia no. 2*. Indonesian Ornithologists' Union, Bogor.
- Sutanto. 1992. Penginderaan Jauh Dasar. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPF) UGM.
- Sutanto. 1994. Penginderaan Jauh Jilid I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tuti Herawati, 2010, Analisis Spasial Tingkat Bahaya Erosi di Wilayah DAS Cisadane, Kabupaten Bogor, Pusat Litbang Kehutanan dan Konservasi Alam, Bogor.
- The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. (various species detected in study areal) <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 28 April 2016
- The Nature Conservancy, 2000. The five-S Framework for Site Conservation. A Practitioner's Handbook for site conservation planning and measuring conservation Success. Volume I Second Edition
- Van Dijk PP, Iverson JB, Rhodin AGJ, Shaffer HD, Bour R. 2014. Turtles of the World, 7th Edition: Annotated Checklist of Taxonomy, Synonymy, Distribution with Maps, and Conservation Status. IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group.
- Widhiono, I. 2015. *Strategi Konservasi Serangga Pollinator*. Universitas Jenderal Soedirman. ISBN: 978-602-1004-08-1. Purwokerto.
- Widjaja, E.A., Y. Rahayuningsih, J.S. Rahajoe, R. Ubaidillah, I. Maryanto, E.B. Waluyo, & G. Semiadi. 2014. Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014. Jakarta: LIPI Press.
- [BPS]. 2021. Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2021. BPS Kabupaten Muaro Jambi
- [BPS]. 2021. Kecamatan Kumpeh dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Muaro Jambi
- [BPS]. 2021. Provinsi Jambi dalam Angka Tahun 2021. BPS Provinsi Jambi

[HCVRN] High Conservation Value Resource Network. 2017. *HCVA Assessment Manual for Use during Integrated HCVA Assessments*. Oxford. UK.

[USDA-NRCS]. 1999. *Soil Taxonomy: A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys*. Agricultural Handbook Number 436. Second Edition by Soil Survey Staff. Washington, DC.

Sumber Internet:

<http://www.cites.org/eng/app/appendices.php> CITES. 2017. Appendices I, II and III valid from 2 January 2017. UNEP, Geneva, Switzerland

<http://www.iucnredlist.org> IUCN: The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. (various species detected in study area). Downloaded on January 2019.

<http://www.asiaplantlist.net/> Slik, F. 2017. *The Asian Plant List*

<https://earthexplorer.usgs.gov> Sentinel-2 Satellite Imagery

<https://intactforests.org> Intact Forest Landscape

<https://ramsar.org> Ramsar sites

<http://webgis.dephut.go.id> Peta Wilayah Ekoregion Indonesia.

<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/great-knot-calidris-tenuirostris>

Lampiran 1. Profil Lengkap Personil Penilaian HCV

• RYAN KARIDA PRATAMA

Ryan menyelesaikan gelar sarjana Sains pada Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB). Memulai karir sejak tahun 2014 dalam bidang kajian hidrologi, kehutanan, konservasi tanah dan air, cadangan karbon, penggunaan lahan, GIS dan *Remote Sensing*. Berpengalaman melakukan kajian *High Conservation Value (HCV)*, *Land Use Change Analysis*, *Carbon Stock Assessment*, *Green House Gas (GHG)*, dan *High Carbon Stock Approach (HCSA)* di perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Sejak tahun 2015, bergabung dalam tim *reviewer* RSPO untuk kajian *Land Use Changes Analysis*. Pada Tahun 2017 terdaftar sebagai *HCSA Practitioner*. Dalam tim berperan sebagai tenaga ahli jasa lingkungan atau HCV 4. Kontak: ryankaridap@gmail.com.

• SIGIT BUDHI SETYANTO

Sigit menyelesaikan gelar Sarjana Pertanian Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Jember dan berpengalaman dalam '*Tobacco Growers Communities Development*' sejak tahun 1990 salah satunya untuk Philip Morris Inc. produsen rokok Marlboro. Sejak 2004 aktif sebagai auditor untuk CAFÉ Practice Program di Indonesia dan Papua New Guinea selain sebagai *Agriculture Marketing Specialist* pada NGO International untuk program Rural Agro-enterprise Development (RAeD). Mendapat pelatihan nasional dan internasional untuk *Sustainable Organic*, SCS-Starbucks CAFÉ Practice, Rainforest Alliance untuk *Sustainable Agriculture*, *Forest Management and Chain of Custody*, DOEN (Winrock Int'l) untuk *Roundtable Sustainable Palm Oil* dan *International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)* serta beberapa pelatihan Etnologi Jaringan Sosial dari Pusat Kajian Antropologi, FISIP Univ. Indonesia. Sampai saat ini telah melakukan beberapa Identifikasi antara lain "Study Ekonomi Sosial Kelapa Sawit, *Social Impact Assessment*, *Free Prior & Informed Consent (FPIC) Assessment*, *Social & Environmental Impact Assessment* dan *High Conservation Value Assessment* dan *High Carbon Stock Assessment* untuk beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini serta perusahaan hutan tanaman di Indonesia. Di tahun 2010 mendapat akreditasi dari RSPO sebagai *Approved NKT Assessor - Discipline Specialist* untuk Identifikasi NKT 5 dan 6 di perkebunan kelapa sawit, HTI dan HPH dan pada tahun 2015, memperoleh *Provisional License ALS* di HCVRN dan di tahun 2019 memperoleh *Full License ALS HCVRN*. Dalam tim berperan sebagai tenaga ahli sosial dan budaya atau HCV 5-6. Kontak: sigit.setyanto@gmail.com.

• IWAN SETIAWAN

Iwan menyelesaikan gelar sarjana Sains pada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (UNPAD). Memulai karir sejak tahun 2000-an dalam bidang kajian pengembangan pengelolaan Kawasan konservasi, penilaian keanekaragaman hayati berbasis masyarakat, nilai konservasi tinggi, manajerial tim, fasilitator dan pelatihan untuk penilaian dan pemantauan satwa liar. Selain itu, sudah 20 tahun sebagai peneliti burung dan mamalia dan aktif sebagai peneliti survey biodiversitas dan kehati di Indonesia. Dalam tim berperan sebagai tenaga ahli keanekaragaman hayati dan ekologi dan identifikasi fauna atau HCV 1-2-3. Kontak: iwansetiawan@gmail.com.

• ANWAR MUZAKKIR

Anwar menyelesaikan gelar sarjana Sains pada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (UNPAD). Memulai karir sejak tahun 2004 dalam bidang keanekaragaman hayati dan identifikasi fauna dalam perkebunan kelapa sawit. Selain itu, fokus menjadi peneliti tumbuhan di Kawasan konservasi di Indonesia terutama

Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat dan asisten peneliti JICA Program. Sudah 10 tahun sebagai tenaga ahli dalam identifikasi flora dalam penilaian nilai konservasi tinggi dan keanekaragaman hayati. Dalam tim berperan sebagai tenaga ahli keanekaragaman hayati dan ekologi dan identifikasi flora atau HCV 1-2-3. Kontak: anwarmuzakkir@gmail.com

- **ANDREA ADITYA WIDHYANTO**

Andre telah melakukan kegiatan kajian sosial dan FPIC dalam berbagai program pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan sejak tahun 2018. Selain itu, menjadi fasilitator proses dalam workshop multipihak untuk FPIC dan Rencana Kelola Sosial di Papua. Sejak tahun 2018 melakukan penilaian nilai konservasi tinggi pada keahlian sosial dan budaya, *social impact assessment*, dan FPIC dilingkup perkebunan kelapa sawit dan lingkup yuridiksi (Kabupaten Nabire, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Marauke). Dalam tim berperan sebagai tenaga ahli sosial dan budaya atau HCV 5-6. Kontak: andrea.aditya.w@gmail.com

- **SITI SUPRIHATIN**

Siti telah menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2020 untuk kegiatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Way Kambas. Selain itu, menjadi fasilitator pendampingan masyarakat di program tata Kelola adat perikanan berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat. Program kerja sosial dan budaya yang masih dilakukan berupa FPIC, SIA, penilaian nilai konservasi tinggi pada lingkup perkebunan kelapa sawit dan lingkup yuridiksi (Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Marauke). Dalam tim berperan sebagai tenaga ahli sosial dan budaya atau HCV 5-6. Kontak: s.suprehatin22@gmail.com

- **MUHAMMAD RIZAL**

Rizal menyelesaikan gelar Magister pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bogor (IPB). Memiliki pengalaman dalam kajian-kajian perubahan tutupan lahan, identifikasi sifat-sifat fisik lahan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Memulai kariernya dengan kajian identifikasi kebakaran hutan dan perubahan tutupan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Berpengalaman dalam kajian *High Conservation Value* (HCV), *Land Use Change Analysis*, *Carbon Stock Assessment*, dan analisis Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan-jauh (*Remote Sensing*). Kontak: muhammadrizal@gmail.com

Lampiran 2. Kebijakan Berkelanjutan



PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION

KEBIJAKAN BERKELANJUTAN

PT. Jambi Batanghari Plantation ("PTJBP") sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia mengakui bahwa semua kegiatan yang terlibat dalam pengembangan kelapa sawit dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan dan risiko terhadap kesehatan, dan keselamatan karyawan, dan pelanggan kami. PT. Jambi Batanghari Plantation mengakui pentingnya sumber Tandan Buah Segar (TBS) yang berkelanjutan (*Sustainability*) dan menjadikan hal ini sebagai bagian penting dari strategi perusahaan dengan komitmen sebagai berikut:

- Menerapkan prinsip-prinsip minyak sawit berkelanjutan dengan memasukkan pertimbangan lingkungan, kesehatan dan keselamatan, sosial, dan ekonomi dalam semua keputusan manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip pada ISPO, dan RSPO;
- Mencegah polusi dan kontaminasi pada udara, tanah, dan air melalui program pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang limbah;
- Tidak melakukan penebangan hutan dan pembakaran, melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi dan Kawasan stok karbon tinggi, serta menolak pembukaan kebun dilahan gambut setelah 31 Desember 2015;
- Menghormati hak azasi manusia dan memastikan perlindungan atas hak seluruh pekerja, anak-anak dan perempuan;
- Menghormati hak PADIATAPA masyarakat (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) untuk pemanfaatan lahan dimana TBS dihasilkan;
- Mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada karyawan, kontraktor, pemasok, dan pemangku kepentingan untuk memastikan kesadaran akan masalah EHS dan membuatnya tersedia bagi pihak yang berkepentingan.
- Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi kebijakan ini dan meninjau kinerja secara konsisten dan komitmen dalam perbaikan berkelanjutan

Oleh karena itu kami percaya bahwa keberlanjutan (*Sustainability*) lingkungan dan social dapat dicapai dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak untuk sepenuhnya mematuhi hukum nasional, lingkungan, dan standar sosial yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dunia pada umumnya.

DIREKTUR

PON WEN JYE

Tanggal: 1 Desember 2019

KEBIJAKAN BERKELANJUTAN



PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION

Jl. Raya Suak Kandis, Ds. Jebus, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Email: corporate@jbplantation.co.id

To : 1. Estate Manager
2. All Field Staff

Cc : Sustainability Department
EHS Manager

From : Director

Re : **Notification for No Land Clearing & Planting Activities**

Dear All,

To meet the pre-requisites for RSPO certification, PT Jambi Batanghari Plantation affirms our commitment to halt all land clearing and-planting activities until the completion of the HCV Report.

During this period, PT Jambi Batanghari Plantation will prioritize the maintenance of existing plantations, harvesting, and other activities that do not involve land clearing while strictly upholding principles of environmental preservation, occupational health, and safety.

This commitment will be reviewed regularly to assess progress in meeting RSPO requirements, taking into account input from all relevant stakeholders.

August 1st 2022
PT Jambi Batanghari Plantation

PON WEN JYE
Director

Lampiran 3. MOU Koperasi dengan PT JBP

Lampiran Perjanjian Kemitraan antara PT JBP dengan Koperasi Aur Jaya


ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn
NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI
KOTA JAMBI
SK. Menteri Hukum dan HAM RI
No. C-59/HT.03.01 - Th.2007 Tgl. 04 Mei 2007
SK. Kepala BPN Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 01 September 2008
Jl. Hayam Wuruk Nomor : 05 Jelutung Jambi
Telp. (0741) 21214

AKTA TGL : 14 Juni 2011.-
NOMOR : 33.-

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGHADAP : 1. **TN. COKRO CIWUTURI SUHENDRA.**
2. **TN. HERIYANTO.**
3. **TN. ENDI PAUZI.**
4. **TN. ALI MUKTI.**

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 33.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-06-2011 (empat belas Juni dua ribu sebelas).
-Pukul 09.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Maktu - Indonesia Barat).
-Berhadapan dengan saya, **ABSAR SURWANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian-akhir akta ini:

1. Tuan **COKRO CIWUTURI SUHENDRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-04-1981 (sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok L Nomor 7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.3204.090481.5505. untuk sementara waktu berada di Kota Jambi. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 30-10-2009 (tiga puluh Oktober dua ribu sembilan), Nomor 42, dibuat dihadapan **MITA DAMAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 14-12-2009 (empat belas Desember dua ribu-

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

1. Para Pihak menyepakati bahwa kerja sama ini untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang didasarkan pada niat baik, kesepakatan dan janji masing-masing antara **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** dan **KOPERASI AUR JAYA** untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam :

a. Perjanjian Dasar dan Kesepakatan Bersama tersebut dalam angka 1 (satu) pembukaan diatas.

b. Berita Acara Rapat anggota **KOPERASI AUR JAYA** perihal Surat Kuasa dan Persetujuan untuk menjadi mitra dari **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit kesepakatan pola bagi hasil deviden (laba bersih) 75:25 tanggal 09-04-2009 (sembilan April dua ribu sembilan).

c. Surat Perachonan **KOPERASI AUR JAYA** Nomor : 007/Kop-0L/GKR/V/2009 tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) kepada **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** sebagai mitra dalam pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Pola bagi Hasil Deviden (laba bersih) 75:25.

d. Surat dari Direktur **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** Nomor : 018/JBP-Jkt/V/2009, tanggal 19-05-2009 (sembilan belas Mei dua ribu sembilan) kepada **KOPERASI AUR JAYA**, tentang persetujuan Perachonan Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Kesepakatan Pola Bagi Hasil

Kecamatan Jambi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 137102480880001. keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Photo Copy ini sesuai dengan aslinya yang telah diarahkan kepada saya, **ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn** Notaris Kota Jambi.

NOTARIS DI KOTA JAMBI
ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn

Lampiran Perjanjian Kemitraan antara PT JBP dengan Koperasi Gedong Lestari



ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn
NOTARIS
 DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI
KOTA JAMBI
 SK. Menteri Hukum dan HAM RI
 No. C-59.HT.03.01 - Th.2007 Tgl. 04 Mei 2007
 SK. Kepala BPN Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 01 September 2008
 Jl. Hayam Wuruk Nomor : 05 Jalutung Jambi
 Telp. (0741) 21214

AKTA TGL. : 14 Juni 2011.-

NOMOR : 31.-

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGHADAP : 1. TN. COKRO CIENTURI SUHENDRA.
 2. TN. MUHAMMAD YAMIN.
 3. TN. TOEI I.
 4. TN. AHMAD HU.


PERJANJIAN KERJASAMA
 Nomor : 31.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-06-2011 (empat belas Juni dua ribu sebelas).
 -Pukul 08.10 WIB (delapan lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).
 -Berhadapan dengan saya, **ABSAR SURWANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **COKRO CIENTURI SUHENDRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-04-1981 (sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok L Nomor 7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5204.090481.5505. untuk sementara waktu berada di Kota Jambi. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 30-10-2009 (tiga puluh Oktober dua ribu sembilan), Nomor 42, dibuat dihadapan **MITA DANAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 14-12-2009 (empat belas Desember dua ribu-

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Fasal 1

LANDASAN KERJASAMA

1. Para Pihak menyepakati bahwa kerja sama ini untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang didasarkan pada niat baik, kesepakatan dan janji masing-masing antara **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** dan **KOPERASI GEDONG LESTARI** untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam :

a. Perjanjian Dasar dan Kesepakatan Bersama tersebut dalam angka 1 (satu) pembukaan diatas.

b. Berita Acara Rapat anggota **KOPERASI GEDONG LESTARI** perihal Surat Kuasa dan Persetujuan untuk menjadi mitra dari **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit kesepakatan pola bagi hasil deviden (laba bersih) 75:25 tanggal 09-04-2009 (sembilan April dua ribu sembilan).

c. Surat Peracohan **KOPERASI GEDONG LESTARI** Nomor : 007/Kop-GL/GKR/V/2009 tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) kepada **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** sebagai mitra dalam pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Pola bagi Hasil Deviden (laba bersih) 75:25.

d. Surat dari Direktur **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** Nomor : 018/JBP-Jkt/V/2009, tanggal 19-05-2009 (sembilan belas Mei dua ribu sembilan) kepada **KOPERASI GEDONG LESTARI**, tentang persetujuan Peracohan Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Kesepakatan

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 157102301890041.

2. Nona **LIYAH**, lahir di Jambi, pada tanggal 08-08-1988 (delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat di Jambi, Jalan Tarazi Kadir, Nomor 64, Rukun Tetangga 10, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1571024906880001. keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.
 -Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
 -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Photo Copy ini sesuai dengan aslinya yang telah dipertibahkan kepada saya, **ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn** Notaris Kota Jambi
 14 Juni 2011
 Absar Surwansyah, S.H., M.Kn


NOTARIS DI KOTA JAMBI
ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn
 (ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn)

Lampiran Perjanjian Kemitraan antara PT JBP dengan Koperasi Jebus Mandiri



ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn
NOTARIS
 DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI
KOTA JAMBI
 SK. Menteri Hukum dan HAM RI
 No. C-59/HT.03.01 - Th.2007 Tgl. 04 Mei 2007
 SK. Kepala BPN Nomor : 9-XVII/PPAT-2008 Tgl. 01 September 2008
 Jl. Hayam Wuruk Nomor : 05 Jelutung Jambi
 Telp. (0741) 21214

AKTA TGL. : 14 Juni 2011.-
 NOMOR : 32.-

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGHADAP : 1. **TN. COKRO CIENTURI SUHENDRA.**
 2. **TN. ABDUL RAZAK MAASYIM.**
 3. **TN. AHMAD TARPEK.**
 4. **TN. MUHAMMAD SYAMIN. HS.**



PERJANJIAN KERJASAMA
 Nomor : 32.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-06-2011 (empat belas Juni dua ribu sebelas).
 -Pukul 08.20 WIB (delapan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).
 -Berhadapan dengan saya, **ABSAR SURWANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan COKRO CIENTURI SUHENDRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-04-1981 (sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Marga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok L Nomor 7, Rukan Tetangga 006, Rukan Marga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5204.090481.5505. untuk sementara waktu berada di Kota Jambi. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 30-10-2009 (tiga puluh Oktober dua ribu sembilan), Nomor 42, dibuat dihadapan **MITA DAMAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 14-12-2009 (empat belas Desember dua ribu-



Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

1. Para Pihak menyepakati bahwa kerja sama ini dibangun perkebunan kelapa sawit yang didasarkan pada niat baik, kesepakatan dan janji masing-masing antara **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** dan **KOPERASI JEBUS MANDIRI** untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam :

a. Perjanjian Dasar dan Kesepakatan Bersama tersebut dalam angka 1 (satu) pembukaan diatas.

b. Berita Acara Rapat anggota **KOPERASI JEBUS MANDIRI** perihal Surat Kuasa dan Persetujuan untuk menjadi mitra dari **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit kesepakatan pola bagi hasil deviden (laba bersih) 75:25 tanggal 09-04-2009 (sembilan April dua ribu sembilan).

c. Surat Permohonan **KOPERASI JEBUS MANDIRI** Nomor : 007/Kop-GL/BKR/V/2009 tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) kepada **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** sebagai mitra dalam pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Pola bagi Hasil Deviden (laba bersih) 75:25.

d. Surat dari Direktur **PT. JAMBI BATANGHARI PLANTATION** Nomor : 018/JBP-Jkt/V/2009, tanggal 19-05-2009 (sembilan belas Mei dua ribu sembilan) kepada **KOPERASI JEBUS MANDIRI**, tentang persetujuan Permohonan Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Kesepakatan Pola Bagi Hasil Deviden (laba bersih) 75:25.

2. **Nona LIYAH**, lahir di Jambi, pada tanggal 08-08-1988 (delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat di Jambi, Jalan Tarsizi Kadri Nomor 64, Rukan Tetangga 10, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1571024808880001. keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
 Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.
 -Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
 -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn
 (ABSAR SURWANSYAH, S.H., M.Kn)

Lampiran 4. Tahapan Studi Pemeriksaan Awal

Berita Acara Kegiatan Studi Pemeriksaan Awal dan Konfirmasi Persetujuan Masyarakat untuk Penilaian HCV PT JBP



BERITA ACARA KEGIATAN STUDI PELINGKUPAN AWAL
Nomor: 061C/BA/PILI/HCV JBP/VIII/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan serangkaian kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di area izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Kegiatan Scoping Study dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 19 – 24 Agustus 2022. Dengan ini atas nama Para Pihak Stakeholders dari Desa Gedong Karya Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, menyatakan **memberikan izin/tidak memberikan izin** untuk melakukan serangkaian kegiatan Kajian NKT dengan **menyertakan/tidak menyertakan** perwakilan untuk terlibat dalam kegiatan hingga selesai.

Demikian Berita Acara Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 19 Agustus 2022

Pihak Desa
Gedong Karya

(TAMBUN)

Ketua Tim
Penilaian NKT

(RYAN KARIDA P.)

Berita Acara Desa Gedong Karya



BERITA ACARA KEGIATAN STUDI PELINGKUPAN AWAL
Nomor: 061D/BA/PILI/HCV JBP/VIII/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan serangkaian kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di area izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Kegiatan Scoping Study dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 19 – 24 Agustus 2022. Dengan ini atas nama Para Pihak Stakeholders dari Desa Sungai Aur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, menyatakan **memberikan izin/tidak memberikan izin** untuk melakukan serangkaian kegiatan Kajian NKT dengan **menyertakan/tidak menyertakan** perwakilan untuk terlibat dalam kegiatan hingga selesai.

Demikian Berita Acara Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 22 Agustus 2022

Pihak Desa
Sungai Aur

(SULANDI)

Ketua Tim
Penilaian NKT

(RYAN KARIDA P.)

Berita Acara Desa Sungai Aur



BERITA ACARA KEGIATAN STUDI PELINGKUPAN AWAL
Nomor: 061B/BA/PILI/HCV JBP/VIII/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan serangkaian kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di area izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Kegiatan Scoping Study dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 19 – 24 Agustus 2022. Dengan ini atas nama Para Pihak Stakeholders dari Desa Jebus Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, menyatakan **memberikan izin/tidak memberikan izin** untuk melakukan serangkaian kegiatan Kajian NKT dengan **menyertakan/tidak menyertakan** perwakilan untuk terlibat dalam kegiatan hingga selesai.

Demikian Berita Acara Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 21 Agustus 2022

Pihak Desa
Jebus

(RYAN KARIDA P.)

Ketua Tim
Penilaian NKT

(RYAN KARIDA P.)

Berita Acara Desa Jebus



BERITA ACARA KEGIATAN STUDI PELINGKUPAN AWAL
Nomor: 061E/BA/PILI/HCV JBP/VIII/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan serangkaian kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di area izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Kegiatan Scoping Study dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 19 – 24 Agustus 2022. Dengan ini atas nama Para Pihak Stakeholders dari Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, menyatakan **memberikan izin/tidak memberikan izin** untuk melakukan serangkaian kegiatan Kajian NKT dengan **menyertakan/tidak menyertakan** perwakilan untuk terlibat dalam kegiatan hingga selesai.

Demikian Berita Acara Kegiatan Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 19 Agustus 2023

Camat
Kecamatan Kumpeh

(RYAN KARIDA P.)

Ketua Tim
Penilaian HCV

(RYAN KARIDA P.)

Berita Acara Kecamatan Kumpeh



Berita Acara Opening Meeting



Berita Acara Closing Meeting

Foto Kegiatan Tahapan Studi Pemeriksaan Awal



Sosialisasi di Desa Jebus



Sosialisai Desa Gedong Karya



Sosialisasi di Desa Sungai Aur



Sosialisasi Kecamatan Kumpoh



Sosialisasi BKSDA Jambi



Sosialisasi Tahura Tanjung



Sosialisasi Dinas Kebudayaan Kab. Muaro Jambi

Absensi Kegiatan Tahapan Studi Pemeriksaan Awal

DAFTAR HADIR

AGENDA : Studi Pengkajian Awal kajian pesisir beranda Perikanan 2022
 TANGGAL : 15 Agustus 2022
 WAKTU : 09.00 - 10.00
 LOKASI : Kantor Dinas Kelautan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
	AHMAD T		L					
	IRWAN SETIARAJAN		L	PIU	Direktur	0813455222		
	Aswara Aswara		L	PIU	HCV CS	0813455222		
	KALINA		L	PIU	Sistem Pengap			
	Siti		L	PIU	HCV SA	0813455222		

DAFTAR HADIR

AGENDA : Studi Pengkajian Awal
 TANGGAL : 24 Agustus 2022
 WAKTU : 13.00 - 14.00
 LOKASI : Kab. Muaro Jambi

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1	Rafael		L	PIU	PIU	0813455222		
2	Hani Ag		L	PIU	PIU	0813455222		
3	Hani Ag		L	PIU	PIU	0813455222		
4	Satrio Nugroho		L	PIU	PIU	0813455222		
5	Satrio Nugroho		L	PIU	PIU	0813455222		
6	Putri Nur Hafidha		L	PIU	PIU	0813455222		
7	Ryan		L	PIU	PIU	0813455222		
8	Aswara Aswara W		L	PIU	PIU	0813455222		

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1	Aswara Aswara		L	PIU	HCV 1.2.3	0813455222		
2	Siti		L	PIU	HCV 2.6			

DAFTAR HADIR

AGENDA : Studi Pengkajian Awal Kajian Area Ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT Jambi Batanghari Plantation (JBP)
 TANGGAL : Senin, 22 Agustus 2022
 WAKTU : 09.00 s.d. selesai
 LOKASI : Kantor Desa Sungai Awi, Kec. Kampoh, Kab. Muaro Jambi

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1	BANARI		L		Pemuda	0813455222		
2	MILAN		L		Pengelola			
3	KURNIA		L		Pemuda	0813455222		
4	A FATONI		L		Imam			
5	Agus		L		Tombo			
6	SATYANO		L		Humas JBP	0813455222		
7	M. ZULHAN		L		Humas JBP	0813455222		
8	Imran		L					
9	NANI YUS		L		Kelemb			


DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
10	MARTINAH	P			Sek. PEK			<i>[Signature]</i>
11	JANIASI		L					<i>[Signature]</i>
12	Rudhony		L					<i>[Signature]</i>
13	Husni		L					<i>[Signature]</i>
14	HANUNTI	P			Kasi paku			<i>[Signature]</i>
15	BUMI	P			KEADUS			<i>[Signature]</i>
16	Ryan Kande P.		L	PILI	Koordinator	0811538000		<i>[Signature]</i>
17	WENI PERMAN		L	PILI	Airatur	0811538124		<i>[Signature]</i>
18	Sumera Ampar		L	PILI	HCV SS	0811538130		<i>[Signature]</i>
19	Siti Supriat		P	PILI	HCV IS	0811538132		<i>[Signature]</i>
20	Muband Basri		P	PILI	GIS	0811538134		<i>[Signature]</i>


DAFTAR PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	15/09/2021	Rauli P. Tambora	PILI DLI SU	0811538136	<i>[Signature]</i>
2	15/09/2021	M. Siryan	Dimas Dimas	0811538137	<i>[Signature]</i>
3	15/09/2021	P. Purwandi	Kasub. Perencanaan Di. Kesub. Spt	0811538138	<i>[Signature]</i>
4	15/09/2021	Adeline Claudi	BUS. KEMAS. KEMAS. PERS. Ind. - Bkr	0811538139	<i>[Signature]</i>
5	15/09/2021	Jumali Supriat	PILI M. M. M. M.	0811538140	<i>[Signature]</i>
6					
7					
8					


DAFTAR PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	15/09-2021	DUSI ARDI	Perintis Semarang Kota Jessy	0811538141	<i>[Signature]</i>
2	15/09-2021	Roy Maulana	Perintis Surgawi Alai	0811538142	<i>[Signature]</i>
3	15/09-2021	Andreas Adhikara	Perintis PAKSI RANA	0811538143	<i>[Signature]</i>
4	15/09-2021	Siti Supriat	Perintis RANA	0811538144	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					


DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*	LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
10	Viki	P	PT. SH	CS. HATI HATI	0811538145		<i>[Signature]</i>
11	WIRNI JETRI	L	PILI	Airatur	0811538146		<i>[Signature]</i>
12	Andreas Adhikara	L	PILI	HCV SS	0811538147		<i>[Signature]</i>
13	SITI	L	PILI	HCV IS	0811538148		<i>[Signature]</i>
14	Muband Basri	L	PILI	GIS	0811538149		<i>[Signature]</i>
15	SIGIT	L	PILI	Sepul	0811538150		<i>[Signature]</i>
16							
17							
18							
19							
20							


DAFTAR HADIR

AGENDA : 2700 PLUNGKUPAN NAMA ALER BERNAL POKERJATI TANGKI & P. JF
TANGGAL : 14 Agustus 2021
WAKTU : 09.00 - selesai
LOKASI : Kab. Deli Jember

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*	LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Zoharudin						<i>[Signature]</i>
2	IBAN						<i>[Signature]</i>
3	MUSTAH						<i>[Signature]</i>
4	M. Amin		Perseid	SEKRES			<i>[Signature]</i>
5	M. Amin		Perseid	KAR. EG			<i>[Signature]</i>
6	Saharudin		Perseid	KAR. EG			<i>[Signature]</i>
7	HERIYANDANA		STINA	Ket. Kds			<i>[Signature]</i>
8	Devi Akbar						<i>[Signature]</i>
9	Fauziah		Perseid				<i>[Signature]</i>


DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*	LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
10	Agus		TK. PAKSI				<i>[Signature]</i>
11	Jupri		Perseid	Ket. Kds I			<i>[Signature]</i>
12	Heriyan		Perseid	Ket. Kds II			<i>[Signature]</i>
13	Andreas Adhikara		Perseid	Ket. Kds III			<i>[Signature]</i>
14	Mica		Adar	Adar			<i>[Signature]</i>
15	Susanto		Stap. Perseid				<i>[Signature]</i>
16	HOLIE BERNARDI		Perseid	Ket. Kds IV			<i>[Signature]</i>
17	Budi Kurnia		Perseid	Ket. Kds V			<i>[Signature]</i>
18	Zuhri		Perseid	Ket. Kds VI			<i>[Signature]</i>
19	INA		TK. PEK	Ket. Kds VII			<i>[Signature]</i>
20	Ryan Kande P.		PILI	Koordinator			<i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEFON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
21	Muhammad B. Pratiwi	✓		PILU	GIS	08121234567		
22	Ahmad Hidayatullah		✓	PILU	HCV 1.2.3	08123456789		
23	Siti	✓		PILU	HCV 2	081234567		
24	Siti							

DAFTAR HADIR

AGENDA
TANGGAL : 21 Agustus 2022
WAKTU : 08.00 s.d selesai
LOKASI : Kantor Desa Gedong Karya, Kec. Kumpeh, Kab. Muara Jambi

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEFON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1	Ardana Ardana W		✓	PILU	Desa	081234567		
2	Ryafi KABIDA		✓	PILU	Kecamatan	08123456789		
3	KRISNA		✓					
4	Endang		✓					
5	Azwar		✓					
6	Mulyana		✓					
7	Parosa		✓					
8	M. Ben		✓		Desa	081234567		
9	WILHANSYAH	✓			Desa			

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEFON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
11	Sopriyanto		✓					
12	Rubiati		✓					
13	Hansumana		✓	LAB	Sen. MPR C. Korp. 08123456789			
14	Buana		✓	Sorad	081234567			
15	Amul Ram		✓	Kantor Desa	Desa	081234567		
16	Sura		✓	Desa	Desa	081234567		
17	MELI		✓	PS-DEKAS	Desa	081234567		
18	Budi		✓	Desa	Desa	081234567		
19	ITA JANA		✓	Desa	Desa	081234567		
20	BARET		✓	Desa	Desa	081234567		
21	BUSYAR-1		✓	Desa	Desa	081234567		

Visum Pertemuan Tahapan Studi Pemeriksaan Awal

VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	21 Agustus 2022	JAMALUDIN	Kantor Jebus	082206532	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Visum Pertemuan Desa Jebus

VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	21 Agustus 2022	TAMBA	Kepala Desa Gedong Karya		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Visum Pertemuan Desa Gedong Karya

VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	21 Agustus 2022	SUNAWADI	ESKALA DESA SUNGAI AIR		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Visum Pertemuan Desa Sungai Air

VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	19 Agustus 2022	KERLINA	SEKRETARIS EEC KUMPEH		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Visum Pertemuan Kecamatan Kumpeh



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	24 Agustus 2024	PUTRI A LINDA SARI	D.211 PT JBP		
2	24 Agustus 2024	HARANI	STP KUN		
3	24 Agustus 2024	H. AMIN, T.	DISEKURANG		
4	24 Agustus 2024	SRIWATI TROKORAN	D.11.110		
5	24 Agustus 2024	M. Rianto	ESKOR JAMBI		
6	24 Agustus 2024	PHARONIC ROTYOS OPD JAMBI			
7	24 Agustus 2024				
8	24 Agustus 2024				

**Visum Pertemuan
OPD Kabupaten Muaro Jambi**



DAFTAR PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	24 Agustus 2024	Dahy Sarda	BKMS Balai Taman Nasional	0822741543	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

**Visum Pertemuan
Balai Taman Nasional Berbak**



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	14 Agustus 2024	Ejar BELHANTARA	PT JBP, MANAGER		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

**Visum Pertemuan
Opening Meeting PT JBP**



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	24 Agustus 2024	Ekar Puhonora	PT JBP, MANAGER		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

**Visum Pertemuan
Closing Meeting PT JBP**

Lampiran 5. Tahapan Penilaian Lengkap

Berita Acara Kegiatan Penilaian Lengkap Penilaian HCV PPT JBP



BERITA ACARA KEGIATAN PENILAIAN LENGKAP
Nomor: 075B/BA/PILI/HCV JBP/IX/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan serangkaian kegiatan Penilaian Lengkap (Full Assessment) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Penilaian Lengkap (Full Assessment) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di areal izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Kegiatan Full Assessment dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 9 – 15 September 2022. Dengan ini atas nama Para Pihak Stakeholders dari Desa Gedong Karya Kecamatan Kumpang Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, menyatakan **memberikan izin/tidak memberikan izin** untuk melakukan serangkaian kegiatan Kajian NKT dengan **menyertakan/tidak menyertakan** perwakilan untuk terlibat dalam kegiatan hingga selesai.

Demikian Berita Acara Kegiatan Penilaian Lengkap ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 14 September 2022

 Kepala Desa Gedong Karya (.....) TANR W	 Ketua Tim Kajian NKT (.....) RUAN KARIDA P.
--	--

Berita Acara Desa Gedong Karya



BERITA ACARA KEGIATAN PENILAIAN LENGKAP
Nomor: 075A/BA/PILI/HCV JBP/IX/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan serangkaian kegiatan Penilaian Lengkap (Full Assessment) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Penilaian Lengkap (Full Assessment) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di area izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Kegiatan Full Assessment dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 9 – 15 September 2022. Dengan ini atas nama Para Pihak Stakeholders dari Desa Jebus Kecamatan Kumpang Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, menyatakan **memberikan izin/tidak memberikan izin** untuk melakukan serangkaian kegiatan Kajian NKT dengan **menyertakan/tidak menyertakan** perwakilan untuk terlibat dalam kegiatan hingga selesai.

Demikian Berita Acara Kegiatan Penilaian Lengkap ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 10 September 2022

 Kepala Desa Jebus (.....) JAMAL UDIN	 Ketua Tim Kajian NKT (.....) RUAN KARIDA P.
--	--

Berita Acara Desa Jebus



BERITA ACARA KEGIATAN PENILAIAN LENGKAP
Nomor: 075C/BA/PILI/HCV JBP/IX/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan serangkaian kegiatan Penilaian Lengkap (Full Assessment) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Penilaian Lengkap (Full Assessment) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di area izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Kegiatan Full Assessment dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 9 – 15 September 2022. Dengan ini atas nama Para Pihak Stakeholders dari Desa Sungai Aur Kecamatan Kumpang Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, menyatakan **memberikan izin/tidak memberikan izin** untuk melakukan serangkaian kegiatan Kajian NKT dengan **menyertakan/tidak menyertakan** perwakilan untuk terlibat dalam kegiatan hingga selesai.

Demikian Berita Acara Kegiatan Penilaian Lengkap ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 12 September 2022

 Kepala Desa Sungai Aur (.....) SUWANDI	 Ketua Tim Kajian NKT (.....) RUAN KARIDA P.
--	---

Berita Acara Desa Sungai Aur



BERITA ACARA PERTEMUAN PEMBUKA STUDI PENILAIAN LENGKAP
Nomor: 070A/BA/PILI/HCV JBP/IX/2022

Dengan ini menyatakan bahwa, tim Konsultan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network) telah melaksanakan kegiatan Pertemuan Pembuka Studi Penilaian Lengkap (Full Assessment) pada areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di area konsesi dan di desa-desa sekitar perusahaan PT Jambi Batanghari Plantation (JBP).

Kegiatan Studi Penilaian Lengkap (Full Assessment) areal NKT dilakukan atas permintaan perusahaan tersebut melalui PILI Green Network sebagai pelaksana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian areal bernilai Konservasi Tinggi (NKT) di area izin perkebunan kelapa sawit dan desa – desa sekitarnya.

Daftar Hadir pertemuan pembuka Studi Penilaian Lengkap (Full Assessment) serta Notulensi sebagaimana dimaksud terdapat di Lampiran Berita Acara pertemuan pembuka ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Demikian Berita Acara pertemuan pembuka Studi Penilaian Lengkap (Full Assessment) ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Jambi, 6 September 2022

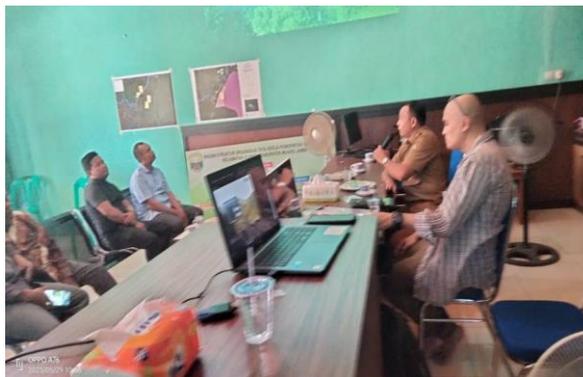
 PT Jambi Batanghari Plantations (.....) RUAN KARIDA P.	 Ketua Tim Penilaian NKT (.....) RUAN KARIDA P.
---	--

Berita Acara Opening Meeting



Berita Acara Closing Meeting

Foto Kegiatan Tahapan Penilaian Lengkap



Wawancara Desa Jebus



FGD Desa Jebus



Pemetaan Partisipatif Desa Gedong Karya



FGD Desa Gedong Karya



FGD Desa Sungai Aur



Wawancara Desa Sungai Aur

Absensi Kegiatan Tahapan Penilaian Lengkap

DAFTAR HADIR

AGENDA : Studi Penilaian Lengkap Kajian Awal Ber-Misi Penerimaan Tangg. PT J&P
 TANGGAL : 14 September 2022
 WAKTU : 09:00 s.d. 12:00:00
 LOKASI : Kantor Desa Gunung Karang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1	Zuhairudin	✓	✓	Magangra	Asisten Kabag. Tata Usaha	0822131973	gelo@ng.kab.go.id	
2	IBNU GABR	✓		J&P	HUMAS			
3	MUSTAFA	✓		J&P	HUMAS	08222887223		
4	M. Yamin	✓		PERUBES	Sekdes	085609050		
5	M. Saleh	✓		SIGARAK				
6	HERI WINDA	✓		LAD	Sek. AGPT	0822285259		
7	MARSILA ZHAWATI	✓		Sekeloa	Sekeloa	0822285259		
8	Doni Ashar	✓		Panda BK	Kaur Tu	0822285259		
9	Faizal	✓		Panda BK	Kaur Tu	0822285259		

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
10	KAMEL		✓	PERUBES	Kaur PBR	08538387244		
11	Doga		✓	Perdes		0822285259		
12	Samsam		✓	PERUBES	Kaur PG	0822285259		
13	BEMUL BEOM		✓	Perdes	Staff Banker	0822285259		
14	Musa		✓	Agar	Kaur			
15	Susanto	✓		SMP KAMIOT		0852409000		
16	KOLIE RONY PANI		✓	Perubes	KAPUS II	0822285259		
17	KARYA KARTEN		✓	Perubes	Perubes	0822285259		
18	ZULHAI		✓	Toko	Manajemen Pemasaran			
19	INA		✓	TP. PKK	Ketua	08538387244		
20	TAMARU		✓	PERUBES	KADES	08538387244		

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
21	Ryan Karandip		✓	PILI	Koordinator	0822285259		
22	Wahid Setiawan		✓	PILI	Direktur	0822285259		
23	Andara Anwar		✓	PILI	HCV SB	0822285259		
24	Andara Nurcahyo		✓	PILI	HCV 1,2,3	0822285259		
25	Muhand Pras		✓	PMA	GIS	0822285259		
26	Siti Supriatna	✓		PILI	HCV SB	0822285259		
27	SIGIT							

DAFTAR HADIR

AGENDA : Studi Penilaian Lengkap Kajian NPT PT Jambi Batanghari Plantation
 TANGGAL : 14 September 2022
 WAKTU : 09:00 s.d. 12:00:00
 LOKASI : Kantor Desa Uluabau

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1	JAMA LUBIN		✓		KADES			
2	RIZKI K.P.		✓	PILI	Koordinator	0822285259		
3	Wahid Setiawan		✓	PILI	Direktur	0822285259		
4	ZULKRI		✓		Sekdes			
5	HENDIKA		✓		KETUA BPD			
6	SYAFI'YI		✓					
7	AERIANASTAH		✓		KADUS I			
8	FINA MARDIANA		✓					
9	DINA YULIANA		✓					

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
10	TARINI		✓			0822285259		
11	M. Dan		✓		Mgr. Humas	0822285259		
12	Elwan-f		✓	gr. J&P	Mgr.	0822285259		
13	SKIPRA WATI		✓		Kaur PBR			
14	ZULHAH		✓					
15	RIELY		✓					
16	SEPTIANTIA SARI		✓		KALIR. TU	0822285259		
17	Sofiana		✓					
18	Dede Sulaman		✓					
19	ZUL. PEPRI		✓		KETUA RT. CA	08526693385		
20	YANUD		✓					

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
21	Andara Anwar		✓	PILI	HCV SB	0822285259		
22	Andara Nurcahyo		✓	PILI	HCV 1,2,3	0822285259		
23	Muhand Pras		✓	PMA	GIS	0822285259		
24	Siti Supriatna	✓		PILI	HCV S.L	0822285259		
25	SIGIT		✓	PILI	HCV SB			

DAFTAR HADIR

AGENDA : 56th Meeting Annual Review Laporan Kegiatan NMT PT-J&P
 TANGGAL : 12 September 2013
 WAKTU : 08.00 s.d. selesai
 LOKASI : Ballon Ogan Sempang Aur

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1.	Bahar				Parade	0816619070		<i>[Signature]</i>
2.	Muzam				Manajemen			<i>[Signature]</i>
3.	Kurmin				Peny DA	08218360181		<i>[Signature]</i>
4.	A. Patoni				Manajemen			<i>[Signature]</i>
5.	Rozali				Tanah			<i>[Signature]</i>
6.	SAHOM				HUMANIS J&P	08117851701		<i>[Signature]</i>
7.	Ruwan				HUMANIS J&P	0828 0767811		<i>[Signature]</i>
8.	IMRON				Manajemen			<i>[Signature]</i>
9.	Neni Yumipa				FAKTA PER			<i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
10.	Jatara				SOE & PE			<i>[Signature]</i>
11.	Rudiansyah				Manajemen			<i>[Signature]</i>
12.	Marsinah				Perkebunan			<i>[Signature]</i>
13.	Bustan				Manajemen			<i>[Signature]</i>
14.	Hassan Wati				Kon. Palau			<i>[Signature]</i>
15.	Bunga				Kadus			<i>[Signature]</i>
16.	Rivan Karde P.	L		PILI	Koordinator	08131089144		<i>[Signature]</i>
17.	Rivan Jerrawan	L		PIU	direktur	08114921346		<i>[Signature]</i>
18.	Si Sufahat			PIU	HCV IK	080705055		<i>[Signature]</i>
19.	Muhammad Pizar			PIU	GIS	080705055		<i>[Signature]</i>
20.	Muhammad Pizar			PIU	HCV 1,2,3	08114921346		<i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		INSTANSI	JABATAN	TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
21.	Ambera Aditya	L		PIU	HCV 56	08129512432		<i>[Signature]</i>
22.	Sigit	L		PIU	HCV 5 & 6			<i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

AGENDA : Opening Meeting Laporan Annual Review Perkebunan Tengg (A&J) PT J&P
 TANGGAL : 8 September 2013
 WAKTU : 08.00 - 16.00
 LOKASI : Kantor PT J&P

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1.	Ivan R			PT J&P	Manajemen	08131089144	ivan@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
2.	Viki R			PT J&P	Manajemen	08114921346	viki@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
3.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
4.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
5.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
6.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
7.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
8.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
9.	Rivan Karde P.	L		PILI	Koordinator	08131089144		<i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

In Partnership Partnership with

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
10.	Rivan Jerrawan	L		PILI	Direktur	08131499724		<i>[Signature]</i>
11.	Rivan Jerrawan	L		PIU	HCV 56	08129512432		<i>[Signature]</i>
12.	Siti S			PIU	HCV 56	08129512432		<i>[Signature]</i>
13.	Sigit			PIU	HCV 56			<i>[Signature]</i>
14.	Muhammad R			PIU	GIS			<i>[Signature]</i>
15.	Rivan A.			PIU	HCV 1,2,3	08113332931		<i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

AGENDA : Closing Meeting Laporan Kegiatan Annual NMT PT J&P
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013
 WAKTU : 08.00 - 16.00
 LOKASI : Kantor PT J&P

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1.	Rivan Karde P.	L		PILI	Koordinator	08131089144	ivan@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
2.	Ivan R			PT J&P	Manajemen	08131089144	ivan@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
3.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
4.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
5.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
6.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
7.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
8.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
9.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
10.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>
11.	Yudi S			PT J&P	Manajemen	08129512432	yudi@ptjandp.com	<i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		INSTANSI	JABATAN	TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1.	Sigit			PIU	HCV 5 & 6	08129512432		<i>[Signature]</i>
2.	Muhammad R			PIU	GIS			<i>[Signature]</i>
3.	Rivan Jerrawan	L		PIU	HCV 1,2,3	08113332931		<i>[Signature]</i>
4.	Sigit							<i>[Signature]</i>

Visum Pertemuan Tahapan Penilaian Lengkap



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	10 Sept 2021	JAMALUSIN	RABOS JEJUS	0825089210	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Visum Pertemuan Desa Jebus



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	14 Sept 2021	Tanjung	Kecole Desa Gedong Karya		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Visum Pertemuan Desa Gedong Karya



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	12 September 2021	SUNANGI	EGRAADIA SURAI Aka.		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Visum Pertemuan Desa Sungai Air



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	14 Agustus 2021	Ejar BAHANTAKA	PT JBP, Manager		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

**Visum Pertemuan
Opening Meeting PT JBP**



VISUM PERTEMUAN

No.	Tanggal	Nama	Instansi & Jabatan	No. Kontak	Tanda Tangan
1	21 Agustus 2021	Ejar Bahantaka	PT JBP, Manager		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

**Visum Pertemuan
Closing Meeting PT JBP**

Lampiran 6. List Spesies Flora dan Fauna

List Spesies Fauna

No	Nama ilmiah	Nama Indonesia	Status			
			R	IUCN	CITES	UU
Mamalia						
1***	<i>Elephas maximus sumatranus</i>	Gajah Sumatra	-	CR	I	+
2***	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau sumatera	-	CR	I	+
3	<i>Aonyx cinereus</i>	Sero ambrang	-	VU	II	-
4	<i>Trachypithecus cristatus</i>	Lutung kelabu	-	VU	II	+
5	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk	-	VU	II	-
6	<i>Rusa unicolor</i>	Rusa sambar	-	VU	-	+
7*	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing kuwuk	-	LC	II	+
8*	<i>Macaca fascicularis</i>	Kera Ekor-panjang	-	EN	II	-
Burung						
9	<i>Anthraceros malayanus</i>	Kangkareng hitam	-	VU	II	+
10	<i>Psittacula longicauda</i>	Betet ekor-panjang	-	VU	-	+
11*	<i>Acridotheres javanicus</i>	Kerak kerbau	-	VU	-	-
12**	<i>Elanus caeruleus</i>	Elang tikus	-	LC	II	+
13**	<i>Spilornis cheela</i>	Elang ular bido	-	LC	II	+
14**	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	Elang brontok	-	LC	II	+
15*	<i>Tyto alba</i>	Serak Jawa	-	LC	II	-
16*	<i>Rhipidura javanica</i>	Kipasan Belang	-	LC	-	+
17*	<i>Hirundo rustica</i>	Layang-layang api	M	LC	-	-
Reptilia						
18	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya Sinyulong	-	VU	I	+
19	<i>Cuora amboinensis</i>	Kura-kura patah dada	-	VU	II	-
20	<i>Amyda cartilaginea</i>	Labi-labi	-	VU	II	-
21*	<i>Varanus salvator</i>	Biawak air	-	LC	II	-
22*	<i>Naja sumatrana</i>	Ular-sendok Sumatra	-	LC	II	-
23*	<i>Ophiophagus Hannah</i>	Kobra	-	LC	II	-
24*	<i>Python brongersmai</i>	Ular gendang	LC	II	-	-
25*	<i>Python reticulatus</i>	Ular Sanca-kembang	-	LC	II	-

Keterangan: - = tidak termasuk kategori endemik atau RTE atau dilindungi; + = spesies dilindungi;

R= Sebaran; E=Endemik: Pulau Sumatra dan pulau satelitnya, M= spesies migran musim dingin;

IUCN status: CR= Critically Endangered, EN= Endangered, VU= Vulnerable;

CITES status: App. I= terdaftar pada Appendix I, II= terdaftar pada Appendix II;

UU: Perlindungan hukum berdasarkan UU No. 5 tahun 1990, Permen LHK No. P.106/2018;

*: jenis satwa yang adaptif/ mampu hidup pada habitat terbuka mencakup kawasan pemukiman, area budidaya dan semak belukar.

** : jenis burung dengan wilayah jelajah yang luas mencakup kawasan budidaya hingga vegetasi alami, tercatat melintas di area penilaian

***: Gajah sumatra dan Harimau sumatera teridentifikasi di Taman Nasional Berbak yang berada diluar area penilaian (AOI).

List Spesies Flora

No	Nama Ilmiah	Familia	Nama Lokal	Status Perlindungan		
				IUCN	CITES	UU*
Pteridophyta				LC	n.a.	TD
1	<i>Acrostichum aureum</i>	Pteridaceae	Paku gajah	LC	n.a.	TD
2	<i>Asplenium nidus</i>	Aspleniaceae	Paku sarang burung	LC	n.a.	TD
3	<i>Stenochlaena palustris</i>	Blechnaceae	Pakis	LC	n.a.	TD
4	<i>Gleichenia linearis</i>	Gleicheniaceae	Paku api/ resam	LC	n.a.	TD
5	<i>Cyathea recommutata</i>	Cyateaceae	Paku tiang beureum	LC	n.a.	TD
6	<i>Davallia denticulata</i>	Davalliaceae	Pakis	LC	n.a.	TD
7	<i>Grammitis tenuisecta</i>	Polypodiaceae	Pakis	LC	n.a.	TD
8	<i>Nephrolepis davallioides</i>	Polypodiaceae	Pakis	LC	n.a.	TD
9	<i>Nephrolepis falciformis</i>	Polypodiaceae	Pakis	LC	n.a.	TD
10	<i>Nephrolepis hirsutula</i>	Polypodiaceae	Pakis	LC	n.a.	TD
Magnoliophyta						
1	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Mangga	LC	n.a.	TD
2	<i>Gluta renghas</i>	Anacardiaceae	Rengas	LC	n.a.	TD
3	<i>Camptosperma coriaceum</i>	Anacardiaceae	Terentang	LC	n.a.	TD
4	<i>Alstonia angustifolia</i>	Apocynaceae	Pulai pipit	LC	n.a.	TD
5	<i>Alstonia scholaris</i>	Apocynaceae	Pulai	LC	n.a.	TD
6	<i>Alstonia scholaris</i>	Apocynaceae	Pulai	LC	n.a.	TD
7	<i>Pistia stratiotes</i>	Araceae	Apu-Apu	LC	n.a.	TD
8	<i>Heptapleurum cephalotes</i>	Araliaceae	Wali songo	LC	n.a.	TD
9	<i>Nypa fruticans</i>	Arecaceae	Nipah	LC	n.a.	TD
10	<i>Areca catechu</i>	Arecaceae	Pinang	LC	n.a.	TD
11	<i>Plectocomia peltata</i>	Arecaceae	Bubuay	LC	n.a.	TD
12	<i>Calophyllum soulattri</i>	Calophyllaceae	Bentangur	LC	n.a.	TD
13	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Calophyllaceae	Bintangur	LC	n.a.	TD
14	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuaraceae	Cemara laut	LC	n.a.	TD
15	<i>Cleome gynandra</i>	Cleomaceae	Mamam lelaki	LC	n.a.	TD
16	<i>Cyperus klinga</i>	Cyperaceae	Rumput teki	LC	n.a.	TD
17	<i>Dillenia excelsa</i>	Dilleniaceae	Simpur	LC	n.a.	TD
18	<i>Dillenia sufruticosa</i>	Dilleniaceae	Simpur	LC	n.a.	TD
19	<i>Erythroxylum cuneatum</i>	Erythroxylaceae	Garu lanang	LC	n.a.	TD
20	<i>Macaranga bancana</i>	Euphorbiaceae	Mahang	LC	n.a.	TD
21	<i>Macaranga pruinosa</i>	Euphorbiaceae	Mahang laki	LC	n.a.	TD
22	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Euphorbiaceae	Bayur	LC	n.a.	TD
23	<i>Macaranga tanarius</i>	Euphorbiaceae	Buta Buta	LC	n.a.	TD
24	<i>Hevea brasiliensis</i>	Euphorbiaceae	Karet	LC	n.a.	TD
25	<i>Macaranga bancana</i>	Euphorbiaceae	Mahang	LC	n.a.	TD
26	<i>Macaranga gigantea</i>	Euphorbiaceae	Mahang besar	LC	n.a.	TD
27	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Euphorbiaceae	Bayur	LC	n.a.	TD
28	<i>Koompassia excelsa</i>	Fabaceae	Menggeris	LR/cd	n.a.	TD
29	<i>Mimosa pigra</i>	Fabaceae	Putri malu pohon	LC	n.a.	TD
30	<i>Albizia saman</i>	Fabaceae	Pokok hujan/ Trembesi	LC	n.a.	TD
31	<i>Archidendron clypearia</i>	Fabaceae	Petai kerayung	LC	n.a.	TD
32	<i>Maniltoa brownioides</i>	Fabaceae	Pohon saputangan	LC	n.a.	TD
33	<i>Grona triflora</i>	Fabaceae	Kacang-kacangan	LC	n.a.	TD
34	<i>Mimosa pudica</i>	Fabaceae	Putri malu	LC	n.a.	TD
35	<i>Merremia peltata</i>	Fabaceae	Mantangan	LC	n.a.	TD
36	<i>Acacia mangium</i>	Fabaceae	Akasia	LC	n.a.	TD
37	<i>Koompassia malaccensis</i>	Fabaceae	Kempas	LC	n.a.	TD
38	<i>Vitex pinnata</i>	Lamiaceae	Leban	LC	n.a.	TD
39	<i>Hyptis brevifolia</i>	Lamiaceae	Herba	LC	n.a.	TD
40	<i>Basilicum polystachyon</i>	Lamiaceae	Kemangi hutan	LC	n.a.	TD
41	<i>Durio zibethinus</i>	Malvaceae	Durian	LC	n.a.	TD
42	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae	Beringin	LC	n.a.	TD
43	<i>Artocarpus elasticus</i>	Moraceae	Terap	LC	n.a.	TD

No	Nama Ilmiah	Familia	Nama Lokal	Status Perlindungan		
				IUCN	CITES	UU*
44	<i>Ficus fistulosa</i>	Moraceae	Beunying	LC	n.a.	TD
45	<i>Ficus hispida</i>	Moraceae	Mongmong/ Talok	LC	n.a.	TD
46	<i>Ficus parietalis</i>	Moraceae	Palas kebo	LC	n.a.	TD
47	<i>Artocarpus elasticus</i>	Moraceae	Terap	LC	n.a.	TD
48	<i>Artocarpus rigidus</i>	Moraceae	Terap hutan	LC	n.a.	TD
49	<i>Musa paradisiaca</i>	Musaceae	Pisang	LC	n.a.	TD
50	<i>Syzygium inophylla</i>	Myrtaceae	Gelam tikus	LC	n.a.	TD
51	<i>Mussaenda frondosa</i>	Myrtaceae	Kingkilaban, Walek Adep	LC	n.a.	TD
52	<i>Nepenthes gracilis</i>	Nepentaceae	Kantong semar	LC	n.a.	TD
53	<i>Nepenthes ampularia</i>	Nepentaceae	Kantong semar	LC	n.a.	TD
54	<i>Spathoglottis plicata</i>	Orchidaceae	Anggrek tanah	LC	n.a.	TD
55	<i>Pandanus tectorius</i>	Pandanaceae	Pandan laut	LC	n.a.	TD
56	<i>Adenia macrophylla</i>	Passifloraceae	Akar karamahak	LC	n.a.	TD
57	<i>Piper aduncum</i>	Piperaceae	Sirih hutan	LC	n.a.	TD
58	<i>Phragmites karka</i>	Poaceae	Perumpung	LC	n.a.	TD
59	<i>Leersia hexandra</i>	Poaceae	Rumput lempuyang	LC	n.a.	TD
60	<i>Fimbristylis ferruginea</i>	Poaceae	Rumput krisan	LC	n.a.	TD
61	<i>Eleusine indica</i>	Poaceae	Rumput jampang	LC	n.a.	TD
62	<i>Pontederia crassipes</i>	Pontederiaceae	Eceng gondok	LC	n.a.	TD
63	<i>Rubus rosaefolius</i>	Rosaceae	Arbei gunung	LC	n.a.	TD
64	<i>Anthocephalus chinensis</i>	Rubiaceae	Jabon	LC	n.a.	TD
65	<i>Aidia densiflora</i>	Rubiaceae	Sembalun	LC	n.a.	TD
66	<i>Fagraea racenosa</i>	Rubiaceae	Kopi hutan	LC	n.a.	TD
67	<i>Madhuca motleyana</i>	Sapotaceae	Nyatoh putih	LC	n.a.	TD
68	<i>Lophopetalum beccarianum</i>	Sterculiaceae	Belabak	LC	n.a.	TD
69	<i>Sindora velutina</i>	Sterculiaceae	Sepetir	LC	n.a.	TD
70	<i>Octomeles sumatrana</i>	Tetramelaceae	Binuang	LC	n.a.	TD
71	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Tiliaceae	Waru laut	LC	n.a.	TD
72	<i>Tetrastigma leucostaphyllum</i>	Vitaceae	Bantengan	LC	n.a.	TD
73	<i>Tetrastigma curtisii</i>	Vitaceae	Walikadep	LC	n.a.	TD

Keterangan: - = tidak termasuk kategori endemik atau RTE atau dilindungi; + = spesies dilindungi;

R= Sebaran; E=Endemik: Pulau Sumatra dan pulau satelitnya, M= spesies migran musim dingin;

IUCN status: CR= Critically Endangered, EN= Endangered, VU= Vulnerable;

CITES status: App. I= terdaftar pada Appendix I, II= terdaftar pada Appendix II;

UU: Perlindungan hukum berdasarkan UU No. 5 tahun 1990, Permen LHK No. P.106/2018;

*: jenis satwa yang adaptif/ mampu hidup pada habitat terbuka mencakup kawasan pemukiman, area budidaya dan semak belukar.

** : jenis burung dengan wilayah jelajah yang luas mencakup kawasan budidaya hingga vegetasi alami, tercatat melintas di area penilaian

Lampiran 7. Absensi Konsultasi Publik



DAFTAR HADIR

AGENDA : Konsultasi Final Kajian Area Ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT Jambi Batanghari Plantation (JBP)
TANGGAL : Rabu, 19 Oktober 2022
WAKTU : 08.00 s.d selesai
LOKASI : Aula Kantor Kec. Kumpoh, Kab. Muaro Jambi

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
1	WEN SETAWAN		L	PILH	Direktur	081314991724		
2	Ryan Karida P.		L	PILH	Koordinator	08551059124		
3	KRISNA		L		Sek. Cam Kumpoh			
4	Ener.		L	PT JBP	Manager			
5	AZWAR		-		Humas JBP	081307658222		
6	MUSTAFI		L		Humas. JBP	0818277282		
7	TARNIZI		L		Humas JBP	08128997495		
8	M. Jen.		L		Staf Humas	0822958693		
9	ROHMAS H.		✓		Pew. Desa Kumpoh			



DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
10	SOPIRAH	P			masyarakat			
11	RUBIATI	P			Masyarakat			
12	HERI WINDA		L	LAO.	sek ADPT	081378870833	Spada kangkung @gmail.com	
13	Bu. jany		L	SARAG	RSI Lao			
14	Amul. REOM		L	Karang Taruna Ds. GO. Kumpoh	Pemuda	08556099109		
15	ZURIA	P		DS GO Kumpoh	PEKAMPUNG			
16	HELLY	P		DS. Jelau	PBP	08926702909		
17	BUNGA	P		S. AUR	KADUS	08137953800		
18	ITA JANA	P		S. AUR	PEMUDI	085215403104		
19	BAHARI		L	ISOTRA Pemuda	KUAPemuda	08191131955		
20	BUSTARI		L	S. AUR	Pemdes SA			



DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN*		LEMBAGA	JABATAN	NOMOR TELEPON	EMAIL	TANDA TANGAN
		P	L					
21	Andrea Adiguna		✓	PILH	HCV 56	08225172452		
22	Siti Suprihati	✓		PILH	HCV 52	081709601920		
23	Muhawid Prati		✓	PILH	GIS	08581792904		
24	Arwan Muzakir		✓	PILH	HCV 1,2,3	082123796091		
26	SIGIT		✓	PILH	HCV 526			

Lampiran 8. Materi Konsultasi Publik

PERTEMUAN KONSULTASI PENILAIAN LENGKAP Areal ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

LINGKUP
PT Jambi Batanghari Plantation (PT. JBP)

Juli s/d Oktober 2022

ABOUT US

PILI
Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI-Green Network)

Lembaga swadaya masyarakat (NGESO) didirikan di Bogor pada tahun 2000.

Program dan kompetensi layanan PILI-Green Network fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran informasi konservasi bagi fasilitas industri korporasi, serta membangun kapasitas stakeholders konservasi keanekaragaman hayati dan tata laksana sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

IKLIM POSITIF
LANSKAP YANG BERKEMBANG
KEMAJUAN INKLUSIF
PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Visi: Terwujudnya kesadaran, pemahaman, dan keaktifan masyarakat di Indonesia dalam konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan

Misi: Meningkatkan strategi swadaya yang berfokus memajukan keanekaragaman hayati Indonesia melalui pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran informasi konservasi yang memadai serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan stakeholder lainnya

Core program in "Climate Positive" of PILI-Green Network Year 2021-2025:

Collaborative management of community-based forestry, sustainable management of indigenous people groups (IPG) biodiversity and local carbon assessment and preservation, responsible land-based business transformation in value chain level and landscape level for various natural products and ecosystem services. Collaborative works with sustainable finance actors, Gov, NGO, IPG, local government agencies, MSOs, CSOs, universities, Forest Carbon, Payments Group, Adabo Group, Agro Agro Lestari Group, Rimba Raya Conservation, and donors to develop long-lasting climate positive action based on field practices in various jurisdictions.

key habitat areas, forest

Climate Positive Coaction Beyond carbon Neutral

TIM KAJIAN

No.	Nama	Keterangan
1	Iwan Setiawan	Ketua Tim, Tenaga Ahli Biodiversitas dan HCV 1,2,3
2	Ryan Karida Pratama	Koordinator Tim Lapangan, HCV 4, LUCA dan GIS & Remote Sensing
3	Andrea Aditya Widhyanto	Anggota tim, HCV 5,6 dan SIA
4	Anwar Muzakir	Anggota tim, Tenaga Ahli Botani, HCV 1,2,3
5	Siti Suprihatin	Anggota tim, HCV 5,6
6	Magetsari	Anggota tim, HCV 5,6 dan SIA

Tujuan Kajian Penilaian NKT

- Mengidentifikasi area yang ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada lahan mineral, lahan gambut, dan lahan masyarakat setempat di areal konsesi PT. Jambi Batanghari Plantation dan desa-desa sekitar.
- Memetakan area perlindungan NKT, area penggunaan lahan masyarakat dan wilayah pengembangan yang diajukan.
- Menyediakan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan untuk memastikan kegiatan produksi di areal konsesi yang tidak berdampak negatif terhadap areal NKT.
- Mematuhi komitmen tidak mengikatkan deforestasi, melakukan pembukaan lahan gambut, dan tidak melakukan eksploitasi kayu.

Luaran

- Dokumen Penilaian NKT di PT Jambi Batanghari
- Rekomendasi Pemantauan dan Pengelolaan NKT

Lokasi Target

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Legalitas	±Luas (ha) ^{*)}
1	PT Jambi Batanghari Plantation	Kab. Muaro Jambi	Izin Lokasi	1.953 ha
±Luas Total (Ha)				1.953 ha

*) Sumber: Perusahaan

Desa di Lanskap PT JBP

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Luas Desa di Area Proyek (Ha)
1.	Muaro Jambi	Kecamatan Kumpeh	Jebus	16.991.87	811.34
2.	Muaro Jambi	Kecamatan Kumpeh	Gedong Karya	13.963.25	561.85
3.	Muaro Jambi	Kecamatan Kumpeh	Sungai Aur	13.647.09	521.58

Panduan Penilaian Areal ber-Nilai Koservasi Tinggi (NKT) / High conservation Values (HCV)

TAHAP 1 PRAPENILAIAN: PENGUMPULAN INFORMASI DASAR, LUKS TUNJANG CEPAT, PADAKAPA DIMULAI DAN PERBETULUAN UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN

TAHAP 2 STUDI PEMERIKSAAN AWAL: REKAM NON-LAPANGAN & PENGUMPULAN INFORMASI, KUNJUNGAN LAPANGAN, PERBETULUAN UNTUK MELAKUKAN DENGAN KUNJUNGAN LAPANGAN & PENYERAPAN UNTUK PENILAIAN LENGKAP

TAHAP 3 PENILAIAN LENGKAP: REVISI LAPANGAN: KAJIAN TOPIKA & LINGKUNGAN, PEMERIKSAAN PARTISIPATIF, PERBETULUAN UNTUK MELAKUKAN KERJA LAPANGAN, KONSULTASI MENGENAI HASIL KESEPAKATAN ATAS WILAYAH KONSERVASI YANG DIKAWAL (TANAH LAYANG, HCV, NKTAN SIK, LAHAN GAMBUT), PERBETULUAN UNTUK MEMBERIKAN ATAU MENYERAPAS ATAS PENGEMBANGAN YANG DIKAWAL

NKT 2 Ekosistem, mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh
 Ekosistem dan mosaik ekosistem pada level lanskap yang baik yang memiliki signifikansi pada tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta memiliki pola pemukiman dan jurrah yang alami.

NKT 4 Keekaragaman spesies
 Mempertahankan keekaragaman biologi yang mencakup spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau terancam punah, yang signifikan pada tingkat global, regional atau nasional.

NKT 6 Nilai kultural
 Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap dengan signifikansi kultural, arkeologis, atau sejarah pada tingkat global atau nasional, dan/atau kepentingan kultural, etnologik, ekonomi atau religius lokal bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.

NKT 3 Ekosistem dan habitat
 Ekosistem, habitat atau rifugium langka, terancam, atau terancam punah.

NKT 5 Jasa ekosistem
 Jasa ekosistem teridentifikasi dalam situasi penting, termasuk perkebunan dengan langkasan, air atau koridor yang pada tingkat rantau dan koridor.

NKT 5 Kebutuhan masyarakat
 Situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat untuk mata pencaharian, kesehatan, makanan, air, dll yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.

Verifikasi : Area NKT 1-4 (Desa Sungai Aur)

1. Spesies Fauna yang langka, terancam atau terancam punah :

- Mamalia
 - Monyet ekor-panjang (*Macaca fascicularis*)
 - Lutung Kelabu (*Presbytis leucostictus*)
 - Busa (Babi) (*Porcula porcula*)
 - Busa (Babi) (*Porcula porcula*)
 - Kakap (*Myriopholis*)
 - Makara (*Pholidon*)
 - Tring (*Phalacrocorax*)
 - Harta Mulut (*Phalacrocorax*)
- Burung
 - Elang Tikus (*Elaenia caerulea*)
 - Elang Ular Bido (*Spilornis cheela*)
 - Rangkong Badak (*Buceros rhinoceros*)
 - Kangkar (*Alcedo*)
 - Alap-alap Capung (*Microhierax*)
- Reptilia
 - King Kobra (*Ophiophagus hannah*)
 - Buaya Muara (*Croodylus porosus*)

2. Spesies Flora yang langka, terancam atau terancam punah :

- Bufferzone TAHURA Tanjung
- Sungai dan sempadannya: S. Batanghari, S. Rantai Kecil dan S. Rantai Besar.

Verifikasi : Area NKT 1-4 (Desa Gedong Karya)

1. Spesies Fauna yang langka, terancam atau terancam punah :

- Mamalia
 - Monyet ekor-panjang (*Macaca fascicularis*)
 - Lutung Kelabu (*Presbytis leucostictus*)
 - Rusa (*Rusa unicolor*)
 - Makan Tutul
 - Kucing Hutan
- Burung
 - Elang Tikus (*Elaenia caerulea*)
 - Elang Ular Bido (*Spilornis cheela*)
 - Rangkong Badak (*Buceros rhinoceros*)
 - Alap-alap Capung (*Microhierax*)
 - Burung Bero
- Reptilia
 - King Kobra (*Ophiophagus hannah*)
 - Buaya Muara (*Croodylus porosus*)

2. Spesies Flora yang langka, terancam atau terancam punah :

- Aggrek (*Bulbophyllum* sp.)
- Kantong semar (*Nepenthes gracilis*)

3. Bufferzone TAHURA Tanjung

4. Sungai dan sempadannya: S. Batanghari, S. Rantai Kecil dan S. Rantai Besar.

Verifikasi : Area NKT 1-4 (Desa Jebus)

1. Spesies Fauna yang langka, terancam atau terancam punah :

- Mamalia
 - Monyet ekor-panjang (*Macaca fascicularis*)
 - Lutung Kelabu (*Presbytis leucostictus*)
 - Rusa (*Rusa unicolor*)
 - Pelanduk Kancil (*Tragulus napu*)
 - Beruang madu (*Helictes malayanus*)
- Burung
 - Elang Tikus (*Elaenia caerulea*)
 - Elang Ular Bido (*Spilornis cheela*)
 - Rangkong Badak (*Buceros rhinoceros*)
 - Kangkar (*Alcedo*)
 - Serinda Melayu (*Artibeus galgulus*)
 - Cicada Ular (*Chloropsis sonnerati*)
 - Alap-alap Capung (*Microhierax*)
- Reptilia
 - King Kobra (*Ophiophagus hannah*)

2. Spesies Flora yang langka, terancam atau terancam punah :

- Aggrek (*Bulbophyllum* sp.)
- Pedak hutan (*Cymbidium corniculata* Howard), dan
- Kantong semar (*Nepenthes gracilis*)

3. Bufferzone TAHURA Tanjung

4. Sungai dan sempadannya: S. Jebus dan S. Palu

5. Areal Gambut

Verifikasi : Area NKT 1-4

No.	Nama	Lebar Sungai (m)	Lebar Bantaran (m)
1	S. Jebus	6-10	5
2	S. Palu	6-8	5
3	S. Batang Hari		
4	S. Kumpang		
5	S. Simpang		
6	S. Malisapari		
7	S. Umbungan		
8	S. Takungkas		
9	S. Rantai Besar		

NKT 5

Situs dan sumber daya yang fundamental dalam memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal atau masyarakat adat (contohnya sebagai sumber mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas atau masyarakat adat.

Situasi berikut ini akan memenuhi syarat sebagai HCV 5:

- Lahan berburu dan perjeratan
- Produk hutan bukan kayu (PHBK)
- Bahan bakar untuk aktivitas rumah tangga seperti memasak, penerangan, dan pemanasan
- Ikan (sebagai sumber protein utama) dan spesies air tawar lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal
- Bahan bangunan
- Pakan ternak dan penggembalaan musiman
- Sumber air yang penting untuk air minum dan sanitasi
- Barang-barang yang dipertukarkan dengan barang esensial lainnya, atau dijual tunai yang kemudian digunakan untuk membeli barang esensial seperti obat-obatan atau pakaian, atau untuk membayar uang sekolah

Sumber: Common Guide for Identification HCV (ICVRA, 2013)

NKT 6

Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki signifikansi kultural, arkeologis atau sejarah di tingkat global atau nasional dan/atau yang memiliki kepentingan kultural, ekologi, ekonomi atau religius sakral yang kritis bagi budaya tradisional komunitas lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi/engagement dengan komunitas lokal atau masyarakat adat terkait.

Situasi berikut ini akan memenuhi syarat sebagai HCV 6:

- Situs yang diakui oleh kebijakan dan legislasi nasional memiliki nilai kultural yang tinggi
- Situs yang memiliki penetapan resmi dari pemerintah nasional dan/atau lembaga internasional seperti UNESCO
- Situs dengan nilai-nilai historis dan kultural penting yang diakui, bahkan apabila tidak dilindungi oleh legislasi
- Situs religius atau sakral, lahan pemakaman atau situs yang dijadikan lokasi penyelenggaraan upacara adat yang memiliki peran penting bagi masyarakat lokal atau adat
- Sumber daya tumbuhan atau hewan yang memiliki nilai totem atau digunakan dalam upacara adat

Sumber: Common Guide for Identification HCV (ICVRA, 2013)

Verifikasi: Area NKT 5 & 6

Desa	Kecamatan	HCV 5		HCV 6	
		Dalam HGU	Luar HGU	Dalam HGU	Luar HGU
Jebus	Kumpang		Pemanfaatan S. Jebus sebagai sumber air untuk kebutuhan MCK dan protein (ikan)		
Gedong Karya	Kumpang		Masyarakat di Desa Gedong Karya memanfaatkan sumber untuk mencukupi kebutuhan pangan (karbohidrat)		
Sungai Aur	Kumpang				

